Pemerintah Kota
Payakumbuh

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017-2022

WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR 1 TAHUN 2018

T E N T A N G

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 – 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menjabarkan visi, misi dan program Walikota yang penyusunannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 228)
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1/ 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021;
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

dan

WALIKOTA PAYAKUMBUH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017-2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap

pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;

7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfataan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;
8. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) Lingkup Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun;
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja PD, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Struktur Tata Ruang Kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah kota;

17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJPD Kota Payakumbuh adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan;
19. Sistem Perencanaan Pembangunan adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka waktu panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan Masyarakat Kota Payakumbuh;
20. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan;
21. Sasaran adalah terget atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
23. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
24. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
25. Bersifat indikatif adalah bahwa tata dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJMD Tahun 2017-2022 merupakan :

a. Penjabaran Visi, Misi, dan Program Walikota ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Walikota dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan mempedomani RPJPD Kota Payakumbuh;

b. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam melaksanakan program pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ditetapkan.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud RPJMD Tahun 2017-2022 adalah untuk memayungi serta memberikan arahan rencana pembangunan jangka menengah bagi pelaku pembangunan yaitu Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

Pasal 4

Tujuan RPJMD Tahun 2017-2022 adalah sebagai pedoman dalam:

a. Menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan lima tahunan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah;
b. Penyusunan Renstra PD dan RKPD dan;
c. Penyusunan Renja PD.

Pasal 5

(1) Ruang Lingkup RPJMD Tahun 2017-2022 meliputi Penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan serta Prioritas dan Program Strategis Walikota disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;

(2) RPJMD Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur bagi penilaian kinerja Walikota pada akhir masa jabatan.

BAB IV

DOKUMEN RPJMD TAHUN 2017-2022

Pasal 6

(1) Dokumen RPJMD Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
a. BAB I : Pendahuluan
b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah
d. BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

i. BAB IX : Penutup

(2) Dokumen RPJMD Tahun 2017-2022 dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan lebih lanjut terhadap RPJMDTahun 2017 – 2022, dituangkan dalam rencana tahunan pada RKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(2) RPJMD Tahun 2017-2022 wajib dilaksanakan oleh Walikota dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 8

Dalam menyusun RPJMD Tahun 2017-2022 harus mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD;

(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2017-2022 dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan;

(4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 10

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :

a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan Tahapan dan Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

c. Terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam rangka efektivitas perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan Nasional;

(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 11

RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

(1) Semua ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang termuat/tercantum dalam dokumen RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022 dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan kebijakan pada tahun berkenaan;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 22 Maret 2018

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

BENNI WARLIS

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2018 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH, PROVINSI SUMATERA BARAT : (2/23/2018)

DAFTAR ISI

BAB I I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-2

1.3 Hubungan Antar Dokumen I-5

1.3 Maksud dan Tujuan I-6

1.4 Sistematika Penulisan I-7

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1

2.1 Sejarah Kota Payakumbuh..... II-1

2.2 Aspek Geografi dan Demografi..... ..... II-1

2.2.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah..... II-1

2.2.2 Potensi Pengembangan Wilayah II-11

2.2.3 Wilayah Rawan Bencana II-14

2.4.4 Demografi II-14

2.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-19

2.3.1 Pertumbuhan PDRB II-19

2.3.2 Laju Inflasi II-24

2.3.3 PDRB per-Kapita II-25

2.3.4 Indeks Gini II-25

2.3.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)..... II-26

2.3.6 Angka Melek Huruf..... II-26

2.3.7 Persentase Balita Gizi Buruk II-27

2.3.8 Tingkat Partisipasi Angka Kerja II-27

2.3.9 Rasio Penduduk yang Bekerja II-27

2.3.10 Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan..... II-28

2.4 Aspek Pelayanan Umum II-29

2.4.1 Layanan Urusan Wajib Dasar II-29

2.4.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar II-61

2.4.3 Urusan Pilihan II-97

2.4.4 Penunjang Urusan II-111

2.5 Aspek Daya Saing Daerah II-115

2.5.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per-Kapita II-115

2.5.2 Nilai Tukar Petani II-117

2.5.3 Angka Kriminalitas yang Tertangani II-118

2.5.4 Rasio Ketergantungan II-119

2.6 Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan II-120

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu III-1

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD III-2

3.1.2 Neraca Daerah..... III-6

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-8

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran III-8

3.2.2 Analisis Pembiayaan III-11

3.3 Kerangka Pendanaan III-15

3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama III-15

3.3.2 Proyeksi Pendapatan dan Belanja III-18

3.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan..... III-24

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH IV-1

4.1 Permasalahan Pembangunan IV-1

4.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar..... IV-2

4.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar..... IV-3

4.1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan..... IV-6

4.1.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan..... IV-7

4.2 Isu Strategis IV-8

4.2.1 Perumusan Isu Strategis Berdasarkan Permasalahan Pembangunan Daerah..... IV-8

4.2.2 Penentuan Isu Strategis..... IV-24

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN V-1

5.1 Visi V-1

5.2 Misi V-3

5.3 Tujuan dan Sasaran..... V-4

5.3.1 Tujuan & Sasaran Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang handal, sehat dan kompetitif..... V-4

5.3.2 Tujuan & Sasaran Misi 2 : Membangun perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan dengan berbasis ekonomi kerakyatan dengan memunculkan gerakan ekonomi bersama..... V-4

5.3.3 Tujuan & Sasaran Misi 3 : Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan..... V-5

5.3.4 Tujuan & Sasaran Misi 4 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih..... V-5

5.3.5 Tujuan & Sasaran Misi 5 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya berdasarkan adat basandi syara' syara' basandi kitabullah..... V-6

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH..... VI-1

6.1 Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Handal, Sehat, Dan Kompetitif..... VI-1

6.1.1 Strategi untuk Misi 1..... VI-1

6.1.2 Arah Kebijakanuntuk Misi 1..... VI-2

6.1.3 Program pembangunan Daerah Misi 1..... VI-8

6.2 Misi 2 : Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing Dan Berkeadilan Dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama..... VI-24

6.2.1 Strategi untuk Misi 2..... VI-24

6.2.2 Arah Kebijakanuntuk Misi 2..... VI-25

6.2.3 Program pembangunan Daerah Misi 2..... VI-28

6.3 Misi 3 : Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum yang Nyaman dan Berkelanjutan..... VI-40

6.3.1 Strategi untuk Misi 3..... VI-40

6.3.2 Arah Kebijakanuntuk Misi 3..... VI-41

6.3.3 Program pembangunan Daerah Misi 3..... VI-44

6.4 Misi 4 : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih..... VI-53

6.4.1 Strategi untuk Misi 4..... VI-54

6.4.2 Arah Kebijakanuntuk Misi 4..... VI-55

6.4.3 Program pembangunan Daerah Misi 4..... VI-58

6.5 Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Dan Berbudaya Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah..... VI-65

6.5.1 Strategi untuk Misi 5..... VI-65

6.5.2 Arah Kebijakanuntuk Misi 5..... VI-66

6.5.3 Program pembangunan Daerah Misi 5..... VI-68

6.6 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah dengan Propinsi dan Nasional VI-72

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII-1

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH VIII-1

BAB IX PENUTUP IX-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta peraturan perundangan, maka diperlukan perencanaan pembangunan yang tersistem dan terpadu, dimana komponen-komponen pembentuk kerangka perencanaan pembangunan saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pada dasarnya, proses perencanaan pembangunan mencakup pendekatan:

a. Teknokratik,
   Pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

b. Partisipatif,
   Pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan ini adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

c. Politik,
   Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan, karena rakyat sebagai pemilih dalam menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

d. Atas-bawah (*top-down*) dan Bawah-atas (*bottom-up*),
   Pendekatan *top-down* dan *bottom-up* dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas tersebut diselaraskan melalui musyawarah pembangunan (MUSRENBANG) yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang berisi visi, misi, kebijakan strategis, program pokok dan prioritas yang akan dilaksanakan Kepala Daerah yang dilandasi oleh kondisi daerah, yang disinergikan dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan Provinsi serta perencanaan pembangunan daerah yang berbatasan.

Diagram 1.1

Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan
Dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Dokumen Perencanaan Daerah Lainnya
sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

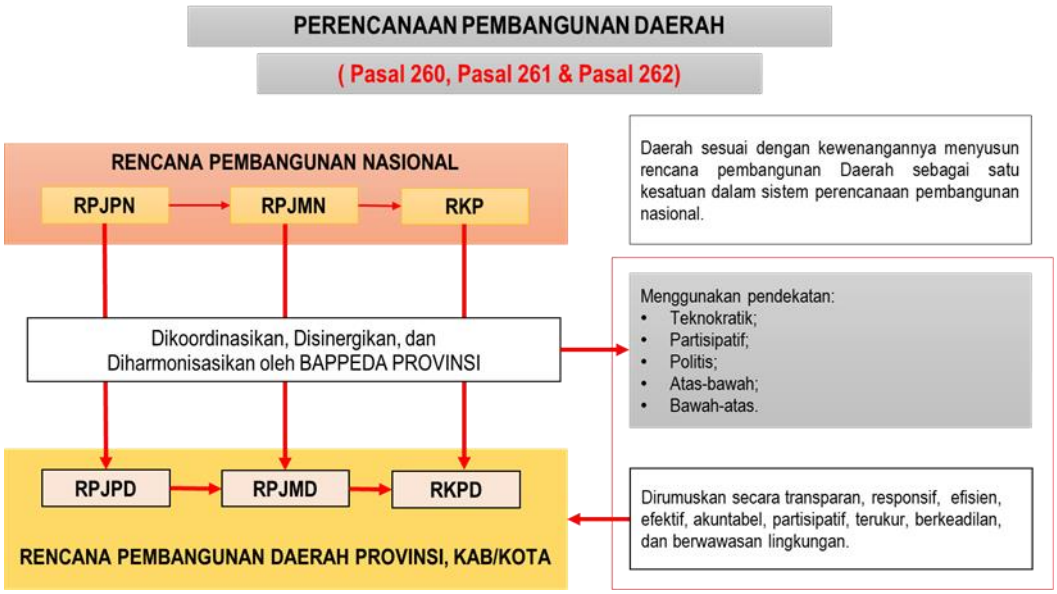

Penyusunan RPJMD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022 adalah merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh periode 2017 – 2022 berdasarkan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh periode 2017 – 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017. Walikota dan Wakil Walikota terpilih adalah H. Riza Falepi, ST, MT dan H. Erwin Yunas, SE. MM. Visi misi Kepala Daerah terpilih menjadi dasar bagi visi dan misi daerah dalam lima tahun masa jabatan kepala daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2022 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 228).

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1/ 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021;
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan lainnya. Penyusunan RPJMD Kota Payakumbuh periode 2017-2022 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh 2005 - 2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Payakumbuh 2010 - 2030, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, serta dokumen perencanaan lainnya.

Dalam kaitannya dengan hubungan fungsional dengan dokumen perencanaan lain, selain memperhatikan RTRW Kota Payakumbuh sendiri, penyusunan dokumen ini senantiasa memperhaikan dokumen RPJMD Kabupaten tetangga dan juga RTRW Kabupaten tetangga. Keterkaitan hubungan fungsional ini terutama pada program-program pembangunan sitem jaringan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan sinergitas perencanaan untuk pencapaian prioritas pembangunan kewilayahan maka diharapkan pembangunan terutama pada kawasan perbatasan dan sekitarnya akan dapat diintegrasikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, Penyusunan RPJMD Kota Payakumbuh telah terintegrasi dengan Permendagri tersebut di atas, dengan tujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

RPJMD Kota Payakumbuh merupakan dokumen induk yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) bagi Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan tahapan yang melibatkan berbagai stakeholders. RPJMD Kota Payakumbuh ini nantinya akan dijabarkan di dalam rencana pembangunan tahunan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rencana Kerja (RENJA) serta prioritas dan plafon anggaran (PPA) setiap tahunnya. Dengan demikian diharapkan sasaran dan tujuan pembangunan di dalam RPJMD ini setiap tahun dapat dicapai secara bertahap, sehingga proses pembangunan dapat terwujud dalam suatu sistem yang terencana dan berkelanjutan.

Diagram 1.2.
Hubungan Dokumen RPJMD Kota Payakumbuh 2017 – 2022
Dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Dokumen Perencanaan Daerah Lainnya

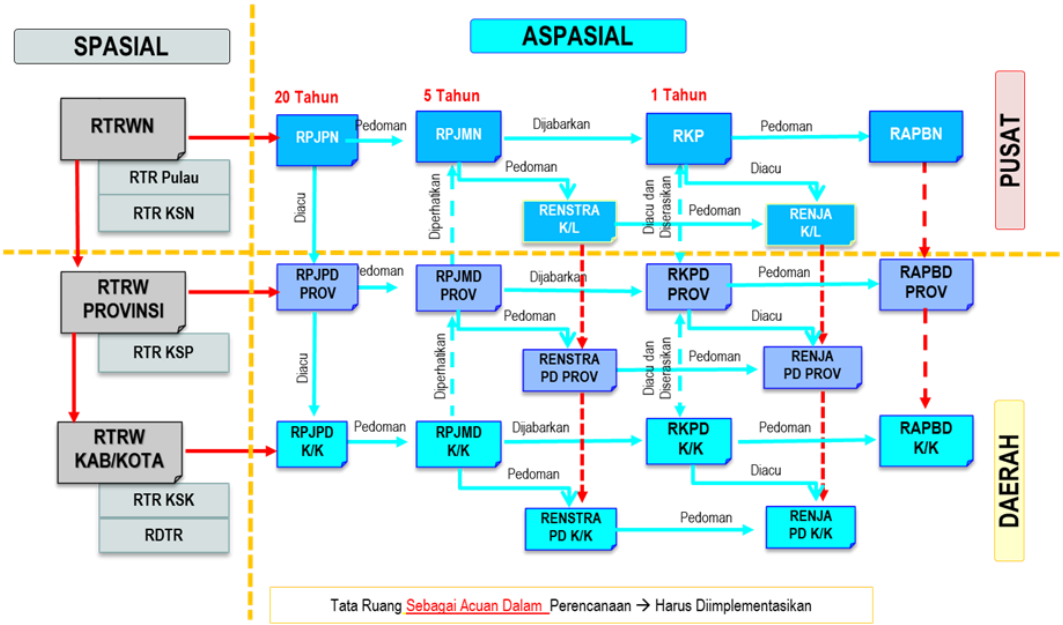

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2022 dimaksudkan untuk :

a. Menyediakan rumusan kebijakan dan program pembangunan;

b. Menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;

c. Menjadi pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Renstra OPD;

d. Mewujudkan komitmen bersama antaraPemerintah Daerah, DPRD, swasta dan masyarakat terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai oleh APBD Provinsi;

e. Menjadi bahan dalam penyusunan RKPD.

Dokumen Recana Pembangunan Jangka Menengah adalah sebuah dokumen yang menggambarkan kondisi masa depan Kota Payakumbuh pada tahun 2022 yang hendak diwujudkan serta upaya-upaya yang akan ditempuh. Dokumen ini juga menjadi bahan sosialisasi tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai hingga tahun 2022 dan arah kebijakan serta program prioritas yang akan dijalankan untuk mencapainya. Tujuan Penyusunan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 adalah untuk :

a. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama tahun 2017 - 2022;

b. Sebagai rujukan bagi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kota Payakumbuh, dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD;

c. Mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;

d. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, sehingga terwujud kondisi yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;

e. Sebagai acuan penyusunan RKPD setiap tahun selama tahun 2017-2022;

f. Sebagai tolok ukur kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota;

g. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan program Kepala Daerah;

h. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Kota Payakumbuh;

i. Sebagai acuan dalam fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelengaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Perda RPJMD;

j. Sebagai rumusan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika :

BAB I **PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Memuat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah.

BAB III **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu dan Kerangka Pendanaan.

BAB IV **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

Memuat Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah dan Isu-Isu Strategis Daerah.

BAB V **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

BAB VI **STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Memuat strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, dan program pembangunan daerah, kebijakan pembangunan berdimensi kewilayahan, agenda dan prioritas pembangunan daerah.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Memuat urusan pemerintah dengan OPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab OPD serta pencapaian target indikator kinerja per urusan disertai kebutuhan pendanaan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Memuat indikator kinerja makro pemerintah daerah dalam pencapaian outcome tahunan selama periode 2017-2022.

BAB IX PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pembangunan di Kota Payakumbuh merupakan pembangunan yang komprehensif dan terintegratif dimana melibatkan semua aspek kehidupan bermasyarakat dan semua pemangku kepentingan, baik dari dunia usaha, pemerintah, masyarakat maupun akademisi. Dalam prosesnya semua pihak dapat berkontribusi dalam membangun Kota Payakumbuh secara proporsional, dengan memenuhi prinsip keterbukaan, demokratis, transparansi, akuntabilitas, efisien, efektif, serta memenuhi azas kepatutan dan kewajaran. Secara umum tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengupayakan tidak terjadinya ketimpangan baik dari sisi sosial ekonomi maupun lingkungan. Untuk Mewujudkan hal tersebut maka pembangunan yang berdasar pada kebutuhan masyarakat dan kemampuan daerah menjadi sebuah keharusan. Dengan memperhatikan posisi geografi, demografi, dan potensi daerah melalui optimalisasi sumber daya dalam kerangka kewenangan pemerintah daerah, yang dijabarkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan diharapkan mampu mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

2.1 Sejarah Kota Payakumbuh

Payakumbuh berasal dari kata Payau dan Kumbuah, dimana berdasarkan literatur lama Payau (Payo) dalam Bahasa Indonesia berarti rawa-rawa, dan Kumbuah adalah sejenis tanaman yang dulunya tumbuh subur di daerah rawa di kanagarian Koto Nan Gadang. Kota Payakumbuh berdiri pada tanggal 17 Desember 1970, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19). Berdasarkan peraturan tersebut Kota Payakumbuh ditetapkan sebagai daerah tingkat II dengan wilayah pemerintahan sendiri, dan tanggal 17 Desember ditetapkan menjadi hari jadi Kota Payakumbuh. Dengan Adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah maka status Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh, berubah menjadi Kota Payakumbuh.

2.2 Aspek Geografi dan Demografi

Dalam rangka menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan yang ada, dibutuhkan pemahaman mengenai kondisi dan potensi daerah yang dimiliki. Hal ini bertujuan agar upaya pembangunan yang dilakukan dapat berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan melalui proses pembangunan taat lingkungan.

2.2.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Payakumbuh secara geografis berada pada daerah pegunungan bukit barisan yang berjarak 124 Km dari ibukota provinsi Sumatera Barat, Kota Padang. Kota Payakumbuhmerupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat yang menjadi gerbang utara sebelum menuju Provinsi Riau. Dengan Posisi astronomis Kota Payakumbuh terletak pada

00^0-10^0sampai dengan 0^0-17′ LS dan 100^0-35′ sampai dengan 100^0-48′ BT. Kota Payakumbuh dapat didominasi dataran rendah (92,30%), dan sisanya perbukitan dengan elevasi maksimum ±825 m dpl (7,70%). Area perbukitan terletak di batas barat daya dan selatan Kota Payakumbuh, disamping jaringan alur sungai yang secara umum mengalir dari barat daya ke timur laut dan bergabung ke Batang Sinamar. Walaupun sepanjang aliran sungai terakumulasi endapan aluvial, tetapi mayoritas material pembentuk muka bumi berasal dari aktifitas gunung berapi.

2.2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Kota Payakumbuh memiliki luas wilayah ±80,43 Km^2 atau ±0,19% dari luas Propinsi Sumatera Barat. Sementara berdasarkan perhitungan peta citra, luas wilayah Kota Payakumbuh adalah 75,26 Km^2. Selisih perhitungan ini dikarenakan perbedaan sumber peta dan teknik yang digunakan untuk menghitung luas wilayah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008, Kota Payakumbuh dimekarkan dari tiga kecamatan menjadi lima kecamatan, dengan ditambahkannya Kecamatan Payakumbuh Selatan pada tanggal 23 Desember 2008, dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori pada tanggal 24 Desember 2008. Sebagai bagian dari Luhak Nan Bungsu, Kota Payakumbuh dikelilingi oleh Kabupaten Limapuluh Kota yang secara administratif berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara : Kecamatan Harau dan Kecamatan Payakumbuh
- Sebelah Selatan : Kecamatan Luhak dan Kecamatan Situjuah Limo Nagari
- Sebelah Barat : Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Akabiluru
- Sebelah Timur : Kecamatan Luhak dan Kecamatan Harau

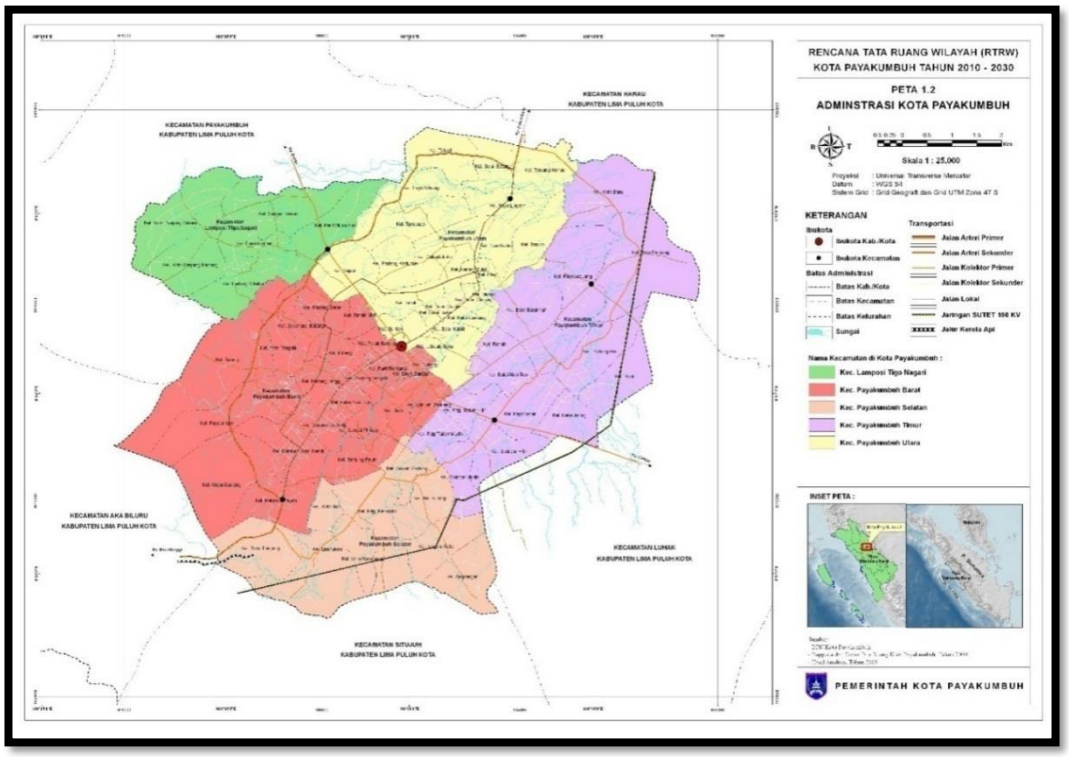

Gambar II - 1
Batas Administrasi Kota Payakumbuh
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010 – 2030

Tabel II - 1
Pembagian Wilayah Administratif Kota Payakumbuh Tahun 2016

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km^2)	Jumlah		
				Kelurahan	RW	RT
1	Payakumbuh Barat	Tanjung Pauh	19,06	18	60	166
2	Payakumbuh Utara	Pdg. Kaduduak	14,53	9	49	123
3	Payakumbuh Timur	Tiakar	22,73	9	33	91
4	Payakumbuh Selatan	Sawah Padang	14,69	7	16	49
5	Lamposi Tigo Nagori	Sei Durian	09,42	6	14	50
Total			80,43	48	172	479

Sumber: Kecamatan Dalam Angka, 2017

2.2.1.3 Topografi

Topografi Kota Payakumbuh berdasarkan aspek ketinggian dan kemiringan lahan, dimana hampir sebagian wilayahnya (±92,30% atau ±7423,75 Ha) terletak dengan kemiringan lahan kurang dari 2%, yang mencakup Kecamatan Payakumbuh Barat, Payakumbuh Timur, Payakumbuh Utara dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Sedangkan Kecamatan Payakumbuh Selatan lebih tergolong pada perbukitan. Secara umum Kota Payakumbuh memiliki relief dengan kemiringan lereng beragam dari 0% (datar) hingga lebih dari 40% (curam), yang terletak pada ketinggian daerah berada pada 500 Meter diatas permukaan laut.

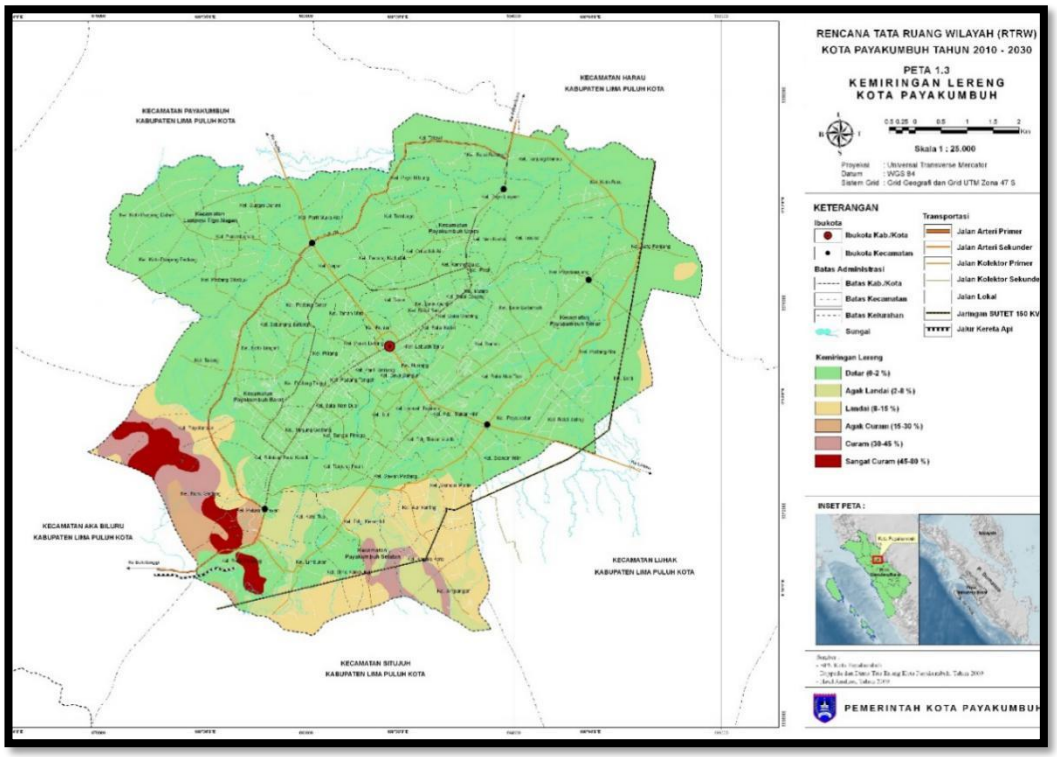

Gambar II - 2
Peta Kemiringan Lereng Kota Payakumbuh
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010 – 2030

Tabel II - 2
Klasifikasi Kemiringan Lahan di Kota Payakumbuh

No	Kemiringan Lahan	Lereng(%)	Kelas	(Luas)	
				Ha	%
1	Datar	0-2	A	6.601,7	82,08
2	Agak Landai	2-8	B	304,0	3,78
3	Landai	8-15	C	588,8	7,32
4	Agak Curam	15-30	D	112,6	1,40
5	Curam	30-45	E	298,4	3,71
6	Sangat Curam	45-60	F	137,5	1,71
Luas				8.043,0	100,00

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010 – 2030

Berdasarkan Gambar II-2 dan tabel II-2 Kecamatan Payakumbuh Selatan (Kelurahan Kapalo Koto Ampangan, Kelurahan Limo Kampuang, dan Kelurahan Sawah Padang Aur Kuning merupakan) dan Kecamatan Payakumbuh Timur (Kelurahan Sicincin) memiliki tingkat kesuburan tanah yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lain. Disamping informasi mengenai curah hujan, dan posisi fisiografis yang cukup tinggi, kecamatan Payakumbuh selatan berpotensi untuk diprioritaskan pada usaha pertanian.

2.2.1.4 Geologi

Berdasarkan sistem klasifikasi tipe tanah yang dikemukakan Marsoedi, Widigdo dan S. Hardjo Wigeno (1995), maka bentuk tanah dari Kota Payakumbuh sebagai berikut:

1. **Aluvial**

   Tanah aluvial merupakan tanah mineral yang berasal dari endapan alluvium sungai, terutama Sungai Batang Agam dan Sungai Sinamar yang tersebar dengan kemiringan (0-2%). Tanah Aluvial dimanfaatkan untuk areal persawahan, permukiman dan ladang/ kebun campuran. Jenis tanah alluvial dikelompokkan menjadi dua; aluvial distrik dan alluvial gleiik. Sifat dan karakteristik tanah dicirikan dengan drainase tanah sedang sampai sangat terhambat, permeabelitas tanah sedang sampai lambat dan tanah agak dalam (60-80 cm), tekstur tanah bervariasi antara lempung liat dan lempung liat berdebu, dengan reaksi tanah masam (PH 4,5-5,5) dan status kesuburan tanah rendah.

2. **Gleisol**

   Tanah Gleisol merupakan tanah mineral yang selalu tergenang air dan tanahnya belum matang (unriped soil), dengan bahan induk tanah berasal dari tufa batu apung. Tanah Gleisol di Kota Payakumbuh dikelompokkan menjadi Gleisol hidrik, yang tersebar pada dataran dengan kemiringan lahan (0- 2%). Jenis tanah gleisol dicirikan dengan drainase tanah sangat terhambat, permeabilitas tanah sangat lambat dan kedalaman tanah agak dalam (51-75 cm). Tekstur tanah halus (liat, lempung liat dan liat berdebu). Kandungan C-Organik tergolong sedang dan reaksi tanah sangat masam (PH <4,5), dan status kesuburan tanah tergolong rendah.

3. Kambisol

Tanah Kambisol merupakan induk tanah yang berasal dari batuan sedimen masam atau dari tufa bahan apung. Secara fisiografis tanah ini tersebar pada dataran berombal aluvial-koluvial, lereng bawah perbukitan, dataran vulkanik dan perbukitan terpisah dengan kemiringan lahan bervarasi dari agak landai (3-8%), landai (8-15%), curam (30-45%) dan sangat curam (>45%). Tanah kambisol dikelompokkan dalam kambisol distrik, kambisol gleiik, dan kambisol litik. Karakteristik tanah ini dicirikan dengan drainase sangat terhambat-baik, permeabilitas tanah sangat lambat-agak cepat dan tekstur tanah lempung liat, lempung, lempung berdebu dan lempung liat berpasir. Kedalaman tanah bervariasi dari cukup dangkal (30-50 cm) sampai agak dalam (51-75 cm), reaksi tanah masam (PH <4,5) dan status kesuburan tanah tergolong rendah.

4. Padsolik

Tanah Padsolik merupakan tanah mineral yang mempunyai horizon argilik dengan kejenuhan basa kurang dari 35%. Bahan induk tanah berasal dari batuan sediment masam yang tersebar pada dataran perbukitan dalam pola rendah. Untuk Kota Payakumbuh, tipe tanah ini dikelompokkan atas dua macam tanah yakni Padsolok ortik dan padsolik humik.Sifat dan karakteristik tanah dicirikan dengan drainase tanah sedang, permeabelitas tanah sedang, dan kedalaman tanah tergolong dalam (100 – 120 cm), tekstur halus (liat dan liat berdebu), reaksi tanah masam (PH 4,5 – 5,5) dan status kesuburan tanah tergolong rendah.

5. Latosol

Tanah Latosol merupakan tanah mineral yang telah berkembang, dengan bahan induk tanah berasal dari batuan vulkanik dan tersebar pada lereng bawah vulkanik. Pemanfaatan tanah tipe ini digunakan untuk ladang dan kebun campuran. Jenis tanah latosol di wilayah studi termasuk pada tingkat tanah latosol humik.Sifat dan karakteristik tanah dicirikan dengan drainase tanah baik, permeabilitas tanah agak cepat dan *Porosital*(100-120cm). Tekstur tanah halus (liat berdebu sampai liat), dan reaksi tanah masam (PH 4,5-5,5). Status kesuburan tanah adalah sedang.

Tabel II - 3
Satuan Peta Tanah (SPT) di Kota Payakumbuh

SPT	Jenis Tanah	Lereng (%)	Posisi Fisiografi	Bahan Induk Tanah	Luas	
					Ha	%
1	Aluvial Distrik	Datar (0 - 2)	Dataran Aluvial	Endapan aluvial sungai	423,06	5,26
2	Aluvial Gleiik	Datar (0 - 2)	Dataran Aluvial	Endapan aluvial sungai	754,43	9,38
3	Kambisol Gleiik	Datar (0 - 2)	Dataran Aluvial	Endapan aluvial & koluvium	2.767,60	34,41
4	Gleisol Hidrik	Datar (0 - 2)	Dataran	Tufa batu apung	2.538,37	31,56
5	Kambisol Distrik	Datar (0 - 2)	Dataran	Tufa batu apung	118,23	1,47
6	Kambisol Gleiik	Agak landai (2 - 8)	Dataran aluvial-koluvial	Endapan aluvium dan koluvium	304,03	3,78
7	Kambisol Distrik	Landai (8 - 15)	Perbukitan kecil	Batuan sedimen	58,71	0,73
8	Kambisol Distrik	Landai (8 - 15)	Perbukitan kecil	Tufa batu apung	86,06	1,07
9	Padsolik Ortik	Landai (8 - 15)	Lereng Bawah Perbukitan	Batuan sedimen	186,60	2,32

SPT	Jenis Tanah	Lereng (%)	Posisi Fisiografi	Bahan Induk Tanah	Luas	
					Ha	%
10	Padsolik Humik	Agak curam (15 - 30)	Perbukitan	Batuan sedimen	112,60	1,4
11	Padsolik Humik	Curam (30 - 45)	Perbukitan	Batuan sedimen	171,32	2,13
12	Padsolik Humik	Sangat curam (45 - 60)	Perbukitan	Batuan sedimen	84,45	1,05
13	Kambisol Litik	Sangat curam (45 - 60)	Perbukitan terpisah	Batuan vulkanik & Intrusi	53,08	0,66
14	Latosol Humik	Landai (8 - 15)	Lereng bawah vulkanik	Batuan vulkanik	257,38	3,2
15	Latosol Humik	Curam (30 - 45)	Lereng bawah vulkanik	Batuan vulkanik	127,08	1,58
Total					8.043,00	100

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010 – 2030

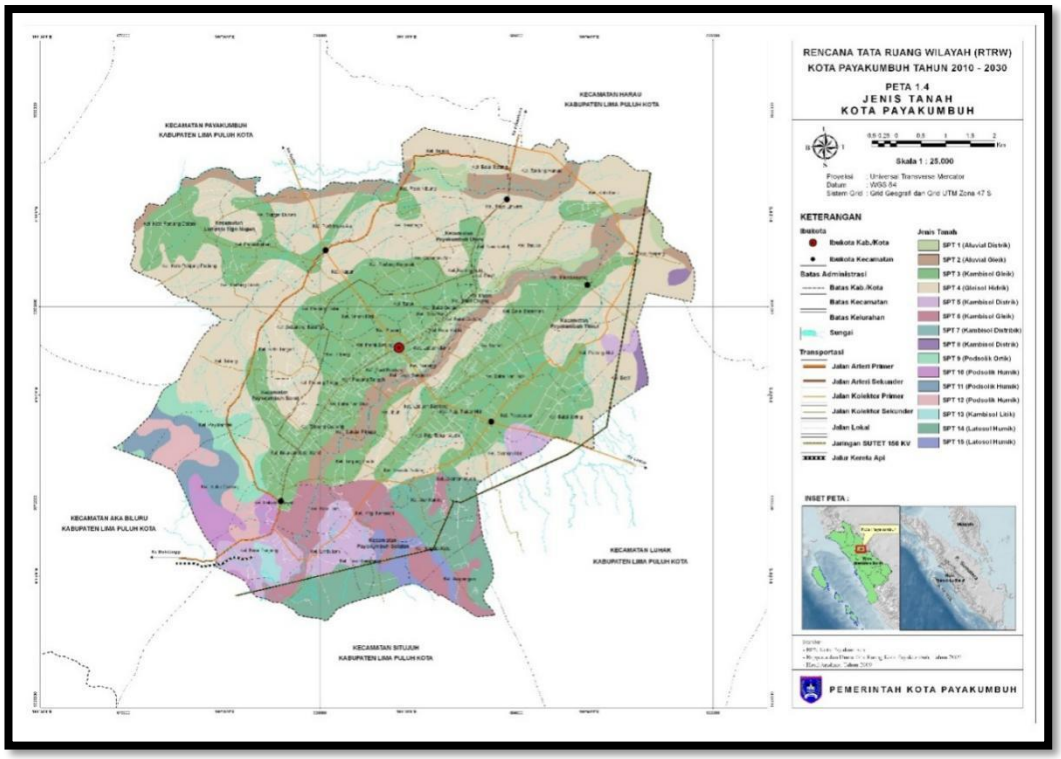

Gambar II - 3
Peta Jenis Tanah Kota Payakumbuh
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010 – 2030

2.2.1.5 Hidrologi

Kota Payakumbuh memiliki sumber air baku yang cukup potensial. Berdasarkan gambar II.4 terlihat ada tujuh alur sungai, yaitu: Batang Lampasi, Batang Pulau, Batang Agam, Batang Sikali, Sungai Talang, Sungai Baih, dan Batang Sinamar. Aliran sungai yang menjangkau setiap wilayah di Kota Payakumbuh tidak hanya dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, tetapi juga dikembangkan sebagai bagian dari objek wisata Kota Payakumbuh.

1. **Sungai Batang Agam**

   Sumber air yang berasal dari air permukaan dengan debit air mencapai 3,38 m^3/detik sampai 6,30 m^3/detik. Sedangkan pada saat kemarau debit air sebesar 4,40m^3/detik.

2. **Mata Air Bulakan**

   Mata air ini berada di Kelurahan Limbukan. Selain sebagai sumber air baku, mata air Bulakanyang mempunyai tiga outlet dari dua bangunan penangkap air tersebut dengan debit sebesar 325 liter/detik dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan perikanan.

3. **Sungai Batang Lampasi**

   Sungai ini mengalir melewati Kelurahan Koto Panjang, Sungai Durian, Taratak Padang Kampuang dan Ompang Tanah Sirah, yang dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan dan peternakan

4. **Sungai Batang Sinamar**

   Sungai yang mengalir melewati Kelurahan Ompang Tanah Sirah Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kotobaru Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur ini belum dapata dioptimalkan untuk keperluan irigasi karena elevasi pada hulu sungai sangat rendah dan hanya melewati Kota Payakumbuh sepanjang ±3 (tiga) kilometer, Sungai Batang Sinamar juga merupakan batas alami dengan Kabupaten Limapuluh Kota.

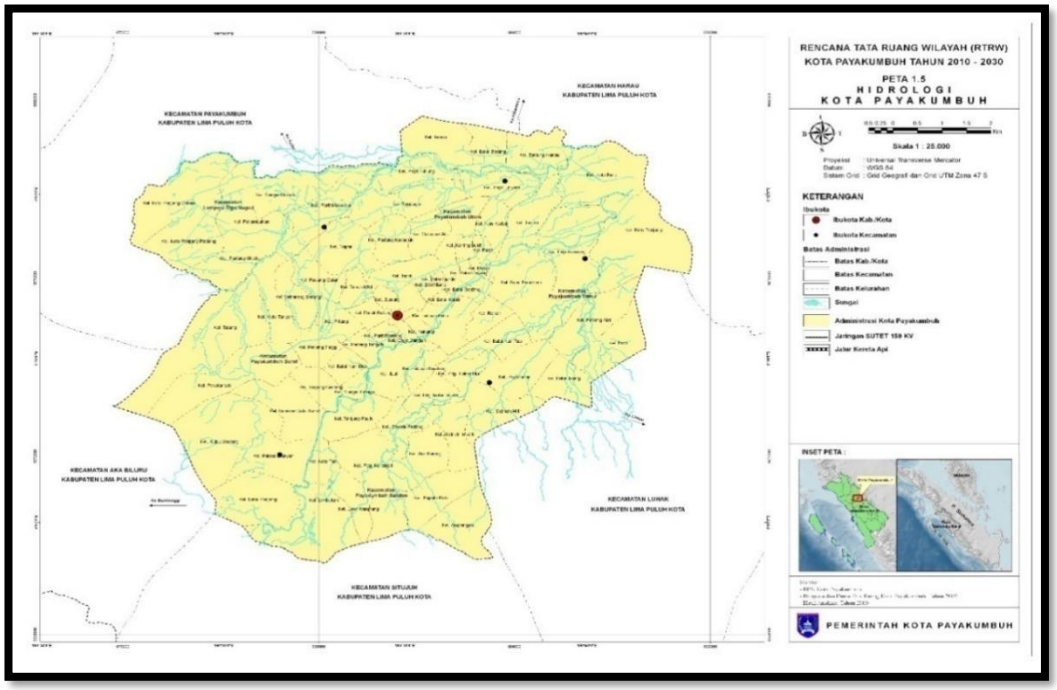

Gambar II - 4
Peta Hidrologi Kota Payakumbuh
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010 – 2030

2.2.1.6 Klimatologi

Berdasarkan sistem klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson, dan sistem klasifikasi iklim W. Koppen Kota Payakumbuh digolongkan pada tipe iklim A (iklim hujan tropis). Iklim hujan tropis memiliki dicirikan dengan suhu normal, dengan pada bulan terdingin suhu diatas 18ºC dan suhu bulan terpanas di atas 22ºC. Untuk sistem klasifikasi iklim zona agroklimat yang dipublikasikan oleh Oldeman Irsal Las dan S.N.Darwis (1979), Kota Payakumbuh tergolong pada zona agroklimat D1, dengan ciri-ciri mempunyai bulan basah (curah hujan diatas 200 mm) berturut-turut sebanyak 3–4 bulan dan bulan kering (curah hujan di bawah 100 mm) berturut-turut kurang dari dua bulan.

Tabel II - 4
Tipe Iklim dan Tipe Hujan Kota Payakumbuh

Stasiun Pengamat Hujan	Elovasi (mdpl)	Tahun Pengamatan	Jumlah Bulan Kering			Jumlah Bulan Basah			Nilai Q	Tipe Hujan Schmidt dan Ferguson	Tipe Iklim Koppen
			Rerata	Maks	Frek	Rerata	Maks	Frek			
Payakumbuh	512	20	1,1	3	2	9,3	11	3	0,12	A	Afa

Sumber: FH. Schmidt and J.H.A Ferguson. 1951. Rainfall Types Based On Wet And Day Preiods Ratio for Indonesia With Western New Guine. Verhodelingon. 42

Curah hujan berpengaruh terhadap ketersediaan air bagi tanaman. Pada daerah yang tidak terairi oleh irigasi, maka pertanian didaerah tersebut sangat tergantung pada hujan. Agar tanaman tidak kekurangan air dan dapat berproduksi maksimum, maka daerah perlu menyediakan sumber air bagi tanaman. Sedangkan untuk yang memiliki curah hujan rendah, petani atau instansi terkait membangun saluran irigasi agar air selalu tersedia bagi tanaman. Disisi lain, Pertumbuhan vegetasi tidak hanya ditentukan oleh curah hujan, tetapi juga oleh distribusi hujan. Hari hujan dinyatakan sebagai suatu tempat yang mengalami hujan dengan angka curah hujan 0,5 mm atau lebih. Jumlah hujan yang sama dalam mm akan berbeda pengaruhnya jika tercurah pada waktu yang berbeda. Distribusi hujan dapat dinyatakan dengan melihat data jumlah hari hujan.

Tabel II - 5
Distribusi HujanKota PayakumbuhTahun 2012- 2016

No.	Bulan	2012		2013		2014		2015		2016	
		Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
1.	Januari	26.3	3	54.0	5	93.00	13	174.50	14	417	18
2.	Februari	71.7	12	87.6	8	33.00	5	132.50	9	126	9
3.	Maret	52.8	5	170.6	9	112.00	12	198.50	17	258	11
4.	April	61.4	13	186.0	8	271.00	20	35.50	20	223	13
5.	Mei	50.3	10	47.0	5	263.00	15	188.00	15	177	12
6.	Juni	49.8	5	76.8	4	85.00	5	159.00	9	46	4
7.	Juli	53.2	6	74.1	5	82.00	4	22.50	3	55	6
8.	Agustus	29.8	8	97.0	4	286.00	13	41.00	5	48	6
9.	September	26.3	6	116.6	7	167.00	13	95.00	6	61	5
10.	Oktober	52.4	14	105.0	4	176.00	14	64.00	5	62	7
11.	November	46.7	21	128.3	10	485.00	22	392.00	24	202	16
12.	Desember	50.3	17	119.3	6	97.00	15	169.50	19	122	11

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2013 - 2017

2.2.1.7 Penggunaan Lahan

Pemanfaataan ruang wilayah perencanaan merupakan bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran, fungsi serta karakter kegiatan manusia dan alam. Pemanfaatan ruang untuk kebutuhan manusia dikategorikan sebagai kegiatan budi daya yang dalam prosesnya harus didukung dengan penyediaaan kawasan lindung. Kelangkaan lahan (*Land Scarcity*) mencerminkan bahwa lahan/tanah merupakan sumber daya yang terbatas dan tidak mungkin bertambah kedepannya, kecuali untuk daerah pantai yang melakukan reklamasi pada daerah pantai atau tanjung. Di sisi lain, perkembangan sosial ekonomi menuntut adanya kenaikan permintaan lahan, baik dari segi luas maupun dari segi keragamannya. Karena itu penataan ruang menjadi sebuah kebutuhan dari kota untuk mengoptimalkan pola kegiatan keruangan dari manusianya. Tanaman padi dapat hidup baik didaerah yang berhawa panas dan banyak mengandung uap air. Curah hujan yang baik rata-rata 200 mm per bulan atau lebih. Untuk daerah dengan ketersediaan air yang cukup, penanaman padi dilakukan pada periode tertentu selalu tergenang air. Berdasarkan tabel II-6,hampir sepertiga luas daerah Kota Payakumbuh dimanfaatkan sebagai sawah.

Tabel II - 6
Luas Penggunaan Lahan menurut Jenisnya di Kota Payakumbuh

No	Jenis Penggunaan Lahan	2012		2013		2014		2015		2016	
		Luas Area (Ha)	Persen (%)	Luas Area (Ha)	Persen (%)	Luas Area (Ha)	Persen (%)	Luas Area (Ha)	Persen (%)	Luas Area (Ha)	Persen (%)
1.	Sawah	2.771	34,45	2.751	34,21	2.123	26,40	2.123	26,40	2.123	26,40
2.	Tanah untuk Bangunan dan Sekitarnya	2.863	35,60	2.902	36,10	3.511	43,64	3.533	43,89	3.530	43,88
3.	Kebun/ Ladang	1.224	15,22	1.456	18,10	1.224	15,22	1.456	18,10	1.458	18,13
4.	Kolam	198	2,46	14	0,17	198	2,46	14	0,17	14	0,17
5.	Hutan	360	4,48	356	4,43	360	4,48	356	4,43	354	4,40
6.	Padang Rumput	47	0,58	11	0,14	47	0,59	11	0,14	11	0,14
7.	Lainnya	580	7,21	553	6,87	580	7,21	550	6,87	553	6,88
	Jumlah	8.043	100,00	8.043	100,00	8.043	100,00	8.043	100,00	8.043	100,00

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2013– 2017 dan RTRW Kota Payakumbuh 2010-2030, data diolah

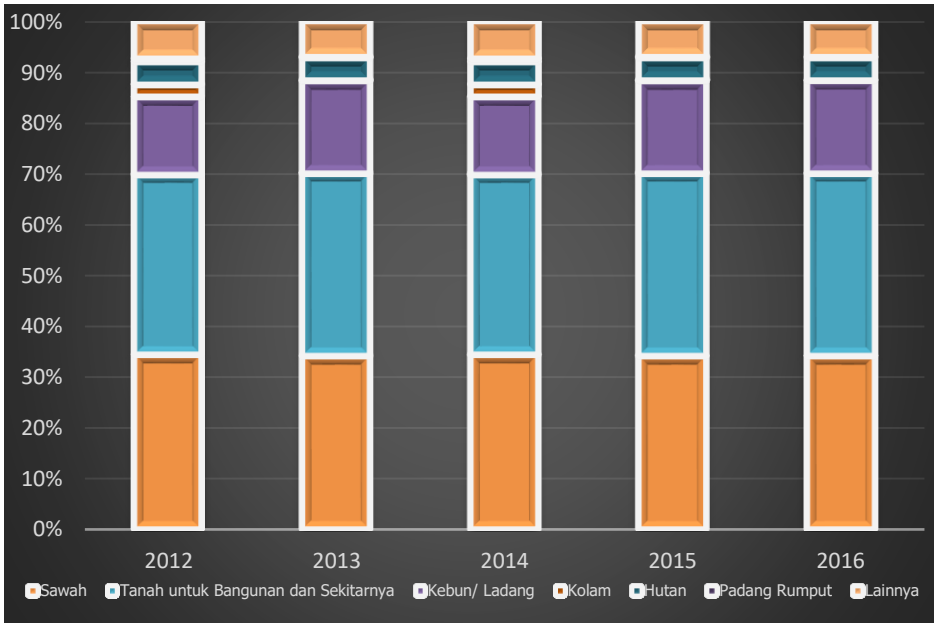

Bagan II - 1
Histogram Deskripsi Luas Penggunaan Lahan
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010 – 2030

Pola penggunaan lahan Kota Payakumbuh sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 terlihat tidak ada perubahan yang signifikan. Pemanfaatan lahan terbesar digunakan untuk tanah dan bangunan. Alih fungsi lahan untuk pembangunan berasal dari perubahan fungsi pemanfaatan kolam dan padang rumput untuk mengakomodir kebutuhan manusia akan ruang guna pembangunan fisik daerah.

Tabel II - 7
Luas Penggunaan Lahan Pertanian di Kota Payakumbuh

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas Daerah	2012		2013		2014		2015		2016	
			Sawah	Bukan Sawah	Sawah	Bukan Sawah	Sawah	Bukan Sawah	Sawah	Bukan Sawah	Sawah	Bukan Sawah
1	Payakumbuh Barat	1.966	511	594	529	577	404	577	404	577	404	577
2	PayakumbuhTimur	2.273	696	742	663	772	536	772	536	772	536	772
3	Payakumbuh Utara	1.453	491	501	745	255	620	255	620	225	620	225
4	Payakumbuh Selatan	1.409	487	389	378	493	252	493	252	493	252	491
5	Lamposi Tigo Nagori	942	586	183	436	293	311	293	311	293	311	293
Jumlah		8.043	2.771	2.409	2.751	2.390	2.123	2.390	2.123	2.390	2.123	2.390

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2013– 2013 dan RTRW Kota Payakumbuh 2010-2030, data diolah.

Untuk tahun 2016 dilakukan perhitungan lanjutan dengan membandingkan luas lahan pertanian sawah dan bukan sawah dengan luas kecamatan, sehingga berdasarkan tabel II-8 terlihat bahwa Kecamatan Payakumbuh Utara (42,67%) dan Payakumbuh Selatan (34,99%) komoditi pertaniannya mayoritas adalah padi dibandingkan dengan tiga kecamatan lainnya, yang lebih dimanfaatkan untuk perkebunan rakyat, palawija, hortikultura, dan padang rumput.

Tabel II - 8
Persentase Luas Penggunaan Lahan Pertanian Sawah dan Non-Sawah dengan Luas Daerah Kota PayakumbuhTahun 2016

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas Daerah	Sawah	Bukan Sawah	Persentase Luas Lahan Pertanian Sawah terhadap Luas Daerah	Persentase Luas Lahan Pertanian Bukan Sawah terhadap Luas Daerah	Persentase Luas Lahan Pertanian terhadap Luas Daerah
1.	Payakumbuh Barat	1.966	404	577	20,55%	29,35%	49,90%
2.	PayakumbuhTimur	2.273	536	772	23,58%	33,96%	57,55%
3.	Payakumbuh Utara	1.453	620	225	42,67%	15,49%	58,16%
4.	Payakumbuh Selatan	1.409	252	493	17,89%	34,99%	52,87%
5.	Lamposi Tigo Nagori	942	311	293	33,01%	31,10%	64,12%
Total		8.043	2.123	2.358	26,40%	29,32%	55,71%

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2017, data diolah

2.2.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Analisis potensi pengembangan ekonomi wilayah dilakukan untuk mengetahui secara konkrit sektor dan sub-sektor yang berpotensi mempengaruhi perkembangan ekonomi wilayah. Informasi ini diperlukan dalam penyusunan rencana daerah untuk menentukan arah dan prioritas pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga pertumbuhan ekonomi optimal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat maksimal dapat diwujudkan. Potensi pengembangan ekonomi kabupaten/ kota dari sisi pembangunan sektoral ditentukan oleh keunggulan komparatif yang dimiliki oleh daerah bersangkutan dibandingkan dengan kinerja sektoral pada tingkat provinsi. Alat analisa yang digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan komparatif sektor dan sub-sektor daerah adalah Indeks Koefisien Lokasi (Location Quotient, LQ).

LQ adalah suatu perbandingan besarnya peranan suatu sektor disuatu daerah terhadap besarnya peranan sektor tersebut pada tingkat yang lebih luas.Teknik ini mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki daerah pada sektor-sektor mana yang merupakan sektor basis dan sektor mana yang bukan sektor basis. LQ dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan sektor unggulan daerah. Dalam perhitungannya nilai LQ diperoleh dengan membandingkan PDRB Kota Payakumbuh dengan PDRB Provinsi Sumatera Barat pada rentang waktu tahun 2012-2016, hasil perhitungan sebagaimana yang tergambar pada Tabel II-9

Tabel II - 9
Perkembangan Nilai Indek Koefisien Lokasi (LQ)Menurut Sektor danSubsektor di Kota Payakumbuh Tahun 2012-2016

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015	2016	Rerata
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,31	0,31	0,33	0,32	0,32	0,30
B	Pertambangan dan Penggalian	0,13	0,13	0,15	0,16	0,15	0,13
C	Industri Pengolahan	0,55	0,54	0,50	0,51	0,52	0,54
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,64	0,63	0,46	0,58	0,60	0,64
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,01	3,86	2,85	2,86	2,75	3,82
F	Konstruksi	1,44	1,38	1,45	1,51	1,48	1,43
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,51	1,54	1,52	1,55	1,56	1,53
H	Transportasi dan Pergudangan	1,27	1,23	1,20	1,16	1,10	1,25
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,34	2,34	2,61	2,81	2,97	2,35
J	Informasi dan Komunikasi	1,32	1,32	1,10	1,00	0,97	1,32
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,05	2,08	2,19	2,25	2,23	2,08
L	Real Estat	1,51	1,50	1,50	1,53	1,49	1,50
M,N	Jasa Perusahaan	0,65	0,63	0,60	0,61	0,61	0,63
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,31	1,30	1,37	1,25	1,24	1,29
P	Jasa Pendidikan	1,11	1,10	1,17	1,17	1,18	1,11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,18	1,17	1,18	1,14	1,13	1,17
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,11	2,12	2,16	2,10	2,06	2,11
Produk Domestik Regional Bruto		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Sumber: Data PDRB Kota Payakumbuh Tahun 2012-2016, Data Diolah

Dari tabel II-9 terlihat bahwa sektor yang menjadi basis dan menjadi sektor unggulan adalah sektor yang memiliki nilai LQ>1 yaitu sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan nilai LQ rata-rata = 3,82, sub sektor konstruksi dengan nilai LQ rata-rata = 1,43, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai LQ rata-rata = 1,53; sektor transportasi dan pergudangan dengan nilai LQ rata-rata 1,25; sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan nilai LQ rata-rata 2,35; sektor real estat dengan nilai LQ rata-rata = 1,50 serta sektor jasa-lainnya yang memiliki 2,11. Angka koefisien ini memperlihatkan bahwa sektor tersebut mempunyai keunggulan komparatif yang cukup tinggi dibandingkan dengan sektor yang sama secara rata-rata di tingkat provinsi Sumatera Barat dan merupakan sektor basis di Kota Payakumbuh.

Untuk melihat potensi pengembangan dari setiap sektor maka digunakan analisis Tipologi Klassen (Apriliyanto: 2003). Tipologi Klassen mendasarkan pengelompokkan sektor, sub-sektor, usaha atau komoditi daerah dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi provinsi atau nasional.Hasil analisis Tipologi Klassen dikelompokkan berdasarkan pertumbuhan dan besarnya kontribusi dari masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB kedalam empat klasifikasi sektor.

Tabel II - 10
Hasil Analisis Tipologi Klassen Sektor (Lapangan Usaha) Kota Payakumbuh

No	Sektor / Lapangan Usaha	Daerah Analisis (Payakumbuh)		Daerah Acuan (Sumbar)		Kuadran
		Rata-rata Pertumbuhan (%)	Rata-rata Kontribusi (%)	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Rata-rata Kontribusi (%)	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,95	7,35	4,13	24,44	4
2	Pertambangan dan Penggalian	5,78	0,59	5,12	4,48	3
3	Industri Pengolahan	4,79	6,14	4,66	11,37	3
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,01	0,06	5,54	0,10	4
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,55	0,38	4,62	0,10	2
6	Konstruksi	8,04	12,14	8,42	8,46	2
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,71	23,48	6,43	15,33	1
8	Transportasi dan Pergudangan	6,47	13,71	8,01	11,03	2
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,37	2,35	6,12	1,00	1
10	Informasi dan Komunikasi	10,64	8,19	9,75	6,08	1
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,13	6,36	6,04	3,03	1
12	Real Estate	5,50	2,94	5,24	1,97	1
13	Jasa Perusahaan	6,50	0,28	6,60	0,44	4
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,33	7,49	2,14	5,93	1
15	Jasa Pendidikan	7,19	3,81	8,40	3,44	2
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,73	1,51	8,39	1,28	2
17	Jasa lainnya	5,97	3,23	6,52	1,54	2

Sumber: Data PDRB Kota Payakumbuh Tahun 2012-2016, Data Diolah

Berdasarkan pada analisis tersebut (tabel II-10), maka dapat diinformasikan bahwa sektor perdagangan dan pariwisata merupakan sektor basis, sektor industri pengolahan sebagai sektor potensial, dan sektor pertanian sebagai sektor tertinggal yang masih punya peluang sangat besar untuk dikembangkan pada pembangunan ke depan.

• Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor • Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum • Informasi dan Komunikasi • Jasa Keuangan dan Asuransi • Real Estate	• Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang • Konstruksi • Transportasi dan Pergudangan • Jasa Pendidikan • Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial • Jasa Lainnya
Sektor Maju; Pertumbuhan Cepat	Sektor Maju; Pertumbuhan Tertekan
• Pertambangan dan Penggalian • Industri Pengolahan	• Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan • Pengadaan Listrik dan Gas
Sektor Potensial; Pertumbuhan Cepat	Sektor Relatif Tertinggal

Bagan II - 2
Kuadran Tipologi Klassen
Sumber: Data Diolah

2.2.3 Wilayah Rawan Bencana

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat yang terletak di zona patahan, Kota Payakumbuh relatif aman dari ancaman bencana alam gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan letusan gunungapi. Namun ancaman bencana alam yang perlu mendapatkan perhatian adalah angin puting beliung.

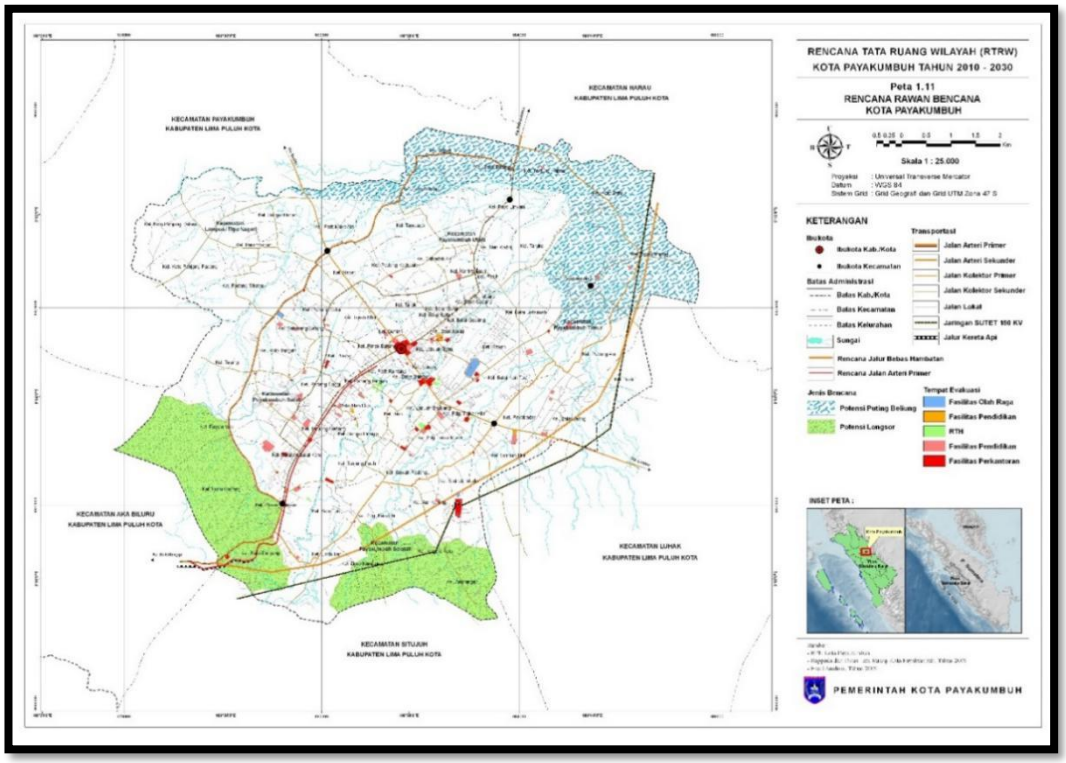

Gambar II - 5
Peta Rencana Rawan BencanaKota Payakumbuh
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010 – 2030

Kejadian bencana alam ataupun bencana sosial mengakibatkan penurunan pada daya dukung wilayah, dikarenakan adanya sumber daya yang rusak akibat

bencana. Potensi bencana alam untuk Kota Payakumbuh dapat dikelompokkan menjadi dua; tanah longsor pada beberapa kelurahan di kecamatan Payakumbuh Selatan, dan potensi angin puting beliung pada bagian luar kecamatan Payakumbuh Selatan, Payakumbuh Timur dan Payakumbuh Utara. Dengan mengetahui potensi bencana daerah, peruntukan fungsi ruang dapat dikendalikan dan juga dapat meminimalkan resiko sosial yang muncul apabila bencana terjadi. Wilayah berpotensi rawan bencana (Gambar II-5) menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi padat karya dan padat karsa, seperti: pemukiman, perdagangan, pendidikan dsb.

2.2.4 Demografi

Perencanaan Kota Payakumbuh merupakan perencanaan yang dimulai dari pemahaman untuk membangun manusia seutuhnya. Pola pendekatan ini mengevaluasi kebutuhan penduduk dari sisi kualitas dan kuantitas penduduk. Dari sisi kualitas dipahami perencanaan penduduk sebagai upaya meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia, sedangkan dari sisi kuantitas diperhatikan melalui pola kependudukan itu sendiri. Jumlah penduduk yang semakin meningkat, dan tidak diikuti oleh pertambahan daya dukung baik dari lahan maupun sumber daya, menjadi salah satu pertimbangan bahwa pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan subjek dan objek dari pembangunan yaitu manusia. Dengan mengetahui kondisi penduduk suatu wilayah secara menyeluruh maka selanjutnya dapat diperkirakan tingkat kebutuhan dan kepentingan penduduk yang harus dipenuhi berdasarkan potensi-potensi yang ada baik untuk saat ini maupun kedepannya.

2.2.4.1 Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Penduduk Kota Payakumbuh tersebar pada lima kecamatan, walaupun berdasarkan tabel II-11. Kecamatan yang paling luas tugas kewilayahannya adalah kecamatan Payakumbuh Timur, tetapi untuk persebaran penduduk, kecamatan Payakumbuh Barat lebih padat dibanding empat kecamatan lainnya.

Tabel II - 11
Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	Luas	2012		2013		2014		2015		2016	
			Jumlah	Density	Jumlah	Density	Jumlah	Density	Jumlah	Density	Jumlah	Density
1.	Payakumbuh Barat	19.06	48.064	2.445	48.537	2.496	48.624	2.473	49.450	2.594	50.033	2.562
2.	Payakumbuh Timur	22.73	25.652	1.129	25.904	1.140	27.246	1.199	27.634	1.216	28.370	1.230
3.	Payakumbuh Utara	14.53	29.770	2.049	30.063	2.069	30.117	2.073	30.679	2.112	30.797	2.139
4.	Payakumbuh Selatan	14.69	9.931	705	10.028	712	10.278	729	10.453	712	10.752	755
5.	Lamposi Tigo Nagori	9.42	9.033	959	9.122	968	9.425	1.001	9.610	1.020	9.855	1.037
	Total	80.43	122.450	1.522	123.654	1.537	125.690	1.563	127.826	1.589	129.807	1.614

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2013 - 2017

Kondisi ini juga dipengaruhi oleh struktur ruang kota, dimana pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan ekonomi kota berada pada kecamatan Payakumbuh Barat, dan Payakumbuh Utara. Disamping itu bentang alam kecamatan juga mempengaruhi preferensi masyarakat dalam memilih lingkungan perumahannya, sebagai contoh luas daerah Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Payakumbuh Selatan tidak terlalu berbeda, tetapi karena kecamatan Payakumbuh Selatan lebih didominasi

perbukitan, sehingga kecamatan Payakumbuh Utara lebih padat dibanding kecamatan Payakumbuh Selatan.

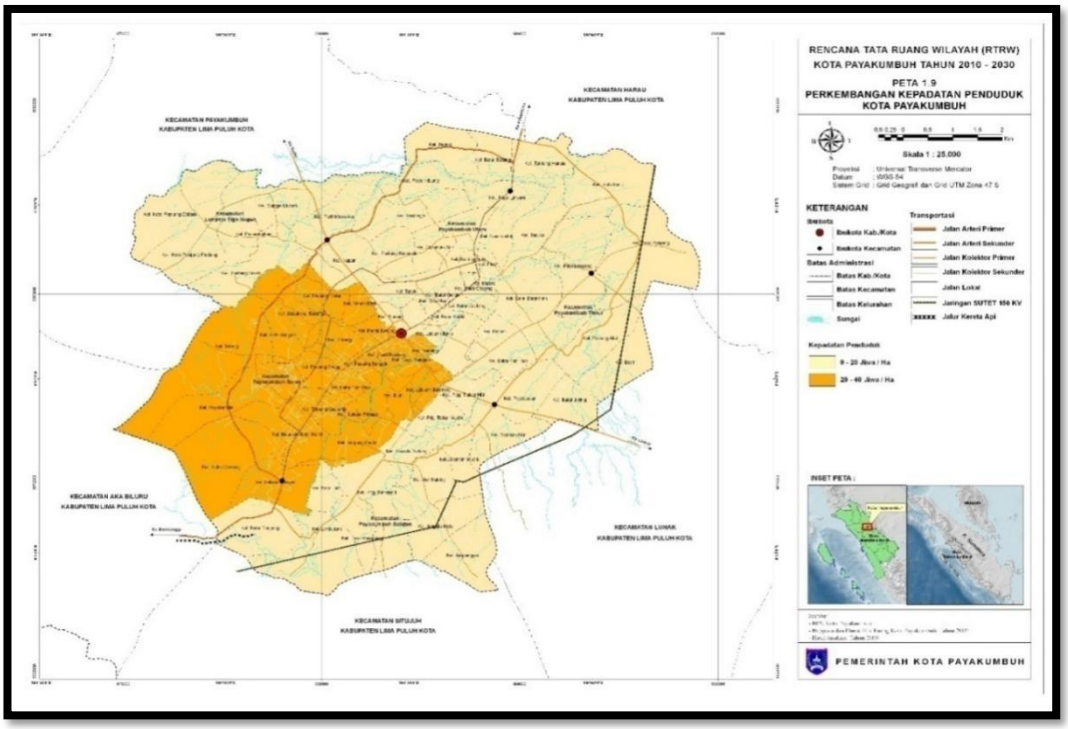

Gambar II - 6
Peta Perkembangan Kepadatan Kota Payakumbuh
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010 - 2030

2.2.4.2 Struktur dan Karakteristik Penduduk

1. Struktur Penduduk Berdasarkan Umur

Klasifikasi penduduk berdasarkan umur berguna untuk memperlihatkan karakteristik penduduk suatu daerah, dan juga untuk menunjukkan tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan) antara penduduk produktif (15-64 tahun) dengan penduduk non produktif (0-14 tahun, dan diatas 65 tahun). Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan data pada tabel II-12, didapatkan dependency ratio atau rasio ketergantungan penduduk di Kota Payakumbuh (tabel II-13).

Tabel II - 12
Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2012 - 2016

No	Kelompok Umur	2012	2013	2014	2015	2016
1.	0-4	12.612	13.816	13.915	13.936	13.914
2.	5 -9	12.390	12.178	12.374	12.598	12.777
3.	10 -14	12.903	11.116	11.220	11.374	11.548
4.	15-19	11.806	11.004	11.184	11.370	11.487
5.	20-24	9.659	9.124	9.151	9.213	9.334
6.	25-29	9.194	10.194	10.366	10.477	10.507
7.	30-34	9.196	9.722	9.837	9.992	10.181
8.	35-39	8.586	9.194	9.292	9.396	9.455

No	Kelompok Umur	2012	2013	2014	2015	2016
9.	40-44	7.659	8.251	8.440	8.631	8.832
10.	45-49	6.880	7.173	7.315	7.478	7.654
11.	50-54	6.294	6.539	6.640	6.767	6.875
12.	55-59	5.195	5.171	5.393	5.584	5.754
13.	60-64	3.391	3.392	3.643	3.897	4.139
14.	65+	6.685	6.780	6.920	7.113	7.350
Jumlah		**122.450**	**123.654**	**125.690**	**127.826**	**129.807**

Sumber: Payakumbuh DalamAngka 2013-2017

Tabel II - 13
Perhitungan Rasio Beban Tanggungan Penduduk

No	Kelompok Umur	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kelompok Umur Produktif	77.860	79.764	81.261	82.805	84.218
2	Kelompok Umur Non-Produktif	44.590	43.890	44.429	45.021	45.589
3	Rasio Beban Tanggungan (%)	57,27	55,02	54,67	54,37	54,13

Sumber: Pengolahan Data Bappeda, 2017

Rasio ini menunjukkan bahwa semakin rendah nilai beban tanggungan menjadi lebih baik. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan untuk beban tanggungan, dimana untuk tahun 2015, rasio beban tanggungan bernilai 54,36 Hal ini dipahami sebagai dari 100 orang penduduk kelompok produktif harus menanggung 54,36 (~55 orang) dari kelompok tidak produktif. Rasio ketergantungan penduduk dengan rentang nilai 51-69 diklasifikasikan sebagai sebagai pola ketergantungan sedang. Disamping itu, memperhatikan jumlah penduduk per-kelompok umur, dapat digolongkan bahwa penduduk Kota Payakumbuh bercirikan ekspansif. Tipe penduduk ini dicirikan melalui tingginya tingkat kelahiran dan rendahnya tingkat kematian, hal ini berarti bahwa kualitas layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah meningkat setiap tahunnya.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan sex ratio (rasio jenis kelamin) di Kota Payakumbuh adalah 0,99 untuk laki-laki terhadap perempuan, yang dipahami bahwa 100 orang perempuan, sebanding dengan 99 orang penduduk laki–laki.

Tabel II - 14
Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2012 - 2016

No	Kecamatan	2012		2013		2014		2015		2016	
		LK	Pr	LK	Pr	LK	Pr	LK	Pr	Lk	Pr
1.	Payakumbuh Barat	23.774	24.290	24.060	24.477	24.136	24.488	24.566	24.884	25.035	25.270
2.	Payakumbuh Timur	12.674	12.978	12.826	13.078	13.525	13.721	13.728	13.906	13.895	14.122
3.	Payakumbuh Utara	14.826	14.944	15.004	15.059	14.950	15.167	15.241	15.438	15.449	15.677
4.	Payakumbuh Selatan	4.903	5.028	4.962	5.066	5.102	5.176	5.193	5.260	5.273	5.342
5.	Lamposi Tigo Nagori	4.473	4.560	4.527	4.595	4.678	4.747	4.774	4.836	4.848	4.911
	Total	60.650	61.800	61.379	62.275	62.391	63.299	63.502	64.324	64.486	65.321

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2013 s.d 2017

3. Struktur Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Jumlah penduduk angkatan kerja di Kota Payakumbuh pada tahun 2016 adalah 63.017 jiwa, dimana 58.562 jiwa dikategorikan sebagai penduduk sudah bekerja atau 92,93% dari penduduk angkatan kerja sudah mempunyai pekerjaan. Berdasarkan tabel II-15, sektor perdagangan masih merupakan sektor favorit yang terlihat dari meningkatnya serapan tenaga kerja pada sektor ini. Untuk tahun 2015 sektor perdagangan menyerap 36,54% dari jumlah angkatan kerja pada tahun tersebut, yang melebihi sepertiga dari angkatan kerja aktif. Untuk sektor lainnya juga terdapat peningkatan dalam serapan tenaga kerja, yang diiringi dengan penurunan jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan. Hal yang patut untuk menjadi perhatian adalah pertumbuhan lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja, akibatnya jumlah pencari kerja semakin meningkat setiap tahunnya. Data Komposisi Penduduk berdasarkan mata pencaharian merupakan salah satu elemen data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Untuk tahun 2016, data tersebut tidak tersedia.

Tabel II - 15
Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2012- 2016

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016*)
1.	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	11.360	10.228	10.988	8.380	7.387
2.	Industri Pengolahan	4.617	4.032	5.454	6.725	7.428
3.	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	17.052	15.478	19.420	21.397	22.845
4.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	11.314	15.694	12.747	13.246	13.890
5.	Lainnya	8.123	8.222	8.812	8.814	9.044
Jumlah yang Bekerja		52.466	53.654	57.421	58.562	60.594
Jumlah yang Mencari Pekerjaan		3.833	4.116	3.902	4.455	4.662
Total		**56.299**	**57.770**	**61.323**	**63.017**	**65.256**

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2013 – 2016
*) Angka diolah

4. Struktur Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat partisipasi pendidikan di Kota Payakumbuh berguna untuk menunjukkan kebutuhan terhadap kuantitas pendidikan yang berkualitas. Data pada tabel 2-16 menjadi dasar bagi pemerintah untuk menghitung jumlah guru, sekolah dan sarana pendidikan lainnya yang berguna untuk meningkatkan SDM yang berdaya saing.

Tabel II - 16
Tingkat Partisipasi PendidikanPenduduk Kota Payakumbuh
Tahun 2012 - 2016

No	Tingkat Pendidikan	Usia (Tahun)	2012	2013	2014	2015	2016
1.	TK	5-6	5.177	5.175	5.266	5.692	5.264
2.	SD	7-12	16.305	16.307	16.594	15.756	14.477
3.	SLTP	13-15	6.963	6.960	7.083	7.403	6.933
4.	SLTA	16-18	7.134	7.134	7.259	7.475	6.991
Total			**31.783**	**32.239**	**32.685**	**33.215**	**33.665**

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2013 - 2017

2.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Dalam rangka menjawab tantangan dan permasalahan yang ada, maka diperlukan pemahaman mengenai kondisi dan potensi daerah. Hal ini dimaksudkan agar upaya pembangunan yang dilakukan dapat berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan melalui proses pembangunan yang taat lingkungan.

2.3.1 Pertumbuhan PDRB

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah bruto barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Nilai tambah bruto adalah nilai produksi dikurangi dengan biaya antara. Nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah, serta keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung netto. PDRB mengukur seluruh transaksi ekonomi yang terjadi di wilayah domestik suatu daerah tanpa memperhatikan apakah transaksi dilakukan oleh masyarakat (residen) dari daerah tersebut atau masyarakat dari daerah lain (non-residen). Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tertentu pada tahun dasar.

Pada Tabel II.17dan tabel II.18 disajikan nilai dan kontribusi masing-masing lapangan usaha dalam PDRB Kota Payakumbuh yang dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). Perkembangan nilai PDRB kota Payakumbuh dari Tahun 2012 s.d 2016 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tiga sektor utama yang mendominasi dalam pembentukan PDRB Kota Payakumbuh ADHB dan ADHK periode 2012-2017 adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Sektor Konstruksi, serta sektor Transportasi dan Pergudangan. Pada tahun 2016 Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berkontribusi sebesar 23,92 persen terhadap PDRB, Sektor Konstruksi berkontribusi sebesar 13,05 persen terhadap nilai PDRB dan sektor Transportasi dan Pergudangan berkontribusi sebesar 13,08%. Kondisi yang sama juga terlihat berdasarkan perhitungan PDRB dengan menggunakan harga Konstan. Sehingga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang ketiga sektor ini masih memiliki peluang untuk dikembangkan dan menjadi sektor utama pengungkit pertumbuhan ekonomi disamping sektor-sektor lainnya.

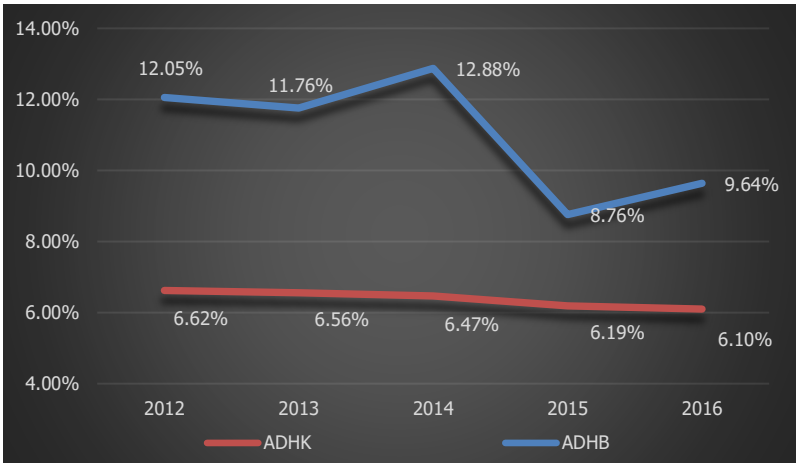

Bagan II - 3
Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2012 - 2016
Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2017 (diolah)

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan laju pertumbuhan PDRB-ADHK pada tahun 2014 dan 2016 dimana pada saat yang sama justru terjadi kenaikan pertumbuhan PDRB ADHB. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun tersebut terjadi penurunan produksi dan pada saat bersamaan terjadi kenaikan harga atau inflasi. Periode tahun 2012, 2013 dan 2015 terjadi penurunan laju PDRB ADHB dan ADHK sekaligus yang mengindikasikan lesunya perekonomian nasional sehingga menyebabkan penurunan produksi dan harga.

Tabel II - 17
Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kota PayakumbuhTahun 2012 - 2016 ADHB

No	Lapangan usaha	2012		2013		2014		2015		2016	
		(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26.0075,19	7,85	28.8517,12	7,79	328.655,76	7,86	349.806,48	7,69	368.159,01	7,39
2	Pertambangan & penggalian	19.008,25	0,57	22.376,49	0,60	27.266,01	0,65	30.787,92	0,68	32.045,70	0,64
3	Industri Pengolahan	209.596,31	6,33	222.842,18	6,02	238.495,39	5,71	254.974,82	5,61	281.253,30	5,64
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.472,50	0,04	1.531,83	0,04	1.902,68	0,05	2.561,92	0,06	3.241,90	0,07
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.221,69	0,37	11.821,58	0,32	11.931,90	0,29	13.099,95	0,29	13.971,12	0,28
6	Konstruksi	397.716,30	12,00	454.536,01	12,27	522.686,42	12,50	600.633,13	13,21	651.884,24	13,05
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	786.490,28	23,73	883.901,87	23,87	980.667,08	23,46	1.078.984,91	23,73	1.192.225,3	23,92
8	Transportasi dan Pergudangan	442.337,39	13,35	493.976,51	13,34	563.936,37	13,49	609.220,22	13,40	648.425,20	13,08
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	79.066,57	2,39	91.721,73	2,48	107.539,82	2,57	128.778,88	2,83	157.647,90	3,16
10	Informasi dan Komunikasi	238.566,56	7,20	250.575,19	6,77	287.022,80	6,87	291.678,29	6,42	323.993,10	6,50
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	206.153,16	6,22	236.489,80	6,39	277.511,96	6,64	304.772,79	6,70	339.767,50	6,82
12	Real Estat	94.140,64	2,84	106.091,82	2,86	123.001,60	2,94	135.787,16	2,99	145.452,10	2,92
13	Jasa Perusahaan	8.915,06	0,27	9.910,08	0,27	11.053,53	0,26	12.352,46	0,27	13.582,00	0,27
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	273.134,32	8,24	296.348,42	8,00	322.160,27	7,71	318.825,91	7,01	346.685,30	6,96
15	Jasa Pendidikan	12.8051,06	3,86	150.666,14	4,07	171.482,74	4,10	191.876,63	4,22	218.407,50	4,38
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	50.921,68	1,54	57.730,90	1,56	64.675,08	1,55	68.583,59	1,51	73.725,20	1,48
17	Jasa Lainnya	105.774,77	3,19	124.298,10	3,36	140.170,06	3,35	153.572,19	3,38	172.918,20	3,47
Total		**3.313.641,72**	**100**	**3.703.335,77**	**100**	**4.180.159,45**	**100**	**4.546.297,23**	**100**	**4.983.384,6**	**100**

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2017

Tabel II - 18
Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kota PayakumbuhTahun 2012 - 2016 ADHK (2000=100)

No	Lapangan usaha	2012		2013		2014		2015		2016	
		(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	224.931,93	7,63	232.344,15	7,40	243.570,98	7,28	251.460,28	7,08	257.764,45	6,84
2	Pertambangan & penggalian	17.468,58	0,59	18.746,21	0,60	19.495,04	0,58	20.393,76	0,57	21.139,40	0,56
3	Industri Pengolahan	185.737,41	6,30	194.432,47	6,19	205.849,20	6,16	209.923,38	5,91	225.113,50	5,98
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.843,38	0,06	1.903,00	0,06	2.061,76	0,06	2.098,47	0,06	2.487,24	0,07
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.198,89	0,41	12.625,85	0,40	12.623,68	0,38	13.021,73	0,37	13.192,07	0,35
6	Konstruksi	351.700,19	11,93	373.409,22	11,89	408.026,76	12,20	445.405,73	12,54	479.091,84	12,72
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	684.363,75	23,22	745.682,82	23,74	789.104,35	23,60	829.764,74	23,37	870.703,20	23,11
8	Transportasi dan Pergudangan	403.964,27	13,70	426.789,72	13,59	456.146,61	13,64	493.323,49	13,89	515.593,50	13,69
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	68.645,30	2,33	72.924,49	2,32	78.826,55	2,36	85.447,59	2,41	98.080,30	2,60
10	Informasi dan Komunikasi	230.207,53	7,81	252.138,45	8,03	277.985,49	8,31	305.455,47	8,60	335.794,90	8,91
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	185.679,35	6,30	200.755,26	6,39	215.146,29	6,43	223.630,45	6,30	241.635,50	6,41
12	Real Estat	87.602,24	2,97	92.556,48	2,95	97.886,79	2,93	103.260,47	2,91	108.004,00	2,87
13	Jasa Perusahaan	8.178,99	0,28	8.660,52	0,28	9.241,95	0,28	9.789,41	0,28	10.320,30	0,27
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	234.653,08	7,96	239.676,65	7,63	243.099,36	7,27	251.484,57	7,08	259.887,90	6,90
15	Jasa Pendidikan	111.117,63	3,77	119.397,62	3,80	126.589,11	3,79	137.594,27	3,87	148.621,70	3,95
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	44.088,94	1,50	47.487,53	1,51	50.861,11	1,52	54.157,01	1,53	56.660,70	1,50
17	Jasa Lainnya	95.262,72	3,23	101.375,00	3,23	107.450,55	3,21	114.818,63	3,23	122.878,30	3,26
Total		**2.947.644,18**	**100**	**3.140.905,43**	**100,00**	**3.343.965,58**	**100**	**3.551.029,44**	**100**	**3.766.968,80**	**100**

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2017

Tabel II - 19
Laju Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB ADHB dan ADHK Kota PayakumbuhTahun 2012 - 2016

No	Lapangan Usaha	2012		2013		2014		2015		2016	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,22	4,43	10,94	3,30	13,91	4,83	6,44	3,24	5,88	2.51
2	Pertambangan & penggalian	10,30	7,19	17,72	7,31	21,85	3,99	12,92	4,61	5,55	3,66
3	Industri Pengolahan	8,61	6,64	6,32	4,68	7,02	5,87	6,91	1,98	10,31	7,24
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-7,84	6,44	4,03	3,23	24,21	8,34	34,65	1,78	26,54	10.62
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,71	3,30	-3,27	3,50	0,93	-0,02	9,79	3,15	6,65	1,31
6	Konstruksi	12,11	7,55	14,29	6,17	14,99	9,27	14,91	9,16	8,28	7,56
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,65	6,89	12,39	8,96	10,95	5,82	10,03	5,15	10,50	4,81
8	Transportasi dan Pergudangan	6,28	5,21	11,67	5,65	14,16	6,88	8,03	8,15	6,44	4,95
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	13,86	6,74	16,01	6,23	17,25	8,09	19,75	8,40	22,42	13.35
10	Informasi dan Komunikasi	15,73	12,88	5,03	9,53	14,55	10,25	1,62	9,88	11,08	9,93
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	15,86	9,29	14,72	8,12	17,35	7,17	9,82	3,94	11,48	8,05
12	Real Estat	8,15	5,11	12,70	5,66	15,94	5,76	10,39	5,49	7,12	4,59
13	Jasa Perusahaan	15,38	7,47	11,16	5,89	11,54	6,71	11,75	5,92	9,95	5,42
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,72	2,32	8,50	2,14	8,71	1,43	-1,03	3,45	8,74	3,34
15	Jasa Pendidikan	12,05	6,60	17,66	7,45	13,82	6,02	11,89	8,69	13,83	8,01
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	17,51	9,64	13,37	7,71	12,03	7,10	6,04	6,48	7,50	4,62
17	Jasa Lainnya	9,00	4,60	17,51	6,42	12,77	5,99	9,56	6,86	12,60	7,02
Total		**12,05**	**6,62**	**11,76**	**6,56**	**12,88**	**6,47**	**8,76**	**6,19**	**9,64**	**6,08**

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2017

2.3.2 Laju Inflasi

Inflasi adalah meningkatnya harga secara umum dan terus menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh faktor permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) barang yang beredar di pasar. Berbagai faktor yang menyebabkan kenaikan harga secara menyeluruh antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, tingginya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, atau ketidaklancaran distribusi barang. Tingginya inflasi berdampak pada penurunan daya beli masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Laju inflasi Kota Payakumbuh pada tahun 2012-2016 mengacu pada angka inflasi ibu kota Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Padang.

Tabel II - 20
Perbandingan Tingkat Inflasi Kota Payakumbuh, Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2012-2016

Tahun	Payakumbuh	Sumbar	Indonesia
2012	4,16	4,16	4,3
2013	10,87	10,87	8,38
2014	11,9	11,58	8,36
2015	1,08	1,08	3,35
2016	4,17	4,89	3,02
Rata-rata	**6,44**	**6,52**	**5,48**

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2017

Pada Tabel II-20 terlihat bahwa angka inflasi Kota Payakumbuh selama periode 2012–2016 cenderung sama dengan Provinsi Sumatera Barat. Akan tetapi, dibandingkan dengan angka inflasi nasional, laju inflasi Kota Payakumbuh secara rata-rata lebih tinggi dari nasional. Berdasarkan informasi dari tabel tersebut terlihat bahwa untuk tahun 2015 laju inflasi mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini muncul karena lebih terjaganya pasokan pangan, tidak adanya pelemahan daya beli masyarakat sehingga tidak dibutuhkannya kebijakan kenaikan harga. Pada tahun 2016 tingkat inflasi daerah meningkat menjadi 4,17% Hal ini dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat yang meningkat, dan perbaikan daya beli masyarakat.

2.3.3 PDRB per-Kapita

PDRB per-kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. PDRB per-kapita merupakan PDRB per jumlah penduduk di suatu daerah.

Tabel II - 21
PDRB Per Kapita 2016 Kota Payakumbuh Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga KonstanTahun 2012 -2016(2000 = 100)

No	Tahun	PDRB (juta rupiah)		Jumlah Penduduk	PDRB per kapita (ribu rupiah)	
		ADHB	ADHK		ADHB	ADHK
1	2012	3.313,64	2.947,64	121,502	27.272,32	24.260,05
2	2013	3.703,34	3.140,91	123,654	29.949,18	25.400,76
3	2014	4.180,16	3.343,97	125,690	33.257,69	26.604,87
4	2015	4.546,30	3.551,03	127,826	35.566,30	27.780,13
5	2016	4.984,53	3.767,82	129,807	38.390,72	29.026,31

Sumber: PDRB Kota Payakumbuh Tahun 2016

Pada tahun 2016, PDRB per-kapita Kota Payakumbuh bernilai 35,02 juta rupiah menurun 1,53% disbanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,94%. Berdasarkan tabel II-21, PDRB per-kapita Kota Payakumbuh setiap tahunnya meningkat baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan, kecuali pada tahun 2016, dimana PDRB per-kapita turun dikarenakan pertambahan PDRB tidak sebanding dengan pertambahan jumlah penduduk.

2.3.4 Indeks Gini

Koefisien gini (rasio gini)digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan melalui perbandingan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Indeks gini menunjukkan ketimpangan pendapatan yang ada masyarakat, dimana dapat digunakan untuk menunjukkan kemakmuran masyarakat.

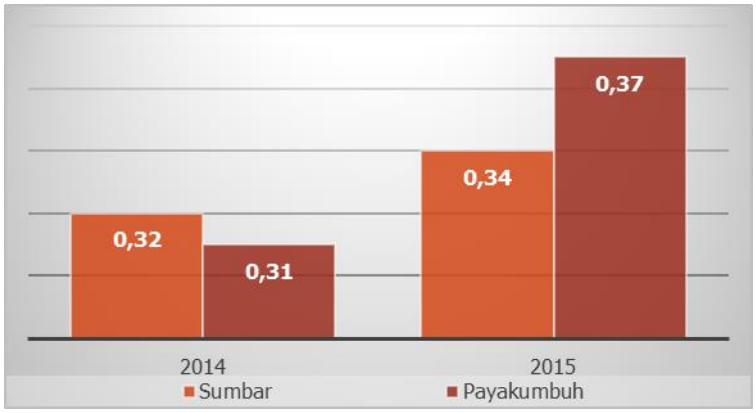

Bagan II - 4
Perbandingan Indeks Gini Provinsi Sumbar dan Kota Payakumbuh Tahun 2014 - 2015
Sumber: Indikator Sosial Ekonomi, 2016

Tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Payakumbuh relatif rendah jika dibandingkan dengan provinsi yang berada pada angka 0,31 pada tahun 2014. Sedangkan untuk tahun 2015, Indeks Gini Kota Payakumbuh lebih meningkat menjadi 0,37. Hal ini dipahami bahwa terj. Akan tetapi lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata provinsi, Satu hal yang menjadi catatan angka 0,3 s.d. 0,5 sudah menunjukkan tingkat

ketimpangan yang sedang, maka diperlukan kebijakan daerah untuk melengkapi kebijakan nasional dalam mengurangi laju ketimpangan tersebut.

2.3.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian pembangunan daerah dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Tabel II - 22
Capaian Indikator HDI Kota PayakumbuhTahun 2012 - 2016

No.	Indikator HDI	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pendidikan					
	▪ Harapan Lama Sekolah	13,87	14,13	14,80	14,21	14,22
	▪ Rata-rata lama Sekolah (Thn)	9,83	9,3	9,96	10,29	10,30
2.	Kesehatan					
	▪ Angka Harapan Hidup (Thn)	72,43	72,43	72,43	72,93	73,03
3.	Ekonomi					
	▪ Pengeluaran Riil/ Kapita (Rp/bln)	640,510	643,670	646,09	749,01	749,01
4.	Human Developmen Index (IPM)	75,89	76,34	76,49	77,42	77,56

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2013 s.d 2017

Dari data diatas terlihat bahwa selama rentang waktu 5 tahun terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI) dari angka 75,89 pada tahun 2012 menjadi 77,56 pada tahun 2016, hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3.6 Angka Melek Huruf

Angka melek huruf didefinisikan sebagai persentase penduduk 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Payakumbuh semakin meningkat setiap tahunnya, dan mendekati 100%.

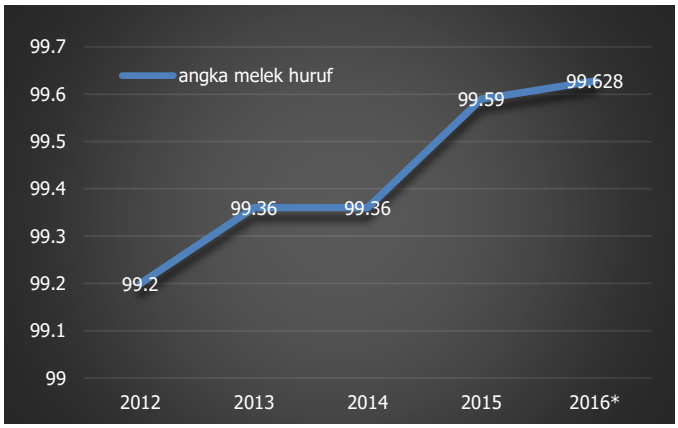

Bagan II - 5
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2012 - 2016
Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2013 – 2017

2.3.7 Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk merupakan salah satu indikator dalam pembangunan bidang kesehatan, dimana semakin rendah capaian angka persentase balita gizi buruk maka semakin baik kinerja bidang kesehatan di Kota Payakumbuh. Gizi buruk merupakan kondisi kurang gizi yang disebabkan rendahnya konsumsi energi dan protein (KEP) dalam makanan sehari-hari. Persentase Balita Gizi Buruk dari tahun 2012 s.d. 2016 cenderung mengalami penurunan, yang mengindikasikan program/ kegiatan yang dilaksanakan sudah cukup efektif untuk meningkatkan kesadaran para ibu dari anak balita untuk memperhatikan keadaan gizi anak mereka, sekaligus mencerminkan semakin membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat kota Payakumbuh. Apabila dibandingkan dengan target pada RPJMD tahun 2016 sebesar <3% maka target ini sudah tercapai.

Tabel II - 23
Balita Gizi Buruk Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Balita Gizi Buruk (%)	0,6	0,1	0,6	0,11	0,08

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2017

2.3.8 Tingkat Partisipasi Angka Kerja

Angka TPAK digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang bekerja atau mencari pekerjaan. Untuk tahun 2016 terdapat 900 orang Pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.Angka TPAK dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi dan demografis; diantaranya jenis kelamin, umur, dan tingkat pendidikan.

Tabel II - 24
Perkembangan Data Ketenagakerjaan Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2016

Kegiatan	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Angkatan Kerja	**56.569**	**57.770**	**61.323**	63.017	63.017
Bekerja	52.736	53.654	57.421	58.562	58.562
Penganggur	3.833	4.116	3.902	4.455	4.455
Bukan Angkatan Kerja	**27.658**	**28.774**	**27.074**	**27 205**	**27 205**
Sekolah	6.811	6.504	9.727	7.776	7.776
Mengurus Rumah Tangga	13.583	16.856	13.412	15.019	15.019
Lainnya	20.847	22.279	3.935	4.410	4.410
Penduduk Usia Kerja	**84.227**	**86.544**	**88.397**	**90.222**	**90.222**
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	**67,16**	**66,75**	**69,37**	**69,85**	**69,85**
Tingkat Penganggur Terbuka (%)	**6,77**	**7,12**	**6,36**	**7,07**	**7,07**
Tingkat Kesempatan Kerja (%)	**93,22**	**92,87**	**93,64**	**92,93**	**92,93**

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2013 - 2017

2.3.9 Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio Penduduk yang Bekerja atau Tingkat Kesempatan Kerja dapat dihitung dari jumlah penduduk yang bekerja dibanding dengan angkatan kerja dalam satu

wilayah. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka jumlah angkatan kerja juga ikut meningkat. Tingkat Kesempatan Kerja berfluktuasi tergantung dengan naik turunnya jumlah penduduk yang bekerja dan jumlah angkatan kerja.

Tabel II - 25
Rasio Penduduk Bekerja Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Angkatan Kerja (orang)	56.569	57.720	61.323	63.017	64.714
2.	Penduduk Yang Bekerja (orang)	52.736	53.654	57.421	58.562	60.184
3.	Rasio (%)	93,22	92,87	93,64	92,93	92,93

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2013 – 2017 (diolah)

2.3.10 Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Payakumbuh dalam beberapa tahun terakhir sudah memperlihatkan indikasi keberhasilan. Pada tahun 2012 dengan jumlah penduduk 122.450 jiwa, tingkat kemiskinan Kota Payakumbuh sebesar 9,00% atau turun sebesar 1,09% Pada tahun 2013 dengan jumlah penduduk 123.654 jiwa, Tingkat kemiskinan Kota Payakumbuh sebesar 7,81% atau turun sebesar 1,19% Sedangkan pada tahun 2014 dengan jumlah penduduk 125.690 jiwa, tingkat kemiskinan Kota Payakumbuh sebesar 7,01% atau turun sebesar 0,8% dan pada tahun 2015 tingkat kemiskinan Kota Payakumbuh sebesar 6,67%, Penurunan tingkat Kemiskinan di Kota Payakumbuh dari tahun 2012 sampai tahun 2016 adalah sebesar 3,42%

Tabel II - 26
Perkembangan Data Kemiskinan Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah penduduk	Jiwa	122.450	123.564	125.690	127.826	129.807
2	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	10.800	9.700	8.840	8.510	8.350
3	Jumlah KK Miskin	KK	2.226	1.940	2.344	2.300	2.257
4	Tingkat Kemiskinan	%	9,00	7,81	7,01	6,67	6,46

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2017

Pada tahun 2016, hasil perhitungan Susenas yang dilakukan oleh BPS, menggambarkan bahwa terjadi penurunan jumlah penduduk miskin Kota Payakumbuh sebanyak 43 orang dari tahun 2015 menjadi 2.257 orang atau terjadi penurunan 6,67% menjadi 6,46%.

Pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor yang terjadi pada tahun 2012 - 2016 mendorong terciptanya lapangan kerja baru, idealnya pertumbuhan lapangan kerja baru dapat lebih tinggi dari pertumbuhan angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran akan terkurangi setiap tahunnya. Angka pengangguran merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan kemandirian di Kota Payakumbuh. Pengangguran yang terjadi di Kota Payakumbuh disebabkan oleh angkatan kerja yang pada umumnya tenaga kerja non formal, kurang terdidik dan minat generasi muda bekerja dibidang pertanian masih rendah. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Kota.

Tabel II - 27
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Payakumbuh Tahun 2012- 2016

No	Tahun	Tingkat Pengangguran (%)
1	2012	7,42
2	2013	7,16
3	2014	6,36
4	2015	7,07
5	2016	7,07

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Payakumbuh, 2016

Untuk tahun 2015 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Payakumbuh sebesar 7,07%, Ini berarti bahwa dalam 100 orang pencari kerja yang tergolong angkatan kerja terdapat sekitar 7 - 8 orang yang sedang mencari kerja/ mempersiapkan usaha atau tidak mencari kerja karena putus asa. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Payakumbuh tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012 dari 7,42% menjadi 7,16% Kondisi ini bertahan pada tahun 2015 dan 2016 dengan kisaran dan 7,07%.Pemerintah Kota Payakumbuh dalam rencana jangka panjang telah memformulasi kebijakan dan berkomitmen penuh bahwa pembangunan sumber daya manusia merupakan kunci utama bagi pengentasan persoalan pengangguran yang perlu terus ditangani melalui perbaikan kualitas pendidikan. Selain itu peningkatan kapasitas, kualitas, produktifitas dan daya saing angkatan kerja perlu terus dipacu agar menghasilkan tenaga kerja yang handal, terlatih dan siap bersaing serta mampu menciptakan lapangan kerja baru ditengah-tengah masyarakat.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang mencakup layanan urusan wajib dan urusan pilihan.

2.4.1 Layanan Urusan Wajib Dasar

2.4.1.1 Urusan Pendidikan

Pembangunan kesejahteraan sosial terkait dengan peningkatan pembangunan sumber daya manusia. Menurut ahli sumber daya manusia Priyono (2009) dan Elfindri (2014), pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Secara umum dapat dikatakan kualitas sumber daya manusia sejalan dengan kualitas dan tingkat pendidikannya. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Kota Payakumbuh, maka pendidikan selalu dijadikan prioritas pembangunan daerah.

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Tabel II - 28
Perkembangan Data PAUD Formal (TK dan RA) Jumlah Lembaga, Murid, Guru Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2016

No	PAUD Formal	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah TK/RA (Lembaga)	50	50	50	53	53
2.	Jumlah Guru (Orang)	313	304	300	334	317
3.	Jumlah Murid (Orang)	3.026	3.099	3.094	3.090	2.988
4.	Jumlah Rombongan Belajar	172	186	174	198	196

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka, 2017; Profil Pendidikan Kota Payakumbuh 2015 – 2016

2. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase penduduk yang masih sekolah menurut kelompok umur pada setiap jenjang pendidikan terhadap penduduk berdasarkan kelompok usia sekolah. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan tidak hanya pada daerah itu saja tetapi juga ada partisipasi daerah lain, dimana ada penduduknya yang sekolah pada daerah tersebut. Berdasarkan bagan II–7 dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Kasar Kota Payakumbuh melebihi 100%. Hal ini disebabkan karena banyaknya penduduk usia sekolah berasal dari Kabupaten/Kota lainnya. Penyebab lainnya adalah karena banyak terdapat anak yang sekolah di tingkat pendidikan dasar (SD/SMP/SMA) yang umurnya diluar tingkatan usia sekolah tersebut. Kedua kondisi itulah yang menyebabkan APK di Kota Payakumbuh diatas 100%.

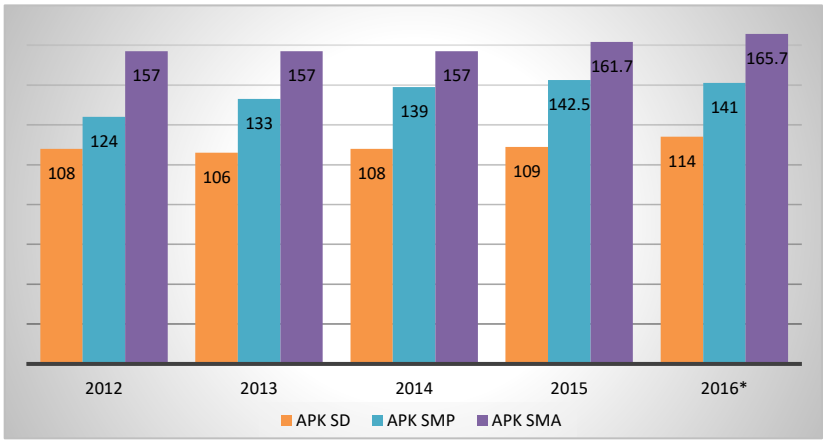

Bagan II - 6
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2012 - 2016
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh 2017

3. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Angka Pendidikan yang ditamatkan merupakan persentase perbandingan jumlah penduduk yang menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah baik negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ ijazah. APT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, dan untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah. Untuk

Kota Payakumbuh selama periode tahun 2012 - 2016, nilai APT mengalami peningkatan dari tahun ketahun.

Tabel II - 29
Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Kota Payakumbuh Tahun2012 - 2016

No	Tingkat Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Tidak punya ijazah	18,05	18,39	18,39	10,90	12,14
2	SD/MI	20,06	22,72	19,50	16,15	16,30
3	SMP/MTs	20,45	18,16	17,26	19,68	18,15
4	SMA/SMK/MA	29,75	30,38	33,10	36,74	37,50
5	Perguruan Tinggi	11,68	10,35	11,23	16,53	15,62

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2017

4. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan penduduk yang masih sekolah menurut kelompok umur terhadap kelompok usia sekolah yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. APM Kota Payakumbuh cenderung naik dari tahun 2012-2016. Dari Bagan II-8, APM Kota Payakumbuh mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik tingkat SD, SMP maupun SMA dan sederajat.

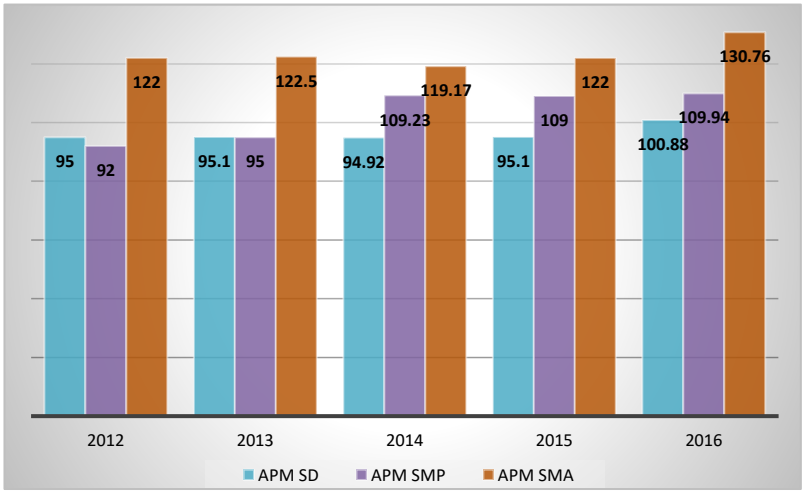

Bagan II - 7
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2012 - 2016
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2017

5. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan layanan pendidikan yang berkualitas. APS diartikan jumlah penduduk yang masih sekolah pada masing-masing kelompok usia sekolah dibagi dengan jumlah penduduk di masing-masing kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APS Kota Payakumbuh cenderung naik dari tahun ke tahun, dan yang tertinggi adalah APS untuk Sekolah dasar diikuti oleh SMP dan SMA.

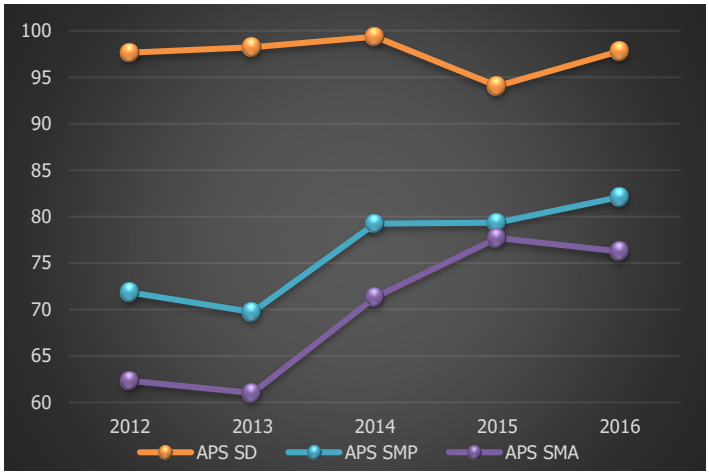

Bagan II - 8
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2016
Sumber: BPS Kota Payakumbuh, 2017

6. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah menunjukkan jumlah dan persentase siswa untuk setiap tingkatan pendidikan (SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK) yang tidak menyelesaikan pendidikannya. Indikator angka putus sekolah menggambarkan seberapa besar angka putus sekolah pada setiap jenjang pendidikan.

Tabel II - 30
Angka Putus Sekolah Pada Pendidikan Dasar dan Menengah
Tahun 2012 - 2016

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	**SD/MI**					
1.1.	Jumlah Murid SD/MI (Orang)	17.198	17.349	17.592	18.005	17.926
1.2.	Jumlah Murid Putus Sekolah (Orang)	16	14	2	5	2
1.3.	Persentase Angka Putus Sekolah	0,09	0,08	0,01	0,03	0,01
2	**SMP/MTs**					
2.1.	Jumlah Murid SMP/MTs (Orang)	8.467	9.317	9.740	9.964	10.233
2.2.	Jumlah Murid Putus Sekolah (Orang)	75	56	65	67	20
2.3.	Persentase Angka Putus Sekolah	0,88	0,60	0,67	0,67	0,19
3	**SMA/MA/SMK**					
3.1.	Jumlah Murid SMA/MA/SMK (Orang)	11.064	11.199	11.142	11.592	12.255
3.2.	Jumlah Murid Putus Sekolah (Orang)	133	86	139	193	50
3.3.	Persentase Angka Putus Sekolah	1,20	0,7	1,25	1,67	0,41

Sumber: Profil Pendidikan Kota Payakumbuh, 2016

7. Angka Kelulusan

Angka kelulusan merupakan salah satu indikator pembangunan bidang pendidikan. Semakin tinggi angka kelulusan siswa pada masing-masing jenjang pendidikan, maka semakin baik kinerja capaian bidang pendidikan. Namun demikian,

angka kelulusan 100% belum menjamin kualitas pendidikan semakin baik, karena tingkat kelulusan 100% diartikan hanya telah memenuhi syarat minimum kelulusan.

Tabel II - 31
Angka Lulusan Siswa Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2012 - 2016

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	**SD/MI**					
1.1.	Peserta UN (Orang)	2.393	2.561	2.594	2.702	2.795
1.2.	Jumlah Lulusan (Orang)	2.394	2.561	2.553	2.553	2.795
1.3.	Persentase Lulusan	100	100	100	100	100
2	**SMP/MTs**					
2.1.	Peserta UN (Orang)	2.525	2.469	2.505	2.973	3.128
2.2.	Jumlah Lulusan (Orang)	2.470	2.449	2.505	2.973	3.128
2.3.	Persentase Lulusan	97,70	99,11	99,95	99,95	100
3	**SMA/MA/SMK**					
3.1.	Peserta UN (Orang)	3.133	3.337	3.118	3.118	3.514
3.2.	Jumlah Lulusan (Orang)	3.117	3.345	3.672	3.540	3.513
3.3.	Persentase Lulusan	99,48	99,81	99,74	99,74	99,97

Sumber: Profil Pendidikan Kota Payakumbuh 2015 – 2016

8. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah digunakan untuk menunjukkan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan.Disamping ketersediaan sekolah, sarana dan prasarana sekolah juga ikut mempengaruhi proses belajar mengajar di sekolah.

Tabel II - 32
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2012 - 2016

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	**SD/MI**					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	74	76	78	79	80
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	16.305	16.307	16.594	15.756	14.477
1.3.	Rasio (%)	0,004	0,005	0,005	0,005	0,006
2	**SMP/MTs**					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	21	21	23	23	24
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	6.963	6.960	7.083	7.403	6.933
2.3.	Rasio	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
3	**SMA/MA/SMK**					
3.1.	Jumlah gedung sekolah	21	22	23	23	24
3.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	7.134	7.134	7.259	7.475	6.991
3.3.	Rasio	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003

Sumber: Dinas Pendidikan, 2017; Payakumbuh dalam Angka 2013 – 2017

Tabel II - 33
Kondisi Ketersediaan Kelas dan Rombel Tahun 2016

No	Uraian	TK	RA	SD	MI	SMP	MTs
1	Ruang Kelas	178	41	668	19	270	60
	a. Kondisi Baik	155	31	605	19	248	60
	b. Kondisi Rusak Ringan	1	-	36	-	10	50
	c. Kondisi Rusak berat	2	6	15	-	1	10
	d. Bukan milik/ sewa	20	4	12	-	11	-
2	Jumlah rombel	166	30	655	20	276	70

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2017

9. Rasio Guru terhadap Murid

Rasio guru murid adalah perbandingan jumlah guru dibagi jumlah murid. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar, jumlah peserta didik yang besar akan mempengaruhi kualitas pengajaran. Oleh karena itu, dengan berkurangnya rasio guru terhadap murid diharapkan dapat menghasilkan anak didik yang berkualitas. Rasio guru murid setingkar SD/MI tahun 2016 menunjukkan angka 1:17, yang diartikan 1 orang guru mendidik lebih kurang 17 orang murid.

Tabel II - 34
Rasio Guru dan Murid Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2016

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	**SD/MI**					
1.1.	Jumlah Guru	1.006	1.043	1.037	1.050	1.062
1.2.	Jumlah Murid	17.198	17.349	17.592	18.005	17.926
1.3.	Rasio	1 : 17	1 : 17	1 : 17	1 : 17	1 : 17
2	**SMP/MTs**					
2.1.	Jumlah Guru	752	715	726	753	799
2.2.	Jumlah Murid	8.467	8.085	8.032	8.467	10.233
2.3.	Rasio	1 :11	1:11	1:11	1:11	1:13

Sumber: Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, 2016

Tabel II - 35
Kondisi Ketersediaan Guru SD Tahun Ajaran 2016/2017

No	UPTD	Jumlah Siswa	Rombel	Guru Kelas		Guru Agama			Guru Penjas		
				Tersedia	Kurang	Tersedia	Butuh	Kurang	Tersedia	Butuh	Kurang
1	UPTD Barat/ Selatan	5356	193	171	22	25	32	7	22	32	10
2	UPTD Utara/ Latina	5513	213	182	31	30	36	6	24	36	12
3	UPTD Timur	3092	123	106	17	16	21	5	13	21	8
Jumlah		**13961**	**529**	**459**	**70**	**71**	**88**	**17**	**59**	**88**	**29**

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2017

Tabel II - 36
Kondisi Ketersediaan Guru Bidang Studi Setingkat SMP Tahun 2016

No	Guru Bidang Studi Smp Negeri	Jumlah Guru PNS	Jumlah Kebutuhan Guru	Kekurangan	Kelebihan
1	PPKN	16	21	5	0
2	Agama	18	21	3	0
3	B. Indonesia	35	43	8	0
4	Matematika	38	37	0	1
5	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	34	33	0	1
6	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	39	30	0	9
7	Bahasa Inggris	32	31	0	1
8	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	14	19	5	0
9	Seni Budaya	19	21	2	0
10	Keterampilan/ TIK	9	40	31	0
11	Muatan Lokal	2	5	3	0
12	BK/BP	23	41	18	0
13	Prakarya	6	15	9	0
Jumlah		**285**	**357**	**84**	**12**

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2017

Tabel II - 37
Rekapitulasi Guru PNS dan Non-PNS Kota Payakumbuh Tahun 2016

No	Jenjang	PNS	Non PNS	Jumlah
1	TK	84	187	271
2	SD	653	428	1081
3	SMP	326	258	584
Jumlah		**1063**	**873**	**1936**

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2017

10. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Kualitas pendidikan ditentukan oleh kualitas tenaga pengajarnya. Semakin tinggi pendidikan dan kualitas guru diharapkan dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

Tabel II - 38
Jumlah Guru Yang Berkualifikasi S1/D4 Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2012 - 2016

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	**TK/RA**					
1.1.	Jumlah Guru (Orang)	313	304	136	334	317
1.2.	Guru Berkualifikasi S1/D4 (Orang)	105	107	80	221	221
1.3.	Rasio (%)	33,54	35,2	58,82	66,16	69,72
2	**SD/MI**					
2.1.	Jumlah Guru (Orang)	1.006	1.043	1.037	1.050	1.062
2.2.	Guru Berkualifikasi (Orang)	626	747	810	908	957
2.3.	Rasio (%)	62,22	71,62	78,11	86,47	90,11
3	**SLB**					

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
3.1.	Jumlah Guru (Orang)	85	87	89	115	118
3.2.	Guru Berkualifikasi (Orang)	66	68	70	99	104
3.3.	Rasio (%)	77,64	78,16	78,65	86,08	88,14
4	**SMP/MTs**					
4.1.	Jumlah Guru (Orang)	753	754	757	770	799
4.2.	Guru Berkualifikasi (Orang)	630	657	638	701	712
4.3.	Rasio (%)	83,66	87,14	84,28	91,04	89,11
5	**SMA/MA/SMK**					
5.1.	Jumlah Guru (Orang)	1.112	1.165	1.174	1.209	1.212
5.2.	Guru Berkualifikasi (Orang)	1.002	1.086	1.033	1.156	1.155
5.3.	Rasio (%)	90,11	93,22	87,99	95,6	95,23

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka, 2017; Profil Pendidikan Kota Payakumbuh, 2016

Dalam rangka meningkatkan kualifikasi guru diarahkan untuk mendapatkan sertifikasi yang bertujuan untuk meningkatan mutu pendidikan yang lebih baik.

Tabel II - 39
Jumlah Guru Bersertifikasi Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2012 - 2016

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	**TK/RA**					
1.1.	Jumlah Guru (Orang)	294	304	304	334	317
1.2.	Guru Bersertifikasi (Orang)	27	28	79	132	126
1.3.	Rasio (%)	10,62	9,21	25,98	39,5	39,75
2	**SD/MI**					
2.1.	Jumlah Guru (Orang)	961	1.043	1.043	1.050	1.062
2.2.	Guru Bersertifikasi (Orang)	81	43	504	537	540
2.3.	Rasio (%)	8,42	4,12	48,32	51,10	50,85
3	**SLB**					
3.1.	Jumlah Guru (Orang)	85	85	85	115	118
3.2.	Guru Bersertifikasi (Orang)	7	9	29	29	74
3.3.	Rasio (%)	8,23	10,59	34,62	25,22	62,71
4	**SMP/MTs**					
4.1.	Jumlah Guru (Orang)	553	754	754	770	799
4.2.	Guru Bersertifikasi (Orang)	26	13	361	414	302
4.3.	Rasio (%)	4,70	1,72	61,12	53,74	37,80
5	**SMA**					
5.1.	Jumlah Guru (Orang)	382	591	382	453	444
5.2.	Guru Bersertifikasi (Orang)	48	3	243	225	217
5.3.	Rasio (%)	12,56	0,50	66,75	49,66	48,87
6	**SMK**					
6.1.	Jumlah Guru (Orang)	550	574	550	582	590
6.2.	Guru Bersertifikasi (Orang)	38	14	321	327	334
6.3.	Rasio (%)	8,18	2,44	58,36	56,10	56,61
7	**Pengawas Sekolah**					

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
7.1.	Jumlah Pengawas (Orang)	24	27	27	34	30
7.2.	Guru Bersertifikasi (Orang)	0	13	27	34	30
73.	Rasio (%)	0	48	100	100	100

Sumber: Profil Pendidikan Kota Payakumbuh, 2016

11. Muatan Pendidikan Karakter

Hal yang juga menjadi perhatian masyarakat saat ini dalam penentuan sekolah bagi anak-anaknya adalah dalam hal muatan pendidikan karakter disekolah tersebut. Jika di telusuri memang terdapat perbedaan muatan pendidikan karakter yang ada pada sekolah negeri dan swasta tertentu. Hal ini disebabkan kewenangan dan keleluasaan sekolah swasta dalam menyusun muatan kurikulum pendidikannya.

Secara umum, pada sekolah negeri muatan pendidikan karakter dan akhlak mulia/keagamaannya relatif rendah dibanding sekolah swasta tertentu, baik dari segi materi yang diberikan, kuantitas serta metoda pelaksanaan. Hal ini disebabkan kewenangan dan keleluasaan sekolah swasta dalam menyusun materi kurikulum pendidikannya.

Tabel II - 40
Perbandingan Muatan Pendidikan Karakter/Akhlak Mulia, Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta di Kota Payakumbuh

No	Muatan/Materi	Sekolah Negeri	Sekolah Swasta	Keterangan
1	Agama			
	- Pendidikan Agama Islam	4 JP/minggu	4 JP/minggu	
	- Tahsin / Tahfilz	-	8 JP/minggu	Sekolah tertentu, ekstrakurekuler
	- Baca/tulis Al Qur'an	2 JP/minggu	2 JP/minggu	
	- Doa harian / hadist	-	2 JP/minggu	
	- Zikir Almatura	-	1 JP/minggu	
2	Pembiasaan Karakter/Akhlak Mulia			
	- Sholat Berjamaah (Zuhur)	1 x /minggu (berganti kelas)	Setiap hari (5x/minggu)	
	- Sholat Berjamaah (Ashar)	1 x /minggu (berganti kelas)	Setiap hari (5x/minggu)	
	- Sholat Duha	1 x /minggu (berganti kelas)	Setiap hari (5x/minggu)	
	- Adab Islami	NA	Setiap hari	Di pantau oleh guru /teman
	- Puasa Sunnah	-	2 x /bulan	Senin/Kamis
	- Berdoa sebelum/ sesudah belajar	Setiap hari	Setiap hari	
	- Mengucapkan salam keluar/masuk ruangan	NA	Setiap hari	
3	KEMANDIRIAN / KEPEMIMPINAN			
	- Out Bond	-	1x/semester	
	- Malam pembinaan Iman & Taqwa	-	1x/semester	
	- Kunjungan edukatif	1x/semester	1x/semester	

No	Muatan/Materi	Sekolah Negeri	Sekolah Swasta	Keterangan
	- Kunjungan ke rumah (home visit)	1x/semester	1x/semester	
	- Muhaddaroh	1x/semester	2x/bulan	
	- Market day	-	2x/bulan	
4	Evaluasi / kontrol Akhlak / karakter			
	- Pengisian buku penghubung/kontrol amalan di rumah/ sekolah	Belum setiap hari	Setiap hari	Di cek oleh guru kelas/walas
	- Kontrol guru	Belum dinilai	Dinilai setiap minggu	Nilai mingguan
	- Kontrol orang tua	Belum Optimal	Dinilai setiap minggu	
	- Kontrol Kepala Sekolah	Belum Optimal	Setiap Bulan	
5	Kejujuran			
	Kantin Jujur Sehat	Belum Optimal	Setiap hari	-Kontrol guru -Laporan ke Kepala sekolah
6	Pramuka	1/Minggu	1/Minggu	Ekskul Wajib
7	Parenting	1/Tahun	1/Bulan	
8	Literasi	2 JP/minggu	2 JP/minggu	Ditambah Ekskul
9	Olah raga	4 JP/minggu	4 JP/minggu	Ditambah Ekskul
10	Seni budaya	4 JP/minggu	4 JP/minggu	Ditambah Ekskul

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2017

12. Sarana dan Prasarana Sekolah

Tabel II - 41
Data Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Negeri/Swasta Kota Payakumbuh Tahun 2016

No	Sekolah Dasar/ Kecamatan	Jumlah siswa	Jumlah rombel	Jmlh lokal	Ruang Belajar		Ruang Kepsek			Ruang Guru			Sanitasi WC/KM			Mobiler yang dibutuhkan				Pagar (m)	Paving block (m)	Rumah dinas
					Rusak Brt	Rusak Sdg	Ada/ Tidak	Rusak Brt	Rusak Sdg	Ada/ Tidak	Rusak Brt	Rusak Sdg	Ada	Tidak	kebutuhan	Meja mrd	Kursi mrd	Lemari kls	Papan tulis			
1	SD Kec. Lamposi Tigo Nagori	892	38	39	7	3	0	0	1	0	0	1	39	3	42	246	438	18	25	188	350	19
2	SD Kec. Payakumbuh Barat	4.518	138	137	14	23	16		4	24	2	5	120	21	143	896	1.763	81	62	2.646	3.933	47
3	SD Kec. Payakumbuh Utara	6.446	268	221	48	69	25	3	4	30	2	7	166	38	222	1.637	3.387	123	123	1.182	2.519	36
4	SD Kec. Payakumbuh Selatan	1.338	48	48	4	10	0	0	0	0	0	0	36	3	45	295	556	28	26	376	1.073	20
5	SD Kec. Payakumbuh Timur	3.323	124	136	16	6	14	1	1	17	0	1	116	6	130	845	1571	104	74	1.476	3.390	73
Jumlah		**16.517**	**616**	**581**	**89**	**111**	**55**	**4**	**10**	**71**	**4**	**14**	**477**	**71**	**582**	**3.919**	**7.715**	**354**	**310**	**5.868**	**11.265**	**195**

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2017

Tabel II - 42
Data Sarana dan Prasarana SMP Negeri/Swasta Kota Payakumbuh Tahun 2016

No	Sekolah Dasar/ Kecamatan	Jumlah siswa	Jumlah rombel	Jmlh lokal	Ruang Belajar		Ruang Kepsek			Ruang Guru			Sanitasi WC/KM			Mobiler yang dibutuhkan				Pagar (m)	Paving block (m)	Rumah dinas
					Rusak Brt	Rusak Sdg	Ada/ Tidak	Rusak Brt	Rusak Sdg	Ada/ Tidak	Rusak Brt	Rusak Sdg	Ada	Tidak	kebutuhan	Meja mrd	Kursi mrd	Lemari kls	Papan tulis			
1	SMP Negeri	5.517	194	186	23	54	10	1	4	9	2	3	110	116	216	44	0	10	0	1	1	5
2	SMP Swasta	1.705	64	54	3	8	5	0	1	5	0	2	26	11	37	3	0	4	0	0	0	3
Jumlah		**16.517**	**7.222**	**258**	**0**	**26**	**62**	**15**	**1**	**5**	**14**	**2**	**5**	**136**	**127**	**253**	**47**	**0**	**14**	**0**	**1**	**1**

Sumber: Dinas PendidikanKota Payakumbuh, 2017

13. Akreditasi Sekolah

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan akreditasi sekolah, karna jika rata-rata sekolah telah berakreditasi baik maka diharapkan secara sarana prasarana, kurikulum dan sistim pembelajaran telah berkualitas.

Tabel II - 43
Data Akreditasi Sekolah Dasar dan Menengah Kota Payakumbuh
Tahun 2012 - 2016

No	Uraian*	2012	2013	2014	2015	2016
1	**Sekolah Dasar**	**73**	**75**	**76**	**76**	**76**
	Akreditasi A	25	26	32	36	54
	Akreditasi B	11	12	14	15	15
	Akreditasi C	1	1	1	1	1
	Belum Terakreditasi	36	36	29	24	6
	Persen SD terakreditasi A	34,27%	34,67%	42,10%	47,37%	71,05%
2	**SMP**	**13**	**15**	**15**	**15**	**18**
	Akreditasi A	-	1	3	6	10
	Akreditasi B	-	-	-	1	1
	Akreditasi C	-	-	-	1	1
	Belum Terakreditasi	13	14	12	7	6
	Persen SD terakreditasi A	0	6,67%	20%	40%	55,5%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2017

*Data yang disajikan adalah kondisi sekolah swasta dan negeri yang terakreditasi, tidak termasuk sekolah MI dan MTs.

2.4.1.2 Urusan Kesehatan

1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi dilihat dari kasus kematian bayi, balita dan ibu melahirkan. Kondisi di Kota Payakumbuh pada tahun 2016, masih terdapat kematian bayi sebesar 13 kasus dan angka kematian balita sebesar 5 kasus, sedangkan kematian ibu melahirkan tidak ada.

Tabel II - 44
Perkembangan Kasus Kematian Bayi, Balita dan Ibu Melahirkan
Tahun 2012 - 2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Kasus Kematian Bayi	21	18	27	27	19
Kasus Kematian Balita	5	0	2	3	5
Kasus Kematian Ibu Melahirkan	3	1	4	3	2

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2017

2. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Pada tahun 2016 posyandu di Kota Payakumbuh berjumlah 165 buah dengan rincian Posyandu Madya sebanyak 1 buah, posyandu Purnama sebanyak 82 buah dan

posyandu Mandiri sebanyak 82 buah. Sedangkan untuk jumlah balita di Kota Payakumbuh tahun 2016 sebanyak 13.914 jiwa. Sehingga dapat dihitung rasio posyandu per satuan balita adalah 1:84, yang dipahami bahwa setiap Posyandu melayani rata-rata 84 orang anak balita.

Tabel II - 45
Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2012 - 2016 Kota Payakumbuh

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah posyandu	165	165	165	165	165
2.	Jumlah balita	12.612	13.816	13.915	13.936	13.914
3.	Rasio	1:75,8	1:74,5	1:78	1:84	1:84

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2017

Tabel II - 46
Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan
Tahun 2016 Kota Payakumbuh

No	Kecamatan	Jumlah posyandu	Jumlah balita	Rasio
1	Kecamatan Payakumbuh Timur	38	2.894	1:76
2	Kecamatan Payakumbuh Barat	55	5.441	1:99
3	Kecamatan Payakumbuh Selatan	18	1.128	1:63
4	Kecamatan Payakumbuh Utara	21	3.425	1:82
5	Lamposi Tigo Nagori	33	1.026	1:86
	Jumlah	**165**	**13.914**	

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2017

3. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per-satuan Penduduk

Untuk tahun 2016, Puskesmas di Kota Payakumbuh berjumlah 8 unit, dan apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk maka memiliki rasio 1:16.226. Kondisi ini diartikan bahwa satu Puskesmas melayani 16.226 jiwa. Dibandingkan dengan Standar Pelayanan Nasional maka angka ini jauh lebih tinggi, karena secara nasional satu Puskesmas diharapkan mampu melayani 30.000 penduduk, sehingga lima tahun kedepan jumlah puskesmas yang ada diperkirakan di Kota Payakumbuh masih ideal untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat Payakumbuh. Untuk membantu Puskesmas memberikan pelayanan kepada masyarakat, terdapat puskesmas pembantu di Kota Payakumbuh sebanyak 23 unit, yang jika dibandingkan dengan jumlah kelurahan sebanyak 48 kelurahan maka rata-rata satu Puskesmas pembantu melayani dua kelurahan sehingga cakupan layanan puskesmas pembantu sudah melayani hampir seluruh kelurahan di Kota Payakumbuh. Sedangkan jumlah rumah sakit di kota Payakumbuh mencapai 3 (tiga) unit yaitu Rumah sakit Pemerintah RSUD Dr Adnaan WD (Rumah Sakit Umum Daerah), RSI Ibnu Sina, Rumah Sakit Bedah dengan rasio 1:40.817.

Tabel II - 47
Data Jenis Layanan FKTP I dan FKTP II di Puskesmas

No	Jenis-Jenis Pelayanan	Jumlah
1	Poli Umum	8 unit
2	Poli Gigi	8 unit
3	Poli KIA	8 unit
4	Poli KB	8 unit
5	Laboratorium	8 unit
6	Imunisasi	8 unit
7	Pojok Gizi	8 unit
8	Pojok ASI	8 unit
9	Pojok Oralit	8 unit
10	Klinik Sanitasi	8 unit
11	Klinik Rokok	4 unit
12	Klinik IVA	8 unit
13	Klinik Kriotherapy	2 unit
14	Klinik Pijat Bayi	2 unit

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2017

Belum optimalnya kualitas pelayanan yang diberikan di Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama disebabkan karena masih belum terpenuhinya atau tersedianya Sumber Daya Manusia dalam hal ini tenaga medis dan paramedis, sedangkan jika kita lihat pada layanan yang diberikan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut FKTL maka ketersediaan sarana dan prasarana di FKTL menjadi salah satu masalah yang menyebabkan belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan yang ada.

4. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit adalah institusi perawatan kesehatan profesional yang melayani melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen. Jumlah rumah sakit sangat mempengaruhi layanan kesehatan yang diterima oleh penduduk di suatu daerah, karena semakin banyak keberadaan rumah sakit pada suatu daerah maka akan semakin banyak masyarakat yang dapat terlayani, hal ini tentu diharapkan akan berbanding lurus juga dengan kualitas kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Berikut disajikan jumlah rumah sakit yang ada di Kota Payakumbuh beserta rasionya jika dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Tabel II - 48
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per-jumlah Penduduk
Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Rumah Sakit Swasta	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan khusus lainnya	1	1	1	2	2
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI	0	0	0	0	0
4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	1	1	1	1	1
5.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	3	3	3	4	4
6.	Jumlah Penduduk	122.450	124.964	125.690	127.826	129.807
7.	Rasio	1:61.225	1 : 62.482	1:41.897	1:31.957	1:32.451

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka, 2017; Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2017

5. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Jumlah dokter umum dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia, termasuk di Kota Payakumbuh, permasalahan tersebut diperburuk dengan tidak meratanya kualitas dokter.

Tabel II – 49
Jumlah Dokter Menurut Kecamatan di Luar Rumah Sakit Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter		Rasio	
			Dr	Drg	dr	Drg
1	Payumbuh Timur	50.367	4	3	1:6.927	1:9.236
2	Payakumbuh Barat	27.954	7	5	1:4.945	1:9.890
3	Payakumbuh Selatan	31.082	2	1	1:2.091	1:10.453
4	Payakumbuh Utara	10.635	3	2	1:875	1:10.635
5	Lamposi Tigo Nagori	9.769	4	1	1:3.195	1:9.585
Jumlah		**129.807**	**20**	**12**	**1:2.283**	**1:8.522**

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2017

6. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan besarnya ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Untuk tenaga para medis (bidan,perawat,perawat gigi) pada tahun 2016 berjumlah sebanyak 105 orang, maka rasio tenaga medis per satuan penduduk pada tahun 2016 adalah 1:1.236.

Tabel II - 50
Jumlah Tenaga Para Medis (Bidan, Perawat, Perawat Gigi) di Luar Rumah Sakit Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Tenaga Para Medis	97	95	106	107	102
2.	Jumlah Penduduk	122.450	124.964	125.690	127.826	129.807
3.	Rasio	1:1.259	1:1.315	1:1.186	1:1.195	1:1.236

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka, 2017; Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2017

Tabel II - 51
Rencana Kebutuhan Tenaga Kesehatan Puskesmas Tahun 2016

No	Jenis SDM	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
1	Dokter Umum	10	35	25
2	Dokter Gigi	2	10	8
3	Perawat	27	106	79
4	Bidan	60	90	30
5	Promkes	9	35	26
6	Kesling	6	35	29
7	Teknologi Laboratorium	6	12	6

No	Jenis SDM	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
8	Tenaga Gizi	5	19	14
9	Kefarmasian	7	25	18
10	Administrasi	3	15	12
11	Pekarya (sopir,kebersihan, satpam	9	14	5
12	Perawat Gigi	11	27	16
13	Rekam Medis	8	11	3
	Jumlah	**163**	**434**	**271**

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2017

Berdasarkan tabel II-51 di Puskesmas se-Kota Payakumbuh jika dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk masih dibutuhkan sebanyak 271 lagi tenaga kesehatan diberbagai bidang.

7. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Komplikasi dan Kematian ibu maternal dan bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa persalinan. Hal ini disebabkan pertolongan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompentensi kebidanan. Berdasarkan profil kesehatan tahun 2016 menunjukkan bahwa dari 2.759 persalinan, yang ditolong oleh tenaga kesehatan adalah sebanyak 2.732 (91,8%). Hal ini menunjukkan bahwa ibu hamil telah memanfaatkan keberadaan tenaga kesehatan di Kota Payakumbuh.

8. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization

Cakupan kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) pada tahun 2016 telah mencapai 95,8%; yakni 46 kelurahan dari 48 kelurahan yang ada.

9. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Dari pelaksanaan Posyandu maka diharapkan akan terjadi peningkatan kesehatan dan tumbuh kembang bayi dan balita, dan diharapakan akan terjaring bayi dan balita dengan keadaan gizi kurang atau buruk. Jika dilihat pada tahun 2016 ditemukan 11 orang bayi dan balita dengan gizi buruk, dan semuanya telah mendapat penanganan sesuai dengan standar tata laksana gizi buruk adalah 100%.

10. Cakupan Kunjungan Bayi

Pada Tabel II-45 telah disampaikan jumlah dan rasio perbandingan pelayanan posyandu di Kota Payakumbuh, dari 165 buah Posyandu yang ada di Payakumbuh jika dibandingkan dengan jumlah balita yang ada sebanyak 13.914 orang pada tahun 2016 maka didapat perbandinngan 1:84 orang yang berarti satu Posyandu akan melayani sampai 84 orang balita. Jika dilihat dari data pada tahun 2016 maka cakupan kunjungan bayi pada tahun 2016 adalah 90.22%.

11. Cakupan Puskesmas

Jumlah puskesmas di Kota Payakumbuh tahun 2016 adalah sebanyak 8 (delapan) unit dan jumlah kecamatan di Kota Payakumbuh adalah sebanyak 5

kecamatan, sehingga cakupan puskesmas sudah tercapai sebesar 96,68%. Capaian ini sudah jauh melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 57%

12. Cakupan Puskesmas Pembantu

Jumlah puskesmas pembantu di Kota Payakumbuh adalah sebanyak 23 unit dengan jumlah seluruh kelurahan adalah sebanyak 48 kelurahan, sehingga cakupan puskesmas pembantu pada tahun 2016 adalah sebesar 0,51 (51%), sehingga target sebesar 65% pada tahun 2016 belum tercapai.

13. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Tabel II - 52
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

No	Permasalahan Pembangunan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Capaian 10 Indikator Pola Hidup Bersih dan Sehat/PHBS	25,70%	25,70%	27,50%	36,10%	48,33%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2017

Berdasarkan tabel II-53 dapat dipahami walaupun terjadi peningkatan setiap tahunnya pada capaian PHBS, tetapi nilai tersebut masih diasumsikan rendah. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam Rumah Tangga ber-PHBS, karena dari 10 indikator PHBS Rumah Tangga apabila salah satu indikator tidak terpenuhi maka belum bisa dikatakan rumah tangga ber-PHBS. Indikator tersebut adalah merokok di dalam rumah, makan buah dan sayur, dan aktivitas fisik.

14. Prevalensi Penyakit

Tabel II - 53
10 Penyakit Terbanyak di Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2016

No	Jenis Diagnosis Penyakit	Jumlah Kunjungan				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	ISPA	20.998 (1)	26.888 (1)	21.684 (1)	25.782 (1)	19.249 (1)
2.	Hipertensi primer	5.687 (2)	6.231 (2)	5.611 (2)	6.183 (2)	7.588 (2)
3.	Penyakit pulpa dan jar. Perifikal	5.230 (3)	5.676 (4)	4.268 (3)	4.540 (5)	3.733 (6)
4.	Nasofaringitis akut (Common Cold)	3.612 (4)	3.389 (7)	3.244 (6)		4.400 (5)
5.	Penyakit kulit Alergi	3.537 (5)	4.260 (5)	1.349 (9)	2.918 (6)	3.010 (8)
6.	Rheumatoid	4.987 (6)	5.832 (3)	3.296 (5)	5.000 (3)	5.174 (4)
7.	Gangguan Refraksi dan Akomodasi	2.049 (7)				
8.	Diare	1.886 (8)				
9.	Penyakit saluran pernapasan atas lainnya	1.393 (9)				2.267 (10)
10.	Diabetes	1.126 (10)	1.113 (9)	1.183 (10)	1.991 (8)	3.287 (7)
11.	Gasteristis		3.837 (6)	3.995 (4)	4.962 (4)	6.024 (3)
12.	Dispepsia		1.351 (8)	2.549 (7)	2.879 (7)	2562 (9)
13.	Cepalgia		1.001 (10)		1.557 (10)	
14.	Dermatitis			1.516 (8)		
15.	Kelainan Refraksi				1.632 (9)	

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2017

Dari tabel II-54 dapat terlihat dalam empat tahun terakhir jenis penyakit yang paling banyak di derita oleh masyarakat Payakumbuh untuk rangking pertama dan kedua adalah penyakit ISPA dan Hipertensi, ISPA atau Inveksi Saluran Pernapasan Atas dan Hipertensi biasanya terkait dengan pola hidup yang ada ditengah masyarakat itu sendiri, karena kedua jenis penyakit ini disebabkan oleh pola hidup yang kurang memperhatikan kesehatan, ISPA terkait pada kualitas udara yang ada disekitar pasien bisa saja disebabkan karena asap rokok atau pembakaran sampah yang menyebakan penurunan mutu udara, hipertensi terkait dengan pola hidup baik makan maupun aktifitas fisik sehingga diperlukan upaya prefentif dan promotif untuk permasalahan ini.

Sementara itu, kecenderungan pengidap HIV/AIDS juga meningkat seiring dengan meningkatnya perubahan prilaku masyarakat yang berdampak pada peningkatan jumlah penderita HIV sebagaimana tabel di bawah ini.Di lain pihak, masih banyak masyarakat yang belum bersedia untuk memeriksakan diri terkait penyakit HIV ke fasilitas pelayanan kesehatan sehingga penularan penyakit HIV masih belum bisa ditekan.

Tabel II - 54
Data Prevalensi HIV/ AIDS

No	Permasalahan Pembangunan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Terjadi perubahan perilaku masyakarat yang berdampak pada peningkatan jumlah penderita HIV	0,0057	0,0073	0,0071	0,0039	0,0053

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2017

15. Jaminan Kesehatan Nasional

Tabel II - 55
Jumlah JKN Mandiri

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepesertan JKN	Persentase
1	2014	125.224	103.810	82,9
2	2015	127.826	113.055	88,4
3	2016	129.807	110.514	85,1

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2017

Kepesertaan JKN ini terdiri dari Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran yang terdiri dari dua kepesertaan yaitu kepesertaan yang dibiayai dengan APBN dan kepesertaan yang dibiayai oleh APBD dan non Penerima bantuan iuran yang terdiri dari Pegawai Negeri sipil, TNI/Polri dan Pekerja Mandiri, terjadi penurunan jumlah kepesertaan dari tahun 2015 ke tahun 2016 jika dilihat dari komposisi kepesertaannya maka terlihat penurunan ini disebabkan karena penurunan jumlah kepesertaan PBI yang dibiayai dengan dana APBD, pada tahun 2014 PBI APBD ini berjumlah 40.000, tahun 2015 berjumlah 39.317 orang sedangkan pada tahun 2016 terjadi penurunan jumlah PBI APBD menjadi 33.077 atau berkurang sebanyak 6.240 orangatau sekitar 5% dari jumlah penduduk, penurunan ini disebabkan karena adanya perubahan komposisi pembiayaan dari APBD Provinsi dan Kota sehingga dana yang tersedia hanya dapat membiayai sejumlah yang tertera diatas.Selain pengurangan kepesertaan disebabkan berkurangnya jumlah PBI APBD, masih rendahnya partisipasi kepesertaan ini juga dipengaruhi oleh masih rendahnya kepesertaaan JKN Mandiri, sehingga sosialisasi berkaitan dengan Jaminan Kesehatan Nasional ini perlu terus ditingkatkan.

2.4.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Kinerja jaringan jalan berdasarkan aspek kemantapan merupakan gabungan kinerja dari aspek kondisi dan aspek pemanfaatan/kapasitas yang diklasifikasikan menjadi dua yaitu tingkat pelayanan mantap atau tidak mantap. Melalui Program Peningkatan Jalan dan Jembatan serta Program Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan maka kondisi jalan mantap (kondisi baik dan rusak sedang) di Kota Payakumbuh pada akhir tahun 2016 mencapai 162.510 Km meningkat dari kondisi tahun 2015 yaitu sepanjang 142.902 Km. Pada tahun 2016 panjang jalan di Kota Payakumbuh mengalami peningkatan yakni dari 261.446 km menjadi 286.800 untuk panjang jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan menjadi 84.653 km dibandingkan dengan panjang jalan seluruhnya 286.800 Km atau dengan proporsi 29,52% diakibatkan tingginya volume kendaraan yang melebihi tonase, sedangkan jalan di Kota Payakumbuh rata-rata klasifikasinya adalah kelas III. Hal ini menunjukan keseriusan pemerintah Kota Payakumbuh dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan.

Tabel II - 56
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi
Kota PayakumbuhTahun 2012- 2016

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kondisi Baik	61,40	62,93	67,99	72,06	84,65
2.	Kondisi Rusak Sedang	58,25	62,82	66,85	70,85	77,86
3.	Kondisi Rusak	82,44	80,25	76,19	70,12	81,66
4.	Kondisi Rusak Berat	33,36	29,56	25,56	21,56	10,51
5.	Panjang Jalan Kota	235,45	236,58	236,59	236,59	254,68
6.	Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)	261,45	261,45	261,45	261,45	286,80
7.	Persentase	45,76	53,59	56,99	60,40	63,81

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, 2017

Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik di Kota Payakumbuh dari tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2016 secara persentase mengalami peningkatan, walaupun ada penambahan panjang jalan di tahun 2016, sehingga persentase jalan dengan kondisi baik menjadi meningkat.

2. Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase di Kota Payakumbuh dari tahun 2013 sampai 2015 terjadi peningkatan setiap tahunnya. Namun persentase panjang jalan yang memiliki trotoar meningkat signifikan pada tahun 2014 dan 2016.

Tabel II - 57
Persentase Panjang JalanKota Payakumbuh
yang Memiliki Trotoar dan Drainase Tahun 2012- 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (Km)	70,55	72,36	142,07	142,08	147,09
2.	Panjang jalan seluruhnya (Km)	261,45	261,45	261,45	261,45	286,80
3.	Persentase	29,98	27,68	54,13	54,14	51,28

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, 2017

3. Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Panjang drainase keseluruhan dan dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai 2016. Peningkatan yang signifikan ini dikarenakan pemerintah Kota Payakumbuh dalam meningkatkan kualitas drainase tidak hanya didanai dari APBD Kota juga bersumber dari APBN. Secara persentase drainase kondisi baik pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 72,75% disamping adanya penambahan pembangunan drainase, fluktuasi pada persentase drainase dengan kondisi baik yang menurun lebih dipengaruhi karena masih rendahnya kesadaran dari masyarakat dalam hal pemeliharaan drainase yang sudah terbangun di kawasan permukiman dan banyaknya pembuangan air hujan yang langsung ke saluran drainase tanpa adanya resapan terlebih dahulu.

Tabel II - 58
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik
Kota PayakumbuhTahun 2012 - 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Panjang drainase dalam Kondisi baik (Km)	69,94	74,94	109,47	114,50	117,50
2.	Panjang drainase seluruhnya (Km)	71,38	76,78	150,47	156,27	158,27
3.	Persentase	97,98	97,60	72,75	73,26	74,23

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, 2017

4. Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor

Nilai persentase dihitung dari perbandingan antara jumlah lokasi pembangunan turap diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor dengan jumlah seluruh wilayah rawan longsor. Jumlah turap yang dibangun terus bertambah karena tingginya jumlah lokasi rawan longsor, dan juga pada lokasi berpotensi rawan lonsor. Pembangunan turap ini tidak hanya didanai oleh APBD Kota, tetapi juga dari APBN.

Tabel II - 59
Jumlah Turap yang Dibangun Kota PayakumbuhTahun 2012 - 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah lokasi turap yang dibangun	31	39	45	47	50
2.	Jumlah lokasi rawan longsor	48	48	48	48	48
3.	Persentase	64,58	81,25	93,75	97,91	104

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, 2017

5. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi dihitung dari panjang saluran irigasi (m) dibandingkan dengan luas lahan budidaya pertanian (hektar) yang ada di Kota Payakumbuh dari tahun 2012 sampai 2013 terjadi kenaikan rasio jaringan irigasi. Namun periode tahun 2013-2016 mengalami penurunan karena adanya alih fungsi lahan akibat pengembangan pembangunan permukiman dan bencana alam.

Tabel II - 290
Rasio Jaringan Irigasi Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2016

No	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jaringan primer (m)	50.356	55.303	49.309,7	49.309,7	49.309,7
2.	Jaringan Sekunder (m)	55.772	55.772	54.314,0	54.314,0	54.314,0
3.	Jaringan Tersier (m)	45.100	45.100	54.967,0	54.967,0	54.967,0
4.	Jumlah jaringan irigasi	151.228	156.175	158.590,7	158.590,7	158.590,7
5.	Luas lahan budidaya (ha)	5.211	5.211	5.598	5.598	5.598
6.	Rasio	29,02	29,97	28,33	28,33	28,33

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, 2017

Menurut tingkat kecamatan, jaringan irigasi yang paling kecil berada di Kecamatan Latina dengan rasio 20,57. Sementara jaringan irigasi terbesar berada pada Kecamatan Payakumbuh Selatan dan Payakumbuh Timur yang notabene berada dalam kawasan pertanian.

Tabel II - 61
Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Kota PayakumbuhTahun 2016

No	Kecamatan	Panjang Jaringan Irigasi			Total Panjang Jaringan Irigasi	Luas lahan budidaya	Rasio
		Primer	Sekunder	Tersier			
1	Payakumbuh Barat	1.785	7.087,00	10.067,00	18.939,00	793	23,88
2	Payakumbuh Timur	12.746	17.710,00	7.120,00	37.576,00	1.132,00	33,19
3	Payakumbuh Utara	53.958	12.095,50	16.830,00	34.883,50	1.457,00	23,94
4	Payakumbuh Selatan	28.775	15.584,50	11.250,00	55.610,20	1.653,00	33,64
5	Latina	45	1.837,00	9.700,00	11.582,00	563	20,57
	Jumlah	49.309	54.314,00	54.967,00	158.590,70	5.598,00	27,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, 2017

Secara umum kondisi jaringan irigasi Kota Payakumbuh sudah baik dengan persentase sebesar 73,90 dari seluruh jaringan irigasi yang ada, hal ini memicu produksi pertanian ke arah yang lebih baik sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel II - 62
Persentase Jaringan Irigasi Kota Payakumbuh dalam Kondisi Baik
Tahun 2012 - 2016

No	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah jaringan irigasi	151.228	156.175	158.590,7	158.590,7	158.590,7
2.	Jaringan irigasi dalam kondisi baik	76.007	84.334	94,361	104.70	117.198
3.	Persentase	50,26	54,95	59,55	66,01	73,90

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, 2017

Secara rinci, dari 65 Daerah Irigasi dengan luas lahan 2.455 ha dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II - 6303
Luas Lahan yang Dialiri Jaringan IrigasiKota PayakumbuhTahun 2012 – 2016

No	Daerah Irigasi	Lokasi	Luas Lahan (Ha)	Lahan teraliri				
				2012	2013	2014	2015	2016
1	Batang Pulau	P. Utara	387	325,08	328,95	334,76	340,56	346,37
2	Sei Bai	P. Timur	80	42,40	42,40	46,00	49,50	53,20
3	Sei Talang	P. Timur	35	24,15	24,50	25,55	26,60	27,65
4	Bendung Beringin	P. Timur	40	26,16	26,40	27,60	28,80	30,00
5	Batang Sikali	P. Selatan	51	39,58	40,29	41,21	42,13	43,04
6	Bandar Ngalau	P. Selatan	124	93,62	99,20	101,68	104,16	97,96
7	Bulakan	P. Selatan	390	327,83	341,48	346,33	351,18	342,39
8	Bandar Baru	P. Selatan	14	7,15	7,28	7,95	8,62	9,30
9	Bandar Gadang	P. Selatan	64	36,29	36,48	39,23	41,98	44,74
10	Bandar Kubang	P. Selatan	8,5	5,14	5,19	5,50	5,80	6,11
11	Bandar Cangkiang	P. Timur	10	7,85	8,00	8,20	8,40	8,60
12	Bandar Taruko I	P. Selatan	12	8,76	9,00	9,30	9,60	9,90
13	Bandar Taruko II	P. Selatan	10	7,30	7,50	7,75	8,00	8,25
14	Baliek Parik	P. Selatan	12	8,82	9,00	9,30	9,60	9,90
15	Bandar Jariang	P. Selatan	5	2,90	3,00	3,20	3,40	3,60
16	Di. Bandar guguk	P. Timur	10	2,70	3,00	3,70	4,40	5,10
17	Bandar Sikumbang	P. Selatan	15	10,62	10,80	11,22	11,64	12,06
18	Bandar Napar	P. Selatan	15	11,70	11,70	12,03	12,36	12,69
19	Bandar Jambu	P. Selatan	13	12,22	13,00	13,00	13,00	13,00
20	Bandar Sawah Like	P. Selatan	16	11,28	12,00	12,40	12,80	13,20
21	Bandar Kalumpang	P. Selatan	15	9,92	10,35	10,82	11,28	11,75
22	Bandar Datar	P. Selatan	16	10,40	10,88	11,39	11,90	69,66
23	Bandar Patai	P. Selatan	81	65,61	68,85	70,07	71,28	34,01
24	Bandar Sikampuang	P. Selatan	38	31,73	32,30	32,87	33,44	34,01
25	Bandar Padang Jariang	P. Selatan	81	72,50	72,52	75,17	75,82	76,46
26	Bandar Piraweh	P. Selatan	26	22,88	23,40	23,66	23,92	24,18
27	Bandar Darek	P. Selatan	64	49,28	51,20	52,48	53,76	55,04
28	Bandar Sawah Tobek	P. Selatan	25	4,50	5,00	7,00	9,00	11,00
29	Bandar Tanjung Aur Kuning	P. Selatan	20	7,20	8,00	9,20	10,40	10,90

No	Daerah Irigasi	Lokasi	Luas Lahan (Ha)	Lahan teraliri				
				2012	2013	2014	2015	2016
30	Bandar Lakuang Sinabok	P. Selatan	5	1,85	1,50	1,85	2,20	2,55
31	Bandar Dalam	P. Selatan	7	3,92	4,20	4,48	4,76	5,04
32	Bandar Bukareh	P. Selatan	13	7,17	7,61	8,15	8,69	9,22
33	Bandar Sei. Linding	P. Selatan	20	16,70	17,00	17,30	17,60	17,90
34	Bandar Labueh	P. Selatan	16,5	12,54	13,20	13,53	13,86	14,19
35	Bandar Panampang	P. Selatan	7	1,26	1,40	1,96	2,52	3,08
36	Bandar Tanjung	P. Selatan	83	41,92	45,65	49,39	53,12	53,95
37	Bandar Luak Samak	P. Selatan	7	3,15	3,50	3,85	4,20	4,55
38	Bandar Luak Ampuh	P. Selatan	15	4,05	4,50	5,55	6,60	7,65
39	Bandar Lurah Taunan	P. Selatan	15	8,10	9,00	9,60	10,20	10,80
40	Bandar Kincir	P. Selatan	10	5,40	6,00	6,40	6,80	7,20
41	Padang Kasai	P. Selatan	28	21,84	22,40	22,96	23,52	24,08
42	Tanjung Rajo	P. Timur	16	8,80	8,80	9,44	10,08	10,72
43	Jembatan CAngkiang	P. Timur	7	4,83	5,25	5,43	5,60	6,02
44	Bandar Kuok	P. Selatan	15	3,38	3,75	4,88	6,00	7,13
45	Bandar Tabek Kincie	P. Barat	17	5,36	5,95	7,06	8,16	9,27
46	Bandar Tanjung Cimotiah	P. Barat	15	4,73	5,25	6,23	7,20	8,18
47	Tanjung Sipasan	P. Barat	10	3,60	4,00	4,60	5,20	5,80
48	Bandar Kaluek	P. Timur	35	9,45	10,50	12,95	15,40	17,85
49	Baramban Nan Tuo	P. Timur	10	4,65	4,70	5,19	5,68	6,17
50	Banda Rawang	P. Timur	10	6,95	7,30	7,57	7,84	8,11
51	Bandar Simpang	P. Timur	16	12,64	13,60	13,84	14,08	14,32
52	Tanjung Baukie	P. Timur	17	3,06	3,40	4,76	6,12	7,48
53	LimauMunggu Gadang	P. Timur	25	7,88	8,75	10,38	12,00	13,63
54	Bandar Guguek Kapalo Koto	P. Selatan	12	6,60	6,60	7,14	7,68	8,22
55	Bandar Atas Pandan	P. Timur	17	16,32	16,66	16,69	16,73	16,76
56	Pincuran Tujuh	P. Timur	40	31,20	34,00	34,60	35,20	35,98
57	Tanjung Panta	P. Timur	15	6,75	7,50	8,25	9,00	9,75
58	Sei Talang (sicincin)	P. Timur	10	6,75	7,50	7,75	8,00	8,60
59	Bandar Nan Lambiang	P. Utara	25	23,50	25,00	25,00	25,00	25,00
60	Bandar Talao	P. Utara	67	36,18	40,20	42,88	45,56	48,24
61	Bandar Sawah Rawang	P. Utara	25	19,35	20,25	20,73	21,20	21,68
62	Tembok Jua	P. Utara	75	43,13	45,00	48,00	51,00	54,00
63	Bandar Simantuang	P. Utara	45	33,48	34,20	35,28	30,36	37,44
64	Bandar Simumbai	P. Utara	12	5,40	6,00	6,60	7,20	7,80
65	Bandar Aie Nan Doreh	P. Utara	15	9,15	9,75	10,28	10,80	11,33
Total			2.455	1.726,06	1.793,54	1,859,07	1.924,59	1.962,12
Persentase				70,31	73,06	75,73	78,39	79,92

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, 2017

Tabel II - 64
Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Kota Payakumbuh Tahun 2012 – 2016

No	Pasokan Irigasi	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pasok Irigasi per Area	Ltr/dtk/Ha	5,80	5,85	6,15	6,15	6,15
2.	Pasok Irigasi Relatif	Ltr/dtk/Ha	4,32	4,35	3,80	3,80	3,80
3.	Pasok Air Relatif	Ltr/dtk/Ha	4,32	4,35	3,80	3,80	3,80
4.	Indek Luas Areal	%	3,92	3,95	3,80	3,80	3,80
5.	Rancangan Luas Areal	Ha	5.211	5.211	5.598	5.598	5.598

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, 2017

Kondisi jaringan irigasi yang baik adalah jaringan irigasi yang dipelihara secara terus menerus sepanjang tahun, yang dilaksanakan sesuai persyaratan teknis dan administrasi dengan baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan.Kegiatan pemeliharaan rutin jaringan irigasi dapat menghasilkan kinerja jaringan irigasi yang sesuai dengan standar pelayanan minimum jaringan irigasi yang ditetapkan.

Tabel II - 65
Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Kota PayakumbuhTahun 2016

No	Kecamatan	Luas Rancangan (Ha)	Luas Lahan Terairi (Ha)	Kebutuhan Air Tanaman (Ha)	Pasok Air Irigasi (lt/ dtk)	Pasok Air Irigasi Total (lt/ dtk)	Total Pasok Air (lt/ dtk)	PIA (lt/ dtk/ ha)	PIR (lt/ dtk/h a)	PAR (lt/ dtk/h a)	IA (%)
1	Payakumbuh Barat	793,0	634,4	991,25	793,00	793,00	793,00	1,25	0,80	0,80	80
2	Payakumbuh Timur	1.132,0	792,4	1.358,40	950,88	950,88	950,88	1,2	0,70	0,70	70
3	Payakumbuh Utara	1.457,0	1.165,0	1.821,25	1.457,00	1.457,00	1.457,00	1,25	0,80	0,80	80
4	Payakumbuh Selatan	1.653,0	1.157,1	1.983,60	1.388,52	1.388,52	1.388,52	1,2	0,70	0,70	70
5	Latina	563,0	450,4	703,00	563,00	563,00	563,00	1,25	0,80	0,80	80
	Jumlah	5.598	4.199,3	6.858,25	5.152,4	5.152,4	5.152,4	1,23	0,75	0,75	75

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, 2017

Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi merupakan tolok ukur keberhasilan dalam pengelolaan jaringan irigasi. Efisiensi diukur berdasarkan tiga indikator yaitu Pasok Irigasi per Area (PIA), Pasok Irigasi Relatif (PIR), dan Pasok Air Relatif (PAR), sedangkan efektifitas dihitung berdasarkan Indeks Luas Areal (IA). Semakin kecil nilai PIA, PIR dan PAR, maka pengelolaan irigasi semakin efisien. PIR dan PAR biasa juga dipakai untuk mengukur kemampuan masyarakat mengelola sumberdaya air dalam kegiatan suatu sistem irigasi. Semakin tinggi nilai IA menunjukkan semakin efektif pengelolaan jaringan irigasi.

6. Panjang Sungai yang Berpotensi Mengalami Abrasi

Kota Payakumbuh dilalui beberapa sungai besar dan sungai kecil, diantara sugai besar adalah sungai Batang Agam, Batang Pulau, Batang Sikali, Sungai Baih, Sungai Tembok dan Sungai Talang. Dari tahun 2012 sampai tahun 2016 telah dilakukan penanganan terhadap tebing sungai yang berpotensi mengalami abrasi.

Tabel II - 66
Panjang Sungai yang Berpotensi Mengalami Abrasi
Kota PayakumbuhTahun 2012 – 2016

No	Sungai	Panjang (m)	Lebar (m)	Potensi Abrasi Per-Tahun				
				2012	2013	2014	2015	2016
1	Batang Agam	15.600	25	9.152	8.804	8.184	7.899	7.343
2	Batang Lampasi	13.600	20	9.975	9.975	9.135	8.875	8.275
	Sawah Barueh	3.350	4	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
3	Batang Pulau	11.400	5	3.827	3.359	2.914	2.472	2.253
	Anak Pulau	1.200	4	360	360	360	123	(105)
4	Batang Sikali	14.500	6	5.755	5.641	5.405	5.077	4.869
5	Sungai Baih	5.270	6	2.066	1.961	1.723	1.604	1.493
	Sungai Batang Jumpun	1.950	5	683	683	683	683	683
6	Sungai Tembok Jua	6.300	4	3.662	3.464	3.305	3.042	2.795
7	Sungai Talang	5.000	5	2.500	2.500	2.500	2.500	2.364
Total		**78.170**		**39.320**	**37.787**	**35.549**	**33.615**	**31.310**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, 2017

7. Kapasitas Air Minum, Pelayanan dan Tingkat Kehilangan Air

Kapasitas terpasang air minum untuk pelayanan di Kota Payakumbuh dari tahun 2012-2016 adalah sebesar 285,57 liter/dtk. Sedangkan Cakupan pelayanan air minum terus meningkat dari tahun ketahun seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Untuk perhitungan tahun 2010-2013, pelayanan pada jaringan pipa terhitung juga dengan jaringan pipa Kabupaten Limapuluh Kota. Sedangkan untuk perhitungan tahun 2014-2016 sudah ada pemisahan pelayanan penduduk Kota Payakumbuh dengan Kabupaten 50 Kota.

Tabel II - 6317
Jumlah Kapasitas ketersediaan air, Pelayanan dan tingkat kehilangan air
Kota PayakumbuhTahun 2012 - 2016

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Ketersediaan Air	L/dtk	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
2	Kapasitas Terpasang/Kap.Produksi	L/dtk	285,57	285,57	285,57	285,57	285,57
3	Jumlah Pelanggan	SR	20.910	21.797	23.380	25.900	26.622
4	Jumlah Kehilangan Air	%	20,78	19,88	20,13	21,54	22,65

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan PDAM Kota Payakumbuh, 2017

8. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Tahun 2016, berdasarkan data PDAM Payakumbuh cakupan pelayanan air minum Kota Payakumbuh sudah sangat baik, yakni mencapai 93,36%. Ini menggambarkan bahwa kebutuhan akan air bersih untuk masyarakat Payakumbuh tidak mengkhawatirkan.

Tabel II - 328
Persentase Penduduk Berakses Air Minum

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum	jiwa	115.103	117.837	116.464	116.035	121.187
2	Jumlah penduduk	Jiwa	122.450	124.694	125.690	127.826	129.807
3	Persentase penduduk terlayani	%	94,00	94,50	92,66	90,78	93,36

Sumber: PDAM Kota Payakumbuh, 2017

9. Rasio Tempat Ibadah per-Satuan Penduduk

Rasio inidihitungantara jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk di Kota Payakumbuh. Untuk tahun 2016 nilai rasio bernilai 2,99 yang dipahami bahwa hampir tiga tempat ibadah dapat menampung untuk 1.000 penduduk. Nilai rasio yang cenderung turun setiap tahunnya dipengaruhi oleh pertambahan penduduk yang tidak diiringi dengan pertambahan jumlah tempat ibadah.

Tabel II - 69
Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk Kota Payakumbuh
Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Tempat Ibadah	389	389	389	389	390
2.	Jumlah Penduduk	122.450	124.694	125.690	127.826	129.807
3.	Rasio	3,20	3,11	3,09	3.04	2,99

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka, 2017

10. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB

Kegiatan penataan ruang mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian digambarkan melalui ketersediaan dokumen maupun peraturan-peraturan bidang penataan ruang yang akan dijadikan pedoman dalam proses pembangunan secara umum.

Tabel II - 70
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas WilayahKota Payakumbuh
Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau	13,78	13,78	13,78	20,98	20,98
2.	Luas wilayah ber HPL/HGB	17,42	16,95	16,95	24,07	24,07
3.	Luas wilayah	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043
4.	Rasio Ruang Terbuka Hijau (1:2)	0,79	0,81	0,81	0,87	0,87
5.	Persentase ruang terbuka hijau (1:3)	0,17	0,17	0,17	0,26	0,26

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, 2017

Indikator Jenis pemanfaatan ruang yang diarahkan dalam ruang terbuka hijau di Kota Payakumbuh terdiri dariRTH taman kota, RTH jalur hijau, RTH tempat pemakaman umum, RTH jalur hijau dan RTH ruang pejalan kaki. Rasio ruang terbuka hijau diukur dari perbandingan luas ruang terbuka hijau dengan luas wilayah ber-HPL/HGB.

Tabel II - 71
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Luas wilayah ber HPL/HGB	Luas Ruang Terbuka Hijau	Rasio Ruang Terbuka Hijau
1	Payakumbuh Barat	1.908	3,14	4,4	0,23
2	Payakumbuh Timur	2.273	0,67	2,3	0,10
3	Payakumbuh Utara	1.453	0,02	10.04	0,69
4	Payakumbuh Selatan	1.467	13,12	2,24	0,15
5	Latina	942	0,01	2	4,84
Jumlah		8.043	16,96	20,98	0,21

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, 2017

11. Rasio Bangunan ber – IMB per Satuan Bangunan

Rasio IMB dihitung berdasarkan pelayanan IMB yang sudah diberikan baik IMB untuk bangunan publik maupun bangunan privat serta IMB pemutihan untuk bangunan yang telah berdiri. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan dihitung dengan jumlah bangunan ber-IMB per jumlah bangunan.

Tabel II - 72
Rasio Bangunan ber-IMB Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Bangunan ber-IMB	3.434	4.372	4.730	5.170	5.625
2.	Jumlah Bangunan	25.965	26.923	27.530	28.058	28.513
3.	Rasio bangunan ber-IMB (1:2)	0,13	0,16	0,17	0,18	0,19

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, 2017

Berdasarkan tabel II-73 terlihat adanya peningkatan dari tahun ketahun, baik untuk bangunan yang sudah ada maupun yang baru dibangun. Hal ini karena adanya peningkatan kinerja dalam pembinaan, pengawasan, dan pengendalian IMB.

13. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Ketaatan dalam pemanfaatan ruang didasarkan pada pemenuhan indikator tertib Peraturan daerah nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030. Berdasarkan tabel II-74 terlihat tahun 2012 sampai dengan 2016 cenderung meningkat, hal ini disebabkan karena tingginya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang dan meningkatnya pengawasan peruntukan lahan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terlihat dari meningkatnya jumlah bangunan yang memiliki IMB baik bangunan privat maupun bangunan publik.

Tabel II - 73
Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Realisasi RTRW (ha)	651,79	752	761	440	580
2.	Rencana Peruntukan RTRW (ha)	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043
3.	Rasio (1/2)	0,081	0,093	0,094	0,054	0,072

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, 2017

2.4.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1. Rasio Rumah Layak Huni

Kualitas lingkungan permukiman menjadi perhatian utama dalam urusan wajib bidang perumahan guna menciptakan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Terkait dengan hal ini, Penataan dan pembangunan perumahan permukiman dilaksanakan secara bertahap dan diprioritaskan pada pemukiman penduduk untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Rasio rumah layak huni dihitung dari perbandingan jumlah rumah layak huni (unit) dengan jumlah penduduk (jiwa).

Tabel II - 334
Rasio Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah PendudukKota Payakumbuh
Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Rumah Layak Huni	24.870	25.791	26.398	26.823	26.893
2.	Jumlah Penduduk	122.450	124.694	125.690	127.826	129.807
3.	Rasio	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Payakumbuh, 2017

Pada periode 2012 - 2016 terjadi peningkatan rumah layak huni yang cukup signifikan, namun peningkatan rasionya tidak terlihat signifikan dikarenakan pertumbuhan jumlah penduduk yang selaras dengan pertambahan jumlah layak huni.

Tabel II - 345
Rasio Permukiman Layak Huni Kota Payakumbuh
Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Luas Permukiman Layak Huni	2.092	2.092	2.092	2.092	2.092
2.	Jumlah luas permukiman	3.328	3.328	3.328	3.328	3.328
3.	Rasio	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Payakumbuh, 2017

2. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Selama periode 2015-2016 terjadi peningkatan jumlah rumah tinggal menjadi 28.436 unit dari 27.723 unit yang ada, namun peningkatan ini tidak diiringi dengan peningkatan jumlah rumah yang berakses sanitasi.

Tabel II - 356
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Payakumbuh
Tahun 2012- 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi	21.354	22.355	23.167	23.833	24.434
2.	Jumlah Rumah Tinggal	26.477	27.117	27.663	27.723	28.436
3.	Persentase	80,65	82,44	83,75	85,95	85,92

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Payakumbuh, 2017

3. Kebutuhan Rumah Kota Payakumbuh

Terkait dengan jumlah backlog terjadi penurunan yang signifikan dari 7.213 unit menjadi 6.091 unit, dimana hal ini berpengaruh terhadap ketersediaan rumah bagi masyarakat Payakumbuh yang semakin baik.

Tabel II - 367
Jumlah dan Backlog Rumah Kota Payakumbuh
Tahun 2012 - 2016

No	Kecamatan	2012		2013		2014		2015		2016	
		Jumlah Rumah	Jumlah Backlog	Jumlah Rumah	Jumlah Backlog	Jumlah Rumah	Jumlah Backlog	Jumlah Rumah	Jumlah Backlog	Jumlah Rumah	Jumlah Backlog
1	Payakumbuh Utara	6.066	1.552	6.213	1.591	6.338	1.438	6.413	1.448	6.515	1.396
2	Payakumbuh Barat	10.851	3.181	11.113	3.310	11.337	2.583	11.471	2.612	11.654	2.496
3	Payakumbuh Timur	5.331	1.411	5.460	1.450	5.569	1.270	5.635	1.279	5.725	1.226
4	Payakumbuh Selatan	2.204	571	2.257	598	2.303	518	2.330	521	2.367	507
5	Lamposi Tigo Nagori	2.025	498	2.074	503	2.116	476	2.141	477	2.175	466
Jumlah		**26.477**	**7.213**	**27.117**	**7.452**	**27.663**	**6.285**	**27.990**	**6.337**	**28.436**	**6.091**

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Payakumbuh, 2017

4. Kawasan Kumuh

Luasan kawasan kumuh Kota Payakumbuh telah ditetapkan melalui surat Keputusan Walikota Nomor 653.3/210/wk-Pyk/2016 pada tahun 2016, dimana dinyatakan seluas 59 Ha yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan.

Tabel II - 78
Luasan Kawasan Kumuh Kota Payakumbuh Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas Kawasan Kumuh (Ha)
1.	Payakumbuh Utara	30,50
2.	Payakumbuh Barat	7,10
3.	Payakumbuh Timur	3,50
4.	Lamposi Tigo Nagori	17,90
Total		**59,00**

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Payakumbuh, 2017

2.4.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dalam pelaksanaannya melayani masyarakat melalui pembinaan wawasan kebangsaan, politik dan kerukunan beragama dan juga pengendalian ketertiban dan keamanan lingkungan.

1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk mencerminkan kapasitas dan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menjamin, memelihara, menjalankan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah. Semakin tinggi rasio jumlah Polisi Pamong Praja, semakin besar ketersediaannya dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penegakan peraturan daerah.

Tabel II - 37
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Petugas Pol PP	59	79	99	102	108
2.	Jumlah Penduduk	122.450	123.654	125.690	127.826	129.807
3.	Rasio Jumlah Petugas Pol PP / 10.000 Penduduk	4,82	6,39	7,88	7,97	8,32

Sumber: Kantor Satpol PP Kota Payakumbuh, 2017

Perlindungan masyarakat adalah komponen khusus pertahanan keamanan negara yang mampu berfungsi untuk membantu masyarakat menanggulangi bencana maupun memperkecil resiko kerugian. Perlindungan masyarakat berfungsi menyelenggarakan pembinaan ketentraman, ketertiban masyarakat, penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat.

Tabel II - 38
Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Linmas	712	630	630	630	630
2.	Jumlah Penduduk	122.450	123.654	125.690	127.826	129.807
3.	Rasio Jumlah Linmas per 10.000 / Peduduk	58,15	50,95	50,12	49,28	48,53

Sumber: Kantor Satpol PP Kota Payakumbuh, 2017

2. Cakupan ketentraman dan ketertiban Masyarakat

Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat dilaksanakan untuk memastikan tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat. Pos kamling adalah salah satu penyelenggaraan keamanan masyarakat dengan pola peningkatan partisipasi mayarakat dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Tingkat pelangagaran terhadap Perda di Kota Payakumbuh masih tinggi dan bervariasi tiap tahun dari tahun 2012 – 2016 , total pelanggaran tiap tahunnya padatahun 2012 sebanyak 240 kasus, tahun 2013 sebanyak 226 kasus, tahun 2014 sebanyak 280 kasus, tahun 2015 sebanyak 262 kasus dan tahun 2016 sebanyak 268 kasus, dari kasus pelanggaran Perda yang terjadi setiap tahunnya dapat tertangani 100%

Tabel II - 39
Tingkat Pelanggaran Kota Payakumbuh dari Tahun 2012 – 2016

No	Kategori Kasus	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pelanggaran Perda Pekat	Kasus	79	72	81	75	86
2.	Selain Pelanggaran Perda Pekat	Kasus	161	158	199	`187	182
	Jumlah Pelanggaran	Kasus	240	226	280	262	268
	Jumlah Pelanggaran yang di Proses/ tertangani	Kasus	240	226	280	262	268
3.	Jumlah Demonstrasi	Kejadian	0	0	0	0	1
4.	Persentase Pelanggaran yang tertangani	%	100	100	100	100	100

Sumber:Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh, 2017

Tabel II - 40
Data Tingkat Waktu Tanggap Bencana Wilayah Manajemen Kebakaran

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah kasus kebakaran	Kasus	126	118	140	178	212
2.	Kebakaran yang tertangani dalam waktu 15menit	Kasus	126	118	140	178	212
3.	Persentase kebakaran yang tertangani dalam waktu 15 menit	%	100	100	100	100	100

Sumber:Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh, 2017

Dari tabel diatas dari tahun 2012 sampai tahun 2016 jumlah kasus bencana kebakaran yang terjadi cenderung meningkat dari tahun ke tahun kebanyakan diakibatkan konsleting listrik, karena umumnya instalasi listrik yang sudah lama.

Tabel II - 41
Data Bencana Alam di Kota Payakumbuh tahun 2012 – 2016

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Angin Kencang, Badai/Punting Beliung	Kejadian	10	16	70	18	24
2	Banjir	Kejadian	1	3	5	2	1
3	Longsong	Kejadian	6	4	1	1	1

Sumber: Badan Penanggulangan bencana Daerah Kota Payakumbuh, 2017

Dari tabel diatas kota Payakumbuh yang paling berpotensi dan dan sering terjadi adalah bencana angin puting beliung, ini dipengaruhi oleh keadaan topografi Kota Payakumbuh yang cenderung datar dan kemudian banjir pada titik-titik tertentu akibat luapan dari beberapa sungai.

2.4.1.6 Urusan Sosial

Penanganan masalah kesejahteraan sosial sebelum tahun 2013 dilakukan secara parsial oleh SKPD teknis sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dengan adanya kerjasama antara Kementerian Sosial RI dengan Pemerintah Kota Payakumbuh dimana Kota Payakumbuh dijadikan salah satu daerah percontohan penanganan masalah kesejahteraan sosial. Maka dibentuklah sebuah lembaga penanganan kesejahteraan sosial yang dinamakan dengan UPT-KAN (Unit Pelayan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari) yang telah diresmikan oleh Menteri Sosial pada tanggal 17 Desember 2013. Sehingga seluruh program/kegiatan penanganan masalah kesejahteraan sosial dilakukan dalam satu atap, diharapkan dengan adanya lembaga ini, masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial yang belum terlayani/tersentuh oleh program penangulangan kemiskinan dapat terlayani dengan secara terpadu oleh satu lembaga saja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, program-program kesejahteraan sosial mencakup 4 (empat) kriteria, yaitu Rehabilitasi Sosial; Jaminan Sosial; Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial.

1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdapat di Kota Payakumbuh diantaranya adalah kemiskinan, ketunaan, penyandang cacat, lanjut usia, anak terlantar, anak jalanan, dan anak nakal.

Tabel II - 42
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2015- 2016

No	Jenis PMKS	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Anak Balita Terlantar	14	36	25	21	16
2	Anak Terlantar	172	175	179	100	62
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	0	17	11	21	10
4	Anak Jalanan	7	8	9	12	5
5	Anak dengan Kedasibilitasan	131	159	150	161	165
6	Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan	3	15	5	7	2
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	0	4	6	5	3
8	Lanjut Usia Terlantar	365	253	291	228	220
9	Penyandang Disabilitas	50	254	293	280	277
10	Tuna Susila	0	0	0	1	1
11	Gelandangan	6	4	0	2	1
12	Pengemis	15	17	16	11	15
13	Pemulung	42	57	64	54	62
14	Kelompok Minoritas	3	5	5	4	3
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan	40	74	87	67	48
16	Orang dengan HIV/AIDS	0	0	0	0	2
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	21	43	33	25	39
18	Korban Trafficking	0	1	4	0	0
19	Korban Tindakkekerasan	17	25	7	17	7
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	4	15	8	7	2
21	Korban Bencana Alam	0	9	21	19	1
22	Korban Bencana Sosial	7	0	9	14	7
23	Perempuan Rawan Sosial ekonomi	572	624	506	454	491
24	Fakir Miskin	6.383	6.383	6.383	6.383	6.383
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	75	30	36	26	7
26	Komunitas Adat Terpencil	0	0	0	0	0
27	Masyarakat tinggal di wilayah kumuh*	21	0	0	0	0
28	Anak Nakal*	21	0	0	0	0
29	Wanita Korban Tindak kekerasan*	7	0	0	0	0
30	Keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni*	234	0	0	0	0
31	Eks Penderita penyakit kronis*	111	0	0	0	0
32	Keluarga Rentan*	394	0	0	0	0
33	Keluarga tinggal di wilayah rawan bencana*	57	0	0	0	0
34	Penduduk tinggal di tepi sungai**	0	0	0	0	0
		8.598	**8.251**	**8.148**	**7.967**	**7.877**

Sumber: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Payakumbuh 2017

Keterangan:
* Indikator yang hanya ada di tahun 2012
** Indikator yang hanya ada di tahun 2013

2. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kota Payakaumbuh cukup banyak, ini menandakan bahwa kepedulian masyarakat terhadap persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan cukup tinggi. Itu difasilitasi oleh Dinas Sosial Kota Payakumbuh dengan menempatkan TKSK di setiap kecamatan. Tenaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) ini menjadi tulang punggung terhadap aktifitas lembaga kemsayarakatan yang ada di kelurahan.

Tabel II - 85
DataPotensi Sumber Kesejahteraan Sosial Aktif

No	Jenis PSKS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)			
	Kec. Payakumbuh Barat	4	40	44
	Kec. Payakumbuh Timur	3	17	20
	Kec. Payakumbuh Utara	10	29	39
	Kec. Payakumbuh Selatan	2	13	15
	Kec. Lamposi Tigo Nagori	4	11	15
	TOTAL			**133**
2	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)			
	Kec. Payakumbuh Barat	1	0	1
	Kec. Payakumbuh Timur	1	0	1
	Kec. Payakumbuh Utara	1	0	1
	Kec. Payakumbuh Selatan	0	1	1
	Kec. Lamposi Tigo Nagori	0	1	1
	TOTAL			**5**

Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2017

Tabel II - 86
Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

No	Jenis PSKS	Jumlah
1	Karang Taruna	48
2	OrSos	12

Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2017

2.4.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.4.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam usaha memajukan pembangunan bangsa. Suroto dalam Tindaon (2010), menyatakan tenaga kerja merupakan motor penggerak dalam pembangunan, yang berperan sebagai sumber daya untuk menjalankan proses produksi dan distribusi barang /jasa, serta sebagai sasaran untuk menghidupkan dan mengembangkan pasar. Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu perusahaan atau suatu instansi. Angka kesempatan kerja dapat dihitung dari jumlah penduduk yang bekerja dibanding dengan angkatan kerja dalam satu wilayah. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka jumlah angkatan kerja juga ikut meningkat. Kebijaksanaan negara dalam kesempatan kerja meliputi upaya-upaya untuk mendorong

pertumbuhan dan perluasan lapangan kerja di setiap daerah serta, perkembangan jumlah dan kualitas angkatan kerja yang tersedia agar dapat memanfaaatkan seluruh potensi pembangunan di daerah masing-masing.

2. Angkatan Kerja dan Pengangguran

Tenaga kerja adalah penduduk yang dapat bekerja jika ada permintaan kerja yang dibatasi antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun, yang perlu menjadi perhatian adalah dengan semakin bertambahnya jumlah angkatan kerja produktif setiap tahunnya baik dari lulusan Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi yang tidak tersalurkan secara maksimal dikarenakan sangat terbatasnya kesempatan kerja berakibat tingginya angka pengangguran. Hal ini diperburuk dengan sulitnya mendapatkan jenis pelatihan yang dibutuhkan untuk pasar kerja dan belum adanya lembaga pendidikan dan keterampilan yang menjamin lulusannya untuk ditempatkan pada lapangan kerja yang tersedia.

Tabel II - 87
Rasio Penduduk Bekerja Kota Payakumbuh Tahun 2012- 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Angkatan Kerja (orang)	56.569	57.770	61.323	63.017	63.017
2.	Penduduk Yang Bekerja (orang)	52.736	53.654	57.421	58.562	58.562
3.	Jumlah Pengangguran	3.833	4.116	3.902	4.455	4.455
4.	Rasio (%)	93,22	92,88	93,64	92,93	92,93

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka Tahun 2016

3. Keselamatan dan Perlindungan Kerja, dan Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama

Tabel II - 88
Jumlah Tenaga Kerja dan Perusahaan yang DifasilitasiPemerintah Kota Payakumbuh

No	Uraian	Satuan	Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja		
			2014	2015	2016
1	Tenaga kerja yang kompeten	%	27	60	60
2	Jumlah pencari kerja yang mendapat informasi tenaga kerja	org	873	1.302	1.100
	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat K3P	org			134
	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat BPJS Kesehatan	org			882
	Jumlah Perusahaan yang memberi jaminan Kesehatan	kasus			29
3	Pencari kerja yang ditempatkan	%	66	25,6	25
4	Jumlah perusahaan yang melaksanakan wajib lapor Ketenagakerjaan	Perusahaan	59	74	100
	Jumlah Sengketa Perusahaan	Kasus			2
5	Kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	%	60	75	100

Sumber: Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 2012-2017

Pengangguran merupakan dampak dari jumlah angkatan kerja yang tumbuh lebih cepat dari pada kesempatan kerja. Dalam rangka mengurangi angka pengangguran Pemerintah Kota Payakumbuh telah melakukan kerjasama dengan Sekolah Tinggi Perhotelan (STP) Sahid Jakarta dalam upaya memenuhi kebutuhan keterampilan dan

pengetahuan tenaga kerja bidang perhotelan dan Pariwisata. Pada tahun 2016, 30 orang pemuda telah diikutsertakan pelatihan yang sama dan telah diberangkatkan magang ke sejumlah negara tetangga dan Asia lainnya, ada 2 buah kerja sama yang dilakukan pemerintah Kota Payakumbuh dalam penempatan tenaga kerja ini.

Pada tahun 2016 itu, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Payakumbuh juga telah melakukan pendidikan khusus untuk mendidik pelaku usaha sebagai cikal bakal wirausahawan baru sebanyak 16 orang.

2.4.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Anak

1. Partisipasi Pemerintah di Pembangunan

Peran serta perempuan dalam pembangunan tidak bisa dipandang sebelah mata. Keberhasilan pembangunan manusia berawal dari pendidikan dalam keluarga yang peran terbesarnya ada pada ibu. Berdasarkan tabel II-89 terlihat nilai IPG yang meningkat setiap tahunnya, indeks IPG merupakan cerminan dari meningkatnya taraf hidup masyarakat yang dikoreksi dengan gender. Untuk tahun 2015 terlihat nilai IPG bernilai 98,52 Ini dapat dipahami bahwa tidak ada perbedaan kesejahteraan/ kondisi yang diterima antara lelaki dan perempuan, baik dari tingkat pendapatan, kesehatan danpendidikan.

Tabel II - 89
Indikator Peran Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Payakumbuh
Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,33	98,42	98,47	98,52	nA
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	55,69	60,43	62,24	61,70	nA
3.	Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah	64	64	65	69,92	69
4.	Persentase partisipasi perempuan dilembaga non pemerintah	28	37	37	30,08	30,6
5.	Rasio KDRT	0,02	0,02	0,018	0,0016	0,0015

Sumber: DP3AP2KB Kota Payakumbuh, 2017; n.a : not available (data tidak tersedia)

Tabel II - 90
Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak

No	Kasus KDRT	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kekerasan terhadap perempuan	114	68	37	51	11
2.	Kekerasan terhadap anak	55	22	30	44	8

Sumber:DP3AP2KB Kota Payakumbuh, 2017

2. Pembangunan Responsif Gender

Disamping itu, hal yang menjadi perhatian dalam percepatan pengarusutamaan gender adalah melalui pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) oleh pemerintah daerah. Berdasarkan informasi dari bidang pemberdayaan perempuan, 40% stakeholder sudah melaksanakan PPRG, dalam artian sudah membuat *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS). Indeks Pemberdayaan Gender digunakan untuk menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, yang direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan

direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan. Berdasarkan tabel II-89 terlihat bahwa terjadi penurunan pada nilai IDG pada tahun 2015.

3. Pemenuhan Hak-hak Anak

Terkait dengan pemenuhan hak anak dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

a. Fasilitas umum yang ramah anak
Sebagai Kota ramah anak, tentunya fasilitas umum di Kota Payakumbuh diharapkan juga dilengkapi dengan fasilitas ramah anak, seperti tempat bermain anak baik itu di tempat – tempat pelayanan publik maupun fasilitas umum lainnya. Namun harus diakui kondisi ini belum optimal dilakukan. Tempat pelayanan publik seperti puskesmas, rumah sakit, tempat pelayanan publik seperti pencatatan sipil, pelayanan satu pintu, zona aman sekolah dan lain-lain masih minim dengan fasilitas yang ramah anak. Beberapa fasilitas umum dan taman bermain di Kota Payakumbuh telah mulai dilengkapi dengan fasilitas bermain anak, diantaranya RTH Batang Agam, RTH Talawi serta Objek wisata Ngalau Indah.

b. Fasilitas Pojok ASI untuk ibu menyusui
Untuk fasilitas pojok ASI bagi ibu menyusui pada perkantoran juga masih minim. Dari 33 Perangkat daerah, yang memiliki fasilitas ruang ibu menyusui (pojok ASI) baru perangkat daerah yang melakukan pelayanan publik seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPMDPTSP, Rumah sakit dan Puskesmas

c. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran
Berdasarkan data dari Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan, jumlah anak yang berusia 18 tahun kebawah (0 – 18 tahun) yang memiliki akta kelahiran pada tahun 2016 adalah sebanyak 28.614 anak dari total 36.397 anak. Artinya cakupan kepemilikan akta kelahiran anak berusia 18 tahun kebawah adalah sebesar 78,6%. Angka ini masih berada dibawah target nasional yang mengisyaratkan cakupan kepemilikan akta kelahiran oleh anak sebesar 85% pada tahun 2019.

Tabel II - 91
Jumlah Anak Berakte Kelahiran

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Anak yang memiliki akte kelahiran	4.450	4.449	2.869	3.021	28.614

Sumber: Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan, 2017

2.4.2.3 Pangan

Ketahanan pangan adalah kecukupan ketersediaan pangan bagi setiap rumah tangga sekaligus kemampuan akses rumah tangga terhadap pangan yang dibutuhkan oleh setiap anggotanya. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial, budaya dan ekonomi. Ketersediaan pangan di kota Payakumbuh secara makro menunjukkan surplus terutama untuk kelompok padi-padian, sayuran, buah-buahan dan ikan. Distribusi pangan yang efektif dan efisien berguna untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Informasi harga pangan diperlukan oleh produsen untuk melihat jadwal tanam melalui

pengaturan pola tanam, peluang pasar, dan gejolak harga yang terjadi. Disisi lain, pemerintah perlu mengambil kebijakan untuk mengantisipasi gejolak harga pada saat tertentu. Dengan demikian. diperlukan penataan jaringan informasi harga pangan, sehingga informasi harga sampai ke tangan produsen dan pemerintah tepat waktu.

1. Ketersediaan Pangan Utama

Secara umum kualitas (Keragaman dan Keseimbangan) konsumsi pangan masyarakat Payakumbuh ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) terus mengalami peningkatan dengan skor 86 tahun 2013 menjadi 89 pada tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh karena ketersediaan 3 kelompok bahan pangan masih rendah tingkat ketersediaannya yaitu kacang – kacangan, Buah Biji Berminyak dan Sayuran dan Buah. Untuk tahun selanjutnya diupayakan agar kelompok bahan pangan yang menyebabkan PPH rendah akan ditingkatkan produksinya dan akan dilancarkan distribusinya sehingga ketersediaannya mencukupi untuk Kota Payakumbuh.

Tabel II - 92
CapaianKinerja Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh
Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Ketersediaan Pangan Utama	ton	26.110	26.355	27.211	27.456	28.359
2	Jumlah ketergantungan pada konsumsi beras	ton	13.100	13.100	13.050	13.000	12.950
3	Rasio pemenuhan kebutuhan beras	ton	1,60	1,65	1,75	1,85	1,95
4	Rata - rata jumlah konsumsi pangan hewani	Gr/kapita/hari	240	250	300	350	375
5	Konsumsi Ikan	Kg/cap/tn	28	28	28,5	29	29,5
6	Lembaga distribusi masyarakat	gapoktan	2	2	2	2	2
7	Regulasi Ketahanan Pangan	buah	0	1	4	6	6

Sumber: Perubahan rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, 2017

Tabel II - 93
Skor PPH Kota Payakumbuh dan PPH Indonesia Tahun 2012 - 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
PPH Kota Payakumbuh	74,48	74,48	77,00	79,13	78,83
PPH Nasional	853,50	90,85	89,30	89,72	85,24

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, 2017

2. Cadangan Pangan

Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, Setiap daerah Kab/Kota harus memiliki cadangan pangan utama berupa beras sebanyak 100 ton. Untuk saat ini cadangan pangan pemerintah di Kota Payakumbuh adalah 17,016 ton. Dalam lima tahun kedepan diharapkan minimal 60% cadangan pangan sesuai SPM dapat terpenuhi. Target skor PPH Nasional sesuai dengan Perpres No.59 tahun 2017 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah sebesar 92,5. Hal ini tentu harus didukung oleh pncapaian PPH di daerah termasuk kota Payakumbuh. Akan tetapi, pada kenyataannya skor PPH kota Payakumbuh masih di bawah nasional dalam beberapa tahun terakhir.

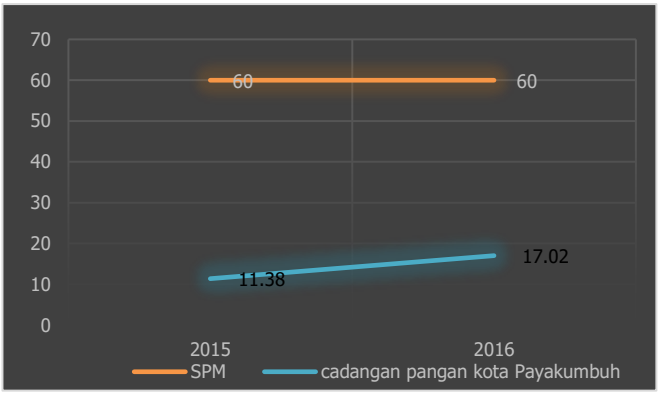

Bagan II - 9
Perbandingan Cadangan Pangan Kota Payakumbuh dengan Standar Ketersediaan Pangan Minimal
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, 2017

3. Persentase Pengeluaran Belanja Pangan dengan Pendapatan Rumah Tangga

Dari data yang ada pengeluaran belanja pangan masih besar dibandingkan pendapatan rumah tangga, hal ini disebabkan oleh pola hidup dan kebiasaan masyarakat yang lebih cenderung memanfaatkan pendapatannya untuk sebagian besar kebutuhan pangan dan belum terbiasa secara mandiri memanfaatkan potensi sumberdaya pangan yang tersedia dilingkungannya sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut kedepan pemanfaatan pekarangan oleh masyarakat Kota Payakumbuh dalam penyediaan pangan rumah tangga akan menjadi prioritas dalam penyediaan pangan keluarga.

4. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Dari data pengambilan sampael bahan pangan di Kota Payakumbuh pada tahun 2016 dari 82 sampel yang diambil sebanyak 69 sampel aman dikonsumsi (84%) dan sebanyak 13 sampel tidak aman dikonsumsi (16%). Kedepannya perlu dilakukan pengawasan bahan pangan yang lebih intensif lagi, agar bahan pangan yang beredar dimasyarakat aman untuk dikonsumsi.

Tabel II - 94
Data Keamanan Pangan

No	Tahun	Jumlah sampel	Jumlah sampel aman	Jumlah sampel tidak aman	Sampel aman (%)
1	2012	6	5	1	83
2	2013	5	4	1	80
3	2014	10	9	1	90
4	2015	8	6	2	75
5	2016	82	79	13	84

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, 2017

2.4.2.4 Pertanahan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008, urusan pertanahan yang dilakukan pemerintah daerah harus terukur. Kondisi urusan pertanahan di Kota Payakumbuh dengan luas wilayah sebesar 80,43 Ha,

permasalahan dan penyelesaiannya sudah dapat diselesaikan. Untuk tahun 2012 diterbitkan 1 izin lokasi untuk Pembangunan kantor BPMD PTSP, tahun 2013 izinlokasi tanah Pembangunan lokasi pengadaan tanah untuk Pembangunan SMA Negeri 5 Payakumbuh, tahun 2014 diterbitkan 8 buah izin lokasi, yaitu untuk lokasi tanah Embung Bulakan, lokasi tanah Pembangunan Kantor lurah Parambahan, lokasi tanah Terminal Agribisnis, lokasi RTH Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Lampasi, lokasi RTH Komplek Unand Jl. Rasuna Said, lokasi RTH Jl. Gajah Mada – Jl. Panglima Polim, lokasi Pembangunan SMK 4 Payakumbuh, lokasi RTH Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Agam. Tahun 2015 dikeluarkan 4 izin lokasi yaitu, Penetapan lokasi tanah pembangunan kantor lurah Talang, penetapan lokasi pembangunan TPST Kota Payakumbuh, penetapan lokasi pembangunan Balai Benih Ikan Payakumbuh, penetapan lokasi pembangunan kantor lurah Padang Tinggi Piliang. Untuk tahun 2016 hannya dikeluarkan 1 izin lokasi yakni untuk perluasan halaman kantor BKD.

Tabel II - 95
Data Lahan Pemerintah Kota Bersertifikat Kota Payakumbuh yang Difasilitasi Dinas PUPR Tahun 2012 - 2016

No	Tahun	Luas Lahan
1	2012	58,02 Ha
2	2013	58,57 Ha
3	2014	58,60 Ha
4	2015	59,58 Ha
5	2016	59,59 Ha

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2017

Disamping itu, persoalan batas administrasi wilayah antara Kota Payakumbuh dengan Kabupaten Limapuluh Kota masih belum jelas. Mediasi telah dilakukan setiap tahun telah dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Permasalahan penentuan tapal batas merupakan masalah yang sangat penting, karena tidak hanya berdampak pada kewenangan daerah saja, tetapi juga pada penataapan dan pemanfaatan ruang kedepannya. Dalam prosesnya, penetapan tapal batas wilayah dilakukan melalui serangkaian tahapan, yangdimulai dari kesepakatan antar dua wilayah, persetujuan gubernur sampai dengan penetapan batas administrasi wilayah dari kedua belah pihak melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

2.4.2.5 Lingkungan Hidup

1. Pencemaran Status Mutu Air

Pencemaran status mutu air dilihat dari jumlah kawasan permukiman atau industri dan sumber mata air yang dipantau mutu airnya dibandingkan dengan jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber-sumber mata air. Pada tahun 2010 pencemaran sebesar 25%, sedangkan tahun 2011 pencemaran status mutu air sebesar 27%. Untuk tahun 2012 pencemaran mutu air sebesar 28%. Ini dilihat dari sungai Batang Agam dan Batang Lampasi. Sedangkan status mutu air tahun 2014 sebesar 28% sedang data 2015 sebesar 28% sedang data 2016 belum tersedia, karena data ini dikeluarkan oleh Bapedalda Propinsi Sumatera Barat.

2. Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Indeks kualitas udara di Kota Payakumbuh dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena pengaruh semakin tingginya volume kendaraan, hal ini perlu diimbangi dengan penyediaan hutan kota atau tanaman penghijauan untuk menetralisir kembali udara yang tercemar

Tabel II - 96
Indeks Kualitas Udara Ambien 2012-2016 Kota Payakumbuh

No	Parameter	2012	2013	2014	2015	2016
1	SO_2		-	21,26	21,26	4,75
2	CO	604,44	241,9	640,9	640,9	600
3	NO_2	73,2	-	17,76	17,76	3,16
4	O_3		53,03	9,6	9,6	15,9
5	HC		-		-	-
6	PM10		-	142,3	142,3	79,1
7	PM2,5		-		-	-
8	TSP		57,43		-	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2017

3. Pencemaran Sungai

Baku mutu sungai di Kota Payakumbuh di ambil sampel adalah sungai Batang Agam pada du lokasi, dilihat dari tahun 2012 - 2016 baku mutu Sungai di Kota Payakumbuh dari parameter yang diambil terhadap dua lokasi tingkat kecemarannya tergolong dalam tercemar sedang.

Tabel II - 97
Data Baku Mutu Sungai

Nama Sungai	No	Parameter Pengujian	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Baku Mutu Air Kelas II PP 82/2001
			Lokasi I	Lokasi II	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi I	Lokasi II	
Sungai Batang Agam	1	pH	7,61	7	7,63	7,45	7,48	7,5	8,16	8,16	7,57	7,62	6-9
	2	TSS	4	4	7	8	5	8	-	-	-	-	50
	3	BOD	1,02	1.94	0,76	2,62	2	2,3	2,5	1,7	2,29	1,44	3
	4	COD	8	6	7	11	14,88	19,89	16,8	15,6	6,5	5,6	25
	5	Fecal coliform	2.000	11.000	9.000	9.000	24.000	24.000	15.000	15.000	12.000	12.000	1.000
	6	Total Coliform	5000	11.000	12.500	12.500	24.000	24.000	11.000	11.000	13.000	13.000	5.000
Status mutu sungai			Tercemar sedang	Tercemar sedang	Tercemar sedang	Tercemar sedang	Tercemar berat	Tercemar berat	Tercemar berat	Tercemar berat	Tercemar sedang	Tercemar sedang	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2017

4. Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air dilihat dari jumlah penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air, dibandingkan dengan jumlah seluruh wilayah rawan longsor dan sumber mata air. Kegiatan ini wujudnya adalah penanaman seribu pohon yang dicanangkan oleh Dinas Pertanian dan Dinas Tata Ruang.

Tabel II - 98
Persentase Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor
Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2016

No	Tahun	Persentase
1	2012	32%
2	2013	34%
3	2014	36%
4	2015	38%
5	2016	40%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKota Payakumbuh, 2017

Mata air di Kota Payakumbuh berpotensi dimanfaatkan untuk kebutuhan air minum untuk Kota Payakumbuh. Berdasarkan data pada table II-99 terlihat bahwa sumber mata air bersih di Kota Payakumbuh, bersumber dari Kabupaten Limapuluh Kota. Air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar, oleh karena Pemerintah Kota untuk kedepannya dapat mensiasati peningkatan kebutuhan air bersih yang seiring dengan pertambahan penduduk melalui pemanfaatan mata Air Bulakan yang saat ini dijadikan embung bulakan mempunyai Unit Produksi lebih kurang 80 l/dt yang bisa melayani Kecamatan Payakumbuh Selatan (tambahan sebanyak 231 SR dan Kecamatan Payakumbuh Barat tambahan sebanyak 1.132 SR).

Tabel II - 99
Sumber Mata Air Bersih Kota Payakumbuh Tahun 2016

No	Sumber Mata Air	Debit Air
1	Batang Tabik, Kab. 50Kota	80 Ltr/ dtk
2	Sei. Dareh, Kab. 50Kota	80 Ltr/ dtk
3	Sikamaruncing, Kab. 50Kota	5 Ltr/ dtk

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKota Payakumbuh, 2017

5. Kawasan Lindung dan Pemanfaatan Air Tanah

Jumlah kawasan lindung di Kota Payakumbuh dari tahun 2012 sampai tahun 2014 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan dengan bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan berkurangnnya fungsi dan luasan kawasan lindung.

Tabel II - 100
Jumlah Kawasan Lindung Kota PayakumbuhTahun 2012 - 2016

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kawasan Lindung	Ha	148	148	347,28	343,11	343,11
2.	Mata Air	buah	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2017

Tabel II - 101
Penggunaan Air Tanah Kota PayakumbuhTahun 2012 - 2016

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Air Tanah	buah	11.205	4.997	4.313	3.040	2.358

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2017

Jumlah mata air di Kota Payakumbuh dari tahun 2012 - 2016 berjumlah 2 buah yakni di Bulakan Balai Kandi dan daerah Limbukan. Untuk penggunaan air tanah di Kota Payakumbuh dari tahun 2012 - 2016 cenderung mengalami penurunan hal ini disebabkan pengalihan dari penggunaan air tanah ke penggunaan air sistem perpipaan dari PDAM.

6. Persentase Pengelolaan Sampah

Volume sampah yang dihasilkan belum seluruhnya dapat ditangani oleh Pemerintah Kota Payakumbuh. Hal ini disebabkan karena armada sampah yang ada kurang memadai sehingga belum semua kelurahan yang terlayani. Kota Payakumbuh mensiasati hal ini dengan program 3R yang didorong untuk mewujudkan pengelolaan sampah dengan pola 3R (reduce, reuse dan recycle).

Tabel II - 102
Jumlah Volume Sampah dan Produksi SampahKota PayakumbuhTahun 2012 - 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah sampah yang terkelola (ton)	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
2.	Jumlah sampah yang terangkut (ton)	18.067,5	18.900,0	21.973,0	23.360,0	24.820,0
3.	Jumlah volume produksi sampah (ton)	22.713,6	28.798,5	30.842,5	38.069,5	47.012,0
	Persentase	80,00	66,00	71,00	61,00	53,00

Sumber: Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017

7. Operasionalisasi TPA/TPST

Pada tahun 2012 - 2015 terjadi penambahan TPS yang cukup signifikan, terhitung untuk tahun 2015 terhitung sebanyak 218 TPS dibangun. Untuk tahun 2016, pemerintah fokus melakukan rehabilitasidan revitalisasi TPS.Berdasarkan tabel II.110 jumlah tempat pembuangan sampah menurun dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengolah sampah sebelum di buang ke TPS. Wadah yang digunakan untuk tempat pembuangan sampah (TPS) terbuat dari tembok dan logam atau material lain seperti kayu dan fiber.

Tabel II - 103
Jumlah TPS 3R Perkecamatan Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2016

No	Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Payakumbuh Timur	1	1	1	1	1
2.	Payakumbuh Barat	1	2	2	2	2
3.	Payakumbuh Utara	1	1	-	-	-
4.	Payakumbuh Selatan	2	2	2	2	2
5.	Lampasi Tigo Nagori	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Lingkungan HidupKota Payakumbuh, 2017

Tabel II - 104
Jumlah Sarana PersampahanKota Payakumbuh Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Mobil Damp Truck	13	13	13	16	16
2.	Truck Amrol	-	-	-	-	1
3.	Becak Motor	16	16	16	16	19

Sumber: Dinas Lingkungan HidupKota Payakumbuh, 2017

Dari sisi rasio TPS per satuan penduduk, kecenderungan jumlah TPS dengan populasi terjadi penurunan, dimana tahun 2012 rasio mencapai 1,13 menurun menjadi hanya 0,16 di tahun 2016. Pertumbuhan penduduk kiranya harus bisa diikuti dengan pertumbuhan jumlah TPS yang tersedia di tengah-tengah masyarakat.

Tabel II - 105
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk
Kota PayakumbuhTahun 2012 - 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah tempat pembuangan sampah TPS (unit)	182	194	215	218	218
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (ton)	139	151	166,22	190,7	190,7
3.	Jumlah penduduk	122.450	124.694	125.690	127.826	129.807
4.	Rasio	1,13	1,21	0,17	0,17	0,16

Sumber: Dinas Lingkungan HidupKota Payakumbuh, 2017

8. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Seiring peningkatan jumlah penduduk Kota Payakumbuh, cakupan pelayanan air minum juga meningkat dari tahun ketahun. Untuk tahun 2014 dilakukan penyesuaian persentase perbedaan layanan air minum, karena adanya layanan pada Kabupaten Limapuluh Kota sebesar 2,3% Kondisi ini kemudian disesuaikan dengan adanya pemisahan layanan antara Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota pada tahun 2015. Dengan demikian penduduk Kota Payakumbuh yang belum mendapat pelayanan air minum perpipaan dari PDAM pada tahun 2016 adalah 8.619 jiwa atau hanya sebesar 6,64%

Tabel II - 106
Persentase Penduduk dan Cakupan Pelayanan Air Minum
Kota Payakumbuh Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Penduduk Terlayani	Jiwa	115.103	117.837	116.464	116.035	121.187
2.	Persentase Cakupan Layanan	%	94	94,50	92,66	90,78	93,36

Sumber: Dinas Lingkungan HidupKota Payakumbuh, 2017

9. Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati di Kota Payakumbuh dari tahun 2012 sampai tahun 2016 berjumlah 8 golongan hayati. Untuk Potensi luasan Taman Kehati di Kota Payakumbuh belum ada luasan lahan yang dapat di jadikan Taman Kehati, namun

kebutuhan akan Taman kehati untuk Kota Payakumbuh sangat dibutuhkan untuk lima tahun kedepan.

Tabel II - 107
Keanekaragaman Hayati Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Keanekaragaman Hayati	Golongan	8	8	8	8	8

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2017

10. Penanganan Limbah B3

Limbah dari bengkel/industri terutama limbah B3 sangat berbahaya bagi lingkungan, dimana terdapat peningkatan penanganan terhadap limbah B3 sebanyak 2 unit dari tahun 2012 - 2016.

Tabel II - 108
Bengkel/Industri Kota Payakumbuh yang Memiliki Penanganan Limbah B3Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Bengkel/Industri	Unit	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Lingkungan HidupKota Payakumbuh, 2017

11. Pengawasan Izin Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan dilihat dari jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemerintah Daerah dibandingkan dengan jumlah kasus lingkungan yang ada. Cakupan ini dilihat dari jumlah perusahan wajib AMDAL yang telah diawasi dibandingkan dengan jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL. Pada tahun 2009 dan 2010 cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL sebesar 100% karena di Kota Payakumbuh hanya ada satu dokumen AMDAL yaitu sutet PLN. Sedangkan tahun 2011 juga ada satu dokumen AMDAL, yaitu pembangunan kantor Balaikota, yang analisanya telah dilaksanakan mulai tahun 2010. Untuk tahun 2012 tidak ada analisa Amdal yang dilaksanakan, analisa pengawasan lingkungan yang dikeluarkan adalah dalam bentuk SPPL (Surat Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup) dan UKL/UPL.Jumlah usaha yang memiliki dokumen lingkungan dari tahun 2012 sampai 2016 cenderung mengalami peningkatan, dari tahun 2012 berjumlah 22 dokumen pada tahun 2016 menjadi 198 dokumen.

Tabel II - 109
Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan	Dokumen	22	55	83	152	198
2.	Kasus Penegakan Hukum Lingkungan	Kasus	6	8	5	3	3
3.	Kasus Penegakan Hukum Lingkungan Diselesaikan	Kasus	6	7	5	3	3
4.	Surat Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dikeluarkan	Surat Rekomendasi	33	35	-	-	189
5.	Usaha Pengendalian Lingkungan/ Usaha Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL)	Surat Rekomendasi	16	20	83	161	12

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2017

2.4.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kegiatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2012 sampai dengan 2016 membawa dampak meningkatnya penerbitan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil.

1. Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk

Untuk melihat persentase penduduk yang telah mengurus dokumen kependudukannya dapat dilihat dari rasio penduduk ber KPT.Rasio penduduk ber-KTP adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah.Rasio penduduk ber-KK adalah perbandingan jumlah penduduk yang ber-KK terhadap jumlah penduduk yang telah menikah, dan Rasio bayi berakte kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada tahun yang sama. Sedangkan Rasio pasangan berakte nikah adalah perbandingan jumlah pasangan nikah berakte nikah terhadap jumlah keseluruhan pasangan yang telah menikah.

Tabel II - 110
Penerbitan Dokumen dan Akta padaKota Payakumbuh tahun 2012 - 2016

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kartu Tanda Penduduk	KTP/Lembar	23.785	80.903	73.273	79.430	85.160
2.	Akta Kelahiran	Lembar	5.677	4.531	3.436	3.813	3.539
3.	Akta Kematian	Lembar	9	15	18	30	129
4.	Akta Perkawinan	Lembar	25	990	951	28	1
5	Akta Perceraian	Lembar	3	1	4	4	14
6	Akta Pengakuan dan Pengangkatan Adopsi Anak	Lembar	2	-	-	2	0
7	Akta Ganti Nama	Lembar	9	5	-	21	0
8	Jumlah Kartu Keluarga diterbitkan	Lembar	12.000	11.338	34.143	34.981	36.916

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKota Payakumbuh, 2017

Tabel II - 111
Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah Kota Payakumbuh Tahun 2016

Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan							
KTP		KK		Akte lahir		Akte nikah	
Sdh	blm	Sdh	blm	Sdh	blm	Sdh	blm
73.273	16.406	34.509	-	36.785	88.823	37.598	55.639
81,7%		100%		28,6%		40,3%	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKota Payakumbuh, 2017

2.4.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Sarana dan Prasarana Pembangunan

Pembangunan pada dasarnya ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Berbagai kebijakan dan program pembangunan melalui berbagai pendekatan telah dilakukan agar dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Tabel II - 112
Kondisi Gedung Kantor Lurah per-Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Kondisi			Jumlah Kantor Lurah
		Baik	Sedang	Kurang	
1	Payakumbuh Barat	9	1	8	18
2	Payakumbuh Utara	7	1	1	9
3	Payakumbuh Timur	8	-	1	9
4	Payakumbuh Selatan	5	1	-	6
5	Lamposi Tigo Nagori	-	5	1	6
Total		29	8	11	48

Sumber:DP3AP2KBKota Payakumbuh, 2017

Pada Tahun 2008 di Kota Payakumbuh terjadi pemekaran wilayah kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 dan 13 tahun 2008. Pada tahun 2014 dilaksanakan penggabungan kelurahan dari 76 menjadi 62 kelurahan. Tahun 2015 kembali dilaksanakan penggabungan kelurahan menjadi 48 kelurahan yang berlaku mulai tahun 2016.

Pemerintah kelurahan sebagai pemerintahan terendah di Kota Payakumbuh merupakan ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah, maka kelurahan harus dilengkapi dengan fasilitas gedung kantor dan prasarana yang mencukupi. Kondisi kantor lurah yang ada saat ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kantor dengan kondisi baik/representatif sebanyak 60%. Kondisi baik disebabkan gedung kantor masih baru, penataan ruang sudah baik, cukup luas, gedung sudah milik sendiri, dan ruang kantor sudah tidak digunakan bersama-sama dengan unsur-unsur yang ada dikelurahan. Kantor kondisi ini banyak pada kelurahan yang bergabung.
2. Kondisi kantor sedang sebanyak 16,6%. Kondisi ini berupa gedung kantor yang masih baik, tapi bangunan sudah lama, ruangan belum memadai, bangunan masih didirikan pada tanah masyarakat yang disewa.
3. Kantor dengan kondisi kurang sebanyak 23%. Kondisi kantor yang kurang/tidak representatif dapat dikatakan karena kondisi kantor kurang layak disebabkan kantor kecil, ruangan sempit, tidak ada penataan ruang yang jelas, kantor menumpang pada tanah masyarakat, pemakaian ruangan masih bergabung dengan unsur-unsur yang ada pada kelurahan seperti PKK, LPM.

Tabel II - 113
Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor Lurah per KecamatanTahun 2016

No	Kecamatan	Kondisi			Jumlah Kantor Lurah
		Baik	Sedang	Kurang	
1	Payakumbuh Barat	9	3	6	18
2	Payakumbuh Utara	-	3	6	9
3	Payakumbuh Timur	6	-	3	9
4	Payakumbuh Selatan	-	5	1	6
5	Lamposi Tigo Nagori	-	-	6	6
	Jumlah	15	11	22	48

Sumber:DP3AP2KBKota Payakumbuh, 2017

Untuk sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas seperti mobiler, perlengkapan kantor, alat-alat elektronik (komputer) dengan kondisi sebagai berikut:

1. Kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai sebesar 31,25%, dapat dilihat dari keberadaan mobiler yang layak dan mencukupi, perlengkapan kantor yang masih baik dan peralatan elektronik seperti komputer yang lebih dari 3(tiga) unit.
2. Sarana dan prasarana dalam kondisi sedang sebesar 22,9%, dapat dilihat dari mobiler yang layak namun belum mencukupi dengan kondisi yang baik, sedangkan peralatan elektroni/komputer sebanyak 2-3 unit.

Kondisi sarana dan prasarana yang kurang sebesar 45,83%, adalah sarana dan prasarana yang tidak mencukupi, kondisi sudah lama, dan perlengkapan kantor berupa komputer hanya 1(satu) buah. Kondisi ini berada pada kelurahan-kelurahan yang kecil.Organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk menunjang dan menjadi pengawas pelaksanaan pembangunan. Untuk Kota Payakumbuh, pada setiap kelurahannya terdapat LPM dan PKK, dimana peranan organisasi masyarakat seperti LPM yang ada di Kota Payakumbuh. Masing-masing kelurahan memiliki satu organisasi LPM yang berjumlah 48 LPM, LPM tersebut aktif dan sangat berperan dalam menunjang pembangunan. Selain itu di setiap kelurahan juga ditunjang oleh ibu-ibu yang mengadakan kegiatan yang tergabung dalam kelompok PKK Kelurahan yang jumlahnya 48 kelompok.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Tabel II - 114
Informasi Lembaga Pengembangan Masyarakat

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Desa/ Kel. Berswasembada	Kelurahan	0	0	0	0	0
2.	Jumlah LPM Aktif	Unit	76	76	76	62	48
3.	Jumlah Binaan LPM	Kelompok	6	1.140	1.140	930	930
4.	Jumlah PKK Aktif	Kelompok	76	76	76	62	54
5.	Jumlah Binaan PKK	Kelompok	450	450	450	372	450

Sumber:DP3AP2KB Kota Payakumbuh, 2017

2.4.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah penduduk Kota Payakumbuh mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Trend pertumbuhan penduduk menunjukkan bahwa perkembangan penduduk Kota Payakumbuh tumbuh secara linier.

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan tabel II-115 terlihat bahwa setiap kecamatan dikota Payakumbuh mengalami peningkatan pertambahan penduduk, walaupun begitu laju pertumbuhan turun pada tahun 2013. Pertambahan penduduk setiap tahunnya dipengaruhi oleh proses alami, dan migrasi penduduk; masuk atau keluar dari suatu daerah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik untuk tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, pertumbuhan penduduk bernilai positif, yang diartikan sebagai tingkat kelahiran dan migrasi masuk di Kota Payakumbuh lebih besar dibandingkan tingkat kematian dan migrasi keluar Kota Payakumbuh. Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 pertambahan penduduk di

setiap kecamatan, kecuali kecamatan payakumbuh utara, lebih dipengaruhi oleh migrasi penduduk, tetapi untuk tahun 2014, pertambahan penduduk lebih dipengaruhi oleh tingkat kelahiran tinggi.

Prediksi untuk pola pertumbuhan penduduk melalui pertumbuhan alami, dan melalui migrasi merupakan pola perhitungan yang kompleks yang tidak hanya memperhitungan satu indeks pengukuran saja, karena dalam perhitungannya pertumbuhan penduudk didasarkan dari tingkat kelahiran, kematian, migrasi masuk dan migrasi keluar. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendorong dan penarik dari kota yang dituju maupun yang ditinggalkan. Pada tahun 2013 pertumbuhan alamiah di Payakumbuh Selatan bernilai negatif, dimana kondisi ini diartikan sebagai tingginya tingkat kematian dibandingkan tingkat kelahiran pada daerah tersebut. Kondisi sebaliknya terjadi untuk tahun 2014, dimana tingkat migrasi pada tahun 2014 Kecamatan Payakumbuh Barat lebih dipengaruhi jumlah penduduk meninggalkan Kota Payakumbuh dibandingkan jumlah penduduk yang masuk.

Tabel II - 4315
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Payakumbuh
Tahun 2012 - 2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Payakumbuh Barat	48.064	48.537	48.624	49.450	50.367
2.	Payakumbuh Timur	25.652	25.904	27.246	27.634	27.954
3.	Payakumbuh Utara	29.770	30.063	30.117	30.679	31.082
4.	Payakumbuh Selatan	9.931	10.028	10.278	10.453	10.635
5.	Lamposi Tigo Nagori	9.033	9.122	9.425	9.610	9.769
6.	Total Jumlah Penduduk	122.450	123.654	125.690	127.826	129.807
7.	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,99%	0,98%	1,65%	1,67%	1,69%

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2013 - 2017

2. Contraceptive Prevalence Rate (CPR)

Persentase cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Tabel II - 4416

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Contraceptive Prevalence Rate	%	nA	73,59	76,38	79,28	76,57

Sumber: DP3AP2KBKota Payakumbuh, 2017

3. Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga

Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per- keluarga. Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah jumlah anak dibagi dengan jumlah keluarga.

Tabel II - 4517
Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Kota Payakumbuh
Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah anak	42.275	48.417	52.297	53.182	56.751
2	Jumlah keluarga	30.716	31.290	31.407	33.384	33.335
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,54	1,55	1,67	1,59	1,70

Sumber: DP3AP2KB Kota Payakumbuh, 2017

4. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB merupakan perbandingan jumlah akseptor KB (peserta KB aktif) dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS). Perkembangan rasio akseptor KB ini cenderung mengalami fluktuasi, namun penambahan jumlah akseptor KB tidak sebanding dengan penambahan PUS sendiri. Pemerintah Kota Payakumbuh melaksanakan program Keluarga Berencana dan pendataan Pasangan Usia Subur (PUS) setiap tahun.

Tabel II - 4618
Perkembangan Peserta KB Aktif Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah akseptor KB (Pasang)	15.631	16.664	15.196	15.098	12.895
2.	Jumlah PUS (pasang)	20.674	21.519	19.834	20.041	19.016
3.	Rasio Akseptor KB (%)	75,61	77,40	76,62	75,34	76,36

Sumber: DP3AP2KB 2017; Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, 2016

Tabel II - 4719
Pencapaian Peserta KB Baru Kota PayakumbuhTahun 2012 - 2016

No	Mix Kontrasepsi	2012		2013		2014		2015		2016	
		PPM	Penca paian	PPM	Penca paian	PPM	Penca paian	PPM	Penca paian	PPM	Penca paian
1	I U D	720	707	651	641	500	641	724	557	562	694
2	M O P	22	22	18	32	85	32	8	12	24	0
3	M O W	103	98	45	150	22	150	98	92	163	195
4	I M P	381	283	252	325	750	325	347	296	366	376
5	SUNTIK	1.196	1.526	1.258	1.706	650	1.706	853	1.234	1688	1545
6	P I L	269	363	380	421	384	421	152	143	246	313
7	KONDOM	595	653	55	370	225	370	160	121	82	205
Jumlah		3.480	3.286	3.652	3.159	3.645	2.626	2.234	2.342	3131	3328
Pencapaian (%)		106,13		111,14		115,38		104,82		106,29	

Sumber: DP3AP2KB Kota Payakumbuh, 2017

5. Petugas dan Kader KB

Tabel II - 4820
Jumlah Petugas dan Kader Keluarga Berencana Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah PKB	Jumlah Kader KB
1	Payakumbuh Utara	9 kelurahan	3 orang	84 orang
2	Payakumbuh Timur	9 kelurahan	2 orang	57 orang
3	Payakumbuh Selatan	6 kelurahan	2 orang	25 orang
4	Payakumbuh Barat	18 kelurahan	4 orang	91 orang
5	Lamposi Tigo Nagori	6 kelurahan	1 orang	23 orang
Jumlah		**48 kelurahan**	**12 orang**	**280 orang**

Sumber: DP3AP2KB Kota Payakumbuh, 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat jika rata – rata 1 orang petugas KB melayani 4 kelurahan. Petugas KB dibantu oleh kader KB. Kader adalah seorang yang mampu dan suka rela berpartisipasi menyumbangkan pemikiran tenaga dan waktu nya untuk membantu pengelolahaan kegiatan program KB di kelurahan. Secara kuantitas dapat dilihat jumlah kader KB ini telah mencukupi, namun secara kualitas perlu dilakukan evaluasi dan pembinaan untuk peningkatan kualitas SDM kader KB tersebut.

6. Ketahanan Keluarga

Dalam upaya peningkatan pemahaman masyarakatdalam ketahanan keluarga untuk menciptakan keluarga sejahterayang mampu menghadapi berbagai tantangan maka dilakukan pembinaan melalui Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia (Tribina Keluarga Aktif) juga perlu ditingkatkan.

Tabel II - 4921
Jumlah Tribina Keluarga Aktif Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2016

No	Tipe Pembinaan	Jumlah Seharusnya	Jumlah Dasawisma				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	BKB	76	76	76	76	76	76
2	BKR	76	7	7	7	7	7
3	BKL	76	9	9	9	9	10

Sumber:DP3AP2KBKota Payakumbuh, 2017

2.4.2.9 Perhubungan

1. Jumlah Arus Penumpang Angkatan Umum

Dilihat dari jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah Kota Payakumbuh selama 1 tahun, jenis angkutan umum yang digunakan adalah bis. Untuk tahun 2015 dan 2016 terjadinya peningkatan pada jumlah penumpang angkutan umum. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan adanya pembenahan armada antar kota dalam provinsi sehingga minat untuk memanfaatkan angkutan umum mulai mengeliat kembali. Seiring dengan bertambahnya kepemilikan kendaraan pribadi oleh masyarakat, pemanfaatan angkutan massal kedepannya juga harus direncanakan untuk mengurangi potensi munculnya kemacetan di Kota Payakumbuh.

Tabel II - 5022
Jumlah Arus Penumpang Tahun 2012 – 2016 Kota Payakumbuh

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Penumpang	643.076	650.608	487.956	143.876	162.676

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, 2017

2. Rasio izin trayek

Izin trayek di Kota Payakumbuh terjadi penurunan selama 2 (dua) tahun awal, karena berkurangnya kecenderungan masyarakat menggunakan angkutan umum, rasionya menurun seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II - 5123
Jumlah Izin Trayek dan Rasio yang Dikeluarkan Kota Payakumbuh

No.	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Izin Trayek	Dokumen	258	258	121	121	121
2.	Jumlah Penduduk	Jiwa	122.450	123.654	125.690	127.826	129.807
3.	Rasio Trayek dengan Jumlah Penduduk	-	0,21	0,20	0,10	0,09	0,09

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, 2017

3. Jumlah Terminal Bis

Di Kota Payakumbuh pada tahun 2016 terdapat tiga buah terminal yang terdiri dari 1 terminal bis antar kota antar propinsi (Terminal Koto Nan Ampek) yang sekarang sudah menjadi kewenangan provinsi dan 2 terminal angkutan kota/ pedesaan yaitu Terminal Labuah Baru dan pos kota.Terminal merupakan pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan penumpang serta perpindahan moda. Saat ini kewenangan pengelolaan terminal bus Koto Nan IV (tipe b) berada pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sedangkan 2 terminal Angkutan Kota/Angkutan Pedesaan (tipe c) dikelola Pemerintah Kota Payakumbuh. Pengelolaan terminal Angkutan Kota/Angkutan Pedesaan belum beroperasi secara optimal dikarenakan rendahnya aksesibilitas pengguna jasa angkutan ke terminal membuat penumpang angkutan umum lebih memilih naik dan turun langsung di pusat-pusat kegiatan. Untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan terminal penumpang tersebut perlu dilakukan penertiban terhadap terminal bayangan, meningkatkan pengamanan dan pelayanan di terminal serta meningkatkan kualitas fasilitas di terminal.

Tabel II - 5224
Terminal Penumpang Kota PayakumbuhTahun 2012 – 2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah terminal penumpang tipe B	1	1	1	1	1
2.	Jumlah terminal penumpang tipe C	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, 2017

4. Angkutan Darat

Angkutan darat yang dimaksudkan disini adalah semua jenis angkutan umum yang terdiri dari mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang. Tahun 2012 perbandingan antara jumlah angkutan darat dengan jumlah penumpang adalah 0,46% kondisi ini menurun pada tahun 2013, dan meningkat signifikan pada tahun 2014 dengan 0,65%. Untuk tahun 2015 dan 2016 terjadi penurunan yang signifikan sehingga persentase perbandingan menjadi 0,01%.

Tabel II - 5325
Jumlah Arus Penumpang Kota PayakumbuhTahun 2012 – 2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Angkutan Darat	2.973	2.875	3.163	2.461	2.461
2.	Jumlah Penumpang	643.076	650.608	487.956	143.876	162.676
3.	Persentase Perbandingan	0,46%	0,44%	0,65%	0,01%	0,01%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, 2017

5. Perparkiran

Perparkiran di Kota Payakumbuh masih menggunakan tepi jalan umum sebagai area/lokasi parkir (*on street*). Lokasi parkir tersebut terletak di pusat kota dan pusat perbelanjaan, dimana kondisi lalu lintas cukup padat disebabkan volume kendaraan dan jumlah pejalan kaki yang cukup tinggi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kemacetan. Selain itu luas area/lokasi parkir yang tidak sebanding dengan jumlah pertambahan kendaraan mengakibatkan pelayanan terhadap pengguna jasa parkir belum maksimal. Jumlah titik parkir ditepi jalan umum dalam Kota Payakumbuh sebanyak 23 titik. Jumlah tersebut masih sangat kurang sehingga perlu dilakukan penambahan lokasi parkir baru untuk mengimbangi potensi parkir akibat pertumbuhan kendaraan, selain penambahan titik parkir *on street* diperlukan juga titik parkir *off street* berupa gedung parkir maupun taman parkir. Disamping meningkatkan ketersedian lokasi parkir, peningkatan kualitas pengelolaan parkir juga diperhatikan dari sisi pelayanan petugas parkir dengan cara memberikan pembinaan secara berkala kepada petugas parkir sehingga petugas parkir tersebut memahami tugas dan kewajibannya dalam memberikan pelayanan perparkiran.

Tabel II - 5426
Jumlah Titik Parkir Tepi Jalan Umum KotaPayakumbuh
Tahun 2012 – 2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Titik Parkir Tepi Jalan Umum	23	23	23	23	23

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, 2017

Disamping itu yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah kota dengan besarnya kontribusi sektor perdagangan pada pertumbuhan ekonomi kota, pertumbuhan daerah komersial menjadi magnet bagi munculnya usaha-usaha baru. Dengan kondisi sekarang ini dimana adanya keterbatasan dalam pengembangan area, maka pelaku usaha memanfaatkan ruang yang seyogyanya disediakan untuk ruang terbuka ataupun untuk lahan parkir menjadi tempat berusaha. Hal ini tentu saja mengganggu lalu lintas pergerakan barang maupun manusia. Oleh karena itu dengan adanya area parkir yang

lebih representatif, diharapkan mampu mengungkit pertumbuhan sektor perdagangan di Kota Payakumbuh.

6. Pelanggaran lalu Lintas

Rendahnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas merupakan faktor penyumbang terbesar dalam terjadinya kecelakaan. Masih rendahnya disiplin berlalu lintas masyarakat Kota Payakumbuh dapat terlihat dengan masih tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas. Secara bertahap dengan pembinaan/penyuluhan terus menerus akan menambah pengetahuan masyarakat dalam berlalu lintas. Selain pembinaan/penyuluhan Dinas Perhubungan juga melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dijalan. Pengawasan dan pengendalian lalu lintas dilaksanakan di daerah rawan hambatan, persimpangan, sekolah, dan perkantoran. Dengan dilaksanakannya pembinaan/penyuluhan serta lebih intensnya pengawasan dan pengendalian lalu lintas oleh aparatur dilapangan diharapkan dapat meningkatkan disiplin dan kepatuhan masyarakat pengguna jalan sehingga dapat menurunkan angka pelanggaran lalu lintas.

Tabel II - 5527
Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Kota Payakumbuh Tahun 2012 – 2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas	6.456	6.796	4.039	6.520	7.041

Sumber: Polres Kota Payakumbuh, 2017

7. Prasarana Jalan.

Perkembangan suatu kota sangat ditentukan oleh dinamika perkembangan masyarakatnya. Kenyataan ini terlihat dari perkembangan kegiatan masyarakat yang berdampak terhadap perkembangan di berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, bidang ekonomi, transportasi dan perkembangan infrastruktur kota itu sendiri.Khususnya bidang transportasi, dengan pertambahan jumlah kendaraan secara kontiniu, ruas jalan dan dinamika lalu lintas yang semakin kompleks dibutuhkan ketersediaan prasarana jalan yang memadai. Prasarana jalan meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung jalan.

Dalam Kota Payakumbuh masih banyak ruas jalan, persimpangan dan sekolah serta pusat keramaian yang belum dilengkapi prasarana jalan. Untuk memenuhi kebutuhan akan prasarana jalan tersebut adalah dengan meningkatkan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Manajemen dan rekayasa lalu lintas merupakan serangkaian usaha dan kegiatan berupa perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan prasarana jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Tabel II - 5628
Jumlah Prasarana Perhubungan Kota Payakumbuh Tahun 2012 – 2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah rambu (buah)	347	801	895	1.155	1.268
2.	Jumlah traffic/warning light (tiang)	45	55	65	76	83
3.	Jumlah marka (m2)	30.340	30.340	30.340	30.340	30.340
4.	Jumlah halte (buah)	7	8	8	8	8
5.	Jumlah pagar pembatas jalan portabel (buah)	-	20	120	120	120

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, 2017

8. Angkutan Barang

Peningkatan jumlah angkutan barang menuntut daerah untuk menyediakan terminal angkutan barang. Selain tempat bongkar muat barang, keberadaan terminal barang akan memudahkan dalam pengawasan lalu lintas barang, serta memudahkan dalam penetapan daerah operasi angkutan barang dalam kota karena telah tersedia lokasi bongkar muat sehingga hanya kendaraan barang yang bertonase kecil yang dapat masuk kota. Hal tersebut dapat mengurangi pelanggaran kelas jalan serta terwujudnya ketertiban dan kelancaran berlalu lintas.

Tabel II - 5729
Jumlah Angkutan Barang Kota Payakumbuh
Tahun 2012 – 2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah angkutan barang	2.429	2.486	2.524	2.545	2.681

Sumber: UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi Sumbar, 2017

Berdasarkan Tabel II-129 terlihat bahwa terjadi peningkatan dalam jumlah angkutan barang yang setiap tahunnya. Hal ini perlu diakomodir melalui penyediaan terminal angkut barang. Disamping itu yang juga perlu diperhatikan adalah kelas jalan, untuk menjamin adanya kesesuaian antara beban tonase kendaraan dengan ketahanan jalan.

9. Akses Transportasi pada Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dalam era otonomi telah mendorong pesatnya laju pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang sosial ekonomi, seperti berkembangnya fisik kawasan permukiman, kawasan perkantoran/ pemerintahan, kawasan perdangangan dan jasa. Dengan kondisi yang seperti ini menjadikan aktivitas masyarakat sehari-hari semakin meningkat, sehingga menuntut tersedianya sistem transportasi yang memadai dan mampu menjadi penunjang dan pendukung kegiatan secara optimal, karena transportasi merupakan alat untuk mengatasi jarak, waktu dan biaya. Secara umum rute angkutan umum sudah mengakomodir daerah-daerah pertumbuhan ekonomi, hanya beberapa lokasi perdagangan baru seperti Pasar Padang Kaduduk yang perlu ditambah rute layanan angkutan umum agar kawasan tersebut dapat dijangkau masyarakat. Namun permasalahan belum baiknya kinerja angkutan umum membuat masyarakat masih belum optimal menggunakan angkutan umum. Untuk itu diperlukan revitalisasi terhadap penyelenggaraan angkutan umum

dalam Kota Payakumbuh sehingga masyarakat lebih memilih angkutan umum dibanding kendaraan pribadi.

2.4.2.10 Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika di Kota Payakumbuh diselenggarakan oleh 2 (dua) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yaitu Sekretariat Daerah dan Dinas Perhubungan dan Komunikasi.

1. Jumlah Hotspot

Jumlah hotspot yang disediakan pemerintah Kota Payakumbuh dimulai dari 2013 sebanyak 1 unit sampai tahun 2014, pada tahun 2015 menjadi 10 unit terus meningkat tahun 2016 menjadi 15 unit, karena pemerintah kota payakumbuh berkomitmen dengan pembangunan infrastruktur IT.

Tabel II - 5830
Jumlah Hotspot Kota Payakumbuh Tahun 2012 – 2016

No.	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Hotspot	Unit	-	1	1	10	15

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh, 2017

2. Jumlah OPD yang terintegrasi Sistem Informasi Teknologi

Untuk penyebarluasan informasi dan meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat, di kota Payakumbuh telah dapat diterima beberapa siaran radio nasional, lokal begitupun dengan TV lokal dan nasional. OPD yang telah terintegrasi sistem informasi teknologi Sub Domain Web 11 OPD. Sistem informasi yang telah terintegrasi di Dinas Kominfo Kota Payakumbuh, terdiri dari :

- Aplikasi Pengelolaan Jaringan Kota
- Aplikasi CCTV Jalan Raya
- Aplikasi SAKIP (Bappeda)
- Aplikasi Sicantik (DMD-PTSP)
- Aplikasi SIWARTA (Kominfo)
- Aplikasi SIWASPADA (Kominfo)
- Aplikasi Kliping (Kominfo)
- Aplikasi SIKOPAY (protokoler SETDAKO)
- SMS Centre RSUD (Dinas Kesehatan)

3. Sumber Daya Manusia Teknologi dan Informatika

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Sumber Daya Manusia yang menagani Teknologi Informatikan sampai tahun 2017 adalah sebanyak 14 orang yang terdiri dari tenaga manajemen TIK, tenaga jaringan internet, tenaga programmer, Tenaga Design Grafis dan Keamanan Informasi.

Tabel II - 5931
Jumlah SDM Teknologi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2012 – 2016

No.	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Tenaga Manajemen TIK	-	-	-	3 Orang	-
2	Tenaga Jaringan Internet	-	-	-	5 Orang	-
3	Tenaga Programmer	-	-	-	1 Orang	-
4	Tenaga Design Grafis	-	-	-	1 Orang	-
5	Keamanan Informasi	-	-	-	1 Orang	-

Sumber: Dinas Komunikasi dan InformatikaKota Payakumbuh, 2017

4. Sarana dan Prasana Teknologi dan Informatika

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Sarana dan Prasarana Teknologi Informatikan sampai tahun 2017 masih terbatas karena keterbatasan Anggaran untuk pemenuhan Sarana dan Prasarana tersebut.

Tabel II - 6032
Sarana dan Prasarana Infrastruktur Teknologi dan Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2012-2016

No.	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jaringan Fiber Optik	-	-	-	-	31 titik
2	Rak server 46 u	-	-	-	-	1 Unit
3	Rak 8 u	-	-	-	-	31 titik
4	Server	-	-	-	-	2 Unit
5	Router	-	1 Unit	-	-	2 Unit
6	Radio layanan Hotspot gratis	-	-	-	-	-
7	CCTV jalan raya	-	-	-	-	2 titik
8	Komputer Pusat Komunitas Kreatif	15 Unit	18 Unit	-	-	-
9	Tower triangle	-	-	1 unit	-	-
10	Radio penerima beserta tiang anthena	-	-	-	-	-
11	Radio Pemancar (Acces Point)	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Komunikasi dan InformatikaKota Payakumbuh, 2017

d. Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)

Potensi Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) untuk Komunikasi dan Informatika di Kota Payakumbuh bisa dikembangkan kedepan adalah Terdiri Dari Komunitas masyarakat yang merupakan sukarelawan terhadap penyampain informasi pemerintahan terkait disektor UMKM, Seni dan budaya serta Industri Kreatif yang terdiri: Komunitas Photograpy,komunitas Makanan Ringan, Komunitas Seni Tradisional, Komunitas Industri Kreatif.

2.4.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Persentase Koperasi Aktif dan Koperasi Sehat

Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi di Kota Payakumbuh. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi daerah berbasis kerakyatan. Jumlah koperasi pada kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami penambahan sebanding dengan jumlah koperasi aktif yang ada.

Tabel II - 6133
Capaian Kinerja Koperasi Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah koperasi aktif	unit	117	120	121	123	126
2.	Jumlah koperasi	unit	148	150	151	153	158
3.	Persentase koperasi aktif	%	79	80	80,1	80,3	81
4.	Persentase koperasi sehat	%	8,33	9,09	9,85	10,61	11,36

Sumber:Dinas Koperasi UKMKota Payakumbuh, 2017

2. Jenis Koperasi

Jenis koperasi di Kota Payakumbuh cukup beragam, yang dominan adalah Koperasi Serba Usaha, kemudian Koperasi Fungsional dan Koperasi Tani. Jenis dan jumlahnya digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel II - 6234
Jenis Koperasi Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2016

No	Jenis Koperasi	2012	2013	2014	2015	2016
1	Koperasi Unit desa	5	5	5	5	5
2	Koperasi Fungsional	43	43	43	43	43
3	Koperasi Karyawan	7	8	8	8	8
4	Koperasi serba Usaha	47	48	51	51	53
5	Koperasi wanita	7	7	7	7	7
6	Koperasi Tani	20	20	20	20	20
7	Koperasi Pondok Pesantren	2	2	2	2	2
8	Koperasi Simpan Pinjam	3	5	5	5	5
9	Koperasi Angkutan Darat	1	1	1	1	1
10	Koperasi Pasar	2	2	2	2	2
11	Koperasi Peternak Sapi	2	2	2	2	2
12	Koperasi PEPABRI	1	1	1	1	1
13	Koperasi WERDATAMA	1	1	1	1	1
14	Koperasi Veteran	1	1	1	1	1
15	Koperasi Kepolisian	1	1	1	1	1
16	Koperasi Pedagang Kaki Lima	1	1	1	1	1
17	Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah	5	5	5	5	5
JUMLAH		**149**	**150**	**153**	**156**	**158**

Sumber:Dinas Koperasi UKM Kota Payakumbuh, 2017

3. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Usaha kecil dan menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Semakin banyak jumlah UMKM menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UMKM. Pada tahun 2016 jumlah UMKM di Kota Payakumbuh mencapai 20.678 unit. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 20.359 unit atau sebesar 1,57%.

Tabel II - 6335
Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2012 - 2016

Jenis usaha	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Usaha Mikro	Unit	14.160	14.529	14.935	15.084	15.235
Usaha Kecil	Unit	4.963	5.075	5.217	5.269	5.322
Usaha Menengah-Besar	Unit	200	202	207	209	211
Persentase ukm terhadap UMKM	%	26,72	26,64	26,64	26,64	26,64
Total UMKM	Unit	19.323	19.806	20.359	20.562	20.678

Sumber: Dinas Koperasi UKM Kota Payakumbuh, 2017

4. Asosiasi dan Forum UMKM

Sampai dengan tahun 2016 telah berdiri asosiasi dan forum UMKM di Kota Payakumbuh sebanyak 3 (tiga) buah yang mewadahi sekitar 644 anggota. Forum ini merupakan wadah koordinasi dan perpanjangan tangan pelaku UMKM kepada pemerintah khususnya.

Tabel II - 6436
Keanggotaan Asosiasi dan UMKM Tahun 2016

Jenis usaha	Satuan	Jumlah Anggota
Forum UMKM	Orang	65
APKL	Orang	300
IWAPI	Orang	279
Total		**644**

Sumber:Dinas Koperasi UKM Kota Payakumbuh, 2017

2.4.2.12 Penanaman Modal

1. Informasi Investasi

Kinerja pembangunan daerah Kota Payakumbuh pada urusan Penanaman Modal dapat digambarkan melalui indikator jumlah investor, nilai investasi dan rasio daya serap tenaga kerja.

Tabel II - 6537
Indikator Kinerja Penanaman Modal Kota PayakumbuhTahun 2012- 2016

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	investor	1	3	1	11	28
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	milyar	10,2	18,5	12,7	37,1	134,7

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2012	2013	2014	2015	2016
3	Nilai realisasi investasi	milyar	110,5	207,3	124,4	160,2	240,6
4	Pertumbuhan Jumlah Investasi	%		87,6	(-40)	29	50
5	Kenaikan /penurunan nilai realisasi investasi	milyar	12	74	(-76)	36	80
6	Lama proses perijinan	hari	14	14	14	7	7

Sumber:DPM dan PTSP Kota Payakumbuh, 2017

Tabel II - 6638
Informasi Potensi dan Kawasan Investasi Kota Payakumbuh

Data Potensi Investasi	Data Kawasan Potensi Investasi
A. Peluang Investasi Bidang Industri	
1. Industri Pakan Ternak	Lingkar Utara Kel. Padang Sikabu (1 Ha)
2. Industri pengelolaan sampah terpadu	TPA taratak Kel. Kapalo Koto Payakumbuh Selatan (2 Ha)
3. Industri pengelolaan kakao	TPA taratak Kel. Kapalo Koto Payakumbuh Selatan
4. Industri pengelolaan sirsak	Terminal Agribisnis Kel. Koto Panjang Payakumbuh Timur.
5. Industri pengelolaan daging	Terminal Agribisnis Kel. Koto Panjang Payakumbuh Timur + Lokasi PPH Kel. Koto Panjang Payakumbuh Timur.
B. Peluang Investasi Bidang Pendidikan	
1. Kawasan Pendidikan Islam Terpadu	- Kel. Koto Baru Kec. Payakumbuh Timur (15 Ha) - Kec. Payakumbuh Selatan (6 Ha) - Kec. Payakumbuh Utara (6 Ha)
C. Peluang Investasi Bidang Pariwisata	
1. Pembangunan Objek wisata Bukik Patah Sembilan	Bukik Patah Sembilan Kel. Padang Alai Kec. Payakumbuh Timur
2. Pengembangan ObjekWisata Batang Agam	Sepanjang Kawasan Batang Agam
3. Pembangunan Pariwisata Embung Bulakan	Kel. Limbukan Payakumbuh Selatan
4. Paket wisata ngalau ampangan	- Kel. Ampangan, Kec. Payakumbuh Selatan (20 Ha) - Kel. Pakan Sinayan Kec. Payakumbuh Barat
5. Pembangunan stadion sepak bola bertaraf internasional dan sport center	Taratak Kel. Kapala Koto Kec. Payakumbuh Selatan

Sumber:DPM dan PTSP Kota Payakumbuh, 2017

Sedangkan untuk investasi dalam bentuk kerjasama kemitraan dengan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh adalah:

- Parkir Pasar Kota Payakumbuh
- Pengelolaan TPA TPA taratak Kelurahan Kapalo Koto Payakumbuh Selatan (2 Ha)
- Embung Bulakan Kelurahan Limbukan Payakumbuh Selatan

Untuk mendukung iklim usaha di Kota Payakumbuh, maka Pemerintah Kota Payakumbuh mengeluarkan regulasi terkait Izin usaha konstruksi pada tahun 2014 (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014) dan regulasi terkait penanaman modal pada tahun 2017 (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017).

2.4.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

1. Jumlah Atlet Berprestasi

Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Payakumbuh telah melakukan pembinaan terhadap 31 cabang olah raga, mulai dari Angkat Berat, Atletik, Bela Diri sampai dengan dayung. Ofisial dan pelatih masing-masing cabang olah raga denga kepengurusan yang tergabung dalam KONI Kota Payakumbuh.

Tabel II - 6739
Data Jumlah Organisasi Olah Raga

No	Cabang Olah Raga	Atlit			Offisial	Pelatih	Jumlah
		Putra	Putri	Jumlah			
1	Angkat Berat (PABBSI)	10	0	10	1	2	13
2	Atletik (PASI)	6	8	14	1	2	16
3	Balap Sepeda (ISSI)	6	0	6	0	2	8
4	Basket (PERBASI)	12	12	24	1	2	27
5	Bola Volley (PBVSI)	14	12	26	0	4	30
6	Bulu Tangkis (PBSI)	7	5	12	1	2	15
7	Catur (PERCASI)	5	5	10	1	1	12
8	Futsal	12	0	12	1	2	15
9	Judo (PJSI)	19	7	26	2	2	30
10	Karate (FORKI)	8	5	13	1	2	16
11	Kempo(PERKEMI)	10	4	14	0	2	16
12	Menembak (PERBAKIN)	3	0	3	0	1	4
13	Panjat Tebing (FTPI)	5	3	8	1	3	12
14	Renang (PRSI)	14	7	21	1	2	24
15	Senam (PERSANI)	8	12	20	0	6	26
16	Sepak Bola (PSSI)	18	0	18	3	2	23
17	Sepak Takraw (PSTI)	10	0	10	1	2	13
18	Silat (IPSI)	8	9	17	0	4	11
19	Taekwondo (TI)	6	5	11	1	2	14
20	Tarung Derajat (KODRAT)	8	3	11	1	2	14
21	Tenis Lapangan (PELTI)	5	5	10	0	1	11
22	Tennis Meja (PTMSI)	4	4	8	1	2	11
23	Aero Sport (FASI)	8	5	13	0	1	14
24	Tinju (PERTINA)	7	2	9	0	4	13
25	Bridge (GABSI)	7	7	14	0	1	15
26	Wushu (WI)	12	1	13	1	2	16
27	Soft Tenis	4	4	8	0	2	10
28	MUEYTHAI	2	0	2	0	2	4
29	Panahan	11	1	12	0	1	13
30	Billyard (POBSI)	5	1	6	1	2	9
31	Dayung (PODSI)	12	4	16	0	2	18
	Jumlah	**266**	**131**	**397**	**20**	**67**	**484**

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh, 2017

Para atlit Kota Payakumbuh sudah mampu berkiprah dan meraih prestasi baik ditingkat provinsi maupun even olah raga tingkat nasional. Tahun 2017 yang lalu tercatat 36 atlit yang berhasil meraih medali di tingkat nasional pada 5 cabang olah raga, meliputi catur, karate, taekwondo, tinju dan Aero Sport. Di tingkat provinsi, prestasi tersebut malah sudah lebih dahulu menoreh prestasi yang menggembirakan, secara akumulasi berhasil diperoleh 149 medali dari atlit Kota Payakumbuh yang mengikuti ajang di tingkat provinsi.

Tabel II - 6840
Data Prestasi Atlit Kota Payakumbuh Skala Regional (PORPROV 2016) dan Nasional

No	Cabang Olah Raga	Prestasi (Jumlah Medali)	
		PORPROV 2016	Nasional 2017
1	Angkat Berat	11	-
2	Atletik	2	-
3	Balap Sepeda	3	-
4	Bola Basket	1	-
5	Bola Volly	1	-
6	Billyard	4	-
7	Bulu Tangkis		Juara III O2SN Nasional
8	Catur	5	1
9	Dayung	7	-
10	Judo	15	-
11	Karate	8	24
12	Kempo	4	
13	Menembak	4	-
14	Panjat Tebing	2	-
15	Pencak Silat	8	-
16	Renang	9	-
17	Senam	15	-
18	Sepak Bola	1	-
19	Sepak Takraw	1	-
20	Taekwondo	4	7
21	Tarung Drajat	4	-
22	Tenis Lapangan	4	-
24	Tinju	7	2
25	Wushu	11	-
26	Aero Sport	9	2
27	Soft Tenis	3	-
28	Panahan	4	-
29	Muaythai	2	-

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh, 2017

2. Sarana dan Prasarana Olahraga

Dalam mendukung prestasi atlit Kota Payakumbuh serta sebagai wadah masyarakat Kota Payakumbuh untuk berolahraga telah tersedia 131 sarana dan prasarana olah raga.

Tabel II - 6941
Sarana Prasarana Olahraga

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Lokasi
1	Lapangan Sepak Bola	10 Lapangan	Sawah Padang; Kubu Gadang; Sicincin Mudiak; Subarang Batuang; Parambahan; Padang Kaduduak; Talawi; Balai Jariang Utara; SMAN 2; SMAN 3
2	Lapangan Basket	20 Lapangan	Kubu Gadang; Daya Bangun; SMPN 1; SMPN 2; SMPN 3; SMPN 4; SMPN 5; SMPN 6; SMPN 7; SMPN 8; SMPN 9; SMAN 1; SMAN 2; SMAN 3; SMAN 4; SMAN 5; SMKN 1; SMKN 2; SMKN 3; Ngalau Indah Medan Nan Bapaneh
3	Lapangan Volley	53 Lapangan	Kubu Gadang (GOR); Balai Jariang Timur; SMPN 1; SMPN 2; SMPN 3; SMPN 4; SMPN 5; SMPN 6; SMPN 7; SMPN 8; SMPN 9; SMPN 10; SMAN 1; SMAN 2; SMAN 3; SMAN 4; SMAN 5; SMKN 1; SMKN 2, sebanyak 2 bh;SMKN 3; SMKN 4; SMKN 5; Padang Cubadak; Nan Kodok; Polsek Kaning Bukit; Payolinyam; Cubadak Air; Padang Kaduduak; Tarok; Balai Betung; Bodi; Muaro; Balai Gadang; Balai Cacang; Balai Baru; Labuah Baru; Talawi; Parambahan; Sicincin; Payolansek; Padang Tiakar Hilir; Kubu Gadang (Jl. Jeruk); Balai Gadang; Balai Nan Duo; Aur Kuniang; Kubu Gadang (Dekat PHI); Koto Baru Payobasuang; Napar; Tanah Mati; Ibuh; Tambago; Bonai;
4	Lapangan Bulu Tangkis	36 Lapangan	Ibuh; GOR M. Yamin; Jax's Bonai Tanjung Gadang; Polsek Kota Kaniang Bukit; Kaning Bukit; SMAN 2, Indoor 2 bh; SMKN 2 indoor, 3 bh; GOR Kantor Bupati 50 Kota Lama; Balai Jariang Timur; Nan Kodok; Payolinyam; Cubadak Air; Padang Kaduduak; Tarok; Balai Betung; Muaro; Balai Gadang; Balai Baru; Labuah Baru; Padang Cubadak; Talawi; Parambahan; Sicincin; Payolansek; Balai Gadang; Balai Nan Duo; Aur Kuniang; Koto Baru Payobasuang; Tanah Mati; Padang Karambia; Koto Baru Balai Janggo; Padang Tinggi
5	Lapangan Tenis	6 Lapangan	Tenis Indoor Kubu Gadang, 2 bh; Tenis Outdoor Kubu Gadang, 2 bh, Tenis Outdoor SMAN 2,Tenis Outdoor MAN 2, Tenis Outdoor Batalyon 131 BS, Tenis Outdoor SMAN 3
6	Lapangan Atletik	2 Lapangan	Gelanggang Kubu Gadang, Lapangan Sicincin
7	Kolam Renang	1 Lapangan	Ngalau Indah
8	Gelanggang/Balai Remaja	4 Lapangan	Ngalau Indah; Gelanggang Kubu Gandang; GOR M. Yamin; Medan Nan Bapaneh Ngalau Indah
TOTAL		**131**	

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh, 2017

3. Organisasi Pemuda

Organisasi pemuda cukup berkembang di Kota Payakumbuh yang ditandai dengan peningkatan jumlah sejak tahun 2013 sampai 2016, dari 10 buah menjadi 50 pada tahun 2016.

Tabel II - 7042
Jumlah Organisasi Pemuda Kota Payakumbuh yang Aktif
Tahun 2012 - 2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Organisasi Pemuda yang Mandiri	7	10	20	30	50

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh, 2017

2.4.2.14 Statistik

Sampai saat ini Kota Payakumbuh belum memiliki sistem aplikasi data secara elektronik, sehingga belum terwujud pengarsipan data tahunan yang tertata dengan baik. Ini mengakibatkan sulitnya updating data dan terjadinya perubahan data setiap tahun yang disampaikan oleh penyedia data. Sistim aplikasi yang digunakan saat ini adalah aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang dikelola secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri dan Sistim Database Perencanaan Pembangunan Daerah (SDP2D) yang dikelola oleh Provinsi Sumatera Barat. Dari kedua aplikasi ini justru terjadi persoalan yang mana jenis data yang tersedia dalam aplikasi tidak menggambarkan kondisi lokal kedaerahan, sehingga banyak elemen data yang tidak terisi. Seharusnya Pemerintah Kota Payakumbuh memiliki sebuah sistim aplikasi data terpadu yang terintegrasi dengan semua Perangkat Daerah. Kondisi di atas menyebabkan kurangnya ketersediaan data untuk kebutuhan perencanaan dan penelitian. Tingkat ketersediaan data untuk perencanaan baru sekitar 80%. Ini menandakan bahwa masih ada kekurangan data untuk perencanaan yang bisa berdampak pada kurangnya kualitas perencanaan pembangunan.

2.4.2.15 Kebudayaan

1. Agama

Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, ada beberapa tipe Masjid untuk daerah Kota/Kabupaten:

1. Masjid Agung, adalah Masjid yang terletak di Ibukota Pemerintahan Kota/Kabupaten yang ditetapkan oleh Walikota/Bupati atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/ Kabupaten menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri oleh pejabat Pemerintah Kota/Kabupaten.
2. Masjid Besar, adalah Masjid yang berada di kecamatan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah setingkat camat atas rekomendasi kepala KUA kecamatan, sebagai Masjid besar dia menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan
3. Masjid Jamik, adalah Masjid yang terletak di pusat pemukiman di wilayah kelurahan.

Tabel II - 7143
Data Masjid yang Memenuhi Keputusan DitJen Bimas Islam NomorDJ.II/802/2014

No.	Persentase Nilai/ Grade	Jumlah Masjid				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Persentase Nilai 81 - 100	3	4	4	5	5
2	Persentase Nilai 71 - 80	7	10	11	14	16
3	Persentase Nilai 61 - 70	28	26	25	24	22
4	Persentase Dibawah Nilai 60	45	43	43	40	40

Sumber: Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh, 2017

Untuk Kota Payakumbuh, belum ada Masjid Agung dan Masjid Besar. Sedangkan Masjid Jamik berjumlah 83 buah. Namun kondisi Masjid Jamik yang ada di Kota Payakumbuh belum semuanya memenuhi 41 indikator yang ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014.Dari 41 indikator tersebut pada akhir tahun 2017 dilakukan penilaian terhadap Masjid Jamik yang ada di Kota Payakumbuh dengan formulasi indikator yang dipenuhi sebuah Masjid dibagi 41 (indikator yang ditetapkan) dikalikan 100%. Dari tabel II-142, Masjid yang dikategorikan berfungsi secara baik adalah yang memiliki nilai di atas 70%.Disamping itu yang perlu mendapat perhatian dalam penerapan Adat Basyandi Syara` Syara` Basandi Kitabullah adalah terkait organisasi kemasyarakatan dan agama. Pembinaan dari organisasi tersebut diperlukan agar organisasi tersebut dapat berperan aktif dalam masyarakat.

Tabel II - 7244
Data Nama-Nama Lembaga/ Organisasi Islam Kota Payakumbuh Tahun 2016

NO	NAMA LEMBAGA/ORGANISASI	AKTIF	TIDAK AKTIF
1	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	V	
2	Dewan Masjid Indonesia (DMI)		v
3	Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ)	V	
4	Panitia Hari Besar Islam (PHBI)	V	
5	Ikatan Pemuda Tarbiyah Indonesia (IPTI)		v
6	Majelis Taklim Indonesia (MTI)	V	
7	Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT)		v
8	Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT)	V	
9	Kelompok Yasin	V	
10	Lembaga Didikan Subuh (LDS)	V	
11	Badan Kerja Sama Taman Pendidikan Quran (BKS TPQ)		v
12	Badan Kerja Sama Masjid (BKSM)	V	
13	Muhammadiyah	V	
14	Ikatan Pemuda Muhammadiyah		v
15	Ikatan Da'i Indonesia (IKADI)	V	
16	Forum Komunikasi Remaja Masjid (FKRM)		v
17	Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia (JPRMI)		v
18	Badan Hisab Rukyat (BHR)	V	
19	Nahdlatul Ulama (NU)		v
20	Badan Wakaf Indonesia (BWI)		v
21	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	V	
22	Persaudaraan Muslimah (Salimah)	V	

NO	NAMA LEMBAGA/ORGANISASI	AKTIF	TIDAK AKTIF
23	Majelis Dakwah Indonesia (MDI)		v
24	Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)	V	
25	Badan Pembinaan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4)	V	
26	Ikatan Qori dan Qoriah (IPQOH)		v
27	Lembaga Seni Qasidah Indonesia (LASQI)	V	
28	Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Indonesia (GUPPI)		v
29	Wanita Islam (WI)		v
30	Muslim Bersaudara	V	
31	Lembaga Dakwah Indonesia (LDI)		v

Organisasi tersebut dikatakan aktif apabila memiliki kepengurusan sesuai dengan periode yang ditetapkan, adanya program kerja tertulis dan realisasi capaian target pelaksanaan program yang melebihi 50% dari target yang telah ditetapkan.

2. Kebudayaan Daerah

Kebudayaan adalah sesuatu yang memengaruhi pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan bersifat abstrak Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Disamping itu yang perlu diperhatikan adalah Peranan Ninik Mamak dalam membangun Kota Payakumbuh, sebagai bagian dari kebudayaan Minangkabau dimana pondasi bermasyarakat dipengaruhi oleh Tigo Tunggu Sajarangan; Ninik-Mamak, Alim-Ulama, dan Cadiak Pandai. Untuk Tahun 2016, dapat diinformasikan bahwa peran aktif ninik mamak alam kegiatan budaya dan keagamaan dapat adalah 80%.

Tabel II - 7345
Even Seni dan Budaya Kota Payakumbuh Tahun 2012-2016

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Pameran/ Expo per tahun	Kali	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Penyelenggaraan Festival seni dan Budaya	Kali	4	4	4	5	6
3.	Jumlah Sarana penyelenggaraan Seni dan Budaya	Buah	1	1	1	2	2
4.	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yg dilestarikan	Unit	18	18	18	18	18
5.	Total benda, situs dan kawasan yg dimiliki	Unit	18	18	18	20	22
6.	Jumlah Grup Kesenian yang Aktif	Grup	16	16	16	16	16

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh, 2017

2.4.2.16 Perpustakaan

Perpustakaan merupakan salah satu sarana pembelajaran untuk mencerdaskan bangsa. Perpustakaan memiliki peranan penting sebagai jembatan menuju penguasaan ilmu pengetahuan sekaligus menjadi tempat rekreasi yang menyenangkan dan menyegarkan. Perpustakaan memberi kontribusi penting bagi terbukanya informasi tentang ilmu pengetahuan. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, perpustakaan harus menjadi sarana aktif/interaktif dan menjadi tempat dihasilkannya berbagai hal baru. Untuk mewujudkan kondisi perpustakaan sesuai dengan fungsi dan peranannya, maka perpustakaan harus diubah sistem operasionalnya dari perpustakaan manual/ tradisional menjadi perpustakaan yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi (perpustakaan digital). Dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan setiap perpustakaan secara bertahap dapat mengejar ketertinggalannya dari perpustakaan-perpustakaan yang lebih maju dan lebih modern serta dapat mengoptimalkan fungsi perpustakaan bagi masyarakat. Selain hal tersebut diperlukan suatu manajemen pengelolaan yang sesuai dengan standar dalam mengelola perpustakaan. Untuk tahun 2016, terlihat bahwa judul koleksi buku yang ada pada perpustakaan dibandingkan dengan jumlah buku, persentasenya masih rendah yaitu dibawah 55%. Hal ini berarti masih terbatasnya judul koleksi buku yang ada diperpustakaan. Kemudian dari jumlah perpustakaan yang ada ternyata masih jauh dari target populasi yang harus dilayani.

Tabel II - 7446
Perkembangan Perpustakaan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Judul	8.084	8.280	8.526	9.023	9.573
	Jumlah Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buku	15.485	15.822	16.316	17.094	18.196
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	52,2	51,83	52,26	52,78	52,61
2	Kunjungan perpustakaan	Orang	5.898	4.666	4.765	4.344	3.382
	Orang dalam populasi yang harus dilayani	Orang	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Pengunjung perpustakaan	%	11,79	9,33	9,53	8,69	6,76
3	Jumlah perpustakaan	Unit	27	33	37	40	39

Sumber: Dinas Arsip dan PerpustakaanKota Payakumbuh, 2017

2.4.2.17 Kearsipan

Arsip merupakan dokumen otentik dan legal tercipta karena pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan kehidupan kebangsaan. Arsip juga merupakan akuntabilitas kinerja aparatur yang dapat dijadikan sebagai saksi abadi terhadap keberhasilan dan kegagalan tugas aparatur negara. Arsip juga dapat dijadikan sebagai budaya dan sejarah. Untuk itu arsip harus diselamatkan dan dikelola dengan baik. Di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, urusan kearsipan diselenggarakan oleh kantor Arsip dan Perpustakaan. Pengelolaan kearsipan bertujuan untuk tracking surat/arsip serta memudahkan pencarian, pendokumentasian data secara baik, tepat dan akurat serta menjaga data tersimpan dengan baik.

1. Pengelolaan Arsip

Tabel II - 7547
Perkembangan Kerasipan di Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku	SKPD	26	26	29	29	29
2.	Jumlah SKPD	SKPD	30	30	30	31	31
3.	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	%	89,66	86,67	86,67	93,55	93,55
4.	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	-	-	-	1	1

Sumber:Dinas Arsip dan PerpustakaanKota Payakumbuh, 2017

Dari Tabel II-147 terlihat hampir semua SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh yang menerapkan arsip secara baku. Hal ini menandakan adanya keseriusan dari pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan arsip secara tertib, walaupun baru dilaksnakan oleh lembaga kerasipan daerah hal ini disebabkan karenasumber daya yang mengelola kearsipan di masing-masing SKPD masih terbatas. Yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari SDM yang mengelola arsip di setiap SKPD, karena dari Tabel di atas pada tahun 2012-2014 tidak ada kegiatan peningkatanuntuk peningkatan SDM pengelola kearsipan,mulai tahun 2015 baru ada kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan.

2. SDM Pengelola Kearsipan

Arsip merupakan dokumen yang harus tersimpan sebagai bukti historis dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Jumlah arsip yang harus dikelola di Kota Payakumbuh tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 meningkat dari 24.000 berkas menjadi 32.000 berkas. Namun kondisi ini tidak sebanding dengan jumlah pejabat fungsional arsiparis yang tersedia. Jumlah pejabat arsiparis ini dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 kondisinya tidak bertambah, dimana hanya tersedia 2 orang pada perangkat daerah terkait. Kondisi ini secara ideal tidak memenuhi, dimana dibutuhkankan sedikitnya ada 5 (lima) orang arsiparis untuk mengimbangi peningkatan jumlah arsip yang dikelola setiap tahunnya.

3. Rendahnya Pemahaman akan pentingnya Arsip

Kondisi ini dapat dilihat dari:

- Belum ada Kepala Perangkat Daerah yang menunjuk dan menugaskan personil sebagai pengelola arsip di PD masing-masing.
- Belum ada Kepala Perangkat Daerah yang menyediakan ruangan untuk pengelolaan arsip di PD masing-masing.
- Belum ada Kepala Perangkat Daerah yang menyediakan anggaran untuk pengadaan sarana penunjang pengelolaan arsip.

Tabel II - 7648
Tabel Jumlah Arsip dan Pejabat Arsiparis pada Dinas Perpustakaan dan Arsip tahun 2012-2016

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Arsip Daerah yang Harus Dikelola	berkas	24.000	25.000	26.500	29.000	29.000
2	Jumlah Pejabat Fungsional Arsiparis	orang	2	2	2	2	2

Sumber:Dinas Arsip dan PerpustakaanKota Payakumbuh, 2017

2.4.3 Urusan Pilihan

2.4.3.1 Urusan Pariwisata

Potensi pengembangan pariwisata di Kota Payakumbuh kedepan cukup besar, baik dalam bentuk wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner Objek wisata alam yang cukup terkenal dikota ini antara lain adalah: Ngalau Indah dan Panorama Ampangan. Untuk objek wisata budaya antara lain meliputi kebudayaan Minangkabau berikut kesenian asli rakyatnya sedangkan untuk wisata kuliner disepanjang Jalan Soekarno Hatta, Jalan Ahmad Yani dan Jalan Jenderal Sudirman Payakumbuh.

Tabel II - 7749
Data dan Informasi Capaian Indikator Urusan Pariwisata
Tahun 2016

No	DATA	Ket
1	Rata Rata lama kunjungan wisata	0,60%
2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,94%
3	Jumlah Kemitraan Pariwisata	283 unit
4	Jumlah atraksi wisata	11
5	Jumlah Pokdarwis	3
6	Jumlah objek wisata unggulan	3 objek wisata

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh, 2017

1. Kunjungan Wisata

Jumlah kunjungan wisata meningkat dan terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Meskipun jumlah kunjungan wisata cukup tinggi, namun memberikan kontribusi yang cukup berarti kepada perekonomian daerah. Hal ini disebabkan karena jumlah wisatawan yang tercatat umumnya merupakan wisatawan lokal dan regional yang tidak menginap di Kota Payakumbuh.

Tabel II - 7850
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan PariwisataKota Payakumbuh
Tahun 2012- 2016

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Kunjungan wisata	Orang	120.224	105.870	116.648	129.963	166.017
	Kunjungan wisata Asing	Orang	115	100	108	1.156	2.355
	Kunjungan wisata Domestik	Orang	120.109	105.770	116.540	128.807	163.662
2	Jumlah objek wisata unggulan	Buah	1	1	1	1	1
3	Jumlah restoran, rumah makan dan warteg	Unit	161	94	113	138	161
4	Jumlah event pariwisata dan budaya yang terlaksana	Kali	11	16	16	11	16
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%		0,94	0,94	0,95	0,95

Sumber: Perubahan Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh, 2016

Dilihat dari jumlah kunjungan wisata, jumlahnya cukup besar dan terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Meskipun jumlah kunjungan wisata cukup tinggi, namun memberikan kontribusi yang cukup berarti kepada perekonomian daerah. Hal ini disebabkan karena jumlah wisatawan yang tercatat umumnya merupakan wisatawan lokal dan regional yang tidak menginap di Kota Payakumbuh.

2. Sarana Pendukung Pariwisata

Untuk mendukung kepariwisataan, Pemerintah Kota Payakumbuh telah membangun berbagai sarana pendukung yang bertujuan untuk kenyamanan wisatawan.

Tabel II - 7951
Sarana Pendukung Pariwisata

No.	Fasilitas Pendukung	Jumlah
1	Gazebo	6
2	Billboard	1
4	Kios Promosi	1
5	Bangunan Mesin	1
6	Ember Tumpah	2
7	Gedung Bilas	2
8	Gedung Loket	3
9	Gerbang Wisata	1
10	Instalasi Bilas Kolam Renang	1
11	Jembatan Reflekasi	1
12	Kantor Tiket Dan Informasi	1
13	Kantor Tiket Ngalau Indah	1
17	Lapangan Parkir	1
18	Merk Rest Area	1
19	Neon Box	3

No.	Fasilitas Pendukung	Jumlah
20	Pagar Kolam Renang	1
21	Papan Baliho	1
22	Parkir	1
23	Taman Pada Rest Area	1
24	Portal Pembatas Jalan	1
26	Rumah Mesin Pompa	1
27	Sarana Permainan Anak Anak	1
28	Taman Digital	1
29	Taman Kolam Renang	1
30	TV Led	2
31	WC Umum	1
32	Tangga Gua Ngalau	1
33	Bangunan WC Ampangan	1
34	Tenda Payung Ampangan	1
35	Instalasi Listrik	4

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh, 2017

2.4.3.2 Urusan Pertanian

1. Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan di Kota Payakumbuh cukup tinggi setiap tahunnya sebagai konsekuensi pertumbuhan penduduk dan berubahnya fungsi lahan pertanian menjadi bangunan perumahan dan komersial. Dalam lima tahun terakhir perubahan fungsi lahan sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, perlu penerapan RTRW yang ketat dalam perizinan dan penyusunan Perda tentang Pertanian Berkelanjutan.

Tabel II - 8052
Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non-Pertanian 2012 - 2017

No	Data Awal (Ha)	Alih Fungsi Lahan (Ha)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Lahan Pertanian Awal; 2751 Ha	2 Ha	2 Ha	3 Ha	2 Ha	3 Ha

Sumber: Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2017

Tabel II - 8153
Luasan Lahan yang Mengalami Penurunan Tingkat Kesuburan

No	Jenis lahan	Luas lahan (ha)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Lahan basah	2 ha	2 ha	3 ha	6 ha	6 ha
2	Lahan kering	1 ha	1 ha	1 ha	2 ha	2 ha

Sumber: Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2017

2. Potensi Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura

Potensi pertanian tanaman pangan dan hortikultura di wilayah Kota Payakumbuh beraneka ragam dan tersebar di seluruh kecamatan. Komoditas unggulan tanaman pangan dan hortikultura di Kota Payakumbuh terdiri dari padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang panjang, cabe, terung, ketimun, dan kakao merupakan komoditas yang sangat prospektif untuk dikembangkan komoditas hortikultura disamping untuk memenuhi kebutuhan lokal, komoditas hortikultura terutama sayur-sayuran telah dipasarkan ke luar provinsi Sumatera Barat. Lahan pertanian dari tahun 2010 sampai tahun 2016 terus mengalami penurunan karena telah banyak beralih fungsi menjadi area pemukiman dan pemanfaatan lahan untuk non pertanian. Namun dengan program intensifikasi pertanian seperti penggunaan benih unggul bermutu, dan penerapan teknologi anjuran sudah berkembang maka produktifitas komoditi pertanian dapat meningkat selama lima tahun terakhir. Pengembangan komoditas tanaman pangan dan hortikultura juga telah dibarengi dengan peningkatan dan pengembangan kelembagaan, akses permodalan dan pemasaran yaitu Gabungan Kelompok Tani, Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA), Terminal Agribisnis dan Sub Terminal Agribisnis (STA).

Tabel II - 8254
Jumlah Produksi Komoditas PertanianKota Payakumbuh
Tahun 2012 - 2016

No.	Komoditas	**Tahun**(dalam ton)				
		2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1.	Produksi Padi	35.334	33.123	33.424	35.962	37.402
2.	Produksi Jagung	1.959	1.689	1.682	1.519	1.180
3.	Produksi Ubi Kayu	9.163	6.605	14.072	76.647	5.250
4.	Produksi Kacang panjang	234,5	218,8	317,0	305	252
5.	Produksi Cabe	283,8	236,9	370,5	390	973,9
6.	Produksi Terung	364,0	276,0	334,0	539.6	1.070,3
7.	Produksi Ketimun	673,9	471,9	539,7	688	1.469,8
9.	Produksi Kangkung	337	281	184	8.4	161,8
10.	Produksi Kakao	919,61	919,61	937,3	967.5	321,5

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka, 2017

3. Sarana dan Prasarana Pertanian

Dalam menunjang peningkatan produksi pertanian, maka setiap tahun selalu dilakukan pembangunan sarana dan prasarana pertanian, baik itu berupa irigasi tersier maupun jalan usaha tani, sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel II - 8355
Jumlah dan Tipe Sarana dan Prasarana Pertanian yang Dibangun pada Tahun 2012 – 2016

No	Kecamatan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
	I. Irigasi tersier					
1	Payakumbuh barat	-	-	3 paket	6 paket	-
2	Payakumbuh timur	-	2 paket	3 paket	8 paket	-
3	Payakumbuh utara	-	2 paket	-	10 paket	-
4	Payakumbuh selatan	-	-	3 paket	5 paket	-
5	Latina	-	3 paket	3 paket	5 paket	-
	II. Jalan usaha tani					
1	Payakumbuh barat	-	2 paket	1 paket	-	6 paket
2	Payakumbuh timur	-	2 paket	1 paket	2 paket	4 paket
3	Payakumbuh utara	-	1 paket	-	-	3 paket
4	Payakumbuh selatan	-	1 paket	-	-	1 paket
5	Latina	-	2 paket	1 paket	1 paket	2 paket

Sumber: Dinas PertanianKota Payakumbuh, 2017

4. Produktifitas Peternakan

Kemajuan dibidang peternakan dapat dilihat dengan peningkatan populasi ternak, peningkatan produksi daging serta menurunnya berbagai penyakit ternak. Disamping dalam bentuk perkembangan populasi, produksi daging, telur dan susu dalam pembangunan peternakan juga dilakukan berbagai kegiatan yang bersifat penunjang seperti inseminasi buatan dan kegiatan pemeliharaan kesehatan. Perkembangan populasi dan produksi peternakan Tidak hanya dari sisi pengembangan produksi peternakan, Kota Payakumbuh juga telah menyiapkan Sentra Pemasaran Peternakan Terpadu, yang meintegrasikan lokasi Pasar Ternak, Rumah Potong Hewan (RPH), Laboratorium Percontohan, BPP dan instalasi Pengolahan Pakan di kawasan Kelurahan Koto Panjang Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur. Untuk meningkatkan produksi daging, Pemerintah Koto Payakumbuh juga mendirikan *breeding farm* di Kelurahan Kapalo Koto.

Tabel II - 8456
Populasi Peternakan Tahun 2012 - 2016

No	Ternak (ekor)	2012	2013	2014	2015	2016
1	Sapi Perah	5.164	4.075	5.520	5.699	5.536
2	Sapi Potong					
3	Kerbau	432	296	859	383	189
4	Kuda	536	551	513	531	337
5	Kambing	5.995	5.875	5.459	5378	5.628
6	Ayam Kampung	82.952	89.588	106.092	83.061	50.728
7	Puyuh	268.950	232.000	219.250	207.800	123.650
8	Itik	66.215	67.855	70.267	87.622	58.964
9	Ayam Ras Petelur	679.000	737.500	751.500	737.250	788.300
10	Ayam Ras Pedaging	966.800	1.127.000	1.064.000	1.144.000	1.070.000

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka, 2017

Tabel II - 8557
Perkembangan Produksi Daging dan Telur Tahun Kota Payakumbuh 2012 - 2016

No	Jenis Ternak dan Unggas	Tahun (Kg)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	**Daging**	**2.692.273**	**3.006.108**	**3.154.404**	**3.061.946**	**2.404.694**
	Daging Sapi	947.208	1.031.766	1.152.009	1.074.433	1.250.000
	Daging Kerbau	113.169	105.923	190.533	111.038	46.972
	Daging kambing	81.665	105.862	79.695	89.458	34.632
	Daging Kuda	5.460	13.440	13.440	18.060	7.770
	Daging ayam kambing	89.422	96.576	114.367	89.540	16.405
	Daging Ayam ras pedaging	519.243	1.059.380	1.000.159	1.075.360	497.918
	Daging ayam ras petelur	908.792	565.171	575.214	575.072	242.640
	Daging itik	27.314	27.990	28.985	28.985	308.357
2.	**Telur**	**5.353.936**	**5.729.653**	**5.857.687**	**5.794.692**	**6.060.000**
	Telur ayam ras	4.937.430	5.299.905	5.404.155	5.284.583	5.700.552
	Telur ayam kampung	52.986	57.224	67.766	53.055	32.403
	Telur itik	363.520	372.524	385.765	456.785	308.357

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka, 2017

5. Dukungan Permodalan

Peran pemerintah dalam memfasilitasi perekonomian masyarakat cukup signifikan, ini terlihat dari berbagai fasilitas yang diberikan kepada kelompok masyarakat petani yang membutuhkan pengembangan usaha dan permodalan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel II - 8658
Jumlah Usaha Pertanian Yang Membutuhkan Akses Permodalan

No	Sub sektor	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Tanaman pangan	62	66	75	92	97
2	Hortikultura	26	34	37	40	44
3	Bunhut	7	8	9	11	14
4	Perikanan	10	15	14	14	21
5	Peternakan	75	77	87	89	99
6	Up3hp	5	4	4	4	4
7	Poklahsar	-	3	3	3	3

Sumber: Dinas PertanianKota Payakumbuh, 2017

Tabel II - 8759
Jumlah Gapoktan yang Difasilitasi Permodalan

No	Jumlah awal gapoktan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
	Jumlah awal yang di fasilitasi	4	32	32	32	32
1	Payakumbuh barat	-	7	7	7	7
2	Payakumbuh timur	1	7	7	7	7
3	Payakumbuh utara	1	4	4	4	4
4	Payakumbuh selatan	1	9	9	9	9
5	Latina	1	5	5	5	5

Sumber: Dinas PertanianKota Payakumbuh, 2017

2.4.3.3 Urusan Perdagangan

Perdagangan di Kota Payakumbuh sangat berperan penting dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan sumber daya lokal serta mengembangkan usaha kecil, mikro dan koperasi. Sektor perdagangan di Kota Payakumbuh terus mengalami peningkatan yang diiringi dengan adanya peningkatan infrastruktur, kejelian pemasaran dari masyarakat dalam membaca peluang, dan lembaga keuangan penyandang dana pinjaman yang ada serta pembinaan pemerintah dalam memotivasi usaha masyarakat.

1. Sarana Perdagangan

Selama kurun waktu tahun 2012-2016, jumlah sarana perdagangan selalu meningkat, ini menggambarkan pergerakan ekonomi masyarakat Kota Payakumbuh pada sektor perdagangan.

Tabel II - 8860
Perkembangan Sarana Perdagangan Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Pasar (Pasar Tradisional, modern, swalayan, kios, toko)	unit	4.236	4.237	4.252	4.246	4.260
	Pasar Tradisional (Ibuh)	unit	2	2	2	2	2
	Pasar Lokal (Pusat Pertokoan)	unit	1	1	1	1	1
	Mall	buah	1	1	1	1	1
	Pasar Swalayan	buah	15	16	12	15	15
	Toko/warung/kios/Los	buah	1.916	1.916	1.935	1.966	1.979
	Kaki lima	buah	2.301	2.301	2.301	2.261	2.261
2	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	klp	1.600	1.800	1.970	2.179	2.354
3	Usaha Perdagangan yang dipasarkan melalui Teknologi Informasi	Unit	nA	nA	nA	nA	16

Sumber: Dinas Koperasi dan UKMKota Payakumbuh, 2017

Tabel II - 8961
Jumlah Sarana Perdagangan Tahun 2016

No	Lokasi		Jumlah		
			Toko	Kios	Los
1	Pasar Pertokoan Kota Payakumbuh	Lantai I	531	48	102
		Lantai II	486	-	-
2	Pusat Pertokoan Terminal Sago	Lantai I	24	16	40
3	Pasar Ibuh	Lantai I	157	358	156
		Lantai II	58	-	-
4	Pasar Rakyat Payakumbuh 2 Padang Kaduduk	Lantai I	-	84	144
5	Pondok promosi	Lantai I	3	-	-
6	Kanopi Taratak Padang Kampuang		-	-	7
Jumlah			**1.259**	**506**	**449**

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, 2017

2. Aktifitas Perdagangan

Untuk menjamin kualitas barang yang dikonsumsi masyarakat, maka telah dilakukan tera ulang terhadap peralatan pedagang, walaupun Kota Payakumbuh belum memiliki pasar tertib ukur, namun kegiatan tera ulang selama ini cukup memberikan kenyamanan konsumen.

Tabel II - 9062
Informasi Tertib Perdagangan

No	Uraian	Jumlah
1.	Data Yang Melakukan Tera Ulang	1.503
	SPBU	4
	SPBE	1
2.	Pasar tertib Ukur	Belum Ada
3.	Jumlah Pedagang besar yang memiliki Gudang Dipusat Kota	13 Buah

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, 2017

3. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima merupakan salah satu penggerak perekonomian Kota Payakumbuh, dimana jumlah pedagang kai lima cukup besar. Samapi saat ini yang diperlukan adalah penataan dan melengkapi fasilitas bagi pedagang kaki lima ini yang perlu ditingkatkan.

Tabel II - 91
Distribusi Pedagang Kaki Lima Kota Payakumbuh Tahun 2016

No	Lokasi	Jumlah
A	**Pasar Pusat Payakumbuh**	
1	Pelataran pertokoan barat	96
2	Emperan blok barat	30
3	Deretan tukang patri	21
4	Pelataran dan emperan timur	30
5	Pelataran terminal sago	205
6	Pedagang malam	254
	Jumlah	**636**
B	**Pasar Ibuh**	
1	Palung	417
2	K5 Pelataran Barat	75
3	K5 Pasar Sore Ibuh	80
4	Pedagang Ayam	45
5	Pedagang Ikan Basah	70
6	Pedagang Daging	38
7	Pedagang Asongan	800
8	Pedagang Bibit Ikan	100
	Jumlah	**1.625**
Total		**2.261**

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, 2017

Gambar II - 7
Lokasi Pedagang Malam (Kuliner Malam)
Sumber: Dinas Koperasi, UMKM Kota Payakumbuh, 2017

Gambar II - 8
Pedagang Garendong Kota Payakumbuh
Sumber: Dinas Koperasi, UMKM Kota Payakumbuh, 2017

4. Kerjasama dan Dukungan Usaha Perdagangan

Gambar II - 9
Bantuan Dana DAK TA. 2015 Los Ikan Kering Pasar Ibuh Blok Timur Kota Payakumbuh

Gambar II - 7
Bantuan Dana DAK TA. 2016Lokasi 1: Pasar Tradisional Ibuh Blok Barat Kota Payakumbuh

Gambar II - 8
Bantuan Dana DAK TA. 2016Lokasi 2: Pasar Pusat Pertokoan Blok Barat/ Kios L, M, N (Inpres 77/78) Kota Payakumbuh
Sumber: Dinas Koperasi, UMKM Kota Payakumbuh, 2017

2.4.3.4 Urusan Perindustrian

Lapangan usaha industri pengolahan tahun 2016 berkontribusi sebesar 5,63% terhadap PDRB Payakumbuh dengan laju pertumbuhan cukup tinggi yaitu 7,24 %. Jumlah industri selama beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi pertumbuhan. Berfluktuasinya perkembangan industri di Kota Payakumbuh karena industri yang berkembang masih banyak yang berskala rumah tangga dan berskala mikro, kecil, menengah yang dikelola baik secara formal maupun informal, sehingga rentan sekali untuk beralih usaha ke sektor lain jika ditimpa krisis. Industri rumah tangga (Home Industry) yang banyak digeluti masyarakat adalah jenis makanan ringan, seperti gelamai, beras rendang, rendang telur, rendang runtiah, kerupuk sanjai, karak kaliang dan jenis kerupuk lainnya.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan pemasaran produk industri ini antara lain melalui kegiatan promosi di pondok promosi serta melalui program *one produk one vilage* (OVOP) yang direalisasikan dengan mendirikan sentra kampung rendang, kampung tenun, sentra makanan ringan dan kampung kerajinan bambu. Kedepan, diharapkan lapangan usaha industri pengolahan yang menggunakan bahan baku dari produk pertanian bisa semakin berkembang sehingga selain untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian juga tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha pertanian khususnya, dan lapangan usaha lainnya dapat diserap oleh lapangan usaha industri.

Gambar II - 9
Sentra Makanan Ringan dan Kampung Rendang Kota Payakumbuh
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, 2017

1. Perkembangan Industri

Perkembangan industri di Kota Payakumbuh didominasi oleh unit usaha skala kecil dan non formal. Perkembangannya fluktuatif sesuai dengan situasi perekonomian. Gambarannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II - 92
Perkembangan Industri Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Unit Usaha	Unit	1.614	1.569	1.616	1.763	1.737
2.	Formal	unit	805	230	274	503	503
3.	Non Formal	unit	811	933	1.337	1.260	1.260
4.	Tenaga Kerja	orang	9.063	9.063	5.724	6.410	5.630
5.	Nilai Investasi	Rp.	86.383.066	85.763.000	85.763.000	86.366.384	86.366.384
6.	Nilai Produksi	Rp.	227.459.389	208.654.000	234.880.000	230.967.00	325.430.000

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, 2017

2. Kapasitas Produksi

Kapasitas produksi untuk sektor UMKM di Kota Payakumbuh masih didominasi oleh usaha tradisional yang belum menggunakan kemasan yang baik. Sampai tahun 2016, dari data yang tersedia, baru 25 unit usaha yang telah menggunakan kemasan yang baik, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel II - 93
Kapasitas Produksi

Jenis Industri	Unit Usaha	Kapasitas Produksi (Unit/Tahun)	Nilai Produksi (Rp.000/ Tahun)	Produk dengan Kemasan yang Baik	Industri yang Memiliki Dok. Lingkungan
Industri kerupuk dan sejenisnya	285	3.698.034	5.904.649	1	-
Industri penggilingan padi	54	2.259.444	3.140.550	-	-
Industri kue basah	243	6.737.298	2.939.501	-	-
Industri makanan yang belum termasuk kelompok manapun	75	326.484	1.804.760	24	-
Industri furniture dari kayu	87	55.104	1.675.836	-	-
Industri percetakan	33	216.358.704	1.315.700	-	-
Industri roti dan sejenisnya	53	1.968.558	1.213.432	-	-
Industri air minum dalam kemasan/ air isi ulang	82	1.068.432	1.132.560	-	-
Industri anyam-anyaman dari rotan dan bambu	124	450.408	830.500	-	-
Industri barang-barang dari semen	75	899.580	786.514	-	-
Industri batu bata dari tanah liat	46	5.161.800	466.860	-	-
Industri pengolahan dan pengawetan daging	11	1.609	462.750	-	-
Industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya selain kecap dan tempe (industri tahu)	28	268.824	416.432	-	-
Industri penggergajian kayu	2	5.484	314.000	-	-
Industri alat-alat dapur dari kayu, rotan dan bambu	1	480	180.000	-	-
Industri bumbu masak dan penyedap makanan	9	40.656	172.700	-	-
Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran	13	135.672	161.295	-	-
Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran	11	153.336	158.000	-	-
Industri berbagai macam tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian dan sejenisnya	14	82.788	151.740	-	-
Industri peti kemas dari kayu kecuali peti mati	10	2.700	150.000	-	-
Industri kerajinan dan ukir-ukiran dari kayu kecuali furniture	4	1.800	140.000	-	-
Industri ransum pakan ternak/ikan	5	187.200	86.600	-	-
Industri minuman ringan (soft drink)	5	36.672	79.000	-	-
Industri es (macam-macam es)	5	32.400	74.470	-	-
Industri barang dari batu untuk keperluan rumahtangga dan pajangan	2	21.600	69.000	-	-
Industri pengolahan teh dan kopi	5	30.000	56.150	-	-
Industri kapur	2	58.800	51.125	-	-
Industri pengeringan dan pengolahan tembakau	3	19.440	47.840	-	-

Jenis Industri	Unit Usaha	Kapasitas Produksi (Unit/Tahun)	Nilai Produksi (Rp.000/ Tahun)	Produk dengan Kemasan yang Baik	Industri yang Memiliki Dok. Lingkungan
Industri tempe	2	36.720	39.000	-	-
Industri makaroni, mie, spagheti, bihun, soun dan sejenisnya	3	7.800	38.000	-	-
Industri susu	2	1.560	29.000	-	-
Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumahtangga termasuk pasta gigi	2	1.248	20.250	-	-
Industri minyak dari kelapa	-	-	-	-	-
Industri kosentrat pakan ternak	-	-	-	-	-
Industri moulding dan komponen bahan bangunan	-	-	-	-	-
Industri barang-barang dari tanah liat untuk keperluan rumahtangga	-	-	-	-	-
Industri jasa reparasi kendaraan bermotor (mobil)	93	62.976	2.363.855	-	-
Industri barang-barang logam bukan alumunium siap pasang untuk bangunan	66	21.852	1.316.840	-	-
Industri jasa bengkel/ reparasi sepeda motor	78	18.852	1.110.170	-	-
Industri pakaian jadi dari tekstil	35	68.160	735.950	-	-
Industri barang tekstil jadi kecuali untuk pakaian jadi	34	119.700	642.000	-	-
Industri pemeliharaan dan perbaikan elektronik	16	27.000	367.600	-	-
Industri kerajinan yang tidak termasuk golongan manapun	30	48.792	358.050	-	-
Industri jasa reparasi kendaraan bukan bermotor (sepeda)	29	7.104	351.070	-	-
Industri bordir / sulaman	12	6.528	318.150	-	-
Industri jasa perorangan lainnya	9	45.348	191.200	-	-
Industri pengolahan lainnya yang belum termasuk golongan manapun	6	6.096	181.600	-	-
Industri Furnitur dari logam	10	468	168.150	-	-
Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi	3	168	110.000	-	-
industri kain rajut	2	1.464	65.000	-	-
Industri alat pertukangan dari logam	2	60	30.250	-	-
Industri alat pertanian dari logam	2	302	30.000	-	-
Industri Pertenunan	3	192	21.000	-	-
Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari	1	720	18.000	-	-
Industri mesin pertanian dan kehutanan	2	156	17.500	-	-
Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	2	12	10.000	-	-
Industri mainan	1	192	10.000	-	-
Industri alat musik tradisional	2	1.140	9.500	-	-

Jenis Industri	Unit Usaha	Kapasitas Produksi (Unit/Tahun)	Nilai Produksi (Rp.000/ Tahun)	Produk dengan Kemasan yang Baik	Industri yang Memiliki Dok. Lingkungan
Industri penempaan pengepresan dan penggilingan logam	1	480	8.000	-	-
Industri alat-alat dapur	2	2.820	260	-	-
Industri Pemintalan Benang	-	-	-	-	-
Industri peralatan kantor dari logam tidak termasuk furnitur	-	-	-	-	-
Industri komponen dan suku cadang motor	-	-	-	-	-
Industri jasa reparasi jam	-	-	-	-	-
Jumlah	**1.737**	**240.551.217**	**32.542.359**	**25**	**-**

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, 2017

2.4.3.5 Kelautan dan Perikanan

Kemajuan pembangunan perikanan dapat dilihat dengan peningkatan produksi perikanan budidaya ikan konsumsi, peningkatan produksi penih ikan dan peningkatan penangkapan ikan di perairan umum.Kegiatan pembangunan di bidang perikanan secara umum adalah bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan mayarakat Kota Payakumbuh akan protein hewani dari ikan. Sampai saat ini walaupun produksi perikanan mengalami peningkatan dari tahun ketahaun tapi untuk pemenuhan kebutuhan Kota Payakumbuh sebagian besar masih didatangkan dari daerah lain seperti dari Danau Maninjau, Waduk Koto Panjang, Rao (Pasaman), Padang Pariaman, Pulau Gadang (Bangkinang), Mudiak (50 Kota).

Tabel II - 94
Perkembangan Populasi, Produksi dan Kegiatan Perikanan Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	**Rumah Tangga Pembudidaya ikan**						
	• Pembudidaya ikan kultur (sambilan utama)	RT	706	698	698	698	698
	• Pembudidaya Ikan Kultur (sambilan tambahan	RT	2.501	2.513	2.513	2.513	2.513
	• Penangkap ikan	RT	-	-	38	38	38
2	**Produksi Benih Ikan**						
	• Luas Kolam	ha	4,3	4,4	4,4	4,4	6,3
	• Produksi	Juta ekor	7.500	6.092	6.092	6.092	8.358
3	**Produksi Pembudidayaan Ikan Rakyat (Ikan Konsumsi)**						
	• Luas Kolam	Ha	198,3	192,57	262,39	201,73	201,73
	• Produksi	Ton	385,72	436,4	485,74	512,37	433,27
4	**Penagkapan Ikan di Perairan Umum**						
	• Luas Kolam	Ha	38,95	38,95	38,95	38,95	38,95
	• Produksi	Ton	4,2	9,94	4,9	5,6	6,2

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka, 2017

Aktivitas budidaya perikanan darat di Kota Payakumbuh melalui budidaya kolam air deras, kolam air tenang, keramba, dan perairan umum. Jenis ikan yang banyak dibudidayakan antara lain ikan nila, ikan lele, ikan mas, dan ikan gurami. Dalam peningkatan kegiatan budidaya dalam rangka peningkatan produksi juga diiringi dengan penyediaan benih unggul, pakan yang murah dan jaminan pasar melalui kegiatan pengolahan. Secara lebih lengkap perkembangan populasi, produksi dan kegiatan perikanan dapat dilihat pada tabel II-166. Adanya kenaikan luas dan produksi budidaya ikan didukung dengan adanya Balai Benih Ikan (BBI) sebanyak 1 unit dan Unit Pembenihan Ikan Rakyat (UPR) sebanyak 4 unit, serta didukung dengan pengembangan pabrik pakan ikan.

Tabel II - 167
Jumlah Produksi Perikanan Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2016

No	Jenis produk	Satuan	Produksi				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Produksi Perikanan	Ton	355,22	436,4	485,74	512,35	433,27
2	Produk Olahan Perikanan	Ton	25,02	12,5	15	17,9	18,3
3	Benih Perikanan	Ribu ekor	7.500	6.092	6.092	6.512	8.632

Sumber: Dinas PertanianKota Payakumbuh, 2017

2.4.4 Penunjang Urusan

2.4.4.1 Perencanaan

Tabel II - 95
Tabel keselarasan dokumen perencanaan dan realisasi pembangunan

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	%	87	90	91,57	95,64	95,69
2.	Persentase Realisasi Pembangunan	%	88	90	93	99,44	99,30

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh, 2017

Dalam hal perencanaan keselarasan dan realisasi dari perencanaan merupakan salah satu alat ukur berkualitasnya sebuah perencanaan. Keselarasan dan realisasi perencanaan dianggap berhasil apabila seluruh dokumen perencanaan selaras dan dapat direalisasikan seluruhnya. Kondisi dokumen perencanaan di Kota Payakumbuh dilihat dari keselarasan meningkat dari tahun ke tahun.

2.4.4.2 Keuangan

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, termasuk tanggung jawab dan aktif mencari berbagai peluang peningkatan pendapatan daerah. Peraturan daerah dan kebijakan diformulasikan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, yaitu kebijakan dalam pengelolaan pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Kemampuan keuangan daerah masih terbatas maka pendapatan daerah mengandalkan dua sumber utama, yaitu Dana Perimbangan (termasuk DAU dan DAK) dan sumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menjadi sumber utama pendanaan pembangunan dan belanja pegawai.

Peningkatan dalam pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan kebijakan pengelolaan yang transparan dan akuntabel dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pengelolaan keuangan daerah mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan berbasis akuntansi, nilai-nilai historis, realistis, periodisasi, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian secara wajar. Pemerintah Kota Payakumbuh sejak tahun 2012-2016 telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, termasuk kategori baik.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel II - 96
Capaian Kinerja Indiktor Urusan Penunjang Keuangan Tahun 2012-2016

No	Indikator	Capaian				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Belanja langsung terhadap total APBD (%)	38,34	43,43	46,00	52,06	51,34
2	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (%)	10,65	9,99	10,92	14,30	12,19
3	Rasio SILPA terhadap total pendapatan (%)	7,71	7,10	9,89	9,26	10,30
4	Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja (%)	93,10	89,93	90,80	93,16	94,34
5	Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD (%)	112,94	102,56	107,78	120,19	115,15
6	Peningkatan PAD (%)	17,41	4,57	24,60	27,91	5,27

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh, 2017

2.4.4.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1. Pengembangan Kapasitas Kepegawaian

Tabel II - 97
Tabel Jumlah Pejabat yang Mengikuti Diklat Struktural
Tahun 2012-2016

No	Eselon	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Eselon II	orang	1	1	1	-	3
2	Eselon III	orang	3	5	5	2	1
3	Eselon IV	orang	36	29	30	-	32

Sumber: BKPSDM Kota Payakumbuh, 2017

Dari tabel terlihat jumlah pejabat yang mengikuti diklat struktural cukup berfluktuatif. Untuk eselon II ada kenaikan dari kondisi 1 orang tahun 2012 menjadi 3 orang pada tahun 2016. Untuk eselon III, dari tahun 2012 sampai tahun 2014 terjadi kenaikan dari 3 orang menjadi 5 orang, namun tahun-tahun berikutnya menurun sampai tahun 2016 terjadi penurunan menjadi 1 orang. Selanjutnya untuk eselon IV juga terjadi penurunan dari 36 orang tahun 2012 menjadi 32 orang tahun 2016.

Tabel II - 98
Tabel Jumlah Pejabat yang Mengikuti Diklat Teknis dan Pejabat Fungsional Tertentu Tahun 2012-2016

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Pejabat yang Mengikuti Diklat Teknis	Orang	16	104	217	97	199
2	Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu	orang	2.212	2.325	2.269	2.225	1.569

Sumber: BKPSDM Kota Payakumbuh, 2017

Jumlah pejabat yang mengikuti diklat teknis tahun 2012 sampai tahun 2014 naik dari 16 orang menjadi 217 orang, sedangkan tahun 2015 turun menjadi 97 orang dan naik lagi tahun 2016 menjadi 199 orang. Kondisi ini berbeda dengan kondisi jumlah pejabat fungsional tertentu dimana tahun 2012 sebanyak 2.212 orang, naik menjadi 2.325 orang tahun 2013, selanjutnya tahun-tahun berikutnya menurun sampai menjadi 1.569 orang tahun 2016.

Disamping itu, Data jumlah ASN yang ditempatkan sesuai formasi pada tahun-tahun sebelumnya belum pernah dilakukan perhitungan. Hal ini karena cukup sulit mengidentifikasi posisi ASN sesuai dengan formasi yang dilamar pada saat masuk sebagai CPNS. Kondisi kebutuhan pegawai yang bergerak cukup dinamis antar Perangkat Daerah mengakibatkan beberapa CPNS tidak lagi pada posisinya yang sesuai dengan pada saat penerimaan awal. Namun mulai tahun 2017 telah dilakukan penghitungan terhadap pejabat struktural yang menempati jabatan sesuai dengan formasi kependidikan dan kompetensi yang dimilikinya.

2. Kedisiplinan Pegawai

Permasalahan kepegawaian di Kota Payakumbuh, berdasarkan data pada tahun 2015 dan 2016 diidentifikasikan terkait dengan pelanggaran kewajiban pegawai untuk menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan (ayat 4) dan menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS (ayat 6) pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 15 PP Nomor 45 Tahun 1990.

Tabel II - 172
Daftar Pelanggaran Kedisiplinan Pegawai Tahun 2012-2016

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pasal 3 PP Nomor 53 Tahun 2010	Orang	2	3	2	6	8
2.	Pasal 9 PP Nomor 53 Tahun 2010	orang	1	1	0	2	0

Sumber: BKPSDM Kota Payakumbuh, 2017

2.4.4.4 Penelitian dan Pengembangan

Penelitian daerah sudah mulai dikembangkan setiap tahunnya dengan berbagai topik penelitian, yang didasarkan pada isu strategis, permasalahan terhadap percepatan pembangunan Kota Payakumbuh. Hal ini merupakan kebutuhan Kota Payakumbuh dalam pemenuhan data dan informasi perencanaan pembangunan melalui kajian atau penelitian yang dilaksanakan setiap tahunnya. Jumlah penelitian yang dihasilkan termasuk sangat rendah, dikarenakan tidak adanya fungsional peneliti pada Bappeda atau membidangi Penelitian dan Pengembangan. Untuk pelaksanaan penelitian tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh bekerjasama dengan lembaga penelitian/akademis seperti: STKIP Payakumbuh, Universitas Andalas (UNAND), dan Universitas Negeri Padang (UNP). Untuk kondisi idealnya seharusnya sudah terbentuk Dewan Riset Daerah Kota Payakumbuh, dengan beranggotakan akademisi pemerhati pembangunan daerah, dan Pemerintah Kota Payakumbuh saat ini sedang melakukan proses tersebut.

Tabel II - 173
Jumlah Kerjasama Pengembangan dan Penelitian yang berkelanjutanAntar Pemangku Kepentingan di Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2016

Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	3 dokumen

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh, 2017

Pada tabel diatas untuk tahun 2012 penelitian daerah dikerjasamakan dengan STKIP Payakumbuh, pada tahun 2013 penelitian daerah dikerjasamakan dengan UNP, pada tahun 2014 penelitian daerah dikerjasamakan dengan UNP, pada tahun 2015 penelitian daerah dikerjasamakan dengan UNP sebanyak 1 penelitian dan UNAND sebanyak 1 penelitian. Dan pada tahun 2016 penelitian daerah berjumlah 3 dokumen yang melibatkan UNP sebanyak 1 penelitian dan UNAND sebanyak 2 penelitian. Untuk penyebarluasan atau pemanfaatan terhadap hasil riset/penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah masih dinilai belum optimal karena jumlah penelitian yang sangat kurang/minim. Namun dari seluruh

penelitian yang dihasilkan, sebagian besar telah dijadikan sebagai perumusan kebijakan daerah dan bahan perencanaan pembangunan daerah.

Tabel II - 174
Persentase Hasil Kelitbangan yang Ditindaklanjuti Dalam Perencanaan

Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bappeda Kota Payakumbuh, 2017

Penelitian perencanaan pembangunan daerah mengambil objek penelitian pada bidang pendidikan, perindustrian, dan pemerintahan. Dan untuk kedepannya topik penelitian akan dikembangkan kearah bidang pembangunan lainnya, terutama yang menjadi prioritas pembangunan.

2.4.4.5 Pengawasan

Salah satu unsur pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih adalah terciptanya reformasi birokrasi yang baik yang diindikasikan dengan Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi dilihat dari kualitas pelayanan publik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Penghitungan indeks reformasi birokrasi Kota Payakumbuh baru dilaksanakan pada tahun 2016 dan sampai saat ini nilainya belum dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB. Sedangkan penilaian mandiri yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Payakumbuh terhadap Indeks RB Kota Payakumbuh berada pada angka 54,46 (sudah berada di atas indeks RB Nasional sebesar 45). Ini menandakan bahwa kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sudah cukup baik.

Demikian juga dengan nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), yang mana untuk tahun 2016 ini belum dikeluarkan nilainya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara itu, penilaian mandiri oleh Inspektorat Kota Payakumbuh, nilai Maturitas SPIP Kota Payakumbuh masih berada pada level 2 yang menandakan bahwa pengendalian internal telah dilaksanakan, namun pemerataannya belum optimal. Padahal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019, target Maturitas SPIP pada semua level pemerintahan pada tahun 2019 harus berada pada Level 3.

2.5 Aspek Daya Saing Daerah

2.5.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per-Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di kota Payakumbuh menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Payakumbuh dan produk impor, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumahtangga. Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumahtangga adalah sebagai konsumen akhir (final consumer) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumahtangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi

tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Selama periode tahun 2012-2016 ternyata pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga mengalami peningkatan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Pertambahan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan tersedianya berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Tabel II - 175
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Total Konsumsi Rumah Tangga (Miliar Rp)					
▪ ADHB/ (Miliar Rp)	1.743,31	1.944,67	2.162,00	2.376,48	2.587,54
▪ ADHK 2010/ (Miliar Rp)	1.574,80	1.648,01	1.721,14	11.800,92	15.209,63
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	52,61	52,51	51,72	52,27	51,91
Rata-rata konsumsi per kapita (Ribu Rp)					
▪ ADHB/ (Miliar Rp)	14.348,01	15.726,17	17.201,05	18.591,49	20.284,22
▪ ADHK 2010/ (Miliar Rp)	12.961,07	13.327,62	13.693,31	14.088,83	14.708,64
Pertumbuhan					
Total konsumsi RT per kapita	4,11	2,83	2,75	2,89	4,4
Jumlah penduduk (000/ orang)	121.502	123.654	125.690	127.826	127.564

Sumber Data: Informasi Sosial Ekonomi Kota Payakumbuh Tahun 2016

Selama periode 2012 – 2016 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB cendrung menurun. Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 52,61% dan terendah pada tahun 2014 sebesar 51,72%. Sedangkan pada tahun 2015 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB kembali meningkat seiring dengan semakin membaiknya perekonomian pada tahun 2015 terlihat dari tingkat inflasi yang rendah pada tahun 2015. Pada tahun 2016 diperkirakan tidak jauh meningkat dari tahun 2016 yaitu sebesar 51,91%. Secara rata-rata, konsumsi per rumahtangga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2016 diperkirakan total konsumsi rumah tangga rata-rata/kapita sebesar Rp. 20.284.220,- per-tahun meningkat dari tahun 2015 yaitu sebesar Rp.18.591.490,-/tahun. Sementara itu, pertumbuhan konsumsi rata-rata per kapita diharapkan dapat meningkat sebesar 4,4% pada tahun 2016.

Sementara itu, kontribusi pengeluaran makanan berada di kisaran 40%, sedangkan sisanya sebanyak 60% dialokasikan untuk pengeluaran non makanan. Kontribusi konsumsi non makanan mengalami trend kenaikan dari 57,95% di tahun 2012, menjadi 63,6% di tahun 2016, dan sebaliknya kontribusi konsumsi makanan mengalami trend penurunan dari tahun 2011-2015. Komposisi pengeluaran non makanan yang makin besar menjadi indikasi bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan. Semakin tinggi pendapatan sebagian besar pengeluaran dibelanjakan untuk nonmakanan.Kebutuhan untuk bahan makanan sudah tercukupi sehingga konsumen beralih ke kebutuhan lain seperti untuk gaya hidup dan kesenangan, misalnya untuk membeli barang mewah sehingga dapat meningkatkan taraf hidup atau status social dihadapan orang lain.Kebutuhan non-makanan itu pun dapat dikeluarkan untuk investasi dan biaya pendidikan anak-anak mereka kejenjang yang lebih tinggi.

Tabel II - 176
Kontribusi Kelompok Pengeluaran Makanan dan Non Makanan terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota PayakumbuhTahun 2012 - 2016

Kelompok Pengeluaran	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Konsumsi Rumah Tangga (%)					
• Makanan	42,05	40,90	38,43	37,47	48,8
• Non Makanan	57,95	59,10	61,57	62,53	51,2
Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS Kota Payakumbuh, 2017

2.5.2 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan/rasio antara Indeks Harga Yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib). Hubungan Nilai Tukar Petani (NTP) dengan tingkat kesejahteraan petani sebagai produsen secara nyata terlihat dari posisi It yang berada pada pembilang (enumerator) dari angka NTP. Apabila harga barang/produk pertanian naik, dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka penerimaan/pendapatan petani dari hasil panennya juga akan bertambah. Disisi lain, untuk melihat tingkat kesejahteraan petani secara utuh perlu juga dilihat faktor pembentuk yang lain yaitu perkembangan jumlah pengeluaran/pembelanjaan mereka baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk produksi. Dalam hal ini petani sebagai produsen dan juga konsumen dihadapkan kepada pilihan dalam mengalokasikan pendapatannya yaitu: Pertama, untuk memenuhi kebutuhan pokok (konsumsi) demi kelangsungan hidup petani beserta keluarganya. Kedua, pengeluaran untuk produksi/budidaya pertanian yang merupakan ladang penghidupannya yang mencakup biaya operasional produksi dan investasi atau pembentukan barang modal. Unsur kedua ini hanya mungkin dilakukan apabila kebutuhan pokok petani telah terpenuhi, dengan demikian investasi dan pembentukan barang modal merupakan faktor penentu bagi tingkat kesejahteraan petani.

Penghitungan Nilai Tukar Petani (NTP) di Kota Payakumbuh baru dimulai pada tahun 2014, Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2014 cukup baik yaitu sebesar 100,68% (lebih dari 100%) meskipun belum mencapai kondisi yang ideal. Tahun 2015, NTP Kota Payakumbuh turun menjadi 100,18, dan pada tahun 2016 diharapkan naik kembali menjadi 100,44%. Kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) di Kota Payakumbuh terus

diupayakan melalui peningkatan indeks yang diterima petani terutama pada sub sektor yang dibawah 100%, yaitu subsektor tanaman perkebunan rakyat dan subsektor peternakan diantaranya melalui stabilisasi harga komoditas pertanian/perikanan, insentif usaha tani/perikanan, fasilitasi permodalan bagi petani/peternak ikan dan penguatan kelembagaan dan kemitraan petani/peternak ikan dengan stakeholder pertanian/perikanan.

Tabel II - 177
Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	NTP Subsektor Tanaman Pangan (%)	97,24	102,43	107,43	98,40	100,50
2	NTP Subsektor Tanaman Hortikultura (%)	100,55	101,25	113,28	103,58	105,58
3	NTP Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (%)	71,64	93,55	74,88	101,46	103,46
4	NTP Subsektor Perikanan	97,48	108,42	118,16	96,94	99,14
5	NTP Subsektor Peternakan	92,98	94,85	95,39	100,54	101,54
	Total	**91,98**	**100,10**	**100,68**	**100,18**	**100,44**

Sumber: Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Payakumbuh Tahun 2016

2.5.3 Angka Kriminalitas yang Tertangani

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat mewujudkan rasa aman bagi masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dsb.

Tabel II - 178
Angka Kriminalitas di Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2016

No	Jenis Kriminal	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah kasus Narkoba	29	43	36	43	43
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	0	1	0	1	0
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	25	12	7	4	4
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	250	300	226	155	155
5.	Jumlah kasus Pencurian	285	421	338	311	311
6.	Jumlah kasus Penipuan	181	134	125	126	125
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	0	0	0	0	0
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	770	911	732	640	640
9.	Jumlah Penduduk	122.450	123.654	125.690	127.826	129.807
10.	Angka Kriminalitas (8)/(9)	62,88	73,67	58,23	50,07	49,30

Sumber: Polres Kota Payakumbuh, 2017

Tabel II - 179
Tindak Kriminal di Kota PayakumbuhTahun 2012 - 2016

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Tindak Kriminal	kasus	408	487	455	435	430
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	122,450	124,694	125.690	127.826	129.807
3	Rasio jumlah kasus per 10.000/Penduduk	%	33,31	39,05	36,20	34,03	33,13

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2017

Tabel II - 180
Jumlah Pos Siskamling di Kota PayakumbuhTahun 2012 - 2016

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Pos Siskamling	Unit	143	143	143	76	48
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	122,450	124,694	125.690	127.826	129.807
3	Rasio jumlah kasus per 10.000/Penduduk	%	11,67	11,44	11,38	5,94	3,7

Sumber: Satpol PP Kota Payakumbuh, 2017

Angka kriminalitas mempengaruhi keinginan investor untuk berinvestasi di Kota Payakumbuh. Investor dalam menghasilkan barang dan jasa, akan dirugikan jika terganggu oleh kriminalitas, demonstrasi dan ketidakpastian hukum (perijinan). Untuk mengurangi angka kriminalitas, demonstrasi dan ketidakpastian hukum, perlu kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan petugas keamanan demi terwujudnya keamanan dan ketertiban di Kota Payakumbuh sehingga investor tidak ragu dan merasa nyaman untuk berinvestasi di Kota Payakumbuh. Dalam upaya peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas diperlukan pengembangan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan keamanan; pengembangan sistem pengamanan rahasia; pengembangan sumber daya manusia (SDM) kepolisian; pengembangan strategi keamanan dan ketertiban; pemberdayaan potensi keamanan; pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; kerja sama keamanan dan ketertiban; penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Tantangan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas adalah menurunkan tingkat kriminalitas agar aktivitas masyarakat dapat berjalan secara wajar. Keberhasilan dalam menurunkan tingkat kriminalitas akan menjadi landasan bagi keberlangsungan pembangunan secara keseluruhan. Di samping itu, profesionalitas aparat keamanan dalam menyelesaikan kasus kriminal, mengungkap jaringan kejahatan transnasional, mencegah terjadinya konflik komunal merupakan determinan penting bagi kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap iklim investasi di Kota Payakumbuh

2.5.4 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif.

Tabel II - 181
Rasio Ketergantungan Kota PayakumbuhTahun 2012 - 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	37.905	37.110	37.231	38.146	38.495
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	6.685	6.780	6.445	7.038	7.223
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2)	44.590	43.890	43.676	45.184	45.718
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	77.860	79.764	82.014	82.642	84.089
5.	Rasio ketergantungan total (3)/(4)	57,27	55,02	53,25	54,67	54,37
6.	Rasio Ketergantungan muda (1/4)	48,68	46,52	45,40	46,15	45,78
7.	Rasio ketergantungan tua (2/4)	8,59	8,50	7,86	8,5	8,59
8.	Jumlah Penduduk	122.450	123.654	125.690	127.826	129.807

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka, 2017

Rasio ketergantungan terbesar selama 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2011 dimana tingkat ketergantungan ini sebesar 58,56. Ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 49,49 dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 9,06. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2011 penduduk usia kerja di Kota Payakumbuh masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua. Sedangkan untuk tahun 2015 tingkat ketergantungan penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif turun menjadi yaitu 54,67 artinya setiap 100 orang yang berusia kerja mempunyai tanggungan sebanyak 55 orang yang belum produktif atau dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 54,67 ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 46,15 dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 8,50. Sekitar 35,34% dari jumlah penduduk Kota Payakumbuh pada tahun 2015 adalah penduduk usia tidak produktif yang terdiri dari 29,84% dari penduduk yang berusia muda <15 tahun dan 5,50% dari penduduk yang berusia tua >64tahun. Jika dilihat dari proporsi ketergantungan penduduk Kota Payakumbuh, Rasio ketergantungan muda lebih besar dari rasio ketergantungan tua. Ini diartikan beban penduduk produktif proporsi tanggung jawabnya lebih besar terhadap penduduk muda dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua.

2.6 Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja pembangunan menjadi bagian penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan periode berikutnya. Dengan mengetahui capaian pembangunan dapat diketahui target pembangunan yang tidak tercapai sebelumnya, sehingga untuk pembangunan pada periode 2012 – 2016 dapat dijadikan pertimbangan untuk menetapkan target kinerja pembangunan strategis 2017 -2022.

Tabel II - 182
Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Payakumbuh

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum Tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016		
I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
FOKUS : KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI									
1	**Kesejahteraan dan Pemerataan ekonomi**								
1.1	Pertumbuhan ekonomi (2010=100)	%	6,62	6,56	6,47	6,19	6,10	6,95	<
1.2	PDRB perkapita (2010=100)	(Rp/juta)	24,26	25,40	26,60	27,78	29,03	43,73	<
FOKUS :KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	**Pendidikan**								
1.1	Angka Melek Huruf	%	99,2	99,36	99,36	99,59	99,63	99,44	>
1.2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	%	9,83	9,93	9,96	10,29	10,34	9,95	>
1.3	Angka Partisipasi Kasar								
	1.3.1. APK SD/MI/Paket A	%	108	106	108	109	114	108,6	>
	1.3.2 APK SMP/MTs/Paket B	%	124	133	133	142,5	141	144	<
	1.3.3. APK SMA/SMK/MA/Paket C	%	157	157	157	161,7	165,7	158	>
1.4	Angka Partisipasi Murni								
	1.4.1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	95	95,1	94,92	95,1	100,88	95,5	>
	1.4.2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	92	95	109,2	109	109,9	107	>
	1.4.3. Angka Partisipasi Murni (APM)MA/SMK/MA /Paket C	%	122	122,5	119,17	122	130,6	124,5	>
FOKUS :SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA									
1	**Kebudayaan**								
1.1	Jumlah Grup Kesenian	Group	45	45	45	47	48	50	<
1.2	Jumlah Gedung Kesenian	Unit	2	2	3	4	4	4	=
2	**Pemuda dan Olah Raga**								
2.1	Jumlah Klub Olah Raga	Klub	130	135	138	141	144	147	<
2.2	Jumlah Gedung Olah Raga	Unit	8	8	9	10	11	11	=

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum Tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016		
2.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
FOKUS :LAYANAN URUSAN WAJIB									
1	**Pendidikan**								
1.1	Pendidikan Dasar								
	1.1.1. Angka Partisipasi Sekolah								
	a. APS 7 -12 Tahun	%	92,5	97,66	98,23	99,37	94,05	97	<
	b. APS 13 – 15 Tahun	%	69,4	71,85	69,72	79,26	79,36	82	<
	1.1.2. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah	Rasio	0,003	0,004	0,004	0,004	0,0045	0,005	<
	1.1.3. Rasio Guru Terhadap Murid	Rasio	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	=
1.2	Pendidikan Menengah								
	1.2.1. Angka Partisipasi Sekolah 16 -18	%	68.9	62,31	61,01	71,32	77,7	76	>
	1.2.2. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah	Rasio	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	=
1.3	Fasilitasi Pendidikan								
	1.3.1.Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	%	91,8	93,03	94,56	96,79	97,02	98	<
	1.3.2.Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik	%	80	83	86	89	94	95	<
	1.3.3.Persentase sekolah SMP yang memiliki labor ideal	%	93,33	95,00	95,00	96,00	98,00	98,00	=
	1.3.4.Persentase sekolah SMA yang memiliki labor ideal	%	98,61	98,65	98,70	99,05	99,15	99,00	>
	1.3.5 Tersedianya boarding school	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
1.4	Angka Putus Sekolah								
	1.4.1 Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,09	0,08	0,01	0,03	0,01	0	>
	1.4.2 Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,88	0,60	0,67	0,67	0,19	0,59	<
	1.4.3 Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	%	1,20	0,7	1,25	1,67	0,41	0	>
1.5	Angka Kelulusan								
	1.5.1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	=
	1.5.2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	97,70	99,11	99,95	99,95	100	99,8	>

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum Tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016		
	1.5.3 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	99,98	99,81	99,74	99,74	99,97	99,72	>
	1.5.4 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	130	131	132	133	134	135	<
	1.5.5 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	182	163	164	165	166	167	<
	1.5.6 Persentase lulusan SLTA yang diterima di Perguruan Tinggi	%	77,67	70,09	63,24	63,08	62,00	60,98	>
1.6	SDM cerdas dan berakhlak mulia								
	1.6.1 Siswa yang mengikuti pendidikan ahklak mulia	orang	36.000	36.500	37.000	37.000	37.200	37.400	<
	1.6.2 Persentase guru yang mengikuti pelatihan akhlak mulia	%	40	42	43	50	55	55	=
1.7	Kualifikasi guru								
	1.7.1.Persentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1	%	69,43	73,01	77,57	85,0	86,42	88	<
	1.7.2. Persentase sertifikasi guru TK/RA	%	10,62	9,21	25,98	39,5	39,75	57,00	<
	1.7.3 Persentase sertifikasi guru SD/ SLB/SMP	%	7,12	5,48	48,95	43,18	50,45	64,00	<
	1.7.4. Persentase sertifikasi guru SLTA	%	10,37	1,47	62,56	52,88	52,74	62	<
1.8	Ilmu pengetahuan dan teknologi								
	1.8.1 Jumlah penelitian yang berkaitan dengan dunia pendidikan	buah	1	1	1	1	1	1	=
2	**Kesehatan**								
2.1	Rasio posyandu per satuan balita	Unit/balita	1:75,8	1:74,5	1:78	1:84	1:84	1:50	>
2.2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Unit/jiwa	P1:15.306 PP 1:5.329	P 1:15.375 PP 1:5.438	P 1:15.786 PP 1:4.786	P 1:15.555 PP 1:5.148	P 1:16.226 PP 1:5.644	P1:15.555 PP1:4.977	>
2.3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Unit/jiwa	1:61.225	1:62.462	1:41.897	1:31.957	1:32.451	1:30.000	>
2.4	Rasio dokter per satuan penduduk	Orang/jiwa	1:1.475	1:4.786	1:4.147	1:3.659	1:2.283	1:3.274	<
2.5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Orang/jiwa	1:1.259	1:1.190	1:1.186	1:1.195	1:1.236	1:2.222	<
2.6	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	73,56	94,6	98,2	100	100	100	=
2.7	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan berkompetensi	%	94,2	94,2	94,7	95	92,33	95	<

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum Tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016		
	kebidanan								
2.8	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	81,58	83,2	98,4	100	95,83	100	<
2.9	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	=
2.10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	42,5	52,4	55,5	48,8	40,38	70	<
2.11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	89	100	100	100	100	100	=
2.12	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	63,6	64	65	70	70	80	<
2.13	Cakupan kunjungan bayi	%	86	9,2	90	90	95,51	90	>
2.14	Cakupan puskesmas	%	50	50	52	55	96,68	57	>
2.15	Cakupan puskesmaspembantu	%	50	50	50,5	50,7	51	65	<
2.16	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)	%	82,1	88,3	90	90	92,48	90	>
2.17	Cakupan Ibu nifas	%	91,2	85,90	85,60	85,60	92,50	91,2	>
2.18	Cakupan Pelayanan Anak balita	%	68,4	75	75	76	80,33	77	>
2.19	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	85,4	85,3	82,1	83	83,5	85	<
2.20	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,3	0,3	0,15	0,12	0,07	0,03	>
2.21	Cakupan Penanganan penderita HIV/AIDS	%	91	90	90	90	95	95	=
2.22	Cakupan penanganan penderita Hipertensi	%	100	100	100	100	92,78	100	<
2.23	Persentase rumah tangga ber PHBS	%	48,6	50,8	61	65	66,3	70	<
2.24	Persentase rumah sehat	%	76,3	78	78,2	78,4	87,48	78,6	>
2.25	Persentase Puskesmas yang bersetifikasi akreditasi	%	0	0	0	12,5	75	37,50	>
2.26	Rasio Rumah Sakit Pemerintah dengan Akreditasi Nasional	%	100	100	100	100	100	100	=
2.27	Ketercukupan ketersediaan obat dan vaksin	Bulan	18	18	18	18	18	18	=
2.28	Persentase sekolah yg menyediakan PJAS (pangan jajanan sehat) melalui warung sekolah	%	40,6	40,6	40,6	42,55	45,35	60	<
2.29	Persentase industri pangan yang mendapatkan sertifikat penyuluhan	%	70	70,5	74,2	78	80	80	=
2.30	Presentase kepesertaan SJSN Kesehatan	%	-	-	82	83	85	85	=

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum Tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016		
3	**Pekerjaan Umum**								
3.1	Jumlah sumber air baku	Buah	3	3	3	3	3	4	<
3.2	Jumlah bangunan penampung air untuk air baku	buah	3	3	3	3	3	4	
3.3	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	%	40	50	60	70	75	80	<
3.4	Rasio jaringan irigasi	%	29,02	29,97	28,33	27,00	27,00	35	<
3.5	Pemetaan jaringan jalan dan jembatan setiap tahun	dokumen	1	1	1	1	1	1	=
3.6	Kawasan kumuh	%	0,73	0,53	0,39	0,25	0,25	0,00	<
3.7	Lingkungan permukiman kumuh	%	0,73	0,53	0,39	0,25	0,25	0,00	<
3.8	Jumlah kelurahan yang terjangkau air minum (mulai tahun 2014 penggabungan kelurahan dari 76 menjadi 62 kelurahan)	kelurahan	76	76	62	48	48	48	=
3.9	Persentase Rumah Tinggal bersanitasi	%	84,62	82,68	83,63	85,95	85,69	97,10	<
3.10	Jumlah IPAL Komunal	unit	3	3	4	7	10	13	<
3.11	Persentase rumah tangga mendapatkan akses air minum yang aman	%	94	94,5	92,66	90,79	93,36	98,9	<
4	**Perumahan**								
4.1	Rasio rumah layak huni	Rasio	0,96	0,96	0,96	0,97	0,97	0,85	>
5	**Penataan Ruang**								
5.1	Persentase Tertatanya kawasan pusat kota	%	60	65	69	73	76	78	<
5.2	Jumlah advice planning yang dikeluarkan	Buah	583	583	571	610	568	825	<
5.3	Keberadaan PERDA RTRW	dokumen	1	1	1	1	1	1	=
5.4	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan keseluruhan	Rasio	0,13	0,16	0,17	0,18	0,19	0,23	<
5.5	Rasio Ruang Terbuka Hijau	Rasio	40,31	42,43	42,44	42,47	42,48	42,50	<
6	**Perencanaan Pembangunan**								
6.1	Persentase kehadiran Musrenbang	%	75	76	81	85	90	95	<
6.2	Dokumen perencanaan RPJPD yang ditetapkan dengan PERDA	Ada	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokume n	1 dokumen	1 dokumen	=

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum Tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016		
6.3	Dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokume n	1 dokumen	1 dokumen	=
6.4	Dokumenperencanaan RKPD yang ditetapkan dengan PERKADA	Ada	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokume n	1 dokumen	1 dokumen	=
6.5	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	%	80	85	90	100	100	100	=
6.6	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan SKPD seperti Renstra SKPD Renja SKPD	Ada	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	=
6.7	Persentase Renja SKPD yang diakomodir dalam RKPD	%	75	76	81	85	100	100	=
6.8	Persentase program Renja SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	%	80	80	80	100	100	100	=
6.9	Persentase program RKPD yang diakomodir dalam APBD	%	80	80	80	100	100	100	=
6.10	Persentase program RPJMD yang diakomodir dalam APBD	%	80	80	80	100	100	100	=
6.11	Kerjasama antar pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi dan swasta	kali	3	3	3	4	4	4	=
6.12	Jumlah laporan pemerintah daerah yang disusun	Buah	6	6	6	6	6	6	=
6.13	Peringkat LPPD	24	43	35	25	20	29	15	<
6.14	Tersedianya buku LPPD	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	=
6.15	Tersedianya buku LPPD akhir masa jabatan	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	=
7	**Perhubungan**								
7.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	643.07 6	650.60 8	487.95 6	143.87 6	162.67 6	650.120	<
7.2	Rasio Izin Trayek		0,0021	0,0020	0,0010	0,0009	0,0009	0,001	<
7.3	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	menit	15	15	15	15	15	15	=
7.4	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum								
	7.5.1 PNP	Rupiah	51.000,-	51.000,-	51.000,-	51.000,-	51.000,-	51.000,-	=
	7.5.2 Bus dan Barang	Rupiah	61.000,-	61.000,-	61.000,-	61.000,-	61.000,-	61.000,-	=
7.5	Angkutan darat	%	0,46	0,44	0,64	0,69	0,76	0,74	
7.6	persentase ketersediaan terminal angkutan penumpang	%	20	22	24	26	28	30	<
7.7	Pemasangan rambu-rambu	Buah	350	450	100	100	98	100	<

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum Tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016		
8	**Lingkungan Hidup**								
8.1	Jumlah Bank Sampah	unit	0	1	2	2	21	22	<
8.2	Jumlah TPST	unit	5	5	6	6	6	6	=
8.3	Ketersediaan Sarana Pengelolaan Persampahan	%	100	100	100	100	100	100	=
8.4	Persentase penanganan sampah	%	77,6	84,97	84,99	85,23	88	78	>
8.5	Jumlah usaha/industri yang diawasi	kali	48	48	48	50	55	60	<
8.8	Jumlah produk hukum perlindungan pengelolaan lingkungan hidup	dokumen	7	6	5	4	3	3	=
8.9	Jumlah dokumen lingkungan yang diterbitkan	dokumen	49	61	83	94	201	120	>
8.10	Jumlah dokumen informasi perlindungan pengelolaan lingkungan hidup	dokumen	1	1	1	1	1	1	=
8.11	Penegakan hukum lingkungan	%	65	69	72	75	80	80	=
8.12	Keberadaan Perda Lingkungan Hidup	Ada	tidak	tidak	tidak	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	=
8.13	Jumlah pemantauan kualitas lingkungan	kali	1	1	1	1	1	1	=
8.15	Jumlah biopori	unit	-	-	234	559	1210	1359	<
8.16	Persentase pengaduan masyarakat terkait lingkungan ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100	100	=
9	**PERTANAHAN**								
9.1	Meningkatnya kepastian hukum atas aset/lahan	persil	12	12	10	20	8	20	<
9.2	Penyelesaian konflik pertanahan	kasus	2	2	2	2	2	2	=
10.	**Kependudukan dan Catatan Sipil**								
10.1	Nilai survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	Nilai	-	-	70	75	78	78	=
10.2	Jumlah penduduk menurut kepemilikan akte nikah	%	25	30	40	40,1	40,3	70	<
10.3	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	Rasio	0,65	0,70	0,80	0,81	0,82	1	<
10.4	Kepemilikan akte kelahiran per-1000 penduduk	Orang	5,6	10,2	13,6	17,46	21,00	80,00	<
10.5	Ketersediaan database kependudukan skala kota	Ada	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	=

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum Tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016		
10.6	Penetapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	=
10.7	Jumlah laporan pendaftaran penduduk yang dihasilkan	Ada	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokum en	1 dokumen	1 dokumen	=
10.8	Persentase permohonan pembuatan dokumen akte kelahiran yang diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan	%	100	100	100	100	100	100	=
10.9	Persentase permohonan pembuatan dokumen akte perkawinan yang diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan	%	100	100	100	100	100	100	=
10.10	Persentase permohonan pembuatan KTP/KK yang diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan	%	100	100	100	100	100	100	=
11	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								
11.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	64	64	65	69,92	66	69	<
11.2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	28	37	37	30,08	38	30,6	>
11.3	Rasio KDRT		0,02	0,02	0,018	0,0016	0,0015	0,0015	=
11.4	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	80	70	75	100	100	95	>
11.5	Terbentuknya KPPA Kota Payakumbuh	Unit	ada	ada	ada	ada	ada	Ada	=
12	**Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**								
12.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	orang	1,54	1,55	1,67	1,59	1,70	1,59	>
12.2	Rasio akseptor KB	Rasio	0,76	0,77	0,77	0,75	0,77	0,77	=
12.3	Cakupan peserta KB aktif	%	75,64	77,44	76,30	77	77	77,1	<
12.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I								
	a. Pra Sejahtera	KK	608	579	545	530	500	516	<
	b. Keluarga Sejahtera I	KK	4.333	4.076	4.257	3.885	3.800	3.625	>
13	**Sosial**								
13.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	panti	2	2	2	2	2	2	=
13.2	PMKS yang memperoleh	orang	427	511	477	750	9.657	1.050	>

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum Tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016		
	bantuan								
13.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial/ PMKS	orang	427	511	477	750	9.657	1050	>
13.4	Jumlah PMKS	orang	2.215	2.250	2.275	3.609	3.281	4.100	<
13.5	Tingkat kemiskinan	%	9	7,81	7,01	6,67	6,46	6,98	>
14	**Ketenagakerjaan**								
14.1	Angkatan kerja (Orang)	orang	56.569	57.770	61.323	63.017	65.097	66.000	<
14.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	72,66	72,43	71,34	69,37	70,40	70,21	>
15	**Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**								
15.1	Persentase koperasi aktif	%	79	80	80,1	80,3	81,50	82	<
15.2	Jumlah BPR/LKM	Unit	5	5	5	6	6	7	<
15.3	Usaha Mikro dan Kecil	Unit	19.123	19.564	20.152	38.835	39.039	20.225	>
15.4	Usaha Mikro dan Kecil	%	98,96	98,98	99,00	99,00	99,00	99,00	=
15.5	Jumlah usaha dan kerjasama koperasi	Unit koperasi	148	150	151	153	154	155	<
16	**Penanaman Modal**								
16.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	0	3	1	12	28	16	>
16.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar	0	18,5	12,7	37,4	134,8	43	>
16.3	Nilai Realisasi Investasi	Milyar	193	207	124	160	240,6	195	>
16.4	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN	milyar	0	14	-83	38	80	25	>
16.5	Sistem informasi pelayanan perizinan dan administrasi pemerintah	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
16.6	Lama proses perizinan	Hari		7	7	7	7	7	=
16.7	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Buah	1	-	2	-	1	-	>
17	**Kebudayaan**								
17.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	Kali	4	4	4	5	6	6	=
17.2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	1	1	1	1	2	2	=
17.3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	18	18	18	18	18	18	=
17.4	KAN yang menuangkan nilai adat dan budaya kedalam tulisan	KAN	1	1	1	3	9	1	=
17.5	Jumlah kali pagelaran kesenian	kali	80	80	82	30	34	88	<

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum Tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016		
17.6	Jumlah grup kesenian yang dibina	grup	45	45	45	22	24	50	>
17.7	Persentase Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	%	50	50	55	55	55	80	<
17.8	Jumlah seminar adat	kali	1	1	1	1	1	1	=
17.9	Jumlah Pelatihan adat yang dilaksanakan	kali	1	1	1	1	1	1	=
17.10	Jumlah LKAAM Kecamatan yang Aktif	buah	5	5	5	5	5	5	=
17.11	Jumlah Bundo Kanduang kecamatan yang Aktif	buah	5	5	5	5	5	5	=
18	**Kepemudaan dan Olahraga**								
18.1	Jumlah organisasi pemuda	Buah	10	10	11	12	12	14	<
18.2	Jumlah organisasi olahraga	Cabang	25	27	27	28	31	27	>
18.3	Jumlah kegiatan kepemudaan	Kali	10	10	12	14	12	18	<
18.4	Jumlah kegiatan olahraga	Kali	12	10	12	14	16	20	<
18.5	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Unit	3	2	3	3	3	5	<
18.6	Jumlah Lapangan olahraga	Unit	82	82	83	84	84	84	=
18.7	Jumlah Diklat Pemuda	Kali	2	2	4	6	8	10	<
18.8	Persentase peningkatan pengetahuan organisasi kepemudaan	%	10	10	20	30	50	80	<
18.9	Persentase peningkatan bakti sosial kepemudaan	%	10	10	20	30	50	80	<
18.10	Persentase berkurangnya dampak narkoba dikalangan generasi muda	%	10	10	20	30	50	80	<
18.11	Persentase peningkatan SDM generasi muda	%	10	10	20	30	50	80	<
18.12	Jumlah kelompok Pemuda pelopor	kelompok	0	5	5	5	4	50	<
18.13	Jumlah Kreatifitas Generasi Muda	kali	10	10	12	14	16	18	<
18.14	Persentase peningkatan ketrampilan tenaga pelatih/pembina olahraga	%	20	20	30	40	40	40	=
18.15	Persentase ketersediaan data evaluasi olahraga	%	80	80	80	80	90	90	=
18.16	Jumlah kegiatan kesegaran jasmani	kali	83	48	48	48	46	83	<
18.17	Jumlah event olahraga rekreasi sepeda santai	paket	10	3	3	3	2	10	<
18.18	Jumlah kegiatan olahraga	cabor	25	49	14	16	18	30	<
18.19	Persentase terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga	persentase	65	67	69	70	70	75	=

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum Tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016		
19	**Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri**								
19.1	Persentase penegakkan Perda	%	75	80	80	80	90	100	<
19.2	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Rasio	4,82	6,39	7,88	7,97	8,32	8,00	>
19.3	Cakupan patroli petugas Satpol PP	Kali	59	46	45	45	45	45	=
19.4	Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	Rasio	58,15	50,95	50,12	49,28	48,53	50	<
19.5	Angka kriminalitasper 10.000 penduduk	%	62,88	73,67	66,12	65	63	60	>
19.6	Kegiatan pembinaan LSM, Ormas dan OKP	kali	2	2	2	2	2	2	=
19.7	Kegiatan pembinaan politik daerah	kali	1	1	1	1	3	1	>
19.9	**Penanggulangan Bencana**								
	Jumlah Sarana dan Prasarana tanggap darurat	Jenis/unit	0	0	12	28	36	42	<
	Tim Reaksi Cepat	Orang	0	0	55	50	50	50	=
	Jumlah paket perbaikan darurat bencana	paket	0	0	0	1	2	2	=
	Jumlah Pengkajian Pemulihan Pasca Bencana	kasus	0	4	25	30	40	40	=
	Jumlah Pelatihan Pemulihan Psikologis	Kali	-	-	-	1	1	1	=
	Jumlah Pemeriksaan tabung pemadam kebakaran	set	0	759	750	760	760	825	<
	Jumlah siaga pemadam kebakaran dalam penanggulangan kebakaran	hari	0	360	360	360	360	360	=
	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kebakaran	unit	0	2	1	2	3	2	>
	Jumlah sosialisasi kebakaran	kali	0	0	1	1	1	1	=
	Jumlah pemeliharaan sarana prasarana pemadam kebakaran	unit	0	3	3	3	3	3	=
	Jumlah diklat bagi anggota pemadam kebakaran	kali	0	0	2	2	2	2	=
	Jumlah Survey lokasi potensi bencana alam	Kelurahan	0	6	9	10	10	10	=
	Jumlah mobil pemadam kebakaran	Unit	4	4	4	4	5	5	=
	Jumlah personil	Orang	28	30	32	37	47	57	<

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum Tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016		
	pemadam kebakaran								
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	kelurahan	76	76	76	62	48	48	=
	Tingkat waktu tanggap (Response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	%	100	100	100	100	100	100	=
	Cakupan pelayanan Bencana	kecamatan	5	5	5	5	5	5	=
	Persentase penanganan dampak bencana	%	100	100	100	100	100	100	=
20	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**								
20.1	Nilai Evaluasi LAKIP	Nilai	D	C	CC	CC	B	BB	<
20.2	Jumlah kelurahan	Buah	76	76	76	62	48	47	>
20.3	Persentase pengelolaan kegiatan tertib administrasi sesuai aturan	%	80	87,5	90	92,5	95	97,5	<
20.4	Peningkatan pemahaman wajib LHKPN untuk menyampaikan LHKPN	orang	0	50	50	60	65	70	<
20.5	Persentase pelaksanaan pengendalian kebijakan KDH	%	50	50	50	50	100	100	=
20.6	Persentase aparatur negara yang profesional	%	100	100	100	100	100	100	=
20.7	Tersedianya laporan keuangan berbasis akrual	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	=
20.8	Jumlah pengawasan internal secara berkala	Orbrik	36	34	36	36	42	46	<
20.9	Jumlah pengawasan kasus dan khusus	Kasus	15	20	21	22	23	24	<
20.10	Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri	Orang	36	36	36	42	42	42	=
20.11	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP)	%	75	80	90	90	100	100	=
20.12	Persentase peningkatan fungsi pengawasan	%	75	80	90	90	100	100	=
20.13	Jumlah aparatur pemeriksa dan pengawasan yang profesional	orang	36	36	36	36	36	36	=
20.14	Persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja	%	92	89	90	90	95	90	>
20.15	Persentase Sisa Lebih Perhitungan anggaran	%	8	11	10	8,08	8,15	10	>

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum Tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016		
	tahun lalu terhadap total pendapatan								
20.16	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis akuntansi berbasis akrual	Orang	0	60	40	40	40	180	<
20.17	Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)	Ada/ tidak	ada	ada	ada	ada	Ada	ada	=
20.18	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Opini	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	=
20.19	Paket pengadaan yang metode pelaksanaannya dilakukan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)/LPSE barang dan jasa yang efisien, akuntabel, dan profesional berbasis teknologi informasi	%	91	97	90	82	95	95	=
20.20	Pemilihan camat yang mempunyai kompetensi terbaik dan meningkatnya motivasi kerja aparatur kecamatan	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
20.21	Kecamatan dan Kelurahan yang memiliki standar pelayanan	Ada/tidak	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
20.22	Konstribusi PAD terhadap pendapatan daerah	%	10,65	9,98	11,18	11,61	11,57	11,61	<
20.24	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	%	100,18	124,78	106,78	110	100	120	<
20.25	Persentase realisasi penerimaan retribusi daerah	%	85,33	103,63	80,19	98	100	105	<
20.26	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	Jenis	11	12	12	13	13	13	=
20.27	Penetapan APBD tepat waktu	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
20.28	Nilai pencapaian ukuran keberhasilan rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Nilai	-	-	100	100	-	100	<
20.29	Tersedianya standarisasi biaya	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	ada	ada	=
20.30	Rasio Pegawai Berpendidikan setara SMA	Rasio	0,21	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	=
20.31	Rasio Pegawai Berpendidikan setara S1	Rasio	0,45	0,46	0,47	0,47	0,47	0,47	=
20.32	Rasio Pegawai Berpendidikan setara S2	Rasio	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	=
20.33	Jumlah Pegawai yang telah mengikuti diklat Fungsional	Orang	0	124	217	185	60	60	=
20.34	Jumlah Pegawai yang	Orang	39	35	36	2	50	50	=

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum Tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016		
	telah mengikuti diklat Struktural								
20.35	Jumlah Pegawai yang telah mengikuti tes uji kompetensi	Orang	0	700	0	73	75	75	=
20.36	Persentase pejabat struktural yang telah lulus diklat struktural	%	50	60	70	70	80	90	<
20.37	Jumlah PNS yang naik pangkat	Orang	782	560	693	642	650	665	<
20.38	Tersedianya database pegawai dan informasi kepegawaian	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
20.39	Tersedianya dokumen Anjab dan ABK yang sudah terevaluasi mengikuti peraturan yang berlaku	Ada/tidak	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	=
20.40	Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan	Buah	7	19	18	8	20	18	>
20.41	Terlaksananya koordinasi, konsultasi dan kerjasama hukum	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	=
20.42	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	=
20.44	Persentase jumlah organisasi perangkat daerah yang menyusun laporan SPM yang telah ditentukan	%	100	100	100	100	100	100	=
20.45	Presentase SOP yang dihasilkan oleh organisasi perangkat daerah	%	25	25	100	100	100	100	=
20.46	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendapat pencerahan tentang tupoksi	%	60	70	70	80	80	100	<
20.47	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	Ada	Ada	=
20.48	Persentase kegiatan hari besar keagamaan yang diperingati	%	100	100	100	100	100	100	=
20.49	Jumlah pondok Al-Qur'an	buah	0	0	3	5	5	5	=
20.50	Wirid pengajian tingkat pemko	Kali	12	12	12	37	45	45	=
20.51	Jumlah jemaah haji Kota Payakumbuh	orang	266	265	265	265	300	300	=
20.52	Pelaksanaan MTQ tingkat Kota	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	=
20.53	Jumlah guru TPA	orang	442	442	442	442	442	442	=
20.54	Persentase mesjid yang dibantu	buah	59	0	50	50	50	60	<
20.55	Persentase guru MDA/TPA	%	0	0	35,46	35,46	35,46	35,46	=

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum Tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016		
	yang bersertifikasi								
20.56	Rata-rata jumlah pelaksanaan monitoring ketentraman, ketertiban dan keamanan lingkungan dalam 1 bulan	kali	13	13	13	13	13	13	=
20.57	Persentase jumlah poskamling yang aktif	%	70	80	85	87	95	95	=
20.58	Jumlah kejahatan dan asusila ditengah masyarakat	buah	770	911	732	652	500	400	>
20.59	Jumlah kelompok yasin	buah	86	86	86	86	86	86	=
20.60	Keberadaan lembaga MUI kecamatan	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	=
20.61	Keberadaan BAZ kecamatan	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	=
20.62	Persentase penanganan insiden yang disebabkan masalah perbedaan agama	%	100	100	100	100	100	100	=
21	**KetahananPangan**								
21.1	Regulasi ketahanan pangan	buah	0	1	4	6	6	8	<
21.2	Ketersediaan pangan utama	Ton	19.031	26.355	27.211	27.456	28.359	30.441	<
21.3	Jumlah ketergantungan pada konsumsi beras	Ton	13.125	13.100	13.050	13.000	12.950	12.900	>
21.4	Rasio pemenuhan kebutuhan beras	Ton	1,61	1,65	1,75	1,80	1,95	2,00	<
21.5	Rata-rata jumlah konsumsi pangan hewani	Gr/kapita/hari	200	250	300	350	375	400	<
21.6	Konsumsi ikan	kg/cap/th	27,5	28	28,5	29	29,5	30	<
22	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**								
22.1	Persentase lembaga masyarakat yang yang berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan	%	80	85	100	100	100	100	=
22.2	Jumlah diskusi/sosialisasi/simulasi, pelatihan dilaksanakan	buah	5	0	0	5	0	5	<
22.3	Media informasi yang disediakan	paket	0	0	0	Ada	Ada	ada	=
22.4	Regulasi lembaga kemasyarakatan yang dilahirkan (perda/perwako)	Ada/tidak	tidak	tidak	tidak	Ada	Ada	ada	=
22.5	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendapat penataan struktur dan pengurus.	%	50	60	70	75	90	100	<
22.6	Persentase lembaga	%	60	70	70	80	90	100	<

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum Tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016		
	kemasyarakatan yang mendapat pencerahan tentang tupoksi								
22.7	Kelompok binaan PKK	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	=
22.8	Kelompok binaan lembaga pemberdayan masayarakat	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	=
22.9	Persentaese Posyandu Aktif	%	90	90	90	100	100	100	=
22.10	Persentase RT/RW aktif	%	100	100	100	100	100	100	=
2.11	Persentase Karang Taruna aktif	%	90	90	90	95	100	100	=
22.12	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100	100	=
22.13	Jumlah MUI /BAZ/LDS aktif	%	90	90	90	100	100	100	=
22.14	Jumlah Bundo Kanduang Kecamatan yang Aktif	Buah	5	5	5	5	5	5	=
22.15	Jumlah sarana & prasarana yang direhab dan atau ditingkatkan	buah	3	1	1	1	1	3	<
22.16	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan SKPD (Renstra SKPD, Renja SKPD, RKA SKPD)	Dokumen	4	5	4	4	5	4	>
22.17	Tersusunnya dokumen-dokumen laporan capaian kinerja	Dokumen	4	4	4	4	4	5	<
23	**Statistik**								
23.1	Buku Payakumbuh Dalam Angka	Ada	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	=
24.2	Buku Kecamatan Dalam Angka	Ada	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	=
24.3	Buku PDRB	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	=
24	**Kearsipan**								
24.1	Pengelolaan arsip secara baku	%	55,60	59,46	67,57	78,38	93,55	91,89	>
24.2	Peningkatan SDM pengelolaan kearsipan	Ada	tidak	tidak	ada	ada	ada	ada	=
25	**Komunikasi dan Informatika**								
25.1	Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik	Ada/Tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	=
25.2	Jumlah SKPD yang mempunyai sistem TIK	SKPD	10	10	11	17	20	22	<
25.3	Sistem Informasi Manajemen Pemerintah	Ada/Tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	=

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum Tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016		
	Daerah								
25.4	Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau,bebas diperoleh dan tepat waktu	Ada/Tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	=
25.5	Website milik Pemerintah Daerah	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	=
25.6	Jumlah surat kabar nasional/lokal	buah	10	10	11	11	31	12	>
25.7	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	buah	15	15	17	17	30	18	>
25.8	Tersedianya jaringan fiber optic (FO)	Jaringan	-	-	-	38	42	38	>
25.9	Tersedianya Masterplan E-Government	Ada	tidak	tidak	ada	ada	Ada	Ada	=
25.10	Ketersediaan sarana teknologi informasi di area publik	Ada/Tidak	tidak	tidak	ada	ada	ada	ada	=
25.11	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informasi yang berkompetensi	orang	0	0	0	5	14	20	<
26	**Perpustakaan**								
26.1	Jumlah perpustakaan	Buah	27	33	38	40	45	50	<
26.2	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	5.000	5.100	5.100	5.200	3.382	5.500	<
FOKUS : LAYANAN URUSAN PILIHAN									
1	**PERTANIAN**								
1.1	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (2010=100)	%	7,34	7,28	7,36	7,35	7,39	7,32	>
1.2	Kontribusi sub sektor tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (2010=100)	%	4,99	4,92	5,06	5,05	6,9	5,04	>
1.3	Kontribusi sub sektor Perkebunan terhadap PDRB (2010=100)	%	0,30	0,29	0,29	0,29	0,27	0,27	=
1.4	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (2010=100)	%	1,87	1,89	1,84	1,86	1,76	1,88	<
1.5	Produksi padi	Ton	35.334	33.123	33.424	34.000	34.500	35.000	<
1.6	Produksi jagung	Ton	1.954	1.689	1.682	1.690	1.693	1.695	<
1.7	Produksi ubi kayu	Ton	9.163	6.605	14.072	14.270	325	15.200	<
1.9	Produksi kacang panjang	Ton	234,5	218,8	317	320	377	330	>
1.10	Produksi cabe	ton	283,8	236,9	370,5	375	350	380	<
1.11	Produksi terung	ton	364	276	334	340	550	360	<
1.12	Produksi ketimun	ton	673,9	471,9	539,7	645	325	555	<
1.13	Produksi kangkung	ton	337	281	184	190	210	220	<

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belum Tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016		
1.14	Produksi Kakao	ton	919,61	919,61	937,3	950	967	970	<
1.14	Jumlah sapi	ekor	5.164	4.075	5.522	5.525	5.530	5.535	<
1.15	Jumlah kambing	Ekor	5.995	5.875	5.459	5.460	5.480	5.470	>
1.16	Jumlah itik	ekor	66.215	67.855	70.267	70.300	70.400	70.320	>
1.17	Jumlah ayam Ras Pedaging (*total ayam)	ekor	966.800	1.127.000	1.064.000	1.065.000	19.600.000	1.075.000	>
1.18	Jumlah produksi daging	Kg	2.692.273	3.006.108	3.154.404	3.160.000	1.250.000	3.175.000	<
1.19	Jumlah Produksi telur (*total ayam)	kg	5.353.936	5.729.653	5.857.687	5.860.000	6.060.000	5.875.000	>
1.20	Adanya pabrik pakan ternak unggas dan ternak besar	Bh investor	0	0	0	0	1	1	=
1.21	Adanya pasar ternak yang representatif	unit	1	1	1	1	1	1	=
2	**Kehutanan**								
2.1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	ha	30	40	50	60	70	80	<
2.2	Kerusakan kawasan hutan	ha	0	21	0	0	0	0	=
3	**Pariwisata**								
3.1	Kunjungan wisata mancanegara (orang)	Orang	115	100	108	1.156	2.355	5.210	<
3.2	Kunjungan wisata nusantara (orang)	orang	120.109	105.770	116.540	128.807	163.662	228.096	<
3.3	Jumlah objek wisata unggulan	buah	1	1	1	1	1	1	=
3.4	Jumlah event pariwisata dan budaya yang terlaksana	kali	19	16	16	16	16	16	=
3.5	Kontribusi sektor pariwisata (Hotel dan restoran) terhadap PDRB (2010=100)	%	2,39	2,48	2,57	2,87	0,95	3,01	<
3.6	Jumlah restoran,rumah makan dan warteg	unit	82	94	111	115	116	120	<
4	**Kelautan dan Perikanan**								
4.1	Konsumsi ikan	Kg/kapita/ tahun	27,5	28	28,5	29	32	30	>
5	**Perdagangan**								
5.1	Jumlah pasar (pasar tradisional/modern;swalayan, toko, kios)	unit	4.236	4.237	4.252	4.255	2.191	4.263	<
5.2	Pameran Expo	kali	1	1	1	1	1	1	=

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh, 2017

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pola dan proses yang harus dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah secara umum mengacu pada paket reformasi keuangan Negara, yang dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggung jawab keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dan peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kota Payakumbuh berpedoman pada Perarturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya, dan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2010 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 33 tahun 2004, telah ditegaskan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 disebutkan bahwa pendekatan anggaran kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kinerja dari perencanaan alokasi biaya yang telah ditetapkan. Kinerja mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan public dan harus berpihak pada kepentingan publik, yang artinya memaksimalkan penggunaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Untuk menyusun rencana keuangan lima tahun kedepan perlu ditinjau kinerja keuangan daerah lima tahun sebelumnya agar dapat diketahui kondisi keuangan yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah dalam membiayai pembangunan. Hasil evaluasi terhadap kinerja keuangan periode sebelumnya dapat menjadi salah satu informasi bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan keuangan untuk membiayai pembangunan di masa yang akan datang.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Azas umum pengelolaan keuangan daerah telah menjadi komitmen Pemerintah Kota Payakumbuh. Pengelolaan keuangan daerah seoptimal mungkin dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang setiap tahunnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah mempunyai kontribusi yang cukup signifikan terhadap APBD Kota Payakumbuh. Pendapatan daerah Kota Payakumbuh disusun atas dasar potensi daerah sebagai sumber penerimaan khususnya kapasitas fiskal, yang menunjukkan gambaran kondisi kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Beberapa faktor yang mempengaruhi besaran rencana target pendapatan daerah dalam APBD Kota Payakumbuh, menyangkut kemampuan kapasitas fiskal yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan perimbangan bagi hasil pajak baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi Sumatera Barat serta sumber lain – lain yang sah.

Menurut Undang–undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menurut Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah Sistem Pembagian Keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu mulai tahun anggaran 2012 sampai dengan 2016, pendapatan daerah Kota Payakumbuh terus mengalami kenaikan. Hal ini patut disyukuri karena dengan kenaikan pendapatan masyarakat Kota Payakumbuh dapat mengalami kemajuan dan peningkatan taraf hidup.

Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber Pendapatan, pengukuran kinerja juga dilakukan pada sisi realisasi belanja Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan pengukuran kinerja juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap. Semakin banyak belanja yang terserap semakin bagus kinerja suatu daerah. Pengelolaan belanja daerah Kota Payakumbuh bertumpu pada alokasi anggaran yang berazaskan keadilan, dimana keadilan merupakan misi utama dalam melaksanakan berbagai kebijakan, khususnya dalam pengelolaan anggaran daerah. Pelayanan umum akan meningkat dan kesempatan kerja juga akan makin bertambah apabila fungsi alokasi dan distribusi dalam pengelolaan anggaran belanja telah dilakukan dengan proporsional. Selain itu dalam pengelolaan belanja daerah juga dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas

anggaran, hal ini dapat dilihat dari manfaat anggaran yang dapat menghasilkan perbaikan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kedua jenis belanja ini digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Belanja yang dilakukan Kota Payakumbuh dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban pelayanan kebutuhan dan kepentingan public. Kewajiban tersebut dapat berupa pembangunan berbagai fasilitas public dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berikut tabel 3.10 yang menunjukkan target dan Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dari tahun tahun 2012-2016.

tabel 3.1
Target dan Realisasi Belanja Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2012 s/d 2016 (Rp.)

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%	Tk. Pertumbuhan
1	2012	503.687.140.851,00	468.917.130.053,00	93,10%	
2	2013	570.263.760.419,00	512.840.670.449,00	89,93%	9,37%
3	2014	653.771.350.803,00	593.640.727.396,00	90,80%	15,76%
4	2015	745.202.396.623,00	694.205.053.266,00	93,16%	16,94%
5	2016	785.579.150.712,00	741.093.594.892,00	94,34%	6,75%
Rata- Rata		651.700.759.881,60	602.139.435.211,20	92,26%	12.20%

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja pemerintah Kota Payakumbuh meningkat dari tahun ketahun. Rata-rata realiasasi yang terjadi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mencapai 92,26%, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 9.76% pertahun. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2016 yakni 94.34%. Adapun Komposisi belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun anggaran 2012 – 2016 dapat dilihat pada grafik 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2
Komposisi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Dalam belanja
Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2012 s/d 2016

NO	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI(Rp)	%	PERTUMBUHAN %	KONTRIBUSI %
Belanja Tidak Langsung						
1	2012	304.377.649.384,00	289.152.949.189,00	95,00		61,66
2	2013	312.475.910.918,00	290.085.134.964,00	92,83	0,32	56,56
3	2014	351.476.732.558,00	320.539.283.713,00	91,20	10,50	54,00
4	2015	359.996.518.030,00	332.807.071.004,00	92,45	3,83	47,94
5	2016	381.869.644.915,00	360.632.251.980,00	94,44	8,36	48,66
Rata- Rata		**342.039.291.161,00**	**318.643.338.170,00**	**93,18**	**5.75**	**52,92**
Belanja Langsung						
1	2012	199.309.491.467,00	179.764.180.864,00	90,19		38,34
2	2013	257.787.849.501,00	222.755.535.485,00	86,41	23,92	43,44
3	2014	302.294.618.245,00	273.101.443.683,00	90,34	22,60	46,00
4	2015	385.205.878.593,00	361.397.982.262,00	93,82	32,33	52,06

NO	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI(Rp)	%	PERTUMBUHAN %	KONTRIBUSI %
5	2016	403.709.505.797,00	380.461.342.912,00	94,24	5,27	51,34
Rata- Rata		**309.661.468.720,60**	**283.496.097.041,20**	**91,00**	**21.03**	**47,08**

Tabel diatas menunjukkan bahwa komposisi belanja tidak langsung merupakan komponen terbesar yang mendukung belanja daerah dengan rata-rata kontribusi sebesar 52.92%, sedangkan belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 47.08%. namun demikian kondisi belanja yang terus meningkat menunjukkan bahwa kebijakan anggaran yang dianut oleh pemerintah Kota Payakumbuh sudah mengedepankan urusan-urusan yang berkenaan dengan masyarakat langsung, hal ini memiliki makna bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan program kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan penganggaran pembangunan yang dilakukan Kota Payakumbuh sudah *pro public*. Rata-rata realisasi belanja tidak langsung dalam kurun 5 (lima) tahun dari 2012 – 2016 sebesar 93.18%, tingkat pertumbuhan sebesar 5.75%.

Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, dalam hal terjadi deficit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan asset yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan. Pos pembiayaan ini berkaitan dengan penerapan anggaran kinerja dimana dimungkinkan adanya surplus atau deficit dalam penganggaran daerah. Berikut tabel 3.3 yang menunjukkan target dan Realisasi pembiayaan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dari tahun tahun 2012-2016.

Tabel 3.3
Target dan Realisasi pembiayaan
Kota Payakumbuh Tahun 2012 s/d 2016

No	TAHUN	TARGET	REALISASI	%	TINGKAT PERTUMBUHAN %
1	2012	31.338.578.248,00	31.338.578.248,29	100,00	
2	2013	29.422.548.319,00	29.962.548.319,64	101,84	-4,39
3	2014	50.186.410.017,00	50.186.328.854,89	100,00	67,50
4	2015	61.187.763.640,00	66.200.584.750,00	108,19	31,91
5	2016	71.240.742.577,00	111.180.098.246,00	156,06	67,94
Rata- Rata		**48.675.208.560,20**	**57.773.627.683,76**	**113.22**	**32,59**

Dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Payakumbuh sepanjang tahun 2012-2016 Sumber Pembiayaan penerimaan yang digunakan adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) yang merupakan pembentuk terbesar dari nominal realisasi penerimaan pembiayaan. Tingkat realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah berkisar antara Rp. 36.696.578.248,29 (2012) hingga Rp. 73.917.573.486,00 (2016). Tingginya realiasi penerimaan pembiayaan tahun 2016 disebabkan oleh

penerimaan kembali atas investasi non permanen (dana bergulir) sebesar Rp. 17.119.524.760,-. Selanjutnya tingkat realisasi pengeluaran pembiayaan berkisar antara Rp. 5,69 Milyar (2012) hingga Rp.20,14 Milyar (2016). Tingginya pengeluaran pembiayaan pada tahun 2016 selain disebabkan oleh penyertaan modal pemerintah daerah kepada perusahaan umum daerah seperti Bank Nagari, penyaluran dana bergulir kepada masyarakat yang merupakan pengeluaran kembali investasi non permanen juga menjadi point tingginya pengeluaran pembiayaan daerah. Adapun besaran penyaluran dana bergulir ini pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.16.543.000.000,-.

Dari uraian yang telah disampaikan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam lima tahun terakhir anggaran pendapatan dan belanja daerah selalu meningkat dari tahun ketahun, sementara pembiayaan daerah berfluktuasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan, sebagaimana dapat ilihat dari tabel 3.4. barikut ini;

Tabel 3.4
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kota Payakumbuh Tahun 2012 s/d Tahun 2016 (dalam Milyar Rupiah)

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan %
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**476,10**	**542,60**	**603,64**	**703,92**	**717,63**	10,94
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**50,71**	**54,18**	**65,90**	**100,65**	**87,45**	17,02
1.1.1	Pajak Daerah	5,72	7,11	10,59	10,77	11,03	19,35
1.1.2	Retribusi Daerah	7,60	8,42	7,01	5,48	6,24	-3,43
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	7,41	9,03	7,98	8,34	9,53	7,27
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah	29,98	29,62	40,31	76,07	60,63	25,82
1.2.	**DANA PERIMBANGAN**	**370,49**	**420,60**	**458,98**	**508,63**	**601,83**	12,95
1.2.1	Dana Bagi Hasil	19,91	16,54	13,55	11,34	12,41	-10,46
1.2.2	Dana Alokasi Umum	325,02	369,12	412,92	425,11	445,52	8,30
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	25,55	34,95	32,50	72,17	138,89	61,06
1.2.4	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
1.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**54,90**	**67,82**	**78,75**	**94,65**	**28,36**	-2,55
1.3.1	Hibah	1,80	12,57	1,00	0,99	3,60	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi	11,69	0,00	17,60	21,65	22,79	18,95
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus	41,41	54,35	60,01	69,38	0,00	-10,68
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Dari Pemerintah Lainnya	0,00	0,90	0,14	2,61	1,97	426,43
2.	**BELANJA DAERAH**	**468,91**	**512,84**	**593,64**	**694,21**	**741,09**	
2.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**289,15**	**290,08**	**320,53**	**332,81**	**360,63**	**5,75**
2.1.1	Belanja Pegawai	259,35	277,20	307,41	329,48	344,42	7,37
2.1.2	Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	15,65	
2.1.4	Hibah	27,79	10,29	3,32	1,97	0,00	
2.1.5	Bantuan Sosial	0,54	1,06	7,63	0,00	0,00	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.7	Bantuan Keuangan	1,21	0,00	2,68	1,36	0,56	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0,24	0,00	0,00	0,00	0,05	
2.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**179,76**	**222,75**	**273,10**	**361,40**	**380,46**	**21,03**
2.2.1	Belanja Pegawai	39,44	47,17	51,54	69,45	35,07	3,52
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73,93	97,59	116,31	127,28	183,88	26,27
2.2.3	Belanja Modal	66,38	77,98	105,24	164,67	161,52	26,74
3.	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**31,33**	**29,42**	**50,18**	**59,19**	**71,24**	**25,7**

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan %
		2012	2013	2014	2015	2016	
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	**37,03**	**38,52**	**59,72**	**60,19**	**67,64**	**18,06**
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	**5,70**	**9,10**	**9,54**	**1,00**	**3,60**	**58,74**

3.1.2. Neraca Daerah

Secara umum kondisi neraca daerah Kota Payakumbuh tergolong baik, terlihat dari rasio lancar dan rasio quick yang mencapai lebih dari angka 1, dan rasio total hutang terhadap total aset dan rasio hutang terhadap modal yang bernilai kurang dari 0,1. Kondisi ini tentunya perlu dijaga dan dipertahankan sehingga kondisi keuangan daerah tetap dalam kondisi sehat. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek sedangkan rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban- kewajiban jangka panjangnya. Hasil perhitungan analisis rasio keuangan daerah Kota Payakumbuh dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Rasio Keuangan Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2012 - 2016

NO	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016
I	**RASIO LIKUIDITAS**					
1	Rasio Lancar = Aktiva Lancar : Kewajiban Jangka Pendek	56,42	20,47	56,42	20,47	7,05
2	Rasio Quick = (Aktiva Lancar - persediaan) : Kewajiban Jangka Pendek	53,62	17,56	53,62	17,56	5,76
II	**RASIO SOLVABILITAS**					
1	Rasio Total Hutang Terhadap Aset = Total Hutang : Total Aset	0,001	0,001	0,001	0,01	0,01
2	Rasio Hutang terhadap Modal = Total Hutang : Total Ekuitas	0,001	0,001	0,001	0,01	0,01

Selama periode 2012-2016, Kota Payakumbuh mengalami penurunan jumlah aset dari Rp. 1.209.901.212,00 menjadi Rp.1.054.710.869.365,00. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah dimana untuk aset tetap sudah diakui adanya akumulasi penyusutan terhadap nilai aset. Disamping itu penurunan aset tetap juga disebabkan oleh penyerahan aset yang ada disekolah menengah dilingkungan Dinas Pendidikan dan di Dinas Perhubungan yang akan diserahkan ke Propinsi Sumatera Barat terkait urusan pemerintahan konkuren. Selanjutnya mengenai Neraca Kota Payakumbuh dalam kurun waktu tahun 2014 s/d 2016 disajikan pada Tabel 3.6. sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kota Payakumbuh tahun 2012-2016

No.	URAIAN	rata-rata pertumbuhan %
I	**ASET**	
I.I	**ASET LANCAR**	2,42
I.I.I	Kas	-9,88
I.I.2	Piutang	32,92
I.I.3	Penyisihan Piutang	226,12
I.I.4	Beban Dibayar di Muka	-19,24
I.I.5	Persediaan	131,07
I.2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	4,18
I.2.I	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,78
I.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	5,27
I.3	**ASET TETAP**	-10,31
I.3.I	Tanah	15,98
I.3.2	Peralatan dan Mesin	8,48
I.3.3	Gedung dan Bangunan	-9,06
I.3.4	Jalan,Irigasi dan Jaringan	21,16
I.3.5	Aset Tetap Lainnya	-0,11
I.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	40,07
I.3.7	Akumulasi Penyusutan	1,70
I.4	**ASET LAINNYA**	258,07
I.4.I	Tagihan Jangka Panjang	75,99
I.4.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00
I.4.3	Aset Tak Berwujud	-9,05
I.4.4	Aset Lain-lain	606,19
	JUMLAH ASET	-4,90
2	**KEWAJIBAN**	188,15
2.I	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	188,15
2.I.I	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	27,59
2.I.2	Utang Beban	185,92
2.I.3	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00
2.I.4	Pendapatan Diterima Dimuka	74,30
3	**EKUITAS DANA**	-5,37
3.I	**EKUITAS DANA LANCAR**	537,58
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	-4,90

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Kebijakan penggunaan anggaran untuk Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur dapat dilihat pada Tabel 3.7 di bawah ini:

Tabel 3.7
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Payakumbuh (dalam Juta Rupiah)

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Kontribusi %
A.	**Belanja Tidak Langsung**	**289,152.94**	**290,085.13**	**320,539.28**	**329,478.86**	**344.418,97**	**291.675,86**	**56,51**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	204,053.24	204,711.08	226,202.36	232,510.96	245,068.79	213,883.67	**40,46**
2	Belanja Tambahan Penghasilan	82,936.18	83,203.56	91,938.56	94,502.65	96,793.31	73,200.93	**15,48**
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	1,630.07	1,635.32	1,807.00	1,857.40	1,826.60	3,634.10	**0,43**
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	533.45	535.17	591.36	607.85	730,27	957.15	**0,13**
B.	**Belanja Langsung**	**179,764.18**	**222,755.53**	**273,101.44**	**229,972.81**	**232.924,32**	**280.615,12**	**43,49**
1	Belanja Honorarium PNS	19,710.16	24,423.92	29,944.08	25,215.26	25,794.05	29,941.55	**4,74**
2	Belanja Uang Lembur	-	-	-	-	-	-	**0,00**
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	336.43	416.89	511.12	430.40	590.00	420.50	**0,08**
4	Belanja Kursus, Pelatihan, dan Sosialisasi	596.30	738.91	905.91	762.85	957.04	1,174.39	**0,17**
5	Bimbingan Teknis PNS	-	-	-	-	-	-	**0,00**
6	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	4,576.49	5,670.97	6,952.69	5,854.71	6,120.24	8,862.30	**1,22**
7	Belanja Makanan dan Minuman	6,264.87	7,763.13	9,517.71	8,014.66	9,612.63	11,935.03	**1,73**
8	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2,025.74	2,510.20	3,077.54	2,591.53	744.77	1.932.88	**0,31**
9	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	631.63	782.69	959.59	808.05	1,090.51	1.274.09	**0,19**
10	Belanja Perjalanan Dinas	16,902.64	20,944.98	25,678.85	21,623.60	26,498.75	34,845.91	**4,85**
11	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-	-		-	-	-	**0,00**
12	Belanja Pemulangan Pegawai	-	-		-	-	-	**0,00**
13	Belanja Modal	128,719.91	159,503.82	195,553.94	164,671.74	161,516.31	190,228.46	**30,22**
	TOTAL	**468,917.12**	**512,840.66**	**593,640.72**	**559.451,67**	**577.343,29**	**572.290,97**	**100,00**

Penggunaan anggaran pada belanja tidak langsung didominasi oleh Belanja Gaji & Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan. Belanja Gaji dan Tunjangan selama kurun waktu 2015-2017 memiliki rata – rata kontribusi sebesar 40.46% dari total Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur dengan trend kontribusi yang cenderung menurun, sedangkan untuk Belanja Tambahan penghasilan memiliki rata-rata kontribusi sebesar 15.48% dari Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur dengan trend kontribusi yang cenderung menurun. Adapun pada belanja pemenuhan kebutuhan aparatur yang ada di belanja langsung, komponen terbesar adalah Belanja Modal dengan rata-rata prosentase kontribusi pada tahun 2014-2016 mencapai 30.22% dari total Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur, disusul oleh Belanja perjalanan dinas dan Belanja honorarium PNS dengan rata-rata kontribusi mencapai 4.85% dan 4,74% dari Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur. Dari analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada Tabel 3.20, meskipun Belanja Honorarium dan belanja Perjalanan Dinas secara proporsi terlihat relatif kecil terhadap total Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur, tetapi bila dibandingkan kepada komponen Belanja Langsung akan terlihat bahwa Belanja Honorarium dan Belanja Perjalanan Dinas mencapai 11% dari total komponen Belanja Langsung yang ada pada Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur. Belanja Modal menempati Proporsi tertinggi dari komponen belanja langsung yakni dengan rata-rata proporsi sebesar 30,22%.

Tabel 3.8.
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kota Payakumbuh tahun 2014-2016

No	Uraian	2017 (%)	2016 (%)	2015 (%)	2014 (%)
A	**Belanja Tidak Langsung**	**39,98%**	**48,66%**	**47,94%**	**53,99%**
1	Belanja Pegawai	38,89%	46,47%	47,46%	51,78%
2	Belanja Bunga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	Belanja Subsidi	0,00%	2,11%	0,00%	0,00%
4	Belanja Hibah	0,96%	0,00%	0,28%	0,56%
5	Belanja Bantuan Sosial	0,00%	0,00%	0,00%	1,29%
6	Belanja Bagi Hasil	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Belanja Bantuan Keuangan	0,07%	0,08%	0,20%	0,45%
8	Belanja Tidak Terduga	0,06%	0,01%	0,00%	0,00%
B	**Belanja Langsung**	**60,01%**	**51,34%**	**52,06%**	**46,00%**
1	Belanja Pegawai	5,34%	4,73%	10,00%	8,68%
2	Belanja Barag dan Jasa	29,31%	24,81%	18,33%	19,59%
3	Belanja Moda	25,36%	21,79%	23,72%	17,73%

Secara umum proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama tahun 2012 hingga 2017 selalu berada di atas 70% dari total belanja dan pembiayaan pengeluaran dengan prosentase rata-rata mencapai 77%.

Tabel 3.9.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Payakumbuh

No.	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja+Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b)x100%
1	2012	388.689.035.395	474.604.580.053	81%
2	2013	410.089.046.523	521.400.670.449	78%
3	2014	470.313.229.901	616.306.891.480	76%
4	2015	559.451.672.230	695.205.053.266	80%
5	2016	577.343.290.297	761.236.594.892	76%
6	2017	572.290.975.156	772.068.292.035	74%

Berdasarkan tabel – tabel pengeluaran APBD Kota Payakumbuh tersebut dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara total keseluruhan belanja proporsi realisasi belanja tidak langsung masih merupakan komponen terbesar dari belanja daerah Kota Payakumbuh tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017 tetapi pada komponen belanja langsung terus mengalami peningkatan sehingga proporsi antara kedua komponen belanja ini semakin berimbang.
2. Realisasi Belanja Tidak Langsung Kota payakumbuh tahun anggaran 2017 mengalami penurunan untuk belanja pegawai hal ini disebabkan oleh pengalihan urusan pendidikan menengah ke propinsi. Sedangkan belanja bantuan keuangan kepada parpol adalah tetap sedangkan belanja tidak terduga mengalami fluktuasi naik dan turun.
3. Realisasi belanja kebutuhan aparatur lingkup Kota Payakumbuh untuk tahun 2015 sampai dengan 2016 mengalami pertumbuhan dengan proporsi yang juga tidak berbeda jauh dari tahun ke tahun, namun mengalami penurunan di tahun 2017.
4. Realisasi Pengeluaran pembiayaan daerah pada dasarnya hanya penyertaan modal.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Komponen pembiayaan merupakan salah satu penutup defisit penganggaran. Analisis pembiayaan selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.10
Defisit Riil Anggaran
Kota Payakumbuh Tahun 2012 – 2017

No.	Uraian	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	476.101.100.124,35	542.604.532.146,25	603.642.162.171,33	703.922.250.202	717.632.636.495	746.928.793.801
	Dikurangi realisasi						
2	Belanja Daerah	468.917.130.053	512.840.670.449	606.766.891.480	694.205.053.266	741.093.594.892	749.948.767.275
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.687.450.000	8.560.000.000	9.540.000.000	1.000.000.000	20.143.000.000	22.119.524.760
A	**Defisit Rill**	**1.496.520.071**	**21.203.861.697**	**(12.664.729.309)**	**8.717.196.936**	**(43.603.958.397)**	**(25.139.498.234)**
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan :						
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	36.696.578.248,29	38.522.548.319,64	59.726.328.854,89	65.200.584.750	73.917.573.486	8.019.973.474
5	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya				0,00	17.119.524.760	17.119.524.760
B	**Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**36.696.578.248,29**	**38.522.548.319,64**	**59.726.328.854,89**	**65.200.584.750**	**91.037.098.246**	**25.139.498.234**
A-B	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan**	**38.522.548.319,64**	**59.726.410.016,89**	**60.187.763.640,22**	**73.917.781.686**	**47.433.139.849**	**0,00**

Berdasarkan tabel analisis diatas, kemudian disusun tabel analisis untuk mengetahui gambaran komposisi penutup defisit riil sebagai berikut :

Tabel 3.11
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2017

No.	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil					
		2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
	Defisit Rill						
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	36.696.578.248,29	38.522.548.319,64	59.726.328.854,89	65.200.584.750,00	73.917.573.486,00	8.019.973.474,00
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.407.462.121	9.028.866.865	7.984.857.557	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	17.119.524.760,00	17.119.524.760,00
8	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	38.522.548.319,64	59.726.410.016,89	60.187.763.640,22	73.917.781.686,00	47.433.139.849,00	0,00

Tabel 3.12
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kota Payakumbuh Tahun 2012 s/d 2016

No	Uraian	2012		2013		2014		2015		2016	
		(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	36,696,578,248.29		38,522,548,319.64		59,726,328,854.89		73,917,781,686.00		47.433.139.849	
2	Pelampauan Penerimaan PAD	280,339,124.35	0.76	1,442,099,940.25	3.74	191,649,473.00	0,32	16,596,767,238.00	22,45	(1.031.741.974)	-2,18
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	43,237,973.74	0.12	45,389,434.44	0.12	70,372,922.00	0,12	(3,501,055,341.00)	-4,74	(2.748.771.098)	-5,80
4	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	(125,832,209.44)	-0.34	(132,093,443.04)	-0.34	(204,801,000.00)	-0,34	4,811,905,322.00	6,51	(125.258.568)	-0,26
5	Sisa Penghematan Belanja	36,503,820,057.77	99.47	37,172,387,217.19	96.50	60,130,623,407.00	99,91	50,997,343,357.00	68,99	44.485.555.820	93,79
6	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	belum terselesaikan	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Kegiatan lanjutan	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan Daerah	(4,986,698.12)	(0.01)	(5,234,829.20)	(0.01)	(8,116,211.00)	0,00		0,00	17.119.524.760	36,09
10	Penerimaan kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,012,821,110.00	6,78	6.276.830.909	13,23
11	Penghematan Penyertaan Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.543.000.000)	34,88

Berdasarkan perkembangan realisasi dan komposisi Pembiayaan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam tahun anggaran 2016 Pemerintah Kota Payakumbuh mengalami defisit riil anggaran oleh karena belanja dan pengeluaran pembiayaan melebihi pendapatan. Defisit riil anggaran ini ditutup dengan penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya terutama dari pelampauan pendapatan dan sisa penghematan belanja.
2. SiLPA tahun anggaran sebelumnya menjadikan komponen ini menjadi yang terbesar dari penutup defisit riil anggaran Pemerintah Kota Payakumbuh tahun anggaran 2016.

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat tergambar pada realisasi belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama seperti pada Tabel 3.13 berikut ini :

Tabel 3.13
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kota Payakumbuh Tahun 2012 – 2016

No.	Uraian	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
A.	**Belanja Tidak Langsung**	**289.152..949.189**	**290.085.134.964**	**333.665.447.797**	**332.807.071.004**	**360.632.251.980**	**299.864.067.041**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	199.575.181.919	205.202.307.737	216.358.445.090	232.510.957.729	245.068.791.567	213.883.669.532
2	Belanja Tambahan Penghasilan	69.964.410.400	69.361.984.455	88.465.934.164	94.502.652.785	96.793.313.423	73.200.935.000
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	1.793.560.000	1.861.600.000	1.444.800.000	1.857.400.000	1.826.600.000	3.634.100.000
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	260.000.000	237.060.826	120.445.000	-	-	-
5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	-	286.069.107.	-	369.103.400	463.203.655	618.341.847
6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	260.881.629	-	238.751.995	267.064.586	338.809.453
7	Belanja Hibah pada Organisasi Kemasyarakatan	-	4.365.719.100	-	1.965.498.725	-	3.205.000.000
8	Belanja Hibah pada Instansi Vertikal	-	-	-	-	13.716.400.050	-
9	BOP PAUD Masyarakat/Swasta	-	-	-	-	1.932.600.000	3.324.000.000
	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	650.000.000
10	Belanja Bantuan Sosial	-	1.065.542.000	-	-	-	-
11	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/desa	-	1.134.000.000	-	1.000.000.000		-
12	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	-	372.734.660	-	362.706.370	559.211.209	559.211.209
13	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	5.067.490	450.000.000
B	**BELANJA LANGSUNG**	**-**	**-**	**-**	**33.671.985.125**	**16.379.576.406**	**13.687.668.604**
	Belanja pegawai BLUD	-	-	-	26.869.665.363	9.271.949.934	4.404.866.000
	Belanja premi asuransi	-	-	-	6.371.919.762	6.517.226.472	8.862.302.604
	belanja beasiswa pendidikan PNS				430.400.000	590.400.000	420.500.000
B.	**Pembiayaan Pengeluaran**	**5.687.450.000**	**8.560.000.000**	**9.540.000.000**	**1.000.000.000**	**20.143.000.000**	**22.119.524.760**

No.	Uraian	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan				-	-	-
2	Pembayaran Pokok Utang				-	-	-
3	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.687.450.000	8.560.000.000	9.540.000.000	1.000.000.000	20.143.000.000	22.119.524.760
	TOTAL (A+B)	**294.840.399.189**	**298.645.134.964**	**343.205.447.797**	**367.479.056.129**	**397.154.828.386**	**335.671.260.405**

Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti pembayaran belanja gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil serta Tambahan Penghasilan PNS. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh pada akhir tahun 2016 sebesar 4.020 orang yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu baik yang menduduki jabatan struktural maupun fungsional. Lebih dari separonya merupakan tenaga dari urusan pendidikan dan urusan kesehatan seperti guru-guru dan tenaga kesehatan.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakan, Pemerintah Kota Payakumbuh berupaya menyeimbangkan alokasi belanja langsung dengan Belana Tidak Langsung.pada setiap tahunnya Pengalokasiaan anggaran pada program kegaitan lebih diprioriataskan sehingga dapat meningkatkan pembangunan dan kemajuan daerah. Upaya ini tentu saja dalam koridor peratuaran perundang undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedomanan umum penyusunan APBD tahun yang berkenaan.

3.3.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

3.3.2.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah berdasarkan pertumbuhan rata rata peiode RPJMD sebelumnya perubahan regulasi dan issu perubahan kebijakan fiskal, di samping sumping itu tentu ada usaha Untuk meningkatkan volume pendapatan daerah, maka strategi yang ditempuh dengan kebijakan antara lain :

1. Menggali dan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah sesuai kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
2. Peningkatan akurasi data potensi pajak
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
4. Peningkatan koordinasi dan pengawasan internal dan eksternal pemungutan pendapatan daerah
5. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pendapatan daerah
6. Peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan dan akses informasi yang akurat kepada masyarakat
7. Penggalakan sosialisasi secara kontinyu kepada masyarakat
8. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
9. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah

Sesuai dengan ruang lingkup Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Payakumbuh mengarahkan pada mengupayakan sumber pendapatan desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum yang menempati proporsi paling besar, sedangkan Pendapatan Asli Daerah terus ditingkatkan namun tetap mempertimbangkan kemampuan warga masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian juga dengan sumber pendapatan lainnya terus ditingkatkan yaitu Lain-lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sehingga

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, proporsi Dana Alokasi Umum secara bertahap dapat digantikan oleh sumber pendapatan yang diupayakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.

3.3.2.2. Proyeksi Kebutuhan Belanja dan Pembiayaan

Belanja Daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro daerah diharapkan memberikan dorongan atau stimulant terhadap perkembangan ekonomi daerah melalui multiplier effect bagi peningkatan kesejahteraan rakyat lebih merata. Untuk itu diperlukan analisa terhadap pengeluaran belanja yang akan dilakukan dalam lima tahun kedepan.

Proyeksi belanja dilakukan dengan cara memperhatikan besaran target capaian indikator sasaran program yang hendak dicapai, perkiraan inflasi yang mungkin terjadi, serta trend perkembangan komponen-komponen yang masuk dalam aspek belanja seperti komposisi belanja langsung dan tidak langsung, belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa dan lain-lain. Dari pertimbangan aspek-aspek tersebut, maka skenario yang dipakai dalam melakukan proyeksi belanja ini adalah skenario moderat, artinya tidak terlalu optimistic tetapi tidak juga pesimis. Hal ini didasari pertimbangan bahwa kedepan tantangan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber belanja akan menghadapi tantangan yang semakin sulit. Disisi lain dengan kondisi ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Perimbangan memberikan ketidakpastian yang tinggi, karena porsinya sangat tergantung oleh kebijakan pemerintah.

Disamping Itu, Merasionalkan belanja sangat penting agar belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien. Oleh karena itu formulasi kebijakan umum anggaran diarahkan pada program prioritaas. Belanja Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan diarahkan sesuai target kinerja yang akan dicapai dari program/kegiatan sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung belanja Aparatur dan Belanja Publik secara proporsional. Secara umum belanja daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang erat kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan masyarakat. Sedangkan belanja tidak langsung dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah seperti pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan kepada partai politik. Berikut ini dapat dilihat proyeksi Pendapatan Daerah pada tabel 3.14 serta Prediksi Pengeluaran Daerah pada tabel 3.15.

Tabel 3.14
Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2017 - 2022

kode	Uraian	2017	Tk. Pertumbuhan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	**Pendapatan Daerah**	**746.928.793.801**		**746.565.751.116**	**823.302.209.176**	**915.191.209.215**	**1.012.335.447.521**	**1.116.329.532.624**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**114.778.257.966**		**129.489.608.116**	**142.334.526.876**	**226.149.156.711**	**277.668.228.468**	**316.935.082.462**
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah	14.376.336.939	19,35%	16.572.700.000	17.614.644.376	21.022.361.293	30.089.333.016	39.943.098.325
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	6.357.155.100	-3,43%	8.513.699.886	8.953.428.700	9.197.767.414	11.950.875.584	16.712.452.431
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.878.354.510	7,27%	12.507.771.840	13.836.703.200	84.842.563.806	95.921.545.512	117.078.963.904
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	85.166.411.417	25,82%	91.895.436.390	101.929.750.600	111.086.464.198	139.706.474.356	143.200.567.802
1.2.	**DANA PERIMBANGAN**	**609.533.394.835**		**578.192.002.000**	**633.454.105.700**	**637.747.337.963**	**675.496.065.423**	**716.044.039.246**
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	15.459.777.705	-10,46%	18.647.721.000	11.560.199.600	13.350.623.599	19.267.608.883	8.297.913.028
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	437.696.934.000	8,30%	437.696.934.000	457.696.934.000	474.025.779.522	513.369.919.222	540.979.622.518
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	105.587.286.130	8,00%	105.347.347.000	146.696.972.100	132.870.934.842	125.358.537.318	144.266.503.700
1.2.4.	Dana Insentif Daerah	50.789.397.000	0,00%	16.500.000.000	17.500.000.000	17.500.000.000	17.500.000.000	22.500.000.000
1.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**22.617.141.000**		**38.884.141.000**	**47.513.576.600**	**51.294.714.541**	**59.171.153.630**	**83.350.410.916**
1.3.1.	Hibah	1.050.000.000	100,00%	17.317.000.000	17.000.000.000	15.000.000.000	16.000.000.000	32.000.000.000
1.3.2.	Dana Darurat		0,00%	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi	21.567.141.000	18,95%	21.567.141.000	30.513.576.600	36.294.714.541	43.171.153.630	51.350.410.916
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus	-	-42,20%	**0**	0	0	0	0

Sumber: BKD Kota Payakumbuh (diolah)

Tabel 3.15
Proyeksi Belanja Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2017 - 2022

Kode	Uraian	2017	Tk. Pertumbuhan	2018	2019	2020	2021	2022
	Belanja Daerah	**746.928.793.801**		**804.861.522.682**	**875.688.004.364**	**954.256.604.622**	**1.041.535.042.345**	**1.138.621.402.359**
2.1.	**Belanja Tidak Langsung**	**299.864.067.041**	5,00%	**335.773.180.849**	**330.701.147.006**	**388.694.151.789**	**419.870.836.434**	**441.055.875.889**
2.1.1.	Belanja Pegawai	291.675.855.832	5,00%	327.437.969.640	322.365.935.797	380.358.940.580	411.535.625.225	432.720.664.680
2.1.4.	Belanja Hibah	7.179.000.000	0,00%	7.326.000.000	7.326.000.000	7.326.000.000	7.326.000.000	7.326.000.000
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa Dan Partai Politik	559.211.209	0,00%	559.211.209	559.211.209	559.211.209	559.211.209	559.211.209
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	450.000.000	0,00%	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000
2.2.	**Belanja Langsung**	**450.084.700.234**		**469.088.341.833**	**544.986.857.358**	**565.562.452.833**	**621.664.205.911**	**697.565.526.470**
2.2.1.	Belanja Pegawai	40.070.514.755	3,52%	41.628.181.832	43.208.572.569	44.610.384.815	46.180.670.361	47.806.229.957
2.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	219.785.722.099	10,00%	214.983.348.548	243.781.683.402	251.659.851.743	276.825.836.917	304.508.420.609
2.2.3.	Belanja Modal	190.228.463.380	15,00%	212.476.811.453	257.996.601.387	269.292.216.275	298.657.698.633	345.250.875.904

Sumber : BKD Kota Payakumbuh (diolah)

Sementara dari sisi belanja daerah diprediksi terjadi peningkatan pengeluaran dari tahun ketahun sejalan dengan peningkatan pendapatan daerah. Kebijakan pengelolaan Belanja Daerah perlu disusun dalam kerangka sistimatis dan terpola. Belanja Daerah diarahkan mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahun mendatang. Pengelolaan Belanja Daerah sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja Daerah diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan (input), keluaran (output) dan manfaat (outcome) yang dapat dinikmati oelh masyarakat. Selanjutnya alokasi anggaran dilaksanakan secara terbuka berdasarkan prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja daerah harus diadministrasikan sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku.

Arah Pengelolaan Belanja Daerah Kota Payakumbuh untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Transparansi dan Akuntabel
   Setiap Pengeluaran Belanja Langsung akan dipublikasikan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan secara terbuka berarti pihak ketiga/swasta dan warga masyarakat mudah mendapatkan informasinya serta tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja langsung. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja langsung tidak hanya dari aspek administrasi keuangan tetapi berkaitan dengan proses perencaan, pelaksanaan dan manfaat dari kegiatan dan program.

2. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
   Dana yang tersedia dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan dengan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan warga masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepentingan warga masyarakat.

3. Optimalisasi Belanja Langsung
   Belanja Langsung mendukung tujuan pembangunan secara efisien dan efektif yang disusun berdasarkan kebutuhan nyata warga masyarakat. Optimalisasi Belanja Langsung untuk membangun infrastruktur melalui kerjasama dengan pihak swasta atau pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Prioritas
   Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk membiayai kegiatan dan program dibidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja guna mnedukung ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi serta penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan

5. Tolok Ukur dan Target Kinerja
   Belanja Daerah pada setiap kegiatan dan program disertai dengan tolok ukut dan target kinerja yang meliputi masukan (input), output (keluaran) dan hasil (outcome) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Tabel 3.16
Proyeksi Pembiayaan 2017-2022

kode	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	PEMBIAYAAN	**3.019.973.474**	**58.295.771.566**	**52.385.795.188**	**39.065.395.407**	**29.199.594.824**	**22.291.869.735**
3.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	**25.139.498.234**	**75.415.296.326**	**94.505.319.949**	**71.184.920.169**	**46.319.119.587**	**39.411.394.499**
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	8.019.973.474	58.295.771.566	52.385.795.188	39.065.395.407	29.199.594.824	22.291.869.735
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan						
	Pinjaman dari Bank			25.000.000.000	15.000.000.000		
3.1.7.	**Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya**	17.119.524.760	17.119.524.760	17.119.524.761	17.119.524.762	17.119.524.763	17.119.524.764
3.2.	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**22.119.524.760**	**17.119.524.760**	**42.119.524.761**	**32.119.524.762**	**17.119.524.763**	**17.119.524.764**
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	22.119.524.760	17.119.524.760	17.119.524.761	17.119.524.762	17.119.524.763	17.119.524.764
	Investasi BLUD RSUD			20.000.000.000	15.000.000.000		
	Ivestasi UPTD Ternak Sapi		-	5.000.000.000 -	-	-	-
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**3.019.973.474**	**58.295.771.566**	**52.385.795.188**	**39.065.395.407**	**29.199.594.824**	**22.291.869.735**

Didalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dimungkinkan adanya defisit dan surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dengan belanja sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dari belanja. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Arah pengelolaan pembiayaan ini adalah :

1. Penerimaan pembiayaan bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pengelolaan keuangan pada waktu APBD dijalankan.
2. Penerimaan pembiayaan juga dimungkinkan untuk mendorong program-program strategis dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pinjaman ke Bank.
3. SILPA sedapat mungkin ditekan realisasinya dengan mengedepankan efektifitas dan efisiensi anggaran tentunya dengan tetap memperhatikan capaian indikator kinerja program.
4. Untuk pengeluaran pembiayaan akan dilakukan dalam bentuk penyertaan modal/ investasi ke BUMD seperti Bank Nagari dan PDAM serta pembayaran cicilan hutang ke Bank.

3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembanguna jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Perhitungan kerangka pendanaan meliputi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah seperti yang ditunjukan dalam Tabel 3.17 dan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah seperti yang ditunjukan dalam Tabel 3.18 berikut ini:

Tabel 3.17
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan	729.446.226.355	803.802.209.176	890.191.209.215	992.335.447.520	1.116.329.532.623
2	Pencairan Dana cadangan (sesuai Perda)	0,00				
3	Sisa Lebih (Rill) Perhitungan Anggaran	75.415.296.326	71.885.795.187	64.065.395.406	49.199.594.824	22.291.869.735
	Total Penerimaan	804.861.522.681	875.688.004.364	954.256.604.622	1.041.535.042.344	1.138.621.402.359
	Dikurangi					
4	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang wajib Mengikat	333.123.651.553	346.685.724.703	359.632.328.222	371.958.548.387	383.505.430.700
5	Serta Prioritas Utama					
	Kapasitas riil Kemampuan Keuangan	471.737.871.128	529.002.279.661	594.624.276.399	669.576.493.956	755.115.971.659

Dari tabel di atas dapat diproyeksikan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Payakumbuh untuk 5 Tahun ke depan hingga berakhirnya masa berlaku RPJMD 2017 - 2022, yaitu :

1. Proyeksi Tahun 2018 sebesar Rp. 804.861.522.681,76,00 atau sebesar 58 % dari total penerimaan.
2. Proyeksi Tahun 2019 sebesar Rp. 875.688.004.364,48 atau sebesar 60 % dari total penerimaan.
3. Proyeksi Tahun 2020 sebesar Rp. 954.256.604.622,40 atau sebesar 62 % dari total penerimaan.
4. Proyeksi Tahun 2021 sebesar Rp. 1.041.535.042.344,49 atau sebesar 64 % dari total penerimaan.
5. Proyeksi Tahun 2022 sebesar Rp. 1.138.621.402.359,25 atau sebesar 66 % dari total penerimaan.

Jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan yang ada tersebut merupakan modal pemerintah derah dalam membiayai :

1. Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen) dan kesehatan sebesar 10 % (sepuluh persen). Selain itu program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi,

memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Selain itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan program prioritas di tingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan serta paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.
3. Rencana alokasi pengeluaran prioritas III, yakni berkaitan dengan alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III baru akan dipenuhi setelah pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu.

Tabel 3.18
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022
(dalam Juta Rupiah)

No.	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
		(Juta Rp)	(juta Rp)	(juta Rp)	(juta Rp)	(juta Rp)
1	**Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan**	**471.737,87**	**529.002,28**	**594.624,28**	**669.576,50**	**755.115,97**
	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I					
II.a	Belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan	461.782,48	515.871,78	576.866,33	645.692,01	723.402,98
II.b	Pembentukan Dana Cadangan					
	Dikurangi					
II.c	Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	15.290,495	17.081,01	19.081,20	21.315,61	23.811,66
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas Utama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**Total rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)**	**446.491,994**	**498.790,77**	**557.785,13**	**624.376,41**	**699.591,32**
	sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas	25.245,88	30.211,51	36.839,15	45.200,09	55.524,65
III.a	Belanja Tidak Langsung	329.006,06	338.062,62	348.98,.76	361.856,90	376.917,21
	Dikurangi					
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	303.760,18	307.851,10	312.146,57	316.656,81	321.392,56
III	**Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)**	**25.245,88**	**30.211,51**	**36.839,15**	**45.200,09**	**55.524,65**
	Surplus Anggaran Riil atau berimbang (I-II-III)	**BERIMBANG**	**BERIMBANG**	**BERIMBANG**	**BERIMBANG**	**BERIMBANG**

3.3.4. Pinjaman Daerah

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota Payakumbuh periode 2017-2022, dan untuk percepatan pencapaian target program pembangunan daerah, adanya kegiatan prioritas daerah, pembangunan infrastruktur dan mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat, dan dengan terbatas dan rendahnya kemampuan keuangan daerah, maka Pemerintah Kota Payakumbuh dapat melakukan pinjaman daerah.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali

Pinjaman daerah adalah alternatif sumber pendanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan solusi untuk menutup kekurangan kas daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan untuk kepentingan daerah seperti kegiatan-kegiatan pendukung pertumbuhan ekonomi daerah, kegiatan-kegiatan untuk kepentingan layanan masyarakat, dan lain sebagainya dengan kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut dengan batas waktu yang telah ditentukan

Konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 pada prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Pemerintah Kota Payakumbuh harus mengikuti batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional.

Selain itu, dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara bab V mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, serta Pemerintah/Lembaga Asing disebutkan bahwa selain mengalokasikan Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, pinjaman daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

3.3.4.1 Dasar Hukum

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
7. PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 005/M.PPN/06/2006 tentang Tatacara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.02/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pinjaman Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tatacara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah.

3.3.4.2 Prinsip Dasar Pinjaman Daerah

Beberapa prinsip dasar dari pinjaman daerah di antaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.
2. Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas.
4. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
5. Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain.
6. Pinjaman Daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
7. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.
8. Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.
9. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD.

3.3.4.3 Persyaratan Pinjaman

Persyaratan umum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pinjaman adalah sebagai berikut:

1. Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Penerimaan umum APBD tahun sebelumnya adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.
2. Memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Pemerintah. Nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (Debt Service Coverage Ratio/DSCR) paling sedikit 2,5 (dua koma lima). DSCR dihitung dengan rumus sebagai berikut:

   DSCR = (PAD + (DBH – DBHDR) + DAU) – BW ≥ 2,5Angsuran Pokok Pinjaman + Bunga + Biaya Lain

3. Dalam hal Pinjaman Daerah diajukan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah harus tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah.
4. Khusus untuk Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang wajib mendapatkan persetujuan dari DPRD.

3.3.4.4. Sumber Pinjaman

Pinjaman Daerah bersumber dari:

1. Pemerintah Pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penerusan Pinjaman Luar Negeri;
2. Pemerintah Daerah lain;
3. Lembaga Keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
5. Masyarakat, berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

3.3.4.5 Jenis Dan Jangka Waktu Pinjaman

1. Pinjaman Jangka Pendek Merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran dan Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Pendek yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan.
2. Pinjaman jangka Menengah Merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman (pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain) harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan.
3. Pinjaman Jangka Panjang Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lain seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

3.3.4.6 Penggunaan Pinjaman

Penggunaan Pinjaman Daerah telah diatur sebagaimana jenis pinjamannya, yaitu:

a. Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
b. Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.
c. Pinjaman Jangka Panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang (i) menghasilkan penerimaan langsung, (ii) menghasilkan penerimaan tidak langsung, (iii) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
d. Khusus Pinjaman Jangka Panjang dalam bentuk Obligasi Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.

3.3.4.7 Prosedur Pinjaman Daerah

1. Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang dananya bersumber dari Pinjaman Luar Negeri.
2. Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang dananya bersumber dari Pusat Investasi Pemerintah.
3. Pinjaman Daerah yang dananya bersumber dari Perbankan
4. Pinjaman Daerah yang dananya bersumber dari Masyarakat (Obligasi Daerah)

3.3.4.8 Larangan Penjaminan

1. Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain;
2. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan;
3. Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.

3.3.4.9 Pembayaran Kembali Pinjaman

1. Seluruh kewajiban pinjaman daerah yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan;
2. Dalam hal daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjamannya kepada Pemerintah, kewajiban membayar pinjaman tersebut diperhitungkan dengan DAU dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak daerah tersebut.

3.3.4.10 Pelaporan Pinjaman

1. Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Pemerintah setiap semester dalam tahun anggaran berjalan;
2. Dalam hal daerah tidak menyampaikan laporan, Pemerintah dapat menunda penyaluran Dana Perimbangan.

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Pelaksanaan Pembangunan di Kota Payakumbuh merupakan proses yang melibatkan multi pemangku kepentingan baik dari dunia usaha, pemerintah, masyarakat maupun akademisi. Dengan proses seperti ini semua pihak dapat berkontribusi dalam pembangunan Kota Payakumbuh secara proporsional, dengan memenuhi prinsip keterbukaan, demokratis, transparansi, akuntabilitas, efisien, efektif, serta memenuhi azas kepatutan dan kewajaran. Secara umum tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengupayakan tidak terjadinya ketimpangan baik dari sisi sosial ekonomi maupun lingkungan. Untuk mewujudkan hal ini maka pembangunan dilakukan dengan memperhatikan posisi geografi dan potensi demografi, memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta mengoptimalkan faktor-faktor lingkungan strategis lainnya. Dalam perspektif pelaksanaan tata kelola pemerintahan, tujuan tersebut direpresentasikan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan ditentukan oleh kinerja seluruh Lurah dan Camat, serta seluruh OPD di lingkungan Kota Payakumbuh; dukungan dari Pemerintah Pusat; serta kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota.

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program dan kegiatan pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan memperhatikan cakupan efek dari masalah, intensitas kemunculan masalah dalam masyarakat, efek beruntun yang berpengaruh pada kinerja sektor lain, dan kecendrungan untuk meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif nantinya. Sehingga dengan memperhatikan hal tersebut dapat dihasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan kota. Disamping itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ditegaskan bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menetapkan kebijakan daerah, yang dikelompokkan menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Berikut permasalahan di Kota Payakumbuh yang dikategorikan berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintahan.

4.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

a. Jumlah SD yang terakreditasi A masih 71% dan SMP masih 55,5%;
b. Kekurangan Guru SD yang ASN (Guru kelas, Penjas dan guru agama) serta guru SMP pada mata pelajaran tertentu (BP, Keterampilan/TIK, Prakarya, Penjaskes); penentuan kekurangan jumlah guru di SD didasarkan pada jumlah rombel;
c. Rendahnya muatan pendidikan karakter dan keagamaan pada sekolah negeri dibanding pada sekolah swasta tertentu;
d. Rendahnya kualitas sarana prasarana pada beberapa sekolah.
e. Belum meratanya kualitas pendidikan di Kota Payakumbuh.

2. Urusan Kesehatan

a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan PHBS;
b. Terjadinya pergeseran gaya hidup berdampak pada pergeseran jenis penyakit yang sering muncul (dari Penyakit Menular menjadi Penyakit Tidak Menular); hipertensi, diabetes, TB, dll;
c. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat yang berdampak pada peningkatan jumlah penderita HIV;
d. Masih belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
e. Rendahnya partisipasi JKN mandiri;
f. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM kesehatan sesuai standar.
g. Peningkatan kasus penyakit menular dan tidak menular.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Menurunnya kualitas pelayanan air bersih;
b. Masih rendahnya Ketersediaan Bangunan Pelengkap Jalan;
c. Belum optimalnya (tidak terpenuhinya) pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai
acuan dalam perencanaan pembangunan;
d. Belum optimalnya pengelolaan perizinan pemanfaatan ruang dan pengaturan pemanfaatan ruang;
e. Belum maksimalnya pengelolaan jaringan irigasi dan pengairan;
f. Meningkatnya potensi abrasi sepanjang pinggir sungai;
g. Masih rendahnya pengendalian daya rusak sungai dan rendahnya penataan sungai;
h. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pemenuhan infrastruktur perkotaan.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Belum optimalnya sambungan air bersih bagi kawasan permukiman;
b. Masih terdapat kawasan kumuh;
c. Masih adanya rumah tidak layak huni;
d. Belum tercapainya target 100% rumah tinggal bersanitasi layak;
e. Masih tingginya Kebutuhan Rumah (Backlog).

5. Urusan Lingkungan Hidup

a. Meningkatnya pencemaran sungai;
b. Belum optimalnya perlindungan terhadap kawasan lindung dan sumber mata air;
c. Belum adanya regulasi terhadap penggunaan air tanah;

d. Masih rendahnya penanganan pengelolaan persampahan;
e. Masih rendahnya cakupan pelayanan penanganan sampah;
f. Belum memadainya sarana prasarana persampahan;
g. Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip lingkungan hidup yang sehat dalam berbagai macam aktifitas pembangunan;
h. Belum memadainya pengendalian pencemaran polutan dan kebisingan udara (emisi kendaraan bermotor);
i. Belum adanya taman KEHATI (Keanekaragaman Hayati) sesuai program nasional;
j. Belum adanya regulasi tentang pengelolaan limbah B3;
k. Belum optimalnya law enforcement (penegakan hukum) terhadap sanksi pelanggaran izin lingkungan;
l. Masih Rendahnya Persentase RTH;

6. Urusan Sosial

a. Masih relatif tingginya angka pengangguran dan kemiskinan;
b. Belum terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar bagi PMKS;
c. fasilitas umum yang ramah bagi penyandang disabilitas belum ada;
d. Belum Optimalnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

4.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

a. Tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi;
b. Masih rendahnya tingkat pendidikan pencari kerja;
c. Masih rendahnya jumlah wirausahawan baru sebagai potensi untuk penyediaan lapangan kerja;
d. Meningkatnya jumlah pengangguran terdidik, yang muncul karena ketidaksesuaian antara spesifikasi lapangan kerja dengan ketersediaan sumber daya;
e. Belum meratanya perlindungan tenaga kerja (terutama hak-hak tenaga kerja, jaminan kesehatan dan keselematan kerja, proteksi keselamatan kerja, hak-hak pensiun);
f. Belum maksimalnya kualitas dan jaringan kerjasama tenaga kerja ke luar negeri dan luar daerah.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
b. Masih rendahnya indeks pemberdayaan gender (IDG);
c. Masih belum optimalnya pemenuhan terhadap hak-hak anak;
d. Belum semua stakeholder memahami konsep PUG.

3. Urusan Pangan

a. Rendahnya pola pangan harapan payakumbuh;
b. Tingginya persentase pengeluaran belanja pangan dibandingkan dengan belanja non pangan;
c. Permasalahan cadangan pangan (20 persen tersedia dari kebutuhan) belum terpenuhi;
d. Masih ditemukan persoalan keamanan dan kesehatan makanan di tengah masyarakat;

4. Urusan Pertanahan

a. Banyak lahan yang belum bersertifikat;
b. Belum tuntasnya penyelesaian tanah Konsolidasi Tanah Perkotaan (KTP);

5. Urusan Lingkungan Hidup

a. Meningkatnya pencemaran sungai;
b. Belum optimalnya perlindungan terhadap kawasan lindung dan sumber mata air;
c. Belum adanya regulasi terhadap penggunaan air tanah;
d. Masih rendahnya penanganan pengelolaan persampahan;
e. Masih rendahnya cakupan pelayanan penanganan sampah;
f. Belum memadainya sarana prasarana persampahan;
g. Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip lingkungan hidup yang sehat dalam berbagai macam aktifitas pembangunan;
h. Belum memadainya pengendalian pencemaran polutan dan kebisingan udara (emisi kendaraan bermotor);
i. Belum adanya taman KEHATI (Keanekaragaman Hayati) sesuai program nasional;
j. Belum adanya regulasi tentang pengelolaan limbah B3;
k. Belum optimalnya law enforcement (penegakan hukum) terhadap sanksi pelanggaran izin lingkungan.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Belum optimalnya proses pengelolaan administrasi dan dokumentasi kependudukan;
b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan dan catatan sipil.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

a. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
b. Belum terpenuhinya SPM ditingkat kelurahan.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Payakumbuh yang lebih dipengaruhi oleh migrasi masuk penduduk;
b. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya melaksanakan keluarga berencana;
c. Masih kurangnya kuantitas maupun kualitas SDM Petugas KB;
d. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketahanan keluarga.

9. Urusan Perhubungan

a. Belum adanya sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan kenyamanan pengguna, keterkaitan dan keterpaduan antar moda dan antar wilayah;
b. Kondisi tempat parkir yang tidak tersedia secara layak;
c. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pola berlalu lintas yang baik;
d. Belum optimalnya kualitas sarana prasarana perhubungan; Belum optimalnya pengelolaan terminal penumpang;
e. Belum tersedianya terminal angkutan barang;
f. Perlunya transportasi antar lokasi pertumbuhan ekonomi.

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh birokrasi terutama untuk peningkatan pelayanan publik;
b. Belum adanya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);

c. Belum optimalnya integrasi sistem informasi daerah yang telah tersedia dan cukup baik dalam pelaksanaan pemerintahan;
d. Terbatasnya kemampuan dan keahlian SDM dalam mengelola informasi dan komunikasi;
e. Belum meratanya ketersediaan infrastruktur informatika.

11. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

a. Rendahnya jumlah koperasi yang memiliki akuntabilitas yang baik;
b. Belum optimalnya diversifikasi produk koperasi;
c. Lambatnya pertumbuhan skala usaha UMKM;
d. Belum terbangunnya kelembagaan UMKM yang kuat;

12. Urusan Penanaman Modal

a. Kurangnya informasi potensi investasi yang akurat dan promosi yang terbatas;
b. Rendahnya pertumbuhan realisasi investasi;
c. Terbatasnya kepastian hukum dan pendukung usaha terutama tentang pajak, tanah, dan infrastruktur;
d. Belum berkembangnya pola kemitraan dan kerjasama dengan investor baik dalam negeri maupun luar negeri;
e. Belum optimalnya pengembangan infrastruktur pendukung kawasan potensial investasi.

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

a. Masih rendahnya prestasi atlit daerah;
b. Masih rendahnya peran organisasi olahraga dalam pembibitan dan pembinaan atlet muda berpotensi;
c. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga untuk menunjang aktivitas latihan dan pertandingan olahraga;
d. Rendahnya aktifitas organisasi kepemudaan.

14. Urusan Statistik

a. Terbatasnya ketersediaan data statistik daerah untuk memenuhi kepentingan perencanaan dan penelitian;
b. Belum adanya sistem data dan informasi sektoral yang terintegrasi dan terkini dari perangkat daerah.

15. Urusan Kebudayaan

a. Belum optimalnya pengelolaan seni dan budaya sebagai aset berharga daerah;
b. Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya;
c. Kurangnya event-event kesenian dan budaya tradisional;
d. Belum optimalnya kerjasama dengan swasta dan masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya daerah;
e. Masih kurangnya peran lembaga sosial keagamaan dan ninik mamak dalam membentuk karakter masyarakat;
f. Belum tersedianya Masjid Agung yang representatif;
g. Belum berfungsinya tempat ibadah sebagaimana mestinya;
h. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran pemuda tentang nilai-nilai sosial budaya serta adat istiadat.

16. Urusan Perpustakaan

a. Masih terbatasnya akses masyarakat dalam memperoleh informasi melalui buku;
b. Masih rendahnya minat baca masyarakat, hal ini terlihat dari relatif kecilnya jumlah keanggotaan perpustakaan dan jumlah pengunjung.

17. Urusan Kearsipan

a. Masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya arsip;
b. Masih rendahnya sumber daya baik manusia maupun sarana dan prasarana yang terkait dalam pengelolaan arsip baik sejarah kota maupun dokumen pembangunan daerah;
c. Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.

4.1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pariwisata

a. Lambatnya Pertumbuhan kunjungan wisatawan;
b. Rendahnya rata-rata lama kunjungan wisatawan;
c. Rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dan serapan tenaga kerja;
d. Belum terbangunnya kemitraan dan kerjasama dengan daerah lain dalam mengembangkan pariwisata;
e. Masih Kurangnya Event yang mendukung pengembangan pariwisata;
f. Masih kurangnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam menunjang pariwisata;
g. Masih rendahnya daya saing destinasi pariwisata kota Payakumbuh;
h. Lemahnya daya dukung infrastruktur dan SDM lokal pariwisata.

2. Urusan Pertanian

a. Pertumbuhan jumlah populasi ternak cenderung stagnan;
b. Meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian;
c. Manajemen skala usaha pertanian pada umumnya masih rendah;
d. Belum mencukupinya ketersediaan produksi holtikultura dan perikanan untuk kebutuhan kota payakumbuh;
e. Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian Kota Payakumbuh;
f. Berkurangnya tenaga kerja disektor pertanian;
g. Belum terpenuhinya infrastruktur pendukung usaha pertanian;
h. Rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya kecakapan petani;
i. Belum meratanya kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh;
j. Belum optimalnya nilai produksi pertanian;
k. Terjadinya pengrusakan lahan yang berdampak pada lahan pertanian;
l. Rendahnya daya saing produk perikanan;
m. Terjadinya penurunan tingkat kesuburan lahan pertanian (degradasi lahan);
n. Belum optimalnya penerapan inovasi teknologi anjuran;
o. Terbatasnya permodalan dan akses ke lembaga keuangan.

3. Urusan Perdagangan

a. Produktifitas perdagangan tidak bertambah signifikan;
b. Daya saing bisnis perdagangan Payakumbuh masih rendah;
c. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pemasaran produk;
d. Belum optimalnya Infrastruktur pasar yang representatif;
e. Masih belum optimalnya penataan pusat perdagangan;
f. Usaha perdagang besar belum punya gudang di area yang telah ditentukan di sepanjang jalan lingkar utara;
g. Belum adanya pasar tertib ukur;

h. Belum tertatanya pedagang kaki lima yang cepat dan cenderung tidak terkendali, sehingga menimbulkan eksternalitas negatif bagi sektor lainnya;

4. Urusan Perindustrian

a. Rendahnya produktifitas usaha industri;
b. Masih terbatasnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk industri;
c. Belum optimalnya pengemasan produk industri;
d. Limbah industri kecil belum terkelola dengan baik.

5. Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Manajemen skala usaha perikanan pada umumnya masih rendah; b. Masih rendahnya produktifitas hasil perikanan Kota Payakumbuh; c. Belum terpenuhinya infrastruktur pendukung usaha perikanan;
b. Rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya kecakapan petani ikan;
c. Belum meratanya kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh;
d. Belum optimalnya nilai produksi perikanan;
e. Rendahnya daya saing produk perikanan.

4.1.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Fungsi penunjang urusan pemerintahan merupakan unsur manajemen pemerintahan yang meliputi perencanaan, pengorganisasi, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standarisasi, dan pengelolaan informasi.

1. Urusan Perencanaan

a. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;
b. Masih belum semua target program pembangunan yang sudah direncanakan dapat direalisasikan.

2. Urusan Keuangan

a. Belum ada pengembangan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional, dan atau melalui kemitraan antara pemerintah dan swasta;
b. Kemampuan keuangan daerah masih terbatas;
c. Potensi-potensi sumber-sumber pendapatan dan sumber pembiayaan daerah belum tergali secara optimal;
d. Belum optimalnya Pengelolaan keuangan daerah;
e. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah.

3. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

a. Belum adanya Sistem tunjangan berbasis kinerja;
b. Belum optimalnya pengukuran kinerja unit kerja dan individu secara komprehensif;
c. Penempatan ASN belum sepenuhnya berbasis kompetensi;
d. Masih rendah kompetensi dan kapabilitas aparatur;
e. Kurangnya Pejabat Fungsional Tertentu.

4. Urusan Penelitian dan Pengembangan

a. Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil riset/penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah belum berjalan baik;
b. Belum adanya kerjasama pengembangan penelitian yang berkelanjutan antar pemangku kepentingan (Dewan riset Daerah).

5. Fungsi Penunjang Lainnya

a. Kualitas reformasi birokrasi belum optimal;

b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dilakukan pemerataan secara optimal.

4.2 ISU STRATEGIS

Walaupun dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi, tetapi hal tersebut haruslah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, dimana adanya kaitan/ hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya yang mencakup hubungan administrasi maupun antar susunan pemerintahan. Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Disamping itu, isu strategis juga merupakan kondisi yang berpotensi menjadi peluang daerah dimasa datang. Perumusan isu strategis dengan memperhatikan kondisi dan Permasalahan di Kota Payakumbuh serta arah kebijakan dalam dokumen perencanaan jangka pangjang Kota Payakumbuh, Kajian Kebijakan dan Agenda Pembangunan Sektoral, Regional, Nasional dan Global.

4.2.1 Kajian Kebijakan dan Agenda Pembangunan Sektoral, Regional, Nasional dan Global

A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh 2005-2025

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh 2005-2025 yaitu "Terwujudnya Payakumbuh sebagai Kota Maju dengan pengembangan Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah"

Misi pembangunan daerah dalam RPJPD Kota Payakumbuh ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kehidupan beragama dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah";
2. Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik, demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui perbaikan mutu pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
4. Mewujudkan sentra usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di dunia global;
5. Mewujudkan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dan berkualitas baik;
6. Mewujudkan lingkungan hidup kota yang tertata baik, bersih, hijau dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Isu-Isu Strategis yang ditetapkan dalam RPJPD Kota Payakumbuh 2005-2025:

1. Pemerintahan dan Hukum: Pemberantasan Korupsi, Penegakan Hukum dan HAM, Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Peningkatan Kinerja Aparatur.
2. Ekonomi dan Sumber Daya Alam: Ekonomi, Sumber Daya Alam.
3. Sumber Daya Manusia
4. Tata Ruang, Prasarana dan Sarana
5. Lingkungan Hidup
6. Sosial Budaya

Isu-isu strategis pada perencanaan jangka panjang, dikelompokan dalam kaitannya untuk mencapai Kota Payakumbuh yang maju, dengan motor penggerak ekonomi difokuskan pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Indikator Kota Maju ditetapkan melalui pengembangan SDM, pemantapan tata pemerintahan, pembangunan fasilitas dan infrastruktur yang memadai dengan memperhatikan agama dan budaya dalam kesesuaian pola pembangunan yang memperhatikan lingkungan. Masyarakat dan Pemerintah merupakan subjek dan objek dari pembangunan itu sendiri, dimana pembangunan yang dilakukan pada sejatinya di sektor ekonomi, sosial budaya dan lingkungan dengan memperhatikan kondisi ruang daerah. Pola ini dapat dipertimbangkan dalam merumuskan misi kota Payakumbuh pada pembangunan strategis Kota Payakumbuh untuk tahun 2017 – 2022.

B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh 2012-2017

Rencana pembangunan strategis Kota Payakumbuh tahun 2012 - 2017 merupakan tahapan ketiga pelaksanaan pembangunan dari RPJPD Kota Payakumbuh tahun 2005 – 2025. Sebagai bagian dari proses, RPJMD Tahun 2017 – 2022 merupakan kelanjutan dari RPJMD Tahun 2012 – 2017, sehingga dengan memperhatikan perencanaan pembangunan strategis sebelumnya dapat dilihat target pembangunan yang belum dicapai, dan isu-isu yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Visi RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017 yaitu "Terwujudnya Payakumbuh Menjadi Kota yang Maju, Sejahtera dan Religius, Pro Rakyat, Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan yang Berlandaskan kepada Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".

Misi yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi RPJMD Tahun 2012-2017:

1. Menjadikan Payakumbuh sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Berbasis ekonomi kerakyatan di Sumatera Barat;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional dan bebas KKN;
3. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama ditengah masyarakat sesuai dengan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah";
4. Mewujudkan pendidikan yang merata, berkualitas dan berkarakter untuk emwujudkan sumber daya manusia Kota Payakumbuh yang berilmu dan bermoral;
5. Meningkatkan kualitas kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat;
6. Melakukan revitalisasi nagari dan memberdayakan kelembagaan masyarakat adat lokal dalam membangun masyarakat dan Kota Payakumbuh;

7. Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur publik dan fasilitas umum sesuai RTRW Kota Payakumbuh.

Isu-Isu Strategis yang dimuat dalam RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017 antara lain :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Pemahaman, Pengamalan Agama dan Budaya;
3. Nilai Tambah Produksi Industri;
4. Investasi;
5. Pertumbuhan Ekonomi;
6. Peningkatan Tata Pemerintahan yang Baik;
7. Jaminan Sosial;
8. Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran;
9. Penataan Ruang Kota;
10. Kualitas Lingkungan Hidup;
11. Prasarana dan Sarana Daerah;
12. Kewenangan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan;
13. Akses dengan Daerah Provinsi Tetangga;
14. Pengalihan Kewenangan Urusan.

Poin penting yang dapat diperhatikan pada rencana pembangunan strategis sebelumnya menunjukkan bahwa Visi Kota Payakumbuh sebagai kota maju dikembangkan secara lebih detail, dengan setiap target capaian pembangunan kota pada akhir 2017 dikembangkan melalui misi yang tetap mengedepankan pengembangan agama dan budaya melalui peningkatan SDM Kota Payakumbuh yang berkualitas (pendidikan dan kesehatan). Pemberdayaan masyarakat diketengahkan sebagai bagian capaian visi yang pro-rakyat melalui penegasan kewenangan nagari dan lembaga kemasyarakatan.

C. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2016 – 2021

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 disusun dengan memperhatikan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)Tahun 2015 – 2019, dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Sumatera Barat, serta masukan dari konsultasi publik dan Focus Group Discussion (FGD). RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan RPJMD, RKPD serta perencanaan dan penganggaran Kabupaten/Kota se-SumateraBarat, dan untuk membantu Kabupaten/Kota mewujudkan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dengan Provinsi Sumatera Barat.

Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 yaitu "Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera", dengan misi antara lain :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah" Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah";
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih danprofessional;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah;
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Prioritas Pembangunan Daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Mental Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat;
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan;
3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan;
4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
5. Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis;
6. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi;
7. Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan;
8. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal;
9. Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur;
10. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan informasi visi, misi dan prioritas diatas, Provinsi Sumatera Barat menekankan pembangunan daerah pada masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan melalui perbaikan sikap mental yang sesuai dengan nilai agama, adat dan kearifan lokal budaya Minangkabau, yang kemudian diikuti dengan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan SDM, ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Prioritas pembangunan daerah provinsi yang diusulkan dikembangkan dari persyaratan minimum standar pembangunan daerah (SPM). Dan dengan memperhatikan kondisi daerah dan isu global Sustainable, maka prioritas pembangunan untuk provinsi Sumatera Barat juga difokuskan pada pengembangan sumber energi terbarukan dan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan, disamping kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.

D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 sebagai pedoman pembangunan negara dalam kurun waktu tersebut. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025.

Visi RPJMN 2015 - 2019 yaitu "Terwujudnya indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong". Misi yang mendukung pencapaian visi RPJMN 2015 - 2019 antara lain:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebasaktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat berkepribadian dalam kebudayaan.

Agenda Pembangunan Nasional nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015 - 2019 atau yang lebih dikenal dengan Nawa Cita dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia pada pembentukan karakter penduduk yang berkepribadian gotong royong, kepribadian ini merupakan karakter masyarakat Indonesia yang sejatinya muncul dari keberagaman budaya. Hal ini menunjukkan bahwa budaya

merupakan salah satu poin yang akan dikembangkan dan dilestarikan pada pemerintahan nasional 2015 – 2019, yang terlihat dengan salah satu agenda pembangunan untuk memperteguhkebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Disamping dengan memproyeksikan Indonesia berkarakter, pemerintah juga mengagendakan berdaulat dan kemandirian, yang salah satunya didapatkan melalui 3 (tiga) misi utama di bidang kemaritiman yang merupakan sumber daya yang potensial untuk ditumbuhkembangkan di Indonesia.

E. Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya harus dikaitkan dengan kebutuhan riil masyarakat, dimana pemerintah harus mampu untuk melahirkan pelayanan-pelayanan publik yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan dengan pengembangan sektor unggulan. Untuk mendorong hal tersebut, maka pemerintah telah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan minimal yang merupakan standar minimum pelayanan publik yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Harapannya masyarakat dapat memperoleh layanan minimum yang dapat diakses oleh masyarakat secara merata dan sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah di dalam setiap SPM. Penentuan layanan minimum pembangunan berguna untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam menentukan jenis layanan publik, dan alokasi biaya layanan untuk menghitung agregat pembiayaan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2005 Pasal 9 dan Pasal 10, menyatakan bahwa pemerintah daerah menggunakan SPM yang telah ditetapkan sebagai salah satu acuan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran, yang dalam pencapaiannya dilakukan berdasarkan analisis kemampuan dan potensi daerah dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2004 Pasal 4 Ayat 2 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2007 pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa SPM dijadikan sebagai bahan masukan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD. Dimana program, kegiatan, alokasi dana indikatif pada urusan pemerintahan wajib mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab SKPD (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 pasal 88 ayat 1). SPM disusun dan diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan Daerah, terkait dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Urusan wajib yang harus memenuhi SPM yang telah ditetapkan antara lain bidang:

1. Pendidikan

   Jenis pelayanan dasar terkait dengan bidang pendidikan adalah pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan, dimana standar jumlah dan kualitas barang/ jasa, pendidik/ tenaga pendidikan dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis bidang pendidikan.

2. Kesehatan

   Mutu dan pelayanan dasar yang diberikan terkait dengan SPM bidang kesehatan adalah standar pada kualitas barang dan jasa yang diterima oleh masyarakat, personil atau SDM personel kesehatan, dan petunjuk teknis pemenuhan standar untuk pelayanan kesehatan pada ibu hamil dan ibu bersalin, kesehatan bayi baru lahir dan balita, kesehatan pada usia pendidikan dasar, usia produktif, dan usia lanjut, dan pelayanan kesehatan untuk penderita penyakit tertentu (hipertensi,

Diabetes Melitus, Gangguan Jiwa Berat, tuberkolosis, dan yang beresiko terinveksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia).

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

   Mutu dan pelayanan dasar yang diberikan terkait dengan SPM bidang pekerjaan umum terkait pada pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik yang mampu dan dapat diakses oleh masyarakat, dengan standar jumlah dan kualitas barang/ jasa ataupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan yang sesuai dengan petunjuk teknis dan tata cara pemenuhan standar.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

   Mutu pelayanan dasar bidang perumahan rakyat adalah memberikan layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana maupun yang terkena relokasi program pemerintah.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

   Jenis pelayanan minimum dasar yang diberikan terkait dengan bidang ketentraman dan ketertiban umum, informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiaagan terhadap bencana, penyelamatan dan evaluasi korban bencana, dan kebakaran. Masing-masing layanan tersebut telah ditentukan baik dalam kualitas, jumlah dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar barang/ jasa, maupun SDM kesejahteraan sosial.

6. Sosial

   Jenis pelayanan minimum kepada penyandang rehabilitasi sosial dasar anak terlantar dan disabilitastelantar di luar panti, rehabilitasi dasar lanjut usi dasar diluar panti, rehabilitasi tuna sosial, perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kota.

F. Sustainable Development Goals (SDGs)

SDGs adalah kesepakatan pembangunan baru pengganti MDGs, dengan masa berlakunya 2015 – 2030, yang disepakati oleh lebih dari 190 negara berisikan 17 goals dan 169 sasaran pembangunan. Tujuh belas tujuan dengan 169 sasaran diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara–negara di seluruh dunia, baik di negara maju (konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta ketimpangan) dan negara–negara berkembang (kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum). Keberhasilan SDGs tidak dapat dilepaskan dari peranan penting pemerintah daerah, sebagai ujung tombak penyedia layanan publik dan berbagai kebijakan serta program pemerintah.

SDGs disusun melalui proses yang partisipatif, melalui survei warga pada laman online; Myworld Survey (*http://data.myworld2015.org/*). Berdasarkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang diusulkan, untuk Indonesia berdasarkan 38.422 survey menunjukkan empat tujuan yang menjadi prioritas, yaitu: pendidikan yang bermutu, kesehatan yang baik, tata pemerintahan yang jujur dan tanggap, serta kesempatan kerja yang lebih baik.

Gambar IV.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

G. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030

G.1. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah kota merupakan kerangka sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota yang berhirarki dan satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota. Rencana struktur ruang wilayah kota berfungsi sebagai arahan pembentuk sistem pusat-pusat pelayanan wilayah kota yang memberikan layanan bagi wilayah kota dan Sebagai arahan perletakan jaringan prasarana wilayah kota sesuai dengan fungsi jaringannya yang menunjang keterkaitan antar pusat-pusat pelayanan kota. Berikut Penjabaran rencana struktur ruang dalam RTRW Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 :

G.1.1 RENCANA PUSAT-PUSAT PELAYANAN KOTA

Rencana pusat-pusat pelayan Kota Payakumbuh meliputi:

A. Pusat Pelayanan Kota.

Pusat Pelayanan Kota mempunyai fungsi utama sebagai pusat pemerintahan dan pusat perdagangan dan jasa regional Kota Payakumbuh, dengan pusat terletak di Kawasan Pusat Kota.

B. Sub pusat pelayanan kota.

Subpusat Pelayanan Kota (SPPK) terdiri dari:

1. SPPK I mempunyai fungsi utama sebagai pusat pengembangan kawasan perkantoran dan jasa serta kawasan pendidikan, dengan pusat terletak di Payobadar;
2. SPPK II mempunyai fungsi utama sebagai pusat pengembangan pertanian dan pusat pengembangan peternakan terpadu, dengan pusat terletak di Payobasung;
3. SPPK III mempunyai fungsi utama sebagai pusat pengembangan perkebunan, dengan pusat terletak di Payolinyam;
4. SPPK IV mempunyai fungsi utama sebagai pusat pengembangan kawasan industri dan pergudangan, dengan pusat terletak di Parik Muko Aia; dan
5. SPPK V mempunyai fungsi utama sebagai pusat pengembangan agrowisata dan pusat pengembangan agribisnis, dengan pusat terletak di Pakan Sinayan.

C. Pusat Lingkungan.

Pusat Lingkungan (PL) merupakan pusat pelayanan yang terdekat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hirarki struktur ruangnya, maka PL yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

a. PPK yang terdiri dari 4 (empat) PL, yang meliputi:
   1. PL 1-1, berpusat di Kelurahan Daya Bangun;
   2. PL 1-2, berpusat di Kelurahan Balai Gadang;
   3. PL 1-3, berpusat di Kelurahan Balai Nan Duo; dan
   4. PL 1-4, berpusat di pada Kelurahan Ibuh.

b. SPPK I terdiri dari 4 (empat) PL, yang meliputi:
   1. PL 2-1, berpusat di Kelurahan Payobadar;
   2. PL 2-2, berpusat di Kelurahan Sicincin Hilir;
   3. PL 2-3, berpusat di Kelurahan Padang Tiakar Mudik; dan
   4. PL 2-4, berpusat di Kelurahan Aur Kuning.

c. SPPK II terdiri 2 (dua) PL, yang meliputi:
   1. PL 3-1, berpusat di Kelurahan Payobasung; dan
   2. PL 3-2, berpusat di Kelurahan Balai Batimah.

d. SPPK III terdiri 4 (empat) PL, yang meliputi:
   1. PL 4-1, berpusat di Kelurahan Payolinyam;
   2. PL 4-2, berpusat di Kelurahan Muaro;
   3. PL 4-3, berpusat di Kelurahan Payonibung; dan
   4. PL 4-4, berpusat di Kelurahan Cubadak Air.

e. SPPK IV terdiri dari 4 (empat) PL, yang meliputi:
   1. PL 5-1, berpusat di Kelurahan Sungai Durian;
   2. PL 5-2, berpusat di Kelurahan Koto Panjang Padang;
   3. PL 5-3, berpusat di Kelurahan Koto Tangah; dan
   4. PL 5-4, berpusat di Kelurahan Napar.

f. SPPK V terdiri dari 3 (tiga) PL, yang meliputi:
   1. PL 6-1, berpusat di Kelurahan Pakan Sinayan;
   2. PL 6-2, berpusat di Kelurahan Limo Kampung; dan
   3. PL 6-3, berpusat di Kelurahan Payolansek.

G.1.2. RENCANA SISTEM PRASARANA UTAMA WILAYAH KOTA

Arahan Pengembangan sistem jaringan transportasi adalah bertujuan untuk mengembangkan keterhubungan antar pusat kegiatan dan memperkuat sistem pergerakan antar wilayah baik internal maupun eksternal. Rencana pengembangan struktur jaringan transportasi disusun untuk mewujudkan pelayanan aksesibilitas yang merata di seluruh wilayah Kota Payakumbuh, dan mengarahkan pertumbuhan wilayah terutama pada wilayah pengembangan baru dengan mempertahankan keseimbangan lingkungan dan ketersediaan sumberdaya daerah. Oleh sebab itu, rencana struktur prasarana jalan meliputi rencana pengembangan jaringan jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, dan kolektor sekunder dan lokal primer. Diasamping rencana sistem jaringan jalan juga direncanakan sistem jaringan Perkeretaapian. Fungsi jalur kereta api terhadap sistem jaringan transportasi Kota Payakumbuh dalam lingkup regional Propinsi Sumatera Barat diarahkan sebagai salah satu alternatif angkutan moda transportasi darat , baik untuk mengangkut orang maupun barang inter dan intra regional, yaitu dengan mendorong percepatan realisasi dari pengoperasian jaringan jalur kereta api dengan terkoneksi dalam sistem jaringan kereta api Sumatera (*Sumatera Railway*). Untuk Kota Payakumbuh, jalur kereta api antara Padang Panjang-Payakumbuh eksisting sudah ada hingga Kelurahan Parik Rantang (stasiun), namun jalur ini sebagian besar sudah ditutup untuk badan jalan dan masih berupa jalan rel non operasi (jalan mati). Pengembangan jalur kereta api yang direncanakan adalah dari batas kota Balai Panjang sampai kawasan Ngalau Sampik saja, dimana lokasi stasiun kereta api kelas kecil akan ditetapkan diKawasan Ngalau Sampik ini.

G.1.3 RENCANA SISTEM PRASARANA LAINNYA

a. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi

Listrik merupakan sumber penerangan dan energi yang sangat penting dalam menunjang perekonomian daerah. Pembangkit tenaga listrik yang dimanfaatkan di Kota Payakumbuh bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Maninjau, PLTA Batang Agam, PLTA Ombilin, Pembangkit Listrik Tanaga Uap (PLTU) Salak, dan PLTA Koto Panjangyang didistribusikan melalui gardu induk/kubikel dengan kapasitas tegangan 20 KV dan berdaya 200 KVA. Jaringan listrik sudah menyebar hampir keseluruh bagian wilayah Kota Payakumbuh.

Secara umum jaringan listrik yang ada di Kota Payakumbuh pada saat ini sudah merata penyebarannya disetiap kecamatan yang ada di Payakumbuh, terutama pada pusat-pusat kegiatan dan lingkungan perumahan penduduk. Dari data yang ada diketahui bahwa daya terpasang yang ada di Kota Payakumbuh adalah sebesar 23.529 kwh dan dari hasil analisa yang telah dilakukan terlihat bahwa jumlah kebutuhan listrik Kota Payakumbuh sampai pada akhir tahun rencana adalah sebesar 25.996 kwh. Jadi dapat disimpulkan bahwa daya terpasang yang ada di Kota Payakumbuh tidak mencukupi untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat akan kebutuhan energi listrik dan dari keadaan ini dapat disimpulkan bahwa permintaan masyarakat terhadap sambungan listrik masih memerlukan tambahan daya energi listrik dari pihak PLN.

Tabel VI-1
Proyeksi Kebutuhan Jaringan Listrik di Kota Payakumbuh
Tahun 2010-2030

No	Kecamatan	Kebutuhan Tahun 2030 (KWH)			
		Domestik	Non Domestik	Hilang	Jumlah
1.	Payakumbuh Barat	11.322	6.793	1.811	19.926
2.	Payakumbuh Timur	6.075	3.645	972	10.692
3.	Payakumbuh Utara	7.312	4.387	1.170	12.869
4.	Payakumbuh Selatan	2.156	1.294	345	3.795
5.	Lamposi Tigo Nagari	2.184	1.310	349	3.844

Sumber : RTRW Kota Payakumbuh 2010-2030

Perkiraan kebutuhan listrik pada tahun 2030 pada Kota Payakumbuh meningkat yaitu sebesar 51.127 KWH. Jumlah kebutuhan listrik tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan juga penerangan jalan. Kebutuhan listrik lebih didominasi untuk kebutuhan rumah tangga dimana jumlah energi listrik yang dibutuhkan adalah sebesar 29.050 KWH pada tahun 2030.

a. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Dalam mendukung perkembangan Kota Payakumbuh terutama sebagai daerah permukiman, perdagangan dan perkantoran, maka kebutuhan prasarana telekomunikasi sudah merupakan suatu keharusan yang perlu dipenuhi dalam menunjang perkembangan daerah. Perkiraan kebutuhan sambungan telepon (SST) di Kota Payakumbuh dapat dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut :

1. Untuk sambungan langsung Rumah Tangga, kebutuhan telepon rumah adalah sebesar 1 SST untuk 50 jiwa penduduk.
2. Untuk sarana umum/sosial diasumsikan kebutuhan telepon adalah 1 SST untuk 250 jiwa penduduk.
3. Untuk sarana komersial dan lainnya diasumsikan kebutuhan telepon adalah 1 SST untuk 150 jiwa penduduk.
4. Untuk melayani kebutuhan fasilitas telepon umum, maka diasumsikan 1 SST untuk 1000 jiwa.

Berdasarkan jumlah penduduk terkini dan standar teknis bahwa 1 unit rumah dihuni oleh 5 jiwa, maka diperkirakan pada Tahun 2030 dibutuhkan jumlah sambungan telepon rumah (dari Telkom) sebesar 5.684SST untuk melayani 25.261unit rumah dengan dibagi kedalam beberapa tipe perumahan, dari mulai tipe rumah berukuran kecil, sedang, hingga tipe rumah berukuran besar di seluruh Kota Payakumbuh. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel proyeksi kebutuhan telekomunikasi Kota Payakumbuh.

Tabel IV-2
Proyeksi Kebutuhan Jaringan telepon (Kabel)

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah (KK)	Kebutuhan Jaringan Telepon						Total Kebutuhan
				Rumah Kecil	Kebutuhan Telepon (SST)	Rumah Sedang	Kebutuhan Telepon (SST)	Rumah Besar	Kebutuhan Telepon (SST)	
Kebutuhan Tahun 2030										
1.	Payakumbuh Barat	49.225	9.845	5.907	886	2.954	886	985	443	2.215
2.	Payakumbuh Timur	26.414	5.283	3.170	475	1.585	475	528	238	1.189
3.	Payakumbuh Utara	31.792	6.358	3.815	572	1.908	572	636	286	1.431
4.	Payakumbuh Selatan	9.376	1.875	1.125	169	563	169	188	84	422
5.	Lamposi Tigo Nagari	9.496	1.899	1.140	171	570	171	190	85	427

Sumber : RTRW Kota Payakumbuh 2010-2030

b. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sungai merupakan sumber daya air permukaan yang dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan penduduk Pengelolaan sungai dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab penetapannya berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11 A / PRT / M / 2006. dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa wilayah sungai terbagi atas lima yakni :

1. Wilayah sungai lintas negara
2. Wilayah sungai lintas provinsi
3. Wilayah sungai strategis nasional
4. Wilayah sungai lintas kabupaten/kota
5. Wilayah sungai dalam satu kabupaten

Penetapan wilayah sungai tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan dan kriteria tertentu yakni :

a. Efektifitas pengelolaan sumber daya air

Efektifitas ini diterjemahkan dalam bentuk pengelolaan sumber daya air dan juga ketersediaan prasarana sumber daya air. Efektifitas ini dapat berupa kegiatan sebagai berikut :

- Pengelolaan sumber daya air pada wilayah tersebut memenuhi kebutuhan konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air.
- Keberadaan prasarana sumber daya air yang menghubungkan daerah aliran sungai yang satu dengan aliran sungai yang lain.

b. Efisiensi pengelolaan sumber daya air

Tercukupinya hak setiap orang untuk mendapatkan air guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.

Sedangkan penetapan wilayah sungai strategis nasional ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini :

- Potensi sumber daya air pada wilayah sungai dibandingkan dengan potensi sumber daya air pada provinsi lebih besar atau sama dengan 20%.
- Banyaknya sektor yang terkait dengan sumber daya air pada wilayah sungai paling kurang 16 sektor dan jumlah penduduk dalam wilayah sungai paling kurang 30% dari jumlah penduduk provinsi.

- Besarnya dampak terhadap pembangunan nasional

c. Sosial

1. Tenaga kerja pada lapangan kerja yang terpengaruh oleh sumber daya air paling kurang 30% dari seluruh tenaga kerja di tingkat provinsi.
2. Wilayah sungai yang terdapat pulau kecil atau gugusan pulau kecil yang berbatasan dengan wilayah negara lain.

d. Lingkungan hidup

1. Terancamnya keanekaragaman hayati yang spesifik pada sumber air yang langka dan perlu dilindungi atau yang merupakan konvensi internasional
2. Perbandingan antara debit air sungai maksimum dengan debit air sungai minimum rata-rata tahunan sungai utama melebihi 75
3. Perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan air pada wilayah sungai yang bersangkutan melampaui angka 1,5
4. Seringnya timbul kejadian penyakit terkait dengan air yang mengakibatkan kematian / cacat tetap dalam jumlah besar.

e. Ekonomi

1. Terdapatnya paling kurang satu daerah irigasi yang luasnya lebih besar atau sama dengan 10.000 ha
2. Nilai produksi industri terkait dengan sumber daya air pada wilayah sungai paling kurang 20% dari nilai produksi industri di tingkat provinsi.
3. Produksi pembangkit listrik tenaga air pada wilayah sungai yang bersangkutan terkoneksi atau merupakan bagian dari jaringan listrik lintas provinsi.

Besarnya dampak negatif akibat daya rusak air terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu tingkat kerugian ekonomi yang diakibatkan paling kurang 1% dari produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tingkat provinsi.

Di Kota Payakumbuh secara perwilayahan dialiri oleh tiga aliran sungai besar yakni Sungai Batang Agam, Sungai Batang Lampasi dan Sungai Batang Sinamar. Dari ketiga sungai tersebut, sungai terbesar merupakan sungai Batang Agam dengan lebar 20 m, panjang 14,6 km yang melintasi Kota Payakumbuh pada bagian selatan dan utara Kota. Berdasarkan kriteria penetapan wilayah sungai maka sungai-sungai yang mengalir di Kota Payakumbuh tidak dapat diklasifikasikan ke dalam wilayah sungai strategis nasional. Wilayah sungai di Kota Payakumbuh tergolong pada Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai Dalam Satu Kota, yang kedepannya perlu dilakukan pengawasan secara ketatat dalam peningkatan dan pemeliharaan sumber daya air untuk peningkatan hasil-hasil produkstivitas pertanian dan perkebunan Kota Payakumbuh.

Kegiatan usaha pertanian masih merupakan usaha yang digeluti sebagian besar masyarakat Kota Payakumbuh. Hal ini didukung dengan perkembangan fisik kawasan yang sebahagian besar merupakan kawasan pertanian dan kawasan pedesaan. Perkembangan Kota Payakumbuh sebagai salah satu Kota Pertanian mengingat masih besarnya penduduk yang bekerja disektor ini ± 22,46% dan hampir setengah lahan kota adalah lahan pertanian.

Jaringan Irigasi sangat berperan dalam meningkatkan produksi pertanian pada suatu wilayah, di Kota Payakumbuh sudah menggunakan beberapa jenis irigasi sebagai pengairan sawah, seperti irigasi teknis, semi teknis, dan juga irigasi sederhana yang masih digunakan. Sumber air dari irgasi tersebut berasal dari Batang Lampasi, Sungai Beringin, Batang Agam, Sungai Dareh, dan Batang Tabik. Kelima sumber pengairan tersebut berasal dari Kabupaten Lima Puluh Kota.

Lahan pertanian merupakan lahan cadangan untuk pengembangan kawasan permukiman. Jika terjadi pengembangan kawasan permukiman maka lahan utama yang tetap dipertahankan adalah lahan pertanian beririgasi.

c. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan didalam RTRW Kota Payakumbuh tahun 2010-2030 dijabarkan kedalam beberapa sistem, yaitu :

a. Sistem Jaringan Air Baku
b. Sistem Penyediaan Air Minum
c. Sistem Pengelolaan Air Limbah Kota
d. Sistem Persampahan Kota
e. Sistem Jaringan Drainase Kota
f. Rencana Sistem Proteksi Kebakaran
g. Rencana Sistem Perparkiran
h. Penyediaan Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Jaringan Jalan Pejalan Kaki
i. Jalur Evakuasi Bencana

Pendekatan pembangunan kota saat ini adalah penataan ruang berbasis mitigasi bencana. Artinya, bagaimana penataan kota tersebut dapat meminimalkan korban jika terjadi bencana. Untuk konteks Kota Payakumbuh, bencana yang dialami adalah bencana alam angin puting beliung dan kawasan yang terkena dampak dari gempa bumi (Kota Payakumbuh tidak merupakan jalur sesar yang menimbulkan gempa atau gerakan tanah).

Ruang Evakuasi dan jalur penyelamatan (Escape Road) adalah ruang terbuka dan jalan-jalan kota yang dikembangkan/direncanakan sebagai jalur pelarian ke titik kawasan penyelamatan dan wilayah yang aman lainnya. Jalur evakuasi bencana bertujuan untuk menyediakan ruang yang dapat dipergunakan sebagai tempat keselamatan dan ruang untuk berlindung jika terjadi bencana. Strategi yang dapat dilakukan adalah :

1. Pemanfaatan RTH sebagai salah satu kawasan evakuasi. Dalam hal ini titik utama evakuasi bencana adalah Lapangan Kapten Tantawi dan Lapangan Kubu Gadang.
2. Mengintegrasikan/menghubungkan jalan eksisting dan menambah jalan baru sebagai rencana jalur penyelamatan dengan fasilitas perlindungan dan sistem kota secara umum.
3. Meningkatkan kualitas jalan yang ada menjadi jalan evakuasi dengan cara : pelebaran jalan, perbaikan *agliment* jalan eksisting, peningkatan kualitas badan jalan penambahan jalan-jalan baru untuk meningkatkan aksesibilitas, efektivitas dan efisiensi kota.
4. Mengintegrasikan/menghubungkan jalan eksisting tersebut dengan rencana jalur penyelamatan yang merupakan urban sistem lama sehingga menjadi suatu sistem kota yang terpadu dan dapat memitigasi bencana alam.
5. Pembangunan jalur penyelamatan harus disertai dengan: penyadaran publik (pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, demo evakuasi dan sebagainya).
6. Penanaman pohon-pohon besar sebagai peneduh jalan dan taman secara teratur memberikan keteduhan kota dan jiwa warga kota. Jenis pohon yang ditanam adalah jenis tanaman lokal. Pohon-pohon besar tersebut akan dirancang sebagai pohon penyelamatan di sepanjang rute-rute penyelamatan, taman penyelamatan, atau bangunan penyelamatan lainnya.

7. Jalan-jalan yang dapat dikembangkan sebagai jalur penyelamatan (*Escape Road*) di Kota Payakumbuh antara lain : Jalan Sudirman dan Jalan Soekarno Hatta dan Jalan-jalan disekitar Lapangan Kapten Tantawi dan Kawasan Kubu Gadang dan jalan-jalan yang mengarah ke lapangan terbuka lainnya.

G.1.4 Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang kota adalah bentuk pengaturan pemanfaatan ruang kota yang menggambarkan ukuran, fungsi serta karakter kegiatan manusia dan/atau kegiatan alam yang diwujudkan dalam bentuk kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pengaturan pemanfaatan tersebut harus dapat menggambarkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan serta keserasian antar13 sektor pembangunan kota.

Prinsip dasar perencanaan pemanfaatan ruang adalah penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 26 Tahun 2007, PP Nomor 26 Tahun 2008, dan Keppres Nomor 32 Tahun 1990, dengan batasan sebagai berikut :

1. Kawasan lindung adalah kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya binaan, nilai sejarah, dan budaya bangsa untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.

2. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya binaan, dan sumberdaya manusia.

G.2. KLHS RPJMD

Salah satu hal penting dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, sebagai mana tertuang dalam Uundang-undang Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup adalah pengembangan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau Strategic Environment Assessment (SEA). KLHS pada prinsipnya merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pemerintah daerah Kota Payakumbuh telah melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan dan evaluasi rencana program jangka menengah daerah (RPJMD) periode 2017-2022 yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.berikut ini Rekomendasi Perbaikan untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Visi-Misi dan Arahan Kebijakan RPJMD periode 2017-2022 :

Tabel IV-3
Program, Hasil Analisis, dan Rekomendasi KLHS

No	Program	Hasil Analisa	Rekomendasi
1	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan (Sekolah dan fasilitasnya)	Jasa Air Sebagian kecil di wilayah selatan di tingkat sangat rendah	1. Menambah supply air PDAM ke wilayah selatan Kota payakumbuh terutama di dataran tinggi dengan menyediakan sumber air baku PDAM baru yang berada di wilayah Kota payakumbuh 2. Setiap kegiatan pembangunan sarana prasarana pendidikan harus menyusun dokumen lingkungan atau SPPL sesuai dengan skala besarannya
2	Pembangunan Rumah Layak Huni	Jasa Air Sebagian kecil di wilayah selatan di tingkat sangat rendah	1. Menambah supply air PDAM ke wilayah selatan Kota payakumbuh terutama di dataran tinggi dengan menyediakan sumber air baku PDAM baru yang berada di wilayah Kota payakumbuh 2. Setiap kegiatan pembangunan perumahan harus menyusun dokumen lingkungan atau SPPL
3	Pembangunan sarana prasarana pendukung dan revitalisasi Pasar	Jasa pengaturan dan pemeliharaan udara rendah	1. Melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas udara di lokasi pembangunan 2. Dishub perlu mencantumkan dalam renstra tentang rekayasa jalur lalu lintas angkutan umum dan pembangunan sub terminal di lokasi Padang Kaduduk untuk kelancaran akses transportasi ke Pasar 3. Dinas Koperasi dan UMKM perlu mencantumkan dalam renstra untuk pembangunan sarana prasarana pendukung yaitu IPAL, TPS Sampah, TPS 3R, drainase tersier serta kegiatan pembinaan terhadap pedagang hasil pertanian agar sampah sisa pertanian ditinggalkan di kebun/lahan (ditimbun dalam tanah sebagai kompos) sehingga timbulan sampah tidak besar
4	Pembangunan Sentra IKM	Jasa pengaturan dan pemeliharaan udara rendah	1. Melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas udara di lokasi pembangunan 2. Dishub perlu mencantumkan dalam renstra tentang rekayasa jalur lalu lintas angkutan umum dan pembangunan sub terminal di lokasi Padang Kaduduk untuk kelancaran akses transportasi ke Sentra IKM 3. Dinas Koperasi dan UMKM perlu mencantumkan dalam renstra untuk pembangunan sarana prasarana pendukung yaitu IPAL, TPS Sampah, TPS 3R, drainase tersier
5	Pembangunan kawasan olahraga di Kelurahan Tanjung Pauh dan Ibuh	Jasa pengaturan dan pemeliharaan udara rendah	1. Melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas udara di lokasi pembangunan 2. Pada kegiatan pembangunan kawasan olahraga Disparpora perlu mencantumkan dalam Renstra tentang Izin Lingkungan pembangunan kawasan olahraga tersebut (AMDAL jika luas area >4Ha dan UKL-UPL jika ≤4 Ha)
No	**Program**	**Hasil Analisa**	**Rekomendasi**
6	Pada Misi 2 Sasaran 7 Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh		1. Membuat perencanaan program pemberian rekomendasi halal dari Pemerintah Kota karena biaya pengurusan Sertifikasi Halal MUI mahal. Untuk itu Kemenag, Labor LH, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian perlu menyusun kebijakan dan dicantumkan dalam Renstra. 2. Rencana pengembangan wisata air/tirta di Embung Bulakan, Batang Agam dan Batang Lampasi harus dicantumkan di Renstra OPD terkait Feasibility Study, Izin Lingkungan, DED, dan Konstruksi. Lokasi harus sesuai dengan RTRW Kota Payakumbuh
7	Pada Misi 3 sasaran 9 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemenuhan		1. Perlu dicantumkan dalam Renstra Dishub terkait peningkatan sarana prasarana transportasi seperti terminal dan fasilitas parkir di kawasan padat/keramaian halte, rekayasa lalu lintas, moda transportasi.

	infrastruktur dasar masyarakat		2. Perlu ada regulasi penggunaan trotoar (renstra Dishub). 3. Perlu penambahan tujuan indikator Persentase pemenuhan kebutuhan dasar berdasarkan SPM infrastruktur (jumlah kelurahan yang memenuhi standar SPM infrastruktur). 4. Setiap kegiatan pembangunan infrastruktur harus menyusun dokumen lingkungan atau SPPL sesuai dengan skala besarannya
8	Pada Misi 3 sasaran 10 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indikator tujuan pada RPJMD diperbaiki dari "persentase RTH, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara" menjadi "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup /IKLH" (IKLH dihitung berdasarkan nilai indeks kualitas air, indeks kualitasudara, dan indeks tutupan lahan)
9	Pada Misi 3 sasaran 11 Mewujudkan perumahan dan pemukiman yang layak		Dalam Renstra Perkim perlu dicantumkan Indikator persentase RT yang memiliki septictank sesuai standar
10	Pada misi 5 sasaran 12 Meningkatnya pengamalan ajaran agama		Peningkatan kualitas sarana prasarana ibadah harus menyesuaikan dengan peruntukan ruang dan standar dan memerlukan perencanaan yang komprehensif dengan OPD terkait.

Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap dekomen RPJMD Periode 2017-2022 telah menjadi pedomen dalam menyusun kebijakan, rencana, dan/atau program guna mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

4.2.2 Penentuan Isu Strategis

Penentuan isu strategis menjadi bagian penting dalam penyusunan rencana pembangunan daerah 5 tahun, dimana identifikasi dan klasifikasi isu – isu didasarkan kepada asumsi pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, luas dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit yang signifikan dengan memperhatikan pada tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dan prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. Perumusan isu strategis yang berangkat dari permasalahan pembangunan daerah, akan menjadi dasar yang tepat dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang strategis.

Keselarasan isu strategis antara RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJMD Kota Payakumbuh, bertujuan untuk percepatan pembangunan melalui sinergisitas isu strategis yang dapat ditelaah dalam penyusunan arah kebijakan daerah nantinya untuk dapat diimplementasikan pada rencana pembangunan jangka menengah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022. Isu strategis yang dirumuskan dalam RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022 juga dilahirkan dari isu-isu yang berkembang di tingkatn nasional dan propinsi sehingga dapat diterjemahkan selaras dengan isu strategis yang ada di kota Payakumbuh, namun terkait dengan isu Pemanfaatan Potensi Kelautan dan Kemaritiman ditingkat propinsi serta isu pembangunan perekonomian berbasis kelautan ditingkat nasional tidak dapat diselaraskan mengingat letak geografis Payakumbuh tidak berada daerah pesisir.

Secara lebih detil dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel VI-4

Persandingan keselarasan Isu Strategis antara RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJMD Kota Payakumbuh

RPJMN	RPJMD Provinsi Sumatera Barat	RPJMD Kota Payakumbuh
• Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas	• Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	• Belum optimalnya Kualitas dan layanan Kesehatan masyarakat
• Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas • Peningkatan kualitas pembelajaran		• Belum optimalnya Kualitas Pendidikan
• Peningkatan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan • Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal		• Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak serta Kesetaraan Gender
• Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan • Peningkatan budaya dan prestasi olahraga		• Belum optimalnya pengembangan potensi pemuda dan olah raga
• Tingkat pertumbuhan ekonomi belum mampu mengatasi tantangan demografis pertumbuhan angkatan kerja dan jumlah penganggur • Peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas dan lanjut usia	• Pengurangan Tingkat Kemiskinandan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah • Pengurangan Pengangguran	• Tingkat Pengangguran dan kemiskinan yang masih relatif tinggi
• Mencapai pertumbuhan yang tinggi dan mengutamakan penumbuhan usaha pemula di ekonomi kreatif	• Penguatan Struktur Ekonomi Daerah • Peningkatan Ketahanan Pangan • Globalisasi dan Peningkatan Daya Saing Daerah	• Belum Terintegrasinya Pengembangan Sektor Unggulan Daerah sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi
• Proses perijinan masih belum efisien • Ketersediaan infrastruktur dan energi yang masih terbatas • Proses pengadaan dan perijinan lahan yang masih menjadi hambatan		• Masih rendahnya nilai investasi
• Populasi UMKM masih didominasi oleh usaha mikro yang informal (98,8%), dan memiliki aset dan produktivitas yang rendah • Koperasi masih terkendala untuk mengoptimalkan partisipasi dan keswadayaan anggotanya dalam menciptakan manfaat sosial ekonomi bagi perbaikan kesejahteraan rakyat.	• Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi	• Belum Optimalnya Penguatan Kelembagaan Ekonomi (Koperasi, IKM, dan UMKM)
• Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, dan pelestarian	• Penanganan Bencana Alam • Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	• Belum Optimalnya Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

dan pemanfaatan keekonomian KEHATI		
• Masih belum terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) di kota dan kawasan perkotaan, sehingga menjadi kurang layak huni.	• Peningkatan Infrastruktur	• Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas Pemenuhan infrastruktur
• Kebutuhan infrastruktur perumahaan dan permukiman		• Belum Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak
• Keterbukaan informasi, komunikasi publik, dan peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik. • Meingkatkan dukungan iptek untuk penyiapan masyarakat indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern	• Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik	• Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Berbasis Teknologi Informasi
• Penguatan karakter dan jati diri bangsa • Pengembangan sumber daya kebudayaan • Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	• Pembangunan Mental dan Peningkatan Pengamalan Nilai-nilai Adat dan Agama	• Menurunnya nilai-nilai karakter dan belum optimalnya peran lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan bermasyarakat
• Percepatan pembanginan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, industri perkebunan, dan industri pertambangan	• Pemanfaatan Potensi Kelautan dan Kemaritiman	-

Adapun isu-isu strategis tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Kualitas dan layanan Kesehatan masyarakat.

Pelayanan kesehatan yang merata dan berkeadilan merupakan salah satu layanan yang wajib disediakan oleh pemerintah melalui : (a) penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang optimal (Puskesmas dan Rumah Sakit), (b) tenaga kesehatan dalam jumlah yang cukup dan berkualitas, dan (c) ketersediaan jaminan pembiayaan kesehatan, sehingga kualitas dan derajat kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan melalui pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan karena dari tubuh yang sehat, memungkinkan manusia untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai modal dasar pembangunan. Kondisi sehat dapat dicapai dengan mengubah perilaku dari yang tidak sehat menjadi perilaku sehat dengan menciptakan lingkungan sehat dan meningkatkan ketahanan keluarga.

Pada pemenuhan layanan dasar urusan kesehatan, kota Payakumbuh memiliki 1 unit Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas yang tersebar di masing-masing kecamatan. Kapasitas tampung rumah sakit diidentifikasi belum seimbang dengan jumlah penduduk yang harus dilayani yang mencakup penduduk Kota Payakumbuh sendiri dan sebagian penduduk dari kabupaten Lima Puluh Kota. Kapasitas tampung

juga terkait dengan jumlah dan kualitas tenaga medis yang masih perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu juga teridentifikasi masalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Hal ini merupakan catatan tersendiri bagi peningkatan layanan kesehatan terhadap masyarakat. Peran tenaga medis diharapkan makin meningkat dalam hal pencegahan timbulnya penyakit melalui upaya edukatif terhadap masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat.

Kondisi-kondisi tersebut tentu menjadi penghambat terhadap pengembangan sumberdaya manusia di Kota Payakumbuh. Dengan demikian, maka peningkatan kualitas layanan dan pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat perlu untuk dikedepankan mengingat sumberdaya manusia yang baik merupakan modal utama pembangunan.

Isu Optimalisasi kualitas dan layanan kesehatan masyarakat ini juga sejalan dengan isu yang ada di tingkat Propinsi Sumatera Barat terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di wilayah Propinsi Sumatera Barat yang juga merupakan jawaban atas isu Nasional berupa peningkatan akses pelayanan dasar dan rujukan yang berkualitas di semua lini pelayanan kesehatan. Sejalan dengan isu propinsi Sumatera Barat terkait pengembangan Kualitas SDM dari sektor kesehatan, permasalahan yang mendapatkan perhatian meliputi peningkatan angka harapan hidup, angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang masih tinggi dibanding rata-rata nasional. Peningkatan kualitas dan layanan kesehatan masyarakat dari sektor hulu akan memperkuat capaian kualitas SDM di tingkat Propinsi Sumatera Barat.

2. Belum optimalnya Kualitas Pendidikan

Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan dasar merupakan kewajiban pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan Kota Payakumbuh sebagai Kota Pendidikan, maka peningkatan kualitas baik dari sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidik, siswa maupun lulusan, menjadi sebuah keharusan. Secara umum, indikator kinerja standar pelayanan bidang pendidikan Kota Payakumbuh telah memenuhi target pencapaian.

Masalah yang perlu ditanggulangi adalah terkait dengan ketersediaan dan pemerataan distribusi tenaga pendidik yang berkualitas. Kekurangan tenaga pendidik ini terurama untuk guru bidang studi tertentu serta guru kelas untuk tingkat sekolah dasar.

Seiring dengan hal tersebut pemerintah daerah diharapkan juga mampu mengakomodir perubahan preferensi masyarakat dalam memilih sekolah dengan muatan agama dan karakter. Fenomena yang terjadi adalah tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak ke sekolah swasta dengan muatan agama dan karakter. Sementara muatan pendidikan agama dan karakter di pendidikan dasar negeri dirasakan masih rendah. Ditambah lagi dengan banyaknya siswa yang berasal dari luar Kota Payakumbuh, disatu sisi ini menjadi sebuah alasan yang menguatkan bahwa pendidikan di Kota Payakumbuh lebih baik dibandingkan daerah sekitar. Kondisi ini perlu diatasi dengan pembenahan tata kelola sekolah dan pemerataan kualitas dan kuantitas dari sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang diterima di setiap sekolah. Perbaikan ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif pada peningkatan proses belajar dan mutu lulusan. Dengan demikian, maka peningkatan kualitas layanan pendidikan perlu menjadi perhatian dalam pengambilan kebijakan pembangunan terkait pengembangan Sumber Daya Manusia ke depan

Hal lain yang juga harus menjadi perhatian oleh Pemerintah Daerah adalah upaya fasilitasi terhadap perkembangan Perguruan Tinggi yang ada di Kota Payakumbuh. Keberadaan perguruan tinggi ini diharapkan dapat memberikan dampak yang luas bagi masyarakat Payakumbuh (multiplier effect) baik dari segi peningkatan kualitas manusia, peningkatan taraf ekonomi dan sosial budaya.

Isu Optimalisasi kualitas pendidikan ini juga sejalan dengan isu yang ada di tingkat Propinsi Sumatera Barat terkait dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di wilayah Propinsi Sumatera Barat yang juga merupakan jawaban atas isu Nasional berupa pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas dan peningkatan kualitas pembelajaran.

3. Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak serta Kesetaraan Gender

Isu perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender di Kota Payakumbuh masih perlu menjadi perhatian. Berdasarkan data yang ada, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan dibandingkan dengan daerah lain.

Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kesetaraan Gender juga merupakan isu nasional dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Peningkatan kualitas perlindungan Perempuan dan Anak serta Kesetaraan Gender harus terus diupayakan dan dijaga agar tetap berkelanjutan. Disamping itu peningkatan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak harus terus diupayakan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus bagi pemerintah ke depan.

4. Tingkat Pengangguran dan kemiskinan yang masih relatif tinggi

Tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih relatif tinggi seharusnya dapat menekan angka pengangguran di kota Payakumbuh. Namun, pada kenyataannya angka pengangguran masih tinggi seiring dengan masih tingginya angka kemiskinan.

Hal ini menunjukkan rendahnya elastisitas perekonomian terhadap angka pengangguran dan kemiskinan. Pada persoalan ini, bisa saja ketersediaan tenaga kerja di kota Payakumbuh tidak sesuai dengan permintaan tenaga kerja yang ada serta rendahnya keterampilan penduduk usia kerja di kota Payakumbuh. Rendahnya penciptaan lapangan kerja bidang jasa dan lapangan kerja berbasis produk lokal sehingga belum mampu menampung tenaga kerja yang ada. Untuk itu, isu ini perlu mendapat penanganan serius dari pemerintah ke depannya.

Secara Nasional isu ini juga muncul dan bersesuaian, sebagaimana tertuang pada RPJMN tahun 2015-2019 bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi belum mampu mengatasi tantangan demografis pertumbuhan angkatan kerja dan jumlah penganggur.

Selain itu PMKS menjadi isu tersendiri yang perlu menjadi perhatian. Semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial dan masih banyaknya yang belum sepenuhnya terselesaikan sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu, maka penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas.

Penurunan angka pengangguran juga diarahkan dalam upaya penyelesaian isu nasional terkait mencapai pertumbuhan yang tinggi dan mengutamakan penumbuhan usaha pemula di ekonomi kreatif. Sektor pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana menjadi Isu Nasional juga belum tereksplorasi dengan matang di daerah, termasuk Kota Payakumbuh.

5. Belum Terintegrasinya Pengembangan Sektor Unggulan Daerah sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih diukur dari pertumbuhan nilai PDRB setiap tahunnya. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi kota Payakumbuh tercatat sebesar 6,08 persen mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya. Jika potensi sektor unggulan tidak dipetakan secara tepat maka pertumbuhan ekonomi akan sulit ditingkatkan.

Pada kenyataannya masih banyak sumber daya alam yang belum tergarap dan potensi sumber daya lokal yang belum termanfaatkan. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan aparatur dalam pemanfaatan sumber daya yang ada serta belum terintegrasinya pengembangan masing-masing sektor tersebut.

Jika dilihat dari sektor pembentuk PDRB, sektor perdagangan, industri, pertanian dan pariwisata adalah sektor pengungkit perekonomian kota Payakumbuh yang masih belum optimal dikembangkan. Rendahnya daya saing produk, lemahnya pemasaran, kurangnya inovasi dan permodalan adalah fenomena yang hampir ditemukan pada pengembangan setiap sektor unggulan. Perlu terobosan baru untuk menggerakkan ke empat sektor diatas secara terintegrasi sehingga dapat mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Dalam lima tahun kedepan sektor strategis ini harus dikelola secara terintegrasi melalui pendekatan cluster industri dengan memperkuat pasokan bahan baku hasil pertanian di hilir seperti padi, bawang, cabe, mendorong peningkatan produksi sub sektor perkebunan melalui produksi perkebunan unggulan kakao, dan pada sub sektor peternakan dapat dijadikan fokus utama dengan pengembangan peternakan sapi yang berskala cukup besar. Peternakan sapi mempunyai peluang yang cukup besar untuk dikembangkan karena beberapa sarana prasarana pendukung sudah ada seperti keberadaan Balai Benih Ternak Unggul (BBTU) di Padang Mangateh, didukung juga dengan adanya Rumah Potong Hewan Modern di Payobasung serta diperkuat dengan adanya Jurusan Peternakan Universitas Andalas (UNAND) yang berada di Kota Payakumbuh sebagai pencetak sumber daya yang unggul di bidang peternakan.

Dengan terjaminan bahan baku maka dapat memperkuat kapasitas produksi industri pengolahan makanan seperti rendang, dan makanan ringan serta olahan kuliner lainnya. Pembangunan city branding Kota Payakumbuh sebagai produsen rendang terbesar di dunia dapat dilakukan dengan terjaminnya bahan baku daging dan penerapan teknologi dalam proses produksi.

Seiring dengan penguatan di sektor hulu (bahan baku dan industri) perlu dilakukan juga penguatan pada sektor hilir yaitu adanya usaha untuk perluasan pangsa pasar baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini dapat disinergikan dengan penguatan pada sektor wisata dengan strategi menjadikan kota payakumbuh menjadi destinasi wisata kuliner dan wisata event berskala lokal, nasional bahkan internasional.

Faktor penghambat yang paling mendasar dalam meningkatkan produktivitas sektor unggulan ini adalah pendampingan pengembangan usaha oleh pihak terkait yang belum terintegrasi. Agar dapat mengoptimalkan segala potensi yang ada dibutuhkan upaya yang terintegrasi oleh semua pemangku kepentingan, pemerintah, pihak swasta, perguruan tinggi dan dukungan penuh dari masyarakat. Pengembangan sektor unggulan harus dilaksanakan secara terpadu dan tidak sektoral untuk dapat menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Kondisi ini perlu mendapat perhatian pemerintah agar dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan berkelanjutan.

6. Masih rendahnya nilai investasi

Secara umum pelayanan perizinan di Kota Payakumbuh melalui Pelayanan Satu pintu sudah berjalan dengan baik, terbukti dengan reputasinya dua kali menda pat anugerah investmen award tingkat Nasional. Akan tetapi pelayan yang perizinan yang baik belum mampu menarik minat investor terutama yang berskala besar untuk berinvestasi di Kota Payakumbuh.

Kendala yang dihadapi antara lain terkait minimnya informasi potensi investasi yang akurat dan promosi peluang investasi yang terbatas, belum tersedianya informasi kelayakan usaha unggulan bagi calon investor, terbatasnya kepastian hukum dan pendukung usah a terutama tentang pajak, tanah, belum efektifnya pemberian insentif, belum berkembangnya pola kemitraan dan kerjasama dengan investor baik dalam negeri maupun luar negeri serta belum optimalnya pengembangan infrastruktur pendukung kawasan potensial investasi. Isu ini perlu menjadi perhatian untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Kota Payakumbuh.

7. Belum Optimalnya Penguatan Kelembagaan Ekonomi (Koperasi, IKM, dan UMKM)

Kelembagaan ekonomi merupakan faktor penunjang keberhasilan ekonomi. Dalam perkembangannya, kelembagaan ekonomi di kota Payakumbuh dirasakan masih belum optimal menunjang sektor perekonomian. Kelembagaan koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan masih menghadapi permasalahan-permasalahan diantaranya kurangnya profesionalitas pengelola koperasi, aturan kelembagaan yang belum berbasis kinerja, minimnya modal usaha, keterbatasan perluasan / pengembangan unit dan keanggotaan dalam koperasi.

Permasalahan mendasar terkait dengan peran kelembagaan IKM dan UMKM adalah rendahnya kualitas dan daya saing IKM dan UMKM, struktur pelaku usaha masih didominasi usaha mikro yang informal dengan produktivitas terbatas. Kondisi ini memerlukan perhatian pemerintah ke depannya dalam hal mengoptimalkan penguatan kelembagaan ekonomi yaitu koperasi, IKM, dan UMKM melalui pendampingan dan pembinaan yang intensif.

Isu terkait pengembangan sektor unggulan daerah sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi dalam penguatan kelembagaan ekonomi di daerah juga sejalan dengan isu Nasional bahwa populasi UMKM masih didominasi oleh usaha mikro yang informal (98,8%) dan memiliki aset dan produktivitas yang rendah. Salah satu soko guru untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Payakumbuh adalah melalui koperasi, namun bersamaan dengan persoalan nasional bahwa Koperasi-koperasi juga masih terkendala untuk mengoptimalkan partisipasi dan

keswadayaan anggotanya dalam menciptakan manfaat sosial ekonomi bagi perbaikan kesejahteraan rakyat.

8. Belum Optimalnya Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Lingkungan yang terjaga dari pencemaran akan meningkatkan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. Beberapa kualitas lingkungan di kota Payakumbuh mengalami penurunan, diantaranya pengelolaan limbah domestik, bengkel dan pasar yang belum optimal. Dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan keberadaan regulasi yang jelas juga sangat diperlukan.

Kondisinya saat ini ketersediaan regulasi terkait pengelolaan lingkungan belum optimal, salah satunya regulasi pemanfaatan air tanah. Akibatnya pelanggaran terkait kelestarian lingkungan pun masih cenderung tinggi diantaranya pelanggaran pemanfaatan sumber daya alam dan pelanggaran aturan pengelolaan limbah berbahaya beracun yang masih tinggi.

Tingkat kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan lingkungan juga relatif rendah. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum membuang sampah pada tempatnya. Masyarakat juga belum memahami pengelolaan sampah rumah tangga sesuai dengan prinsip 3R (reuse, reduce, recycle).

Disamping itu, TPA regional yang berada di Kota Payakumbuh perlu mejadi perhatian khusus dari pemerintah, karena dengan proses sanitary landfill, keterbatasan lahan dan peningkatan timbulan sampah yang seimbang dengan pertambahan penduduk, maka perlu adanya manajemen pengolahan sampah, baik dalam proses sosialisasi konsep 3R, atau melalui pemanfaatan sampah menjadi sumber energi terbarukan. Disamping itu Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang layak perlu ditingkatkan. Kondisi ini diharapkan menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.

Pada skala Nasional, isu peningkatan kualitas lingkungan hidup berfokus pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, dan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian KEHATI.

9. Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas Pemenuhan Infrastruktur

Pada dasarnya kondisi infrastruktur dasar di Kota Payakumbuh sudah memadai. Namun, kondisi yang sudah ada perlu terus dijaga dan dioptimalkan sesuai dengan SPM Perkotaan yang lengkap. Pemenuhan infrastruktur Dasar ditekankan pada terpenuhinya cakupan pelayanan air minum, jalan status kota dalam kondisi sedang dn mantap, drainase kota yang mampu mencegah timbulnya genangan air, dan infrastruktur penunjang pertanian berupa irigasi primer yang berkinerja baik.

Ketersediaan air baku di Kota Payakumbuh saat ini masih bergantung pada sumber air dari Kabupaten Lima Puluh Kota. Permasalahan ini menimbulkan dampak kurangnya pelayanan PDAM Kota Payakumbuh.

Terkait dengan fungsi drainase kota, diidentifikasi luas lokasi genangan air setelah hujan meningkat setiap tahunnya. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor yang perlu diidentifikasi lebih lanjut. Kondisi-kondisi ini memerlukan penanganan yang serius pada pembangunan ke depan.

Menyangkut dengan kelengkapan fasilitas umum yang hasur ada dalam sebuah kota, Kota Payakumbuh perlu melengkapi tersebut seperti luas RTH minimal disebuah kota adalah 30% dari luas wilayah perkotaan. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang

dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Target luas sebesar 30% dari luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan secara tipikal di wilayah perkotaan.

Berkaitan dangan mesjid sebagai fasilitas umum peribadatan yang berskala kota perlu diwujudkan di Kota Payakumbuh. Masjid terbagi menjadi beberapa kelas atau strata. Kelas atau strata masjid ini ditentukan berdasarkan fungsi masjid, fasilitas masjid dan fungsi sosial yang diamanahkan dalam ketetapan Dewan Mesjid Indonesia. Untuk sebuah kota ditetapkan statusnya sebagai mesjid agung yang berperan sebagai suatu institusi yang sangat penting untuk membina masyarakat muslim juga sebagai tempat ibadah dan pusat kebudayaan Islam, tempat pendidikan dan pusat urusan keagamaan masyarakat.

Fasilitas umum lainnya adalah berupa Stadion. Stadion adalah sebuah bangunan yang umumnya digunakan untuk acara olah raga, dimana didalamnya terdapat lapangan atau pentas yang dikelilingi tempat berdiri atau duduk bagi penonton. Bangunan stadion olah raga merupakan jenis bangunan teater besar untuk mempertunjukan berbagai macam pertandingan didalamnya.

Beberapa pertandingan olah raga yang dapat digelar di stadion antaranya olah raga basket, voly, badminton, bola kaki dll. Umumnya stadion memiliki tempat duduk penonton yang kas disebut tribun. Sebagai sebuah kota menengah sudah selayaknya ada di Kota Payakumbuh yang akan meningkatkan prestasi olah raga Kota Payakumbuh.

10. Belum Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang ada dan keterbatasan daya tampung lahan yang ada, maka jika tidak ada penataan perumahan dan kawasan permukiman yang komprehensif dapat dipastikan kawasan kumuh akan semakin meningkat di masa mendatang. Perbaikan kawasan kumuh dapat dilakukan secara swadaya dengan memanfatkan modal sosial di daerah. Selain itu untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur permukiman terkait pembangunan bidang air minum dan sanitasi perlu juga untuk diperhatikan.

Belum optimalnya kenyamanan kota sebagai tempat tinggal, dan wadah aktifitas manusianya, juga dipengaruhi oleh pemanfatan ruang. Dimana proses penataan ruang dalam prakteknya harus disesuaikan dengan rencana tata ruang (RTRW), pada kenyataannya masih banyak bangunan yang tidak memiliki IMB, dan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai. Upaya pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau sebesar

30% dilakukan dengan membangun taman kota, jalur hijau, permakaman, dan inisiasi rasionalisasi sempadan sungai. Kondisi ini, perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat, dimana 10% dari kebutuhan RTH tersebut dipenuhi oleh pribadi. Ruang kota yang nyaman juga dapat muncul dari kesiap-siagaan terhadap rawan bencana alam maupun bencana kebakaran.

11. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Berbasis Teknologi Informasi

Reformasi Birokrasi pada dasarnya terdiri dari tiga elemen utama. Pertama, reformasi keuangan daerah, yaitu mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam prosesnya transaparansi pada proses ini akan meningkatkan kepuasan masayarakat. Pengoptimalan E-Government melalui E-Budgeting dan E-Planning merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk

meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Reformasi ini dilakukan dengan mekanisme perencanaan partisipatif. Perencanaan partisipatif yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tetapi proses penyaringan aspirasi masyarakat terhadap kebutuhan pembangunan dilaksanakan dari tingkat RT. RT dan RW sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat hendaknya didorong untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasinya. Diharapkan dengan inovasi pada proses perencanaan pembangunan daerah meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah.

Reformasi kedua terkait dengan sumber daya aparatur daerah, dimana profesionalisme aparatur daerah merupakan tujuan yang ingin dicapai pada isu strategis ini, profesionalisme dipahami sebagai proses rekrutmen dan penempatan pegawai disesuaikan dengan bidang keahlian, disamping penilaian kepegawaian dilakukan berdasarkan kinerja. Hal lain yang patut untuk dipertimbangkan adalah berkaitan dengan penempatan aparatur dengan membuat sebuah kerangka kerja yang memastikan keberlangsungan sebuah program kerja dengan memusatkan perhatian kepada kesiapan sumber daya manusia. Disamping itu peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan pada OPD Pelayan publik, kecamatan dan kelurahan perlu untuk ditingkatkan, karena pelayanan publik yang bersentuhan dengan masyarakat berawal dari kelurahan.

Reformasi pelayanan publik, yaitu sebuah kondisi ideal pelayanan publik yang diberikan dari pemerintah kepada masyarakat sebagai hasil akhir dari reformasi keuangan daerah dan reformasi sumber daya aparatur. Pelayanan publik ideal dapat diwujudkan dan selalu terbaharui dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan masyarakat tentang standar layanan yang diinginkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan transparansi pemerintahan adalah Penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk mendukung administrasi pemerintahan juga harus dilaksanakan untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan inovatif serta dapat memuaskan masyarakat. Komitmen Pemerintah Kota Payakumbuh dalam menegakkan integritas untuk merealisasikan pelayanan publik yang ideal, dibutuhkan kerjasama yang sangat terorganisasi dan efektif antar komponen di dalam jajaran Pemerintah Kota, termasuk hubungan pemerintah kota dengan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sesuai Undang Undang Nomor 23 tahun 2014. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik sangat perlu untuk ditingkatkan.

12. Menurunnya Nilai-Nilai Karakter dan belum optimalnya Peran Lembaga Agama dan Adat dalam Tata Kehidupan Bermasyarakat

Permasalahan sosial yang muncul di tengah masyarakat adalah menurunnya nilai – nilai karakter pada masyarakat terutama remaja dan anak-anak. Karakter masyarakat Payakumbuh sebagai bagian dari masyarakat Minangkabau mengedepankan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah". Hal ini menunjukkan bahwa adat budaya dan agama merupakan dua panduan dalam hidup dan menjadi karakter masyarakat Minangkabau.

Faktanya penerapan adat basandi syara' , syara' basandi kitabullah semakin lama mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari makin tingginya tingkat perceraian dan kenakalan remaja, implementasi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari mengalami degradasi, jumlah pengguna narkoba meningkat, penderita HIV AIDS dan jumlah penduduk LGBT meningkat. Pengamalan agama di tengah masyarakat masih

kurang dan pelestarian adat masih belum maksimal. Peranan pemerintah bekerjasama dengan ninik mamak dan lembaga adat dan agama yang ada diharapkan lebih optimal ke depannya.Disamping itu, seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi memudahkan masuknya pengaruh budaya asing. Kurangnya peran Lembaga Agama dan Adat dalam menyaring pengaruh budaya asing tersebut mengakibatkan menurunnya nilai-nilai karakter di tengah masyarakat.

13. Belum optimalnya pengembangan potensi pemuda dan olah raga

Isu pemuda masih dianggap cukup penting untuk diprioritaskan. Pemuda merupakan potensi besar jika bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dan sebaliknya jika potensi tersebut tidak dikelola dengan baik akan berdampak tidak baik terhadap proses pembangunan yang sedang berlangsung. Apalagi mengingat pemuda merupakan segmen yang memiliki energi besar dan inovasi tinggi. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

Selanjutnya peran olah raga dalam mendukung terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kualitas fisik sudah tidak diragukan lagi. Selain bermanfaat jasmani, olah raga juga berperan dalam pengembangan karakter bangsa. Olah raga mampu melahirkan kebiasaan yang baik seperti jujur, disiplin, sportif, tanggung jawab dan kerjasama. Walaupun bidang olah raga memiliki alat ukur yang jelasa dalam pencapaian prestasi dan keberhasilannya, namun tak bisa dipungkiri pembangunan olah raga di Kota Payakumbuh masih menemui hambatan dan keterbatasan. Persoalan pembinaan terhadap bibit – bibit atlet berprestasi yang masih belum terarah seperti ; sistem rekruitmen calon atlet, pembibitan, pembinaan pada cabang olah raga, sampai pada peningkatan prestasi.

Hal lain yang turut mendukung iklim olahraga ditingkat masyarakat, ditingkat pendidikan maupun tingkat olah raga prestasi adalah ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Sarana prasarana yang ada saat ini masih perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pengadaan sarana prasarana harus diikuti dengan sosialisasi dan edukasi, terutama masyarakat pengguna agar turut menjaga dan memelihara fasilitas tersebut.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. VISI

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan,guna pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang tersedia.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, adalah rencana pelaksanaan tahap ketiga (2016-2020) dan keempat (2021-2025) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, dimana visi pembangunan jangka panjang daerah Kota Payakumbuh untuk Tahun 2025 adalah ***"Terwujudnya Payakumbuh Sebagai Kota Maju dengan Pengembangan Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah"***. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, RPJPD Kota Payakumbuh telah menetapkan pula 6 misi utama pembangunan daerah, meliputi : 1) Mewujudkan tata kehidupan beragama dan berbudaya berdasarkan falsafah*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*; 2) Mewujudkan tatapemerintahan daerah yang baik, demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif; 3) Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas melalui perbaikan mutu pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial; 4) Mewujudkan sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di dunia global; 5) Mewujudkan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dan berkualitas baik; 6) Mewujudkan lingkungan hidup kota yang tertata baik, bersih, hijau dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

Mengacu kepada pentahapan pembangunan daerah pada RPJPD Kota Payakumbuh pada Tahap ke-3 tahun 2016-2020 dan Tahap ke-4 tahun 2021-2025, penekanan pembangunan lebih diarahkan pada **peningkatan kualitas sumber daya manusia meliputi peningkatan mutu pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).**

Arah pembangunan ini mencakup beberapa bidang pembangunan yaitu :

1. Bidang Agama dan budaya dengan fokus pada pendalaman pemahaman keagamaan untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang berbudi luhur berakhlak mulia;
2. Bidang pembangunan hokumdanpemerintahan daerah fokus pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel, meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, meningkatnya akuntabilitas kinerja Birokrasi, optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah,mewujudkan penerapan e-Government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, meningkatnya kompetensi dan kapasitas aparatur yang bebas KKN, mewujudkan supremasi hukum sesuai kewenangan daerah, meningkatnya kualitas pelayanan publik dan terbangunnya sistem pengelolaan tanah ulayat yang mempunyai kepastian hukum;
3. Bidang ekonomi dengan fokus pada penyediaan sarana dan prasarana untuk kawasan industri, memfasilitasi terwujudnya agribisnis maju dan efisien, pengembangan usaha wisata dan terbangunnya beberapa lokasi pusat kegiatan sektor ekonomi.
4. Bidang sarana dan prasarana perkotaan dengan fokus pada pengembangan sistem jaringan jalan untuk kelancaran lalu lintas, penyediaan prasarana tenaga listrik ke seluruh wilayah kota, penyediaan air bersih bagi penduduk kota, mewujudkan sistem

drainase yang representatif, menyediakan sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi yang cukup bagi warga kota;

5. Pembangunan lingkungan hidup dengan fokus mewujudkan penataan ruang yang serasi, efektif dan efisien, terpeliharanya kawasan konservasi alam dan jalur hijau dan mewujudkan masyarakat sadar lingkungan.

Pada RPJPD Kota Payakumbuh Tahap ke-3 tahun 2016-2020, penekanan pembangunan diarahkan pada **melanjutkan kebijakan yang telah ditempuh pada tahap kedua dengan fokus pada peningkatan capaian sasaran masing-masing bidang.**

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terpadu dan bersinergi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah, diperlukan sinkronisasi prioritas nasional dan daerah. Sehubungan dengan itu perlu digambarkan terlebih dahulu visi dan misi serta prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2014-2019, yang selanjutnya akan dijadikan acuan dalam penentuan prioritas pembangunan daerah. Berikut ini adalah gambaran ringkas visi, misi, dan prioritas pembangunan nasional.

Visi Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019 adalah "Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong". Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Visi dan Misi pemerintah Tahun 2014-2019 dijabarkan lebih operasional ke dalam sembilan Prioritas Nasional yang disebut *Nawacita* yaitu: (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; (2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga Bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) Melakukan revolusi karakter bangsa; serta (9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan dan memperhatikan prioritas nasional tersebut diatas, serta mengakomodir visi, misi, kepala daerah terpilih, maka visi pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 adalah : **"Payakumbuh**

Maju, Sejahtera, dan Bermartabat, dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang"

Meliputi Payakumbuh dengan segala kesatuannya: kesatuan demografis, kesatuan geografis dan kesatuan budaya. Ini berarti pembangunan yang dilaksanakan di Payakumbuh merupakan pembangunan yang komprehensif, integral, menyeluruh dan merata.

MAJU adalah kondisi dimana pada tahun 2022, Payakumbuh menjadi lebih baik dengan kualitas hidup yang relatif tinggi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan ketersediaan infrastruktur, sarana dan utilitas yang memperhatikan efek keberlanjutan lingkungan.

SEJAHTERA dimaknai sebagai peningkatan standar hidup masyarakat yang sehat, handal, makmur dan merata yang diindikasikan dengan pendapatan perkapita melampaui rata - rata nasional (non migas).

BERMARTABAT diartikan sebagai harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota dengan karakteristik dan budaya masyarakat yang dapat dijadikan teladan karena ketaatan, ketaqwaan, dan kedisiplinannya, berangkat dari akar budaya minang "adat basandi syara', syara' basandi kitabullah" dalam arti seluas-luasnya tanpa mengabaikan pluraritas budaya yang ada disekitar kita.

SEMANGAT KEBERSAMAANmaksudnya adalah menghadirkan kekuatan politik, pemerintahan sosial budaya dan ekonomi dengan sistem ekonomi yang menekankan pada keadilan dalam penguasaan sumber daya ekonomi, proses produksi serta konsumsi di mana kemakmuran rakyat lebih diutamakan daripada kemakmuran individu. Menggunakan model pertumbuhan tinggi yang independen dengan berbasis produksi secara berkesinambungan untuk mendukung perkembangan UKM yang menjalankan konsep bisnis one village one product (OVOP). Upaya agar UKM dapat eksis dan meningkatkan daya saing produk-produk mereka dalam perdagangan pasar nasional maupun pasar internasional, perlu memiliki jejaring dengan sesama UKM sesuai bidang geraknya dan terus melakukan interaksi positif seperti: berbagi gagasan, dialog terbuka, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, networking, toleran dan saling bersinergi untuk mendorong terciptanya produk-produk baru, membuka inovasi, serta mendorong terus pengembangan skill untuk peningkatan kualitas produk agar mampu bersaing. Selanjutnya perwujudan dari ekonomi kerakyatan adalah lahirnya UKM-UKM dan juga koperasi sebagai pilar pembangunan ekonomi di kota Payakumbuh. Penguatan pilar-pilar ini tentu merupakan sebuah keharusan demi tercapainya tujuan dasar dari prinsip ekonomi kerakyatan.

MENUJUPAYAKUMBUHMENANGmaksudnya adalah kesiapanPayakumbuhuntukmenghadapiglobalisasi,berbasiskekuatanlocal,untukmenjadiyangterbaikdanterdepandenganmempertahankanpencapaiansebelumnyasertamenjadicontohbagidaerahlainuntukmenciptakanperubahanbagikenyamanandankesejahteraanwargaKotaPayakumbuh.
MenujuPayakumbuhmenangdiartikanmajudalamketersediaaninfrastruktur,sejahterasecaraekonomidanSDMyangbermartabat,denganberbasis potensilokal yangmempunyaidayasaing.

5.2 MISI

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian ini, maka misi pembangunan daerah dalam RPJPD Kota Payakumbuh sampai dengan tahun

2025 ditetapkan sebagai berikut: Mewujudkan tata kehidupan beragama dan berbudaya berdasarkan falsafah *"Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*; mewujudkan tatapemerintahan daerah yang baik, demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif; mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas melalui perbaikan mutu pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial; mewujudkan sentra usaha mikro, kecil dan menengah yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di dunia global; mewujudkan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dan berkualitas baik; dan mewujudkan lingkungan hidup kota yang tertata baik, bersih dan hijau dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

Misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2017-2022 ditetapkan sejalan dengan RPJPD Kota Payakumbuh tersebut, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Handal, Sehat, dan Kompetitif;
2. Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama;
3. Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum yang Nyaman dan Berkelanjutan;
4. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Bersih;
5. Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mencapai misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi sebagai berikut :

5.3.1 Mewujudkan sumber daya manusia yang handal, sehat dan kompetitif.

Misi mewujudkan sumber daya manusia yang handal, sehat dan kompetitif ini dimaksudkan untuk:

a. Mewujudkan kualitas SDM yang berkarakter, memiliki kompetensi dan daya saing melalui pengembangan kualitas pendidikan, pemanfaatan e- informasi dan kemampuan iptek yang maju dan tepat guna;
b. Meningkatkan kesehatan masyarakat yang berkualitas dan merata;
c. Meningkatkan kualitas hidup melalui pemberdayaan masyarakat;
d. Serta dengan menangani masalah kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial.

Misi ini merupakan upaya pemerintah Kota Payakumbuh dalam membangun sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas yang pada gilirannya akan menjadi manusia yang produktif, kompetitif, dan dilandasi akhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya.Tujuan yang akan dicapai dari misi ini adalah terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas. Sasaran dari misi ini meliputi;

1. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan.
2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.
3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan.
4. Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
5. Meningkatnya prestasi atlit.

5.3.2 Membangun perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan dengan berbasis ekonomi kerakyatan dengan memunculkan gerakan ekonomi bersama

Misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan perekonomian kota Payakumbuh untuk lima tahun ke depan diarahkan pada pembangunan perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan. Perekonomian yang tangguh diupayakan dengan membangun kemandirian perekonomian daerah sehingga perekonomian kota Payakumbuh diharapkan tidak mudah goyah dan terpengaruh oleh kondisi ekonomi nasional maupun global. Selanjutnya perekonomian ke depannya juga diharapkan mampu memiliki daya saing dengan memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Terwujudnya hal tersebut diharapkan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang tapi merata dan berkeadilan untuk seluruh masyarakat kota Payakumbuh. Oleh sebab itu, salah satu penekanan dalam misi ini adalah upaya pembangunan perekonomian melalui gerakan ekonomi bersama dalam hal ini melalui kelembagaan koperasi yang sudah teruji sebagai suatu kelembagaan perekonomian yang berbasis ekonomi kerakyatan.

Untuk itu, dalam rangka mencapai misi kedua ini, maka tujuan yang akan dicapai dari misi kedua adalah "Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas", dengan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatnya Produktivitas Sektor Strategis;
2. Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh;
3. Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi.

5.3.3 Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan

Misi ini diarahkan pada pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat kota dengan tetap memperhatikan penataandan pemanfaatan ruang wilayah yang sesuai dengan peruntukannya serta konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Disamping itu juga untuk meningkatkan konektivitas pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi,sehingga sektor unggulan di Kota Payakumbuh dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomidan meningkatkan layanan dasar masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

DalamrangkapencapaianmisiMeningkatkanpenataan Kota, KetersediaanInfrastrukturdanFasilitasUmum yang NyamandanBerkelanjutan,maka tujuanmisi ini adalah meningkatkankeberlanjutanpembangunan yang berwawasanlingkungan dengansasaranpembangunanyaitu :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan.
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
3. Mewujudkan Perumahan dan pemukiman yang layak.

5.3.4 Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Misi ini merupakan perwujudan tata kelola pemerintahan yang yang baik dan bersih sehingga dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan pemerintahan

yang akuntabel, aspiratif, partisipatif dan transparan, mewujudkan pelayanan publik yang prima melalui inovasi dan pengembangan sistem pelayanan yang menjamin efektifitas, efisiensi dan kepuasan masyarakat, meningkatkan kemampuan manajerial dan teknis aparatur dan menanamkan nilai-nilai kesadaran berdemokrasi pada masyarakat dan pelaku politik.

Tekad untuk menjadikan tata pemerintahan yang baik memiliki konsekuensi melibatkan segenap elemen masyarakat dan kalangan swasta untuk menyediakan peluang dan akses bagi masyarakat untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Langkah utama yang diambil dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah membangun birokrasi yang kokoh, memiliki kapasitas dan kredibilitas tinggi. Birokrasi sebagai salah satu aktor dalam pembangunan harus mampu dan dapat dipercaya, sehingga pada gilirannya dapat menjalankan kewajibannya dalam melayani masyarakat secara prima.

Dari uraian di atas, maka secara umum tujuan yang akan dicapai dari misi ini adalah "Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi" dengan sasaran adalah : Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan serta perluasan partisipasi publik;

5.3.5 Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya berdasarkan adat basandi syara' syara' basandi kitabullah

Pembangunan masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan secara keseluruhan, pembangunan akhlak mulia dan berbudaya memiliki posisi dan peran yang strategis sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam kehidupan. Akhlak mulia yang berasal dari pengamalan ajaran agama mendorong manusia untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu, mendidik manusia agar berbuat baik dan mencegahnya berbuat buruk. Pengamalan ajaran agama seseorang mampu memahami keberadaan Tuhan dan mengabdi kepada-Nya, bersikap empati kepada sesama. Agama sebagai sistem nilai berfungsi sebagai penyelamatan, pendidikan, bimbingan, pemersatu, pengubah dan pemecahan yang diarahkan pada upaya pembentukan tatanan kehidupan masyarakat yang semakin maju.

Penekanan pada akhlak mulia yang berbudaya juga memiliki maksud peningkatan intensitas perhatian terhadap peningkatan peran dan pemberdayaan kelembagaan budaya dalam membentuk akhlak mulia di masyarakat untuk mewujudkan pembangunan. Langkah untuk memberdayakan dan meningkatkan peran tersebut dilakukan melalui peningkatan akses di segala bidang : ekonomi, politik, sosial, budaya sehingga diharapkan lembaga budaya di masyarakat dapat terlibat lebih aktif lagi dalam membentuk akhlak mulia dalam mewujudkan pembangunan daerah.

Tujuan yang akan dicapai dari misi ini adalah "Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan agamis". Sasaran yang akan dicapai antara lain :

1. Meningkatnya pengamalan ajaran agama;
2. Menguatnya lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat.

Tabel 5.1
Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kota Payakumbuh

VISI : PAYAKUMBUH MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT DENGAN SEMANGAT KEBERSAMAAN MENUJU PAYAKUMBUH MENANG

No	Misi	Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran		Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
									2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Mewujudkan SDM yang handal, sehat dan kompetitif	1	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 79,63	1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	1	Jumlah sekolah (SD, SMP) yang berakreditasi A	64	67	70	74	77	80	82	82
					2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	2	Angka Usia Harapan Hidup	73,03	73,14	73,40	73,60	73,90	74,30	74,50	74,50
					3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	NA	61.70	61,76	61,80	61,86	61,92	62,50	62,50
					4	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	4	Tingkat Kemiskinan	6,46	6,20	6,00	5,80	5,60	5,40	5,00	5,00
							5	Tingkat Pengangguran	7,07	6,92	6,77	6,62	6,47	6,32	6,00	6,00
					5	Meningkatnya prestasi Atlet	6	Jumlah Atlet berprestasi tingkat Nasional.	NA	4	7	11	15	18	20	20
2	Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing Dan Berkeadilan Dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama	2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 6,38%	6	Meningkatkan Produktivitas Sektor Strategis	7	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	23,92	23,92	23,97	24,02	24,07	24,12	24,17	24,17
							8	Kontribusi sektor Industri Olahan terhadap PDRB	5,64	5,98	6,00	6,02	6,08	6,11	6,12	6,12
							9	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	7,39	7,39	7,42	7,44	7,45	7,46	7,47	7,47
							10	Persentase peningkatan kunjungan wisata	27,74	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

No	Misi	Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran		Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
									2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
					7	Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh	11	Nilai Realisasi Investasi (Miliar Rupiah)	175,7	195,00	200,06	200,7	215,86	230,75	200,75	1243,12
							12	Persentase Usaha Kecil Menengah terhadap UMKM	26,64	27,14	27,64	28,15	28,66	29,18	29,70	29,70
					8	Meningkatnya Kualitas Koperasi	13	Persentase Peningkatan SHU Koperasi	8,30	10,26	12,30	14,25	16,40	18,30	20,25	20,25
3	Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur Dan Fasilitas Umum Yang Nyaman Dan Berkelanjutan	3	Meningkatkan keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Persentase Pemenuhan sarana prasarana sesuai dengan Standar pelayanan minimum (SPM) 100%	9	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan	14	Persentase pelayanan air minum	94,21	94,41	96,71	98,8	99,02	99,67	100	100
							15	Persentase panjang jalan status Kota dalam kondisi mantap	63,81	66,56	69,31	72,06	74,81	77,56	80,30	80,30
							16	Persentase Sistem drainase skala kota	39,88	42,17	44,46	45,95	47,39	48,91	50,44	50,44
							17	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	78,30	78,60	78,90	79,20	79,50	79,80	80,10	80,10
							18	Persentase daerah irigasi berkinerja baik	70,52	73,43	76,34	79,10	81,72	84,21	86,58	86,58
							19	Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan	66,66	72,22	77,78	83,33	88,89	94,44	94,44	94,44
					10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56,23	56,50	57,00	57,25	57,5	57,75	58,00	58,00
					11	Mewujudkan Perumahan dan pemukiman yang layak	21	Persentase luas kawasan kumuh	1,77	1,77	1,77	1,62	1,47	1,32	1,17	1,17
4	Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih	4	Meningkatnya profesionalisme birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81.85	12	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan	22	Nilai Evaluasi AKIP Kota	B	BB	BB	BB	A	A	A	A
							23	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
							24	% PD terintegrasi TI	0	9,68	29,03	45,16	64,52	100	100	100
							25	IKM	78,39	79,35	79,85	80,35	80,75	81,35	81,85	81,85

No	Misi	Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran		Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
									2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
							26	Indeks RB	NA	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00
5	Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Dan Berbudaya Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah	5	Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan agamis	Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga/ Badan Zakat/ Wakaf 5%	13	Meningkatnya pengamalan ajaran agama	27	Persentase Sekolah yang menerapkan Pendidikan Karakter berkategori baik	N/A	13,83	21,28	28,72	36,17	43,62	51,06	51,06
							28	Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga/ Badan Zakat/ Wakaf	2,50	3,00	3,40	3,80	4,20	4,60	5,00	5,00
					14	Menguatnya lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat	29	Persentase lembaga keagamaan yang aktif	54,84	61,29	67,74	74,19	77,42	80,65	83,87	83,87
							30	Persentase lembaga adat yang aktif	75,00	80,00	90,00	95,00	100	100	100	100

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan Arah kebijakan adalah cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dirancang secara konseptual, analitik, realistis, dan komprehensif. Strategi yang akan diwujudkan dalam kebijakan dan program merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebagai penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan.

6.1. Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Handal, Sehat, Dan Kompetitif.

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi ini adalah Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas. Sasaran yang akan dicapai dalam misi 1 ini ada 5 sasaran yaitu : 1) Meningkatnya kualitas layanan pendidikan; 2) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat; 3) Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan; 4) Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; dan 5) Meningkatnya Prestasi Atlet.

6.1.1. Strategi untuk Misi 1

Untuk mencapai sasaran pada Misi 1, diperlukan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Manajemen dan mutu pendidikan;
2. Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan;
3. Penguatan Pendidikan Karakter
4. Peningkatan angka keberlanjutan pendidikan;
5. Peningkatan budaya gemar membaca;
6. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, pengendalian penyakit menular dan tidak menular;
7. Peningkatan standar layanan kesehatan masyarakat;
8. Peningkatan cakupan jaminan kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam penjaminan kesehatan;
9. Peningkatan kesetaraan gender, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
10. Peningkatan penanggulangan PMKS;
11. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan;
12. Meningkatkan kualitas, produktivitas dan kesempatan kerja.
13. Peningkatan kualitas pemuda dan olah raga untuk prestasi.

Terkait dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Startegi tersebut untuk dilaksanakan dalam 5 tahun kedepan adalah sebagaimana pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pada Misi 1

Visi : Payakumbuh Maju, Sejahtera, dan Bermartabat, dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang		
Misi : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Handal, Sehat, dan Kompetitif		
Tujuan	Sasaran	Strategi
1. Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas	1. Meningkatnya kualitas pendidikan	1. Peningkatan Manajemen dan mutu pendidikan
		2. Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan
		3. Penguatan Pendidikan Karakter
		4. Peningkatan angka keberlanjutan pendidikan
		5. Peningkatan budaya gemar membaca
	2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	6. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, pengendalian penyakit menular dan tidak menular
		7. Peningkatan standar layanan kesehatan masyarakat.
		8. Peningkatan cakupan jaminan kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam penjaminan kesehatan
	3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan	9. Peningkatan kesetaraan gender, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	4. Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	10. Peningkatan penanggulangan PMKS
		11. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan
		12. Meningkatkan kualitas, produktivitas dan kesempatan kerja
	5. Meningkatnya Prestasi Atlet	13. Peningkatan kualitas pemuda dan olah raga untuk prestasi .

6.1.2. Arah Kebijakan untuk Misi 1

Dalam rangka mengimplementasikan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun, diperlukan arah kebijakan yang menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun.

Arah kebijakan untuk mencapai Misi 1 yaitu adalah :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengawasan pendidikan;
2. Optimalisasi pemenuhan 8 standar pendidikan
3. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan melalui pendidikan inklusi, pendidikan informal dan non formal;
4. Penguatan pelaksanaan pendidikan karakter dan akhlak mulia di sekolah.
5. Mendorong peningkatan pelayanan pendidikan menengah atas (SMA/SMK/MA) dan perguruan tinggi di Kota Payakumbuh melalui bantuan keuangan/hibah;
6. Mendorong pengembangan budaya literasi dan layanan pengelolaan perpustakaan berbasis IT;
7. Menurunkan kasus kematian bayi dan ibu melahirkan
8. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hidup sehat (PHBS) ;
9. Menurunkan angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular
10. Meningkatkan kualitas gizi masyarakat;
11. Optimalisasi pelayanan penyalahgunaan NAPZA,

12. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesehatan dan ketahanan keluarga
13. Meningkatkan sarana prasarana layanan kesehatan serta ketersediaan obat obatan;
14. Mendorong peningkatan sarana prasarana Rumah sakit yang representatif melalui dana pembiayaan.
15. Meningkatkan kualitas manajemen layanan kesehatan;
16. Meningkatkan jaminan dan kemandirian masyarakat dalam penjaminan kesehatan
17. Optimalisasi program pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pemenuhan hak anak;
18. Meningkatkan akses dan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diarahkan kepada rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial serta pemberdayaan sosial;
19. Optimalisasi peran dan fungsi PSKS serta pelaksanaan sistim layanan terpadu (SLRT) dalam penanggulangan kemiskinan;
20. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan;
21. Perluasan kesempatan kerja serta fasilitasi kemitraan dengan dunia usaha;
22. Peningkatan daya saing angkatan kerja siap pakai;
23. Peningkatan pembibitan atlit dan pembinaan olah raga prestasi;
24. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga;

Arah Kebijakan Pembangunan untuk Misi 1 setiap tahunnya dapat dilihat pada Tabel 6.2. berikut :

Tabel 6.2.
Arah Kebijakan Pembangunan pada Misi 1 Kota Payakumbuh 2017-2022

No	Arah Kebijakan				
	Tahun 2018	**Tahun 2019**	**Tahun 2020**	**Tahun 2021**	**Tahun 2022**
1	2	3	4	5	6
	Sasaran 1				
	1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengawasan pendidikan; 2. Optimalisasi pemenuhan 8 standar pendidikan 3. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan melalui pendidikan inklusi, pendidikan informal dan non formal; 4. Penguatan pelaksanaan pendidikan karakter dan akhlak mulia di sekolah. 5. Mendorong peningkatan pelayanan pendidikan menengah atas (SMA/SMK/MA) dan perguruan tinggi di Kota Payakumbuh melalui bantuan keuangan/hibah; 6. Mendorong pengembangan budaya literasi dan layanan pengelolaan perpustakaan berbasis IT;	1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengawasan pendidikan; 2. Optimalisasi pemenuhan 8 standar pendidikan 3. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan melalui pendidikan inklusi, pendidikan informal dan non formal; 4. Penguatan pelaksanaan pendidikan karakter dan akhlak mulia di sekolah. 5. Mendorong peningkatan pelayanan pendidikan menengah atas (SMA/SMK/MA) dan perguruan tinggi di Kota Payakumbuh melalui bantuan keuangan/hibah; 6. Mendorong pengembangan budaya literasi dan layanan pengelolaan perpustakaan berbasis IT;	1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengawasan pendidikan; 2. Optimalisasi pemenuhan 8 standar pendidikan 3. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan melalui pendidikan inklusi, pendidikan informal dan non formal; 4. Penguatan pelaksanaan pendidikan karakter dan akhlak mulia di sekolah. 5. Mendorong peningkatan pelayanan pendidikan menengah atas (SMA/SMK/MA) dan perguruan tinggi di Kota Payakumbuh melalui bantuan keuangan/hibah; 6. Mendorong pengembangan budaya literasi dan layanan pengelolaan perpustakaan berbasis IT;	1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengawasan pendidikan; 2. Optimalisasi pemenuhan 8 standar pendidikan 3. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan melalui pendidikan inklusi, pendidikan informal dan non formal; 4. Penguatan pelaksanaan pendidikan karakter dan akhlak mulia di sekolah. 5. Mendorong peningkatan pelayanan pendidikan menengah atas (SMA/SMK/MA) dan perguruan tinggi di Kota Payakumbuh melalui bantuan keuangan/hibah; 6. Mendorong pengembangan budaya literasi dan layanan pengelolaan perpustakaan berbasis IT;	1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengawasan pendidikan; 2. Optimalisasi pemenuhan 8 standar pendidikan 3. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan melalui pendidikan inklusi, pendidikan informal dan non formal; 4. Penguatan pelaksanaan pendidikan karakter dan akhlak mulia di sekolah. 5. Mendorong peningkatan pelayanan pendidikan menengah atas (SMA/SMK/MA) dan perguruan tinggi di Kota Payakumbuh melalui bantuan keuangan/hibah; 6. Mendorong pengembangan budaya literasi dan layanan pengelolaan perpustakaan berbasis IT;

No	Arah Kebijakan				
	Tahun 2018	**Tahun 2019**	**Tahun 2020**	**Tahun 2021**	**Tahun 2022**
1	2	3	4	5	6
	Sasaran 2				
	1. Menurunkan kasus kematian bayi dan ibu melahirkan 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hidup sehat (PHBS) ; 3. Menurunkan angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular 4. Meningkatkan kualitas gizi masyarakat; 5. Optimalisasi pelayanan penyalahgunaan NAPZA, 6. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesehatan dan ketahanan keluarga 7. Meningkatkan sarana prasarana layanan kesehatan serta ketersediaan obat obatan; 8. Mendorong peningkatan sarana prasarana Rumah sakit yang representatif melalui dana pembiayaan. 9. Meningkatkan kualitas manajemen layanan kesehatan; 10. Meningkatkan jaminan dan kemandirian masyarakat dalam penjaminan kesehatan	1. Menurunkan kasus kematian bayi dan ibu melahirkan 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hidup sehat (PHBS) ; 3. Menurunkan angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular 4. Meningkatkan kualitas gizi masyarakat; 5. Optimalisasi pelayanan penyalahgunaan NAPZA, 6. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesehatan dan ketahanan keluarga 7. Meningkatkan sarana prasarana layanan kesehatan serta ketersediaan obat obatan; 8. Mendorong peningkatan sarana prasarana Rumah sakit yang representatif melalui dana pembiayaan. 9. Meningkatkan kualitas manajemen layanan kesehatan; 10. Meningkatkan jaminan dan kemandirian masyarakat dalam penjaminan kesehatan	1. Menurunkan kasus kematian bayi dan ibu melahirkan 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hidup sehat (PHBS) ; 3. Menurunkan angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular 4. Meningkatkan kualitas gizi masyarakat; 5. Optimalisasi pelayanan penyalahgunaan NAPZA, 6. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesehatan dan ketahanan keluarga 7. Meningkatkan sarana prasarana layanan kesehatan serta ketersediaan obat obatan; 8. Mendorong peningkatan sarana prasarana Rumah sakit yang representatif melalui dana pembiayaan. 9. Meningkatkan kualitas manajemen layanan kesehatan; 10. Meningkatkan jaminan dan kemandirian masyarakat dalam penjaminan kesehatan	1. Menurunkan kasus kematian bayi dan ibu melahirkan 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hidup sehat (PHBS) ; 3. Menurunkan angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular 4. Meningkatkan kualitas gizi masyarakat; 5. Optimalisasi pelayanan penyalahgunaan NAPZA, 6. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesehatan dan ketahanan keluarga 7. Meningkatkan sarana prasarana layanan kesehatan serta ketersediaan obat obatan; 8. Mendorong peningkatan sarana prasarana Rumah sakit yang representatif melalui dana pembiayaan. 9. Meningkatkan kualitas manajemen layanan kesehatan; 10. Meningkatkan jaminan dan kemandirian masyarakat dalam penjaminan kesehatan	1. Menurunkan kasus kematian bayi dan ibu melahirkan 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hidup sehat (PHBS) ; 3. Menurunkan angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular 4. Meningkatkan kualitas gizi masyarakat; 5. Optimalisasi pelayanan penyalahgunaan NAPZA, 6. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesehatan dan ketahanan keluarga 7. Meningkatkan sarana prasarana layanan kesehatan serta ketersediaan obat obatan; 8. Mendorong peningkatan sarana prasarana Rumah sakit yang representatif melalui dana pembiayaan.

No	Arah Kebijakan				
	Tahun 2018	**Tahun 2019**	**Tahun 2020**	**Tahun 2021**	**Tahun 2022**
1	2	3	4	5	6
					9. Meningkatkan kualitas manajemen layanan kesehatan; 10. Meningkatkan jaminan dan kemandirian masyarakat dalam penjaminan kesehatan
	Sasaran 3				
	Optimalisasi program pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pemenuhan hak anak;	Optimalisasi program pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pemenuhan hak anak;	Optimalisasi program pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pemenuhan hak anak;	Optimalisasi program pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pemenuhan hak anak;	Optimalisasi program pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pemenuhan hak anak;
	Sasaran 4				
	1. Meningkatkan akses dan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diarahkan kepada rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial serta pemberdayaan sosial; 2. Optimalisasi peran dan fungsi PSKS serta pelaksanaan sistim layanan terpadu (SLRT) dalam penanggulangan kemiskinan; 3. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan; 4. Perluasan kesempatan kerja serta fasilitasi kemitraan dengan dunia usaha;	1. Meningkatkan akses dan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diarahkan kepada rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial serta pemberdayaan sosial; 2. Optimalisasi peran dan fungsi PSKS serta pelaksanaan sistim layanan terpadu (SLRT) dalam penanggulangan kemiskinan; 3. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan; 4. Perluasan kesempatan kerja serta fasilitasi kemitraan dengan dunia usaha;	1. Meningkatkan akses dan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diarahkan kepada rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial serta pemberdayaan sosial; 2. Optimalisasi peran dan fungsi PSKS serta pelaksanaan sistim layanan terpadu (SLRT) dalam penanggulangan kemiskinan; 3. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan; 4. Perluasan kesempatan kerja serta fasilitasi kemitraan dengan dunia usaha; 5. Peningkatan daya saing	1. Meningkatkan akses dan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diarahkan kepada rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial serta pemberdayaan sosial; 2. Optimalisasi peran dan fungsi PSKS serta pelaksanaan sistim layanan terpadu (SLRT) dalam penanggulangan kemiskinan; 3. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan; 4. Perluasan kesempatan kerja serta fasilitasi kemitraan dengan dunia usaha;	1. Meningkatkan akses dan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diarahkan kepada rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial serta pemberdayaan sosial; 2. Optimalisasi peran dan fungsi PSKS serta pelaksanaan sistim layanan terpadu (SLRT) dalam penanggulangan kemiskinan; 3. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi

No	Arah Kebijakan				
	Tahun 2018	**Tahun 2019**	**Tahun 2020**	**Tahun 2021**	**Tahun 2022**
1	2	3	4	5	6
	5. Peningkatan daya saing angkatan kerja siap pakai;	5. Peningkatan daya saing angkatan kerja siap pakai;	angkatan kerja siap pakai;	5. Peningkatan daya saing angkatan kerja siap pakai;	terhadap upaya penanggulangan kemiskinan; 4. Perluasan kesempatan kerja serta fasilitasi kemitraan dengan dunia usaha; 5. Peningkatan daya saing angkatan kerja siap pakai;
	Sasaran 5				
	1. Peningkatan pembibitan atlit dan pembinaan olah raga prestasi; 2. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga;	3. Peningkatan pembibitan atlit dan pembinaan olah raga prestasi; 4. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga;	5. Peningkatan pembibitan atlit dan pembinaan olah raga prestasi; 6. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga;	7. Peningkatan pembibitan atlit dan pembinaan olah raga prestasi; 8. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga;	9. Peningkatan pembibitan atlit dan pembinaan olah raga prestasi; 10. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga;

6.1.3. Program pembangunan Daerah Misi 1

Program-program prioritas untuk mewujudkan misi 1 adalah:

1. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
2. Program Wajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun
3. Pendidikan Anak Usia Dini
4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Program pendidikan non formal
6. Program Pendidikan karakter/akhlak mulia
7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Kepustakaan
8. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
9. Program pengembangan lingkungan sehat
10. Program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
11. Pengendalian penyakit tidak menular
12. Program perbaikan gizi masyarakat
13. Program keluarga berencana
14. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD
15. Program Pengadaan Peningkatan sarana prasarana RS/RSJ/RSP/RSM
16. Program Standarisasi pelayanan kesehatan
17. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
18. Program Penguatan kelembagaan PUG dan anak
19. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
20. Program pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya.
21. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
22. Program peningkatan kulaitas hidup bagi lansia melalui bantuan UEP
23. Program peningkatan kualitas SDM kesos masyarakat.
24. Program Pemberdayaan dan kelembagaan kesos.
25. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan
26. Program pengembangan perumahan
27. Program Lingkungan sehat perumahan
28. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
29. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
30. Program peningkatan kesejahteraan petani
31. Program Pembangunan saluran drainasi/ gorong-gorong
32. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
33. Program peningkatan kemampuan teknologi industri
34. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
35. Program peningkatan kesempatan kerja
36. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
37. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
38. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
39. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga
40. Program pembangunan sarana dan prasarana olah raga.

Keterkaitan antara Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel 6.3 dibawah ini :

Tabel 6.3.
Keterkaitan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah pada Misi 1 Kota Payakumbuh 2017-2022

Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah
1. Peningkatan Manajemen dan mutu pendidikan	1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengawasan pendidikan;	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
	2. Optimalisasi pemenuhan 8 standar pendidikan;	Program Wajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun
		Program Pendidikan Anak Usia Dini
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2. Peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan	3. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, melalui pendidikan inklusi, pendidikan informal dan pendidikan non formal;	Program Pendidikan Non Formal
3. Penguatan Pendidikan Karakter	4. Penguatan pelaksanaan pendidikan karakter dan akhlak mulia disekolah	Program Pendidikan karakter/akhlak mulia
4. Peningkatan angka keberlanjutan pendidikan	5. Mendorong peningkatan pelayanan pendidikan menengah atas (SMA/SMK/MA) dan perguruan tinggi di Kota Payakumbuh melalui bantuan keuangan/hibah	
5. Peningkatan budaya gemar membaca	6. Mendorong pengembangan budaya literasi dan layanan pengelolaan perpustakaan berbasis IT;	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Kepustakaan
6. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, pengendalian penyakit menular dan tidak menular	7. Menurunkan kasus kematian bayi dan ibu melahirkan	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
	8. Meningkatkan partisipasi masyarakt untuk hidup sehat (PHBS) ;	Program pengembangan lingkungan sehat
		Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
	9. Menurunkan angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular;	Program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
		Pengendalian penyakit tidak menular
	10. Meningkatkan kualitas gizi masyarakat;	Program perbaikan gizi masyarakat
	11. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesehatan dan ketahanan keluarga	Program keluarga berencana
		Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD
7. Peningkatan standar layanan kesehatan masyarakat.	12. Meningkatkan sarana prasarana layanan kesehatan serta ketersediaan obat obatan;	Program Pengadaan, peningkatan sarana prasarana Rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata
	13. Peningkatan sarana prasarana RS yang representastif melalui pendanaan pembiayaan	
	14. Meningkatkan kualitas manajemen layanan kesehatan;	Standarisasi pelayanan kesehatan

8. Peningkatan cakupan jaminan kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam penjaminan kesehatan	15. Meningkatkan promosi kesehatan dan jaminan kesehatan;	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
	16. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam penjaminan kesehatan	
9. Peningkatan kesetaraan gender, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	17. Optimalisasi program pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pemenuhan hak anak;	Program Penguatan kelembagaan PUG dan anak
		Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
10. Peningkatan penanggulangan PMKS	18. Meningkatkan akses dan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diarahkan kepada rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial serta pemberdayaan social	Program pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya.
		Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
		Program Peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia melalui pemberian bantuan UEP
11. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan	19. Optimalisasi peran dan fungsi PSKS serta pelaksanaan sistim layanan terpadu (SLRT) dalam penanggulangan kemskinan	Program Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
		Program pemberdayaan kelembagaan kesos
	20. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan;	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan
		Program pengembangan perumahan
		Program Lingkungan sehat perumahan
		Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
		Program Pembangunan saluran drainasi/ gorong-gorong
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Wajib Belajar 9 Tahun
		Program Pendidikan Non Formal
		Program Pengembangan Sistim Pendukung Usaha Bagi UMKM
		Program Keluarga Berencana
		Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu Padu
12. Meningkatkan kualitas, produktivitas dan kesempatan kerja	21. Fasilitasi kemitraan dengan dunia usaha dan perluasan kesempatan kerja;	Program peningkatan kesempatan kerja
	22. peningkatan daya saing angkatan kerja siap pakai	Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
		Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan

		kompetitif UKM
13. Peningkatan kualitas pemuda dan olah raga untuk prestasi .	23. Peningkatan pembibitan atlit dan pembinaan olah raga prestasi	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
	24. Meningkatkan sarana dan prasarana OR	Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga
		Program pembangunan sarana dan prasarana OR

Keterkaitan antara Misi, Tujuan,Sasaran dan Program Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel 6.4 dibawah ini :

Tabel 6.4
Keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Untuk Misi 1

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Misi : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Handal, Sehat, dan Kompetitif																	
	Tujuan : Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,56	77.90	-	78.25	-	78.60	-	78.94	-	79.29	-	79.63	-	79.63	-	
	Sasaran 1 Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Jumlah Sekolah (SD,SMP) yang terakreditasi A	64	67	-	70	-	74	-	77	-	80	-	82	-	82	-	
1	Program pendidikan anak usia dini	Persentase satuan PAUDNI yang memiliki sapras sesuai SNP	na	60%	2.455.	62%	2.870.	64%	3.562.	65%	2.552.	67%	2.352.	70%	2.202.	70%	15.993 .	Diknas
		Persentase satuan pendidikan PAUD yang pengelolaanny a berkategori baik	na	70%		72%%		75%		77%		78%		80%		80%	-	
		Persentase PTK PAUD	na	50%		52%		54%		56%		58%		60%		60%		

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		yang sesuai dengan SNP																
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun	Persentase sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan SNP	na	80%	11.002	83%	16.716	85%	13.048	86%	12.638.	87%	14.090	90%	17.023.	90%	84.520.	Diknas
		Rata - rata nilai Mid semester	na	7,5		7,6		7,7		7,8		7,9		8		8	-	Diknas
		Rata - rata nilai semester	na	7,5		7,6		7,7		7,8		7,9		8		8	-	
3	Program Pendidikan Non Formal	Angka melek huruf	99,63	99,56	4.284.	99,6	4.423.	99,66	4.423.	99,71	4.393.	99,75	4.393.	99,81	6.393.	99,85	28.310.	Diknas
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio guru per rombel	na	100%	547.	100%	677.	100%	677.	100%	677.	100%	677.	100%	677.	100%	3.934.	Diknas
		Rasio guru per mapel	na	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	-	Diknas
		Rasio tenaga kependidikan	na	80%		83%		85%		87%		88%		90%		90%		Diknas

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		per sekolah															-	
		Persentase PTK yang sesuai dengan SNP	na	0,5		53%		55%		57%		60%		65%		65%		
5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang pengelolaannya berkategori baik	na	0,7	477.	72%	497.	74%	497.	75%	497.	77%	497.	80%	497.	80%	2.965.	Diknas
6	Program Pendidikan Karakter/ Akhlak mulia	Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik	na	13,83 %	-	21%	3.805.	29%	5.341.	36%	5.636.	44%	5.931.	51%	6.226.	51%	26.941 .	Diknas
		Persentase capaian program pendidikan karakter melalui mapel	na	44,44 %		46%		48%		50%		55%		65%		65%	-	
7	Program Pengembangan Budaya Baca	Persentase peningkatan jumlah	8,2	9,2	300.	28,26	148.	40,21	148	50	410.	63,04	450.	73,91	494.	73,91	1.652.	Dinas Perpustakaan dan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Dan Pembinaan Perpustakaan	pengunjung perpustakaan																Arsip
	Sasaran 2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat;	Angka Harapan Hidup	73,03	73,14	-	73,40	-	73,60	-	73,90	-	74,30	-	74,50	-	74,50	-	
1	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah tangga ber-PHBS	66,33%	67%	585.	70%	872.	75%	832.	77%	832.	79%	843.	80%	843.	80%	4.809.	Dinkes
		Persentase sekolah PHBS	48,33	73	-	75	-	78	-	80	-	85	-	90	-	90	-	
2	Program perbaikan gizi masyarakat	Persentase peningkatan status gizi masyakat	na	100%	75.	100%	99.	100%	99.	100%	99.	100%	99.	100%	99.	100%	573	Dinkes
		Persentase penanganan balita gizi buruk	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	-	Dinkes
		Cakupan balita gizi buruk	0,08%	<3		<3		<3		<3		<3		<3		<3	-	Dinkes
3	Program Pengembangan lingkungan sehat	Cakupan jamban yang sesuai standar	85,92%	87%	360.	89,5%	369.	90%	369.	92%	391.	93%	391.	95%	391.	95%	2.275.	Dinkes

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		kesehatan																
		Cakupan Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga	93,36%	95%		96,75%		96,80 %		96,90 %		97%		98%		98%	-	Dinkes
		Cakupan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	na	95%		96%		97%		98%		98,5%		98,6%		98,6%		
		Cakupan Pengelolan Limbah Cair Rumah Tangga	na	90%		92%		92,50 %		93%		94%		95%		95%		
		Cakupan Laik Sehat TPM	na	na		77%		80%		81%		82%		83%		83%		
		Cakupan Laik Sehat TTU	na	na		79%		80%		81%		82%		83%		83%		
		Persentase peningkatan STBM	na	na		95%		96%		97%		98%		100%		100%		

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase cakupan stop BABS	na	na		90%		91%		92%		93%		95%		95%		
		Persenatase laik sehat TTM dan TTU	na	na		80%		83%		85%		87%		90%		90%		
4	Program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	Cakupan penemuan semua kasus TB	40,38%	41%	194.	42%	222.	42%	222.	43%	222.	44%	235.	45%	235.	45%	1.333.	Dinkes
		Persentase TB yang mengetahui status HIV	na	39%		40%		42%		43%		44%		45%		45%		Dinkes
		Persentase HIV AIDS yang mendapatkan ARV	na	20%		20%		20%		20%		20%		20%		20%	-	
		Cakupan penanganan kasus diare	na	95%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Insident rate DBD per 100.000	na	<41		<41		<41		<41		<41		<41		<41		

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		penduduk																
		Cakupan Kelurahan UCI	na	75%		80%		81%		82%		83%		85%		85%		
		cakupan pelayanan imunisasi anak sekolah	na	90%		92%		93%		95%		100%		100%		100%		
		Cakupan pelayanan imunisasi dasar lengkap	na	90%		93%		95%		96%		97%		100%		100%		
		cakupan penanganan kasus DBD	na	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
5	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase RS dan Puskesmas terakreditasi	75%	80%	794.	100%	423.	100%	443.	100%	425.	100%	449.	100%	449.	100%	2.985.	Dinkes
		Persentase puskesmasn dengan nilai IKM >75	na	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Sapras puskesmas	na	65%		70%		72%		75%		78%		80%		80%		

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Pengkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		yang sesuai standar																
6.	Program Pengadaan, peningkatan sarana prasarana Rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS Paru- paru/RS Mata	Persentase Ketersediaan alat kedokteran RS sesuai standar	na	78%	21.373.	80%	21.760.	82%	42.000.	83%	30.000.	85%	45.000	87%	10.000.	87%	170.133	
		Persentase Ketersediaan Prasarana RS sesuai standar	na	75	-	80	-	82	-	83	-	85	-	87	-	87	-	
7	Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan persalinan dengan nakes di faskes	91,80%	98%	742.	100%	738.	100%	738.	100%	747.	100%	738.	100%	747.	100%	4.453.	Dinkes
		Cakupan pelayan Nifas sesuai standar	93%	95%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	-	Dinkes
		Cakupan pelayan Neonatal sesuai standar	96%	98%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinkes
8	Pengendalian Penyakit tidak Menular	Cakupan penderita	93%	95%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinkes

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		hipertensi yang mendapat pelayanan			20.		37.		37.		39.		37.		37.		189.	
		Cakupan penderita DM yang mendapat pelayanan sesuai standar	na	95%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	-	Dinkes
		Cakupan IVA positif yang tertangani	na	95%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	-	Dinkes
		Cakupan pelayanan IVA usia produktif	na	30%		32%		33%		34%		35%		35%		35%		
		Cakupan penemuan kasus hipertensi usia > 15 tahun	na	20%		22,6%		22,8%		23%		23,5%		24%		24%		
9	Program keluarga berencana	unmeet need	na	11,85	1.683.	11,27	1.834.	11,13	2.051.	11,06	2.256.	10,92	2.482.	10,87	2.730.	10,87	13.039	DP3A P2KB
10	Program pengembangan model	Persentase posyandu dengan strata	na	10%	766.	15%	832	20%	915.	25%	1.007	30%	1.108	40%	1.219	40%	5.849.	DP3A P2KB

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	operasional BKB-Posyandu-PAUD	mandiri			00													
11	Program upaya kesehatan masyarakat	Persentase kepesertaan JKN	85,10%	87%	7.428.	89%	7.813.	95%	6.985.	100%	9.587.	100%	11.239.	100%	17.572	100%	60.625	Dinkes
	Sasaran 3. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan;	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,70	61,70	-	61,76	-	61,80	-	61,86	-	61,92	-	62,5	-	62,5	-	
1	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah kelembagaan PUG	64	64	613.	72	606.	83	817.	95	938.	110	938.	122	1.121.	122	5.035.	DP3A P2KB
		Persentase program dan kegiatan yang di PPRG - kan	na	5%		7%		10%		12%		15%		17%		17%		
		Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak	na	65%		70%		75%		80%		82%		85%		85%		
		Jumlah Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)	na	5		10		15		20		25		30		30		DP3A P2KB

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase kasus penanganan kekerasan anak	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Jumlah organisasi perempuan yang aktif	3	3	375.	3	120.	36	332.	36	345.	36	359.	36	375.	36	1.908.	DP3A P2KB
	Sasaran 4. Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Angka kemiskinan	6,46	6.2	-	5.93	-	5,66	-	5,39	-	5,12	-	5	-	5	-	
		Angka pengangguran terbuka	7.07	6.92	-	6,77	-	6,62	-	6,47	-	6.32	-	6	-	6	-	
1.	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social	Persentase meningkatnya keterampilan anak cacat, anak terlantar termasuk anak jalanan, dan	70	70	968.	80	663.	85	982.	90	1.335.	100	1.410.	100	1.486.	100	6.846.	Dinas Sosial

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		anak nakal																
2	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS lainnya	Jumlah Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial/ penanganan PMKS	427 orang	427 orang	662.	511	376.	477	605.	750	655.	900	653.	1.050 orang	652	4.115 orang	3.607.	Dinas Sosial
3	Program Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase peningkatan kapasitas SDM kessos	70	70	-	80	645.	85	913.	90	997.	100	1.074.	100	1.156.	100	4.785.	Dinas Sosial
4	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social	Persentase peningkatan kualitas lembaga kesejahteraa n sosial	70	70	897.	80	211.	85	591.	90	656.	100	713.	100	764.	100	3.834.	Dinas Sosial
5	Program Peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia melalui pemberian bantuan UEP	Persentase Meningkatnya kualitas hidup bagi lanjut usia	70	70		80	612.	85	441.	90	3.359.	100	5.057.	100	8.410.	100	17.880	Dinas Sosial
6	Program Peningkatan Ketahanan	Skor PPH	78,84	87,50		89,00		90,50		92,00		93,50		95,00		95		Dinas Ketapa ng

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Pengkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pangan pertanian/perkebunan	Ketersediaan			944.		1.565.		1.097.		5.171.		6.959.		10.182.		24.976	
6	Program upaya kesehatan masyarakat	Persentase kepesertaan JKN	85,10%	87%	7.428.	89%	7.813.	95%	6.985.	100%	9.587.	100%	11.239.	100%	17.572	100%	60.625	Dinkes
7	Program perbaikan gizi masyarakat	Persentase peningkatan status gizi masyakat	na	100%	75.	100%	99.	100%	99.	100%	99.	100%	99.	100%	99.	100%	573	Dinkes
		Persentase penanganan balita gizi buruk	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	-	
		Cakupan balita gizi buruk	0,08%	<3		<3		<3		<3		<3		<3		<3	-	
8	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	91,70	91,70	4.173.	92,95	5.467.	93,81	5.388.	94,84	6.056	95,92	4.645	96,98	7.978	96,98	29.535	Dinas Perumahan dan Waskin
9	Program Lingkungan sehat Perumahan	Persentase rumah bersanitasi layak	88,20	88,20	5.718.	89,71	3.838.	91,22 %	3.248.	92,74 %	2.727.	94,25%	1.495	95,76%	1.534.	95,76 %	12.845	Dinas Perumahan dan Waskin
10	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun	Persentase sekolah yang memiliki sarana	na	80%	11.002	83%	16.716	85%	13.048	86%	12.638.	87%	14.090	90%	17.023.	90%	84.520 .	Diknas

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		prasarana sesuai dengan SNP																
		Rata - rata nilai Mid semester	na	7,5		7,6		7,7		7,8		7,9		8		8	-	
		Rata - rata nilai semester	na	7,5		7,6		7,7		7,8		7,9		8		8	-	
11	Program Pendidikan Non Formal	Angka melek huruf	99,63	99,56	4.284.	99,6	4.423.	99,66	4.423.	99,71	4.393.	99,75	4.393.	99,81	6.393.	99,85	28.310.	Diknas
12	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga	50,00%	55,00%	350.	60,00%	636.	65,00%	636.	70,00%	838.	75,00%	922.	80,00%	1.014.	80,00%	4.048.	Dinas Koperasi dan UKM
		Persentase peningkatan jumlah komoditi yg diperdagangkan	2,00%	3%		3,5%		4%		4,5%		5%		5,5%		5,5%		
13	Program Pengembangan Sistim Pendukung	Persentase peningkatan modal UMKM	0,02	0,02	82.	2,5%	153.	2,5%	153.	0,03	130.	0,03	143.	3,5%	157.	3,5%	739.	Dinas Koperasi dan UMKM

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Usaha Bagi UMKM																	
		Jumlah pertumbuhan volume penjualan UMKM di pasar modern	0,01	1,2%		1.5%		1,7%		1,8%		0,02		2,2%		2,2%		
14	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase pertambahan tenaga manajer UMKM	0,01	0,01	173.	1,2%	202	1,4%	202.	1,7%	235.	1,8%	258.	0,02	284.	0,02	1.183.	Dinas Koperasi dan UKM
		Persentase pertambahan tenaga pembukuan UMKM	0,01	0,01		1,2%		1,4%		1,7%		1,8%		0,02		0,02		
15	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase industri yang menerapkan teknologi tepat guna	0.30%	0.30%	157.	0.30%	1.571.	0.30%	442.	0.30%	628.	0.50%	646.	0.70%	667.	0,80%	3.956.	Dinas Naker Perin
16	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi padi	37402 ton	37500 ton	1.299.	37750 ton	3.613.	38588 ton	3.613.	40517 ton	3.328.	41543 ton	5.010.	43000 ton	8.383.	43000 ton	23.949	Dinas Pertanian

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Produksi cabe	973,9 ton	980 ton		980 ton		985 ton		985 ton		990 ton		990 ton		990 ton		
		Produksi bawang	-	50 ton		200		400		600		800		1000		1000		
		Produksi Kakao	1092 ton	1095 ton		1020 ton		1095 ton		1100 ton		1170 ton		1230 ton		1230 ton		
		Produksi padi	37402 ton	37500 ton	1.299.433.200	37750 ton	3.613.709.479	38588 ton	3.613.709.479	40517 ton	3.328.525.271	41543 ton	5.010.350.735	43000 ton	8.383.054.912	43000 ton	23.949.349.876	
17	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	100.32	100.38	467.	100.51	339.	100.61	339.	100,73	611	100,8	702	101	807	101	2.800.	Dinas Pertanian
18	Program keluarga berencana	unmeet need	na	11,85	1.683.	11,27	1.834.	11,13	2.051.	11,06	2.256.	10,92	2.482.	10,87	2.730.	10,87	13.039	DP3AP2KB
19	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD	Persentase posyandu dengan strata mandiri	na	10%	766.00	15%	832	20%	915.	25%	1.007	30%	1.108	40%	1.219	40%	5.849.	DP3AP2KB
20	Program Pembangunan saluran drainasi/ gorong-gorong	persentase jalan kota yang memiliki drainase	42,17%	44,46%	12.042.	44,46%	23.179	45,95%	12.078	47,39%	16.042.	48,91%	30.042	50,44%	42.042	50,44%	123.385.	Dinas PU PR

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	persentase irigasi dengan kondisi baik	73,43%	76,34 %	19.003	76,34%	10.902	79,10 %	10.902	81,72 %	10.000.	84,21%	2.121	86,58%	10.000	86,58 %	43.926	Dinas PU PR
22	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang berwirausaha	57	57	396.	59	1.181.	59	1.181.	96	1.900.	101	2.000.	111	2.200.	483	8.462.	Dinas Naker dan Perin
		Jumlah tenaga kerja yang diserap wirausaha	86	86		88		88		143		151		166		722		
23	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	160	160	817	165	2.154.	172	2.154.	219	2.787.	239	3.045.	261	3.325.	1216	13.467 .	Dinas Naker dan Perin
24	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah penurunan angka pemutusan hubungan kerja	8	8	27.	10	564	25	97.	34	3.128	45	8.673	52	8.943.	174	21.407	Dinas Naker dan Perin
	Sasaran 5 : Meningkatnya prestasi atlet	Jumlah Atlet berprestasi tingkat Nasional	4	-	-	7	-	11	-	15	-	18	-	20	-	20	-	

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah cabor yang dapat medali	27	27	4.387.	30	3.180.	30	6.180.	33	4.000.	33	6.300.	35	4.000.	35	23.660	Dinas Parpora
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik	Na	75	10.600	80	2.864.	83	3.164.	85	125	95	198.	97	132.	97	6.484.	Dinas Parpora
3	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sapras olah raga yang dibangun	Na		-	3 bh	250	3 bh	250.	2 bh	120.	3 bh	125.	2	130.	10	875.	Dinas Parpora

6.2. Misi 2 : Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan Dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama.

Peningkatan pemerataan dan pembangunan ekonomi diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pembangunan yang dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut hendaklah memperhatikan antara lain; kondisi ekonomi masyarakat yang ada, potensi sumber daya alam dan manusia, kemampuan daya saing daerah serta infrastruktur yang tersedia. peranan Pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat yaitu; (1) Fungsi alokasi terutama dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, (2) Peranan distribusi dan peranan stabilisasi. Di samping itu perlu upaya bersama antara pemerintah daerah bersama masyarakatnya mengelola semua potensi sumber daya yang tersedia dengan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi ini perlu diwujudkan guna mencapai misi 2 yaitu; 'Membangun perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan dengan berbasis ekonomi kerakyatan dengan memunculkan gerakan ekonomi bersama".

6.2.1. Strategi untuk Misi 2

Untuk mencapai sasaran pada Misi 2, diperlukan strategi sebagai berikut :

1. Mendorong peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian melalui perluasan pangsa pasar dan iklim perdagangan yang kondusif;
2. Mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian melalui peningkatan produksi hasil pertanian strategis;
3. Mendorong peningkatan kontribusi sektor industri melalui peningkatan produktivitas dan daya saing produk industri berbasis sumberdaya lokal;
4. Menumbuh kembangkan industri kepariwisataan yang didukung oleh sektor perdagangan, hotel, restoran, industri dan jasa-jasa usaha lainnya.
5. Mendorong kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi;
6. Mendorong peningkatan skala usaha UMKM melalui penguatan modal UMKM
7. Mendukung tumbuh kembangnya ekonomi kerakyatan melalui penguatan kelembagaan Koperasi

Terkait dengan keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pada Misi 2 dapat dilihat pada Tabel 6.5 berikut :

Tabel 6.5
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Startegi Pada Misi 2

Visi : Payakumbuh Maju, Sejahtera, dan Bermartabat, dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang		
Misi : Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	1. Meningkatkan Produktivitas Sektor Strategis	1. Mendorong peningkatan peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian melalui perluasan pangsa pasar dan iklim perdagangan yang kondusif;
		2. Mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian melalui peningkatan produksi hasil pertanian strategis
		3. Mendorong peningkatan kontribusi sektor industri melalui peningkatan produktivitas dan daya saing produk industri berbasis sumberdaya local
		4. Menumbuh kembangkan industri kepariwisataan yang didukung oleh sektor perdagangan, hotel, restoran, industri dan jasa-jasa usaha lainnya.
	2. Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh	5. Mendorong kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi;
		6. Mendorong peningkatan skala usaha UMKM melalui penguatan modal UMKM;
	3. Meningkatnya Kesejahteraan anggota Koperasi	7. Mendukung tumbuh kembangnya ekonomi kerakyatan melalui penguatan kelembagaan Koperasi

6.2.2. Arah Kebijakan untuk Misi 2

Dalam rangka mengimplementasikan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun, diperlukan arah kebijakan yang menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun.

Arah Kebijakan Pembangunan untuk Misi 2 setiap tahunnya dapat dilihat pada Tabel 6.6. berikut :

Tabel 6.6.
Arah Kebijakan Pembangunan pada Misi 2 Kota Payakumbuh 2017-2022

No	Arah Kebijakan				
	Tahun 2018	**Tahun 2019**	**Tahun 2020**	**Tahun 2021**	**Tahun 2022**
1	2	3	4	5	6
Sasaran 1: Meningkatkan Produktivitas Sektor Strategis					
1.	1. Peningkatan transaksi perdagangan; 2. Peningkatan kelancaran distribusi barang/ jasa; 3. Penguatan kelembagaan petani dan Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian; 4. Peningkatan produktivitas komoditi pertanian strategis; 5. Pembentukan sentra-sentra produksi IKM sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang terintegrasi; 6. Peningkatan kemampuan industri dalam penerapan standarisasi mutu produk; 7. Peningkatan kemampuan manajerial dan SDM pelaku industri; 8. Peningkatan penerapan teknologi industri. 9. Peningkatan kualitas sarana prasarana pariwisata; 10. Membangun kemitraan antar jasa usaha pariwisata; 11. Mengembangkan paket-paket destinasi wisata.	1. Peningkatan volume perdagangan antar daerah; 2. Peningkatan transaksi perdagangan; 3. Peningkatan kelancaran distribusi barang/ jasa; 4. Penguatan kelembagaan petani dan Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian; 5. Peningkatan produktivitas komoditi pertanian strategis; 6. Penerapan sistim pertanian berkelanjutan. 7. Pembentukan sentra-sentra produksi IKM sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang terintegrasi; 8. Peningkatan kemampuan industri dalam penerapan standarisasi mutu produk; 9. Peningkatan kemampuan manajerial dan SDM pelaku industri; 10. Peningkatan penerapan teknologi industri. 11. Peningkatan kualitas sarana prasarana pariwisata; 12. Membangun kemitraan antar jasa usaha pariwisata; 13. Mengembangkan paket-paket destinasi wisata.	1. Peningkatan volume perdagangan antar daerah; 2. Peningkatan transaksi perdagangan; 3. Peningkatan kelancaran distribusi barang/ jasa; 4. Penguatan kelembagaan petani dan Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian; 5. Peningkatan produktivitas komoditi pertanian strategis; 6. Penerapan sistim pertanian berkelanjutan. 7. Pembentukan sentra-sentra produksi IKM sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang terintegrasi; 8. Peningkatan kemampuan industri dalam penerapan standarisasi mutu produk; 9. Peningkatan kemampuan manajerial dan SDM pelaku industri; 10. Peningkatan penerapan teknologi industri. 11. Peningkatan kualitas sarana prasarana pariwisata; 12. Membangun kemitraan antar jasa usaha pariwisata; 13. Mengembangkan paket-paket destinasi wisata.	1. Peningkatan volume perdagangan antar daerah; 2. Peningkatan transaksi perdagangan; 3. Peningkatan kelancaran distribusi barang/ jasa; 4. Penguatan kelembagaan petani dan Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian; 5. Peningkatan produktivitas komoditi pertanian strategis; 6. Penerapan sistim pertanian berkelanjutan. 7. Pembentukan sentra-sentra produksi IKM sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang terintegrasi; 8. Peningkatan kemampuan industri dalam penerapan standarisasi mutu produk; 9. Peningkatan kemampuan manajerial dan SDM pelaku industri; 10. Peningkatan penerapan teknologi industri. 11. Peningkatan kualitas sarana prasarana pariwisata; 12. Membangun kemitraan antar jasa usaha pariwisata; 13. Mengembangkan paket-paket destinasi wisata.	1. Peningkatan volume perdagangan antar daerah; 2. Peningkatan transaksi perdagangan; 3. Peningkatan kelancaran distribusi barang/ jasa; 4. Penguatan kelembagaan petani dan Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian; 5. Peningkatan produktivitas komoditi pertanian strategis; 6. Penerapan sistim pertanian berkelanjutan. 7. Pembentukan sentra-sentra produksi IKM sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang terintegrasi; 8. Peningkatan kemampuan industri dalam penerapan standarisasi mutu produk; 9. Peningkatan kemampuan manajerial dan SDM pelaku industri; 10. Peningkatan penerapan teknologi industri. 11. Peningkatan kualitas sarana prasarana pariwisata; 12. Membangun kemitraan antar jasa usaha pariwisata; 13. Mengembangkan paket-paket destinasi wisata.

No	Arah Kebijakan				
	Tahun 2018	**Tahun 2019**	**Tahun 2020**	**Tahun 2021**	**Tahun 2022**
1	2	3	4	5	6
Sasaran 2: Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh					
	1. Pembentukan BUMD untuk mendorong percepatan pertumbuhan sektor strategis; 2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif; 3. Meningkatkan kualitas pelayan perizinan Usaha. 4. Fasilitasi penguatan modal bagi UKM, dan IKM; 5. Fasilitasi pemasaran produk UMKM.	1. Pembentukan BUMD untuk mendorong percepatan pertumbuhan sektor strategis; 2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif; 3. Meningkatkan kualitas pelayan perizinan Usaha. 4. Fasilitasi penguatan modal bagi UKM, dan IKM; 5. Fasilitasi pemasaran produk UMKM.	1. Pembentukan BUMD untuk mendorong percepatan pertumbuhan sektor strategis; 2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif; 3. Meningkatkan kualitas pelayan perizinan Usaha. 4. Fasilitasi penguatan modal bagi UKM, dan IKM; 5. Fasilitasi pemasaran produk UMKM.	1. Pembentukan BUMD untuk mendorong percepatan pertumbuhan sektor strategis; 2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif; 3. Meningkatkan kualitas pelayan perizinan Usaha. 4. Fasilitasi penguatan modal bagi UKM, dan IKM; 5. Fasilitasi pemasaran produk UMKM.	1. Pembentukan BUMD untuk mendorong percepatan pertumbuhan sektor strategis; 2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif; 3. Meningkatkan kualitas pelayan perizinan Usaha. 4. Fasilitasi penguatan modal bagi UKM, dan IKM; 5. Fasilitasi pemasaran produk UMKM.
Sasaran 3: Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi					
	1. Meningkatkan pembinaan terhadap koperasi.	1. Meningkatkan pembinaan terhadap koperasi.	Meningkatkan pembinaan terhadap koperasi.	Meningkatkan pembinaan terhadap koperasi.	Meningkatkan pembinaan terhadap koperasi.

6.2.3. Program Pembangunan Daerah Misi 2

Program-program prioritas untuk mewujudkan misi 2 adalah:

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
2. Program pemasaran hasil produksi pertanian;
3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan;
4. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan;
5. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan;
6. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;
7. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
8. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan;
10. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan;
11. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan;
12. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
13. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
14. Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
15. Program penataan struktur industri;
16. Program peningkatan kapasitas iptek produksi;
17. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
18. Program peningkatan kemampuan teknologi industri;
19. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial;
20. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
21. Program Pengembangan Olah Raga Rekreasi;
22. Program Pengembangan Kemitraan;
23. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
24. Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
25. Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi;
26. Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi;
27. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah;
28. Program Optimalisasi Pelayanan Publik;
29. Program Perencanaan Penataan ruang;
30. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
31. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
32. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM;
33. Program Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif;
34. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;

Keterkaitan antara Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel 6.7 dibawah ini :

Tabel 6.7.
Keterkaitan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah pada Misi 2 Kota Payakumbuh 2017-2022

Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah
1 Mendorong peningkatan peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian melalui perluasan pangsa pasar dan iklim perdagangan yang kondusif;	1 Peningkatan volume perdagangan antar daerah;	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
		Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan
		Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
	2 Peningkatan transaksi perdagangan.	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
		Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
	3 Peningkatan kelancaran distribusi barang/ jasa;	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
2 Mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian melalui peningkatan produksi hasil pertanian strategis	1 Penguatan kelembagaan petani dan Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian;	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
	2 Peningkatan produktivitas komoditi pertanian strategis;	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
		Program peningkatan produksi hasil peternakan
		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
	3 Penerapan sistim pertanianpangan berkelanjutan.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
3 Mendorong peningkatan kontribusi sektor industri melalui peningkatan produktivitas dan daya saing produk industri berbasis sumberdaya lokal	1 Pembentukan sentra-sentra produksi IKM sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang terintegrasi;	Program penataan struktur industri;
	2 Peningkatan kemampuan industri dalam penerapan standarisasi mutu produk;	Program peningkatan kapasitas iptek produksi
	3 Peningkatan kemampuan manajerial dan SDM pelaku industri;	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
	4 Peningkatan penerapan teknologi industri.	Program peningkatan kemampuan teknologi industri
		Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

4 Menumbuh kembangkan industri kepariwisataan yang didukung oleh sektor perdagangan, hotel, restoran, industri dan jasa-jasa usaha lainnya.	1 Peningkatan kualitas sarana prasarana pariwisata;	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
	2 Membangun kemitraan antar jasa usaha pariwisata;	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
	3 Mengembangkan paket-paket destinasi wisata.	Program pengembangan kemitraan
	4 Menyelenggarakan event –event untuk menarik wisatawan	Program pengelolaan keragaman budaya
		Program pengembangan olah raga rekreasi
		Program pengembangan ekonomi kreatif
5 Mendorong kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi;	1 Pembentukan BUMD untuk mendorong percepatan pertumbuhan sektor strategis;	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi investasi
	2 Menciptakan iklim investasi yang kondusif;	Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah
		Program Perencanaan Penataan ruang
		Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
	3 Meningkatkan kualitas pelayan perizinan Usaha.	Program Optimalisasi Pelayanan Publik
6 Mendorong peningkatan skala usaha UMKM melalui penguatan modal UMKM;	1 Fasilitasi penguatan modal bagi UKM, dan IKM;	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
	2 Fasilitasi pemasaran produk UMKM.	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
7 Mendukung tumbuh kembangnya ekonomi kerakyatan melalui penguatan kelembagaan Koperasi	1 Meningkatkan pembinaan terhadap koperasi.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Keterkaitan antara Misi, Tujuan,Sasaran dan Program Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel 6.8 dibawah ini :

Tabel 6.8
Keterkaitan antara Misi, Tujuan,Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Untuk Misi 2

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	16	18	19
Misi; Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama																		
	Tujuan ; Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	6,08	6,11		6,14		6,20		6,26		6,32		6,38		6,38		
	Sasaran 1 ; Meningkatkan Produktivitas Sektor Strategis	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	23,92	23,92		23,97		24,02		24,07		24,12		24,17		24,17		
		Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	5,64	5,98		6,00		6,02		6,08		6,11		6,12		6,12		
		Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	7,39	7,39		7,42		7,44		7,45		7,46		7,47		7,47		
		Persentase peningkatan kunjungan wisata	27,74	2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		15		
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Volume perdagangan luar negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 ton	300	4 ton	375	6 ton	675	Dinas Koperasi UKM, Dinas Naker &

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	16	18	19
																		Perind
2	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	Persentase fasilitasi pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan	15%	20%	134,7	26%	0	27%	148,2	28%	155,6	29%	164,9	30%	176,5	30%	780,07	Dinas Pertanian
3	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Persentase fasilitasi pemasaran hasil produksi Peternakan	20%	29%	756.5	30%	2.362,9	31%	2.362,9	32%	973,7	34%	1.059,3	35%	1.149,5	35%	7.908,5	Dinas Pertanian
4	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga	50%	55%	350,99	60%	636,1	65%	636,1	70%	838,7	75%	922,6	80%	1.014,80	80%	4.048,5	Dinas Koperasi dan UKM
		Persentase peningkatan jumlah komoditi yg diperdagangkan	2%	3%		3.5%		4%		4.5%		5%		5.5%		5.5%		
5	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Persentase pedagang kaki lima dan asongan yang mematuhi SOP	60%	65%	1.476,2	70%	2.043,5	75%	2.043,5	80%	2.354,3	85%	2.589,8	90%	2.848,7	90%	11.879,9	Dinas Koperasi dan UKM
6	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan	Jumlah kerjasama perdagangan	25	30	9.731,1	31	4.638,6	32	4.638,6	33	4.404,5	34	4.844,9	35	5.329,4	35	23.856,1	Dinas Koperasi dan UKM

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	16	18	19
	Dalam Negri																	
7	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi padi	37.402 Ton	37.500 ton	1.299,4	37.750 ton	3.613,7	38.588 ton	3.613,7	40.517 ton	3.328,5	41.543 ton	5.010,4	43.000 ton	8.383,1	43.000 ton	23.949,5	Dinas Pertanian
		Produksi cabe	973,9 ton	980 ton		980 ton		985 ton		985 ton		990 ton		990 ton		990 ton		
		Produksi bawang merah	-	50 ton		200 ton		400 ton		600 ton		800 ton		1.000 ton		1.000 ton		
		Produksi kakao	1.092 ton	1.095 ton		1.095 ton		1.095 ton		1.100 ton		1.170 ton		1230 ton		1230 ton		
8	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	100.32	100.38	467,8	100.51	339,1	100.61	339,1	100.73	611,9	100.80	702,8	101.00	807,7	101.00	2.800	Dinas Pertanian
9	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Produktivitas padi	5,3 ton/ha	5,5 ton/ha	1.099,1	5.56 ton/ha	1.911,9	5.60 ton/ha	1.911,9	5.69 ton/ha	2.097,7	5.75 ton/ha	2.262,3	6 ton/ha	2.563,2	6 ton/ha	10.747,0	Dinas Pertanian
		Produktivitas cabe	9 ton/ha	10 ton/ha		10.5 ton/ha		10.8 ton/ha		11 ton/ha		11.4 ton/ha		11.7 ton/ha		12 ton/ha		
		Produktivitas bawang	10 ton/ha	12 ton/ha		12.5 ton/ha		12.8 ton/ha		13 ton/ha		14 ton/ha		15 ton/ha		15 ton/ha		
		Produktivitas kakao	1 ton/ha	1,2 ton/ha		1.25 ton/ha		1.3 ton/ha		1.33 ton/ha		1.35 ton/ha		1.4 ton/ha		1,4 ton/ha		
10	Program pemberdayaan	Persentase kelompok	35%	40%	174,5	42%	126,6	45%	126,7	51%	202,4	55%	243	60%	291,5	60%	990,1	Dinas Pertanian

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	16	18	19
	penyuluhpertanian /perkebunan lapangan	tani yang menerapkan anjuran teknologi budidaya																
11	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase angka kematian ternak	0.35%	0.40%	352,1	0.37%	305,7	0.36%	305,7	0.35 %	552	0.35 %	591,2	0.35%	672,8	0.35%	2.427,4	Dinas Pertanian
12	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Populasi sapi (ekor)	5.510	5.620	620,7	5.732	777,9	5.846	5.777,9	5.962	2.963,8	6.081	3.025,1	6.202	3.092,7	6.202	15.637,5	Dinas Pertanian
		Jumlah Produksi Sapi Konsumsi (ton)	922 ton	939 ton		967 ton		996 ton		1036 ton		1.077 ton		1.131 ton		1.131 ton		
13	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Skor PPH Ketersediaan	78.8	87,5	944,2	89	1.565,0	90.5	1.097,5	92	5.171,7	93,5	6.959,1	95	10.182,8	95	24.976,0	Dinas Ketahanan Pangan
14	Program Penataan Struktur Industri	Jumlah produk industri yang mendapat sertifikat SNI	0	0	10.741.3	0	1.106,7	0	1.693,6	1 buah	1.606,7	1 buah	1.693,6	1 buah	2.006,7	3 buah	8.107,5	Dinas Naker dan Perin
15	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Persentase industri yang menerapkan standarisasi mutu produk	1.50%	1.50%	604.9	1.50%	754,8	1.50%	650,5	1.50 %	710	1.50 %	710	1.50%	710.000	1.50%	3.535,3	Dinas Naker dan Perin
16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase promosi produk yang memperoleh umpan balik	0.30%	0.30%	65.5	0.30%	500,0	0.50%	546,4	0.50 %	546,4	0.50 %	546,4	0.50%	546,4	2.60%	2.685,6	Dinas Naker dan Perin

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	16	18	19
17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase industri yang menerapkan teknologi tepat guna	0.30%	0.30%	158.0	0.30%	1.571,0	0.30%	442.7	0.30 %	628.3	0.50 %	647	0.70%	667.3	0,7%	3.956,4	Dinas Naker dan Perin
18	Program Pengembangan Sentra - sentra Industri Potensial	Persentase peningkatan nilai produksi	0	0	0	1.50%	0	1.50%	43.4	2%	0	2.50 %	43.4	3%	0	10.50 %	86.9	Dinas Naker dan Perin
19	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan wisatawan	27,74	2,5	1.298.9	2,5	1.317,8	2,5	1.317,8	2,5	4.156,2	2,5	5.900,0	2,5	9.333,1	15	22.025,1	Dinas Parpora
		Persentase promosi kepariwisataan yang dilaksanakan	40%	50%		50%		55%		65%		75%		80%		80%		
		Rata-rata lama tinggal wisatawan	1.2 hari	1.2 hari		1.25 hari		1.27 hari		1.30 hari		1.40 hari		1.50 hari		1.5 hari		
20	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase objek wisata unggulan dengan kondisi baik	32,5%	32,5%	4.084.9	35%	4.946,8	37%	5.946,8	40%	6.364,4	45%	7.000,9	50%	7.700,9	50%	31.959,9	Dinas Parpora
		Jumlah Pengembangan Destinasi Pariwisata	1 ow	1 ow		2 ow		1 ow		1 ow		1 ow		1 ow		7 ow		
21	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah Kerjasama yang dilakukan dengan	3	3	68	3	220.2	4	220.2	5	647,3	6	712,0	7	783,2	7	2.583,1	Dinas Parpora

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	16	18	19
		pelaku usaha jasa Pariwisata																
22	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah karya ekonomi kreatif yang difasilitas	0	0	0	1	440.7	1	440.7	1	440.7	1	440.7	1	440.7	5	2.203,5	Dinas Parpora
23	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival Budaya	8	8	1.132,8	8	8.21,3	9	8.21,3	11	982,1	12	977,8	15	1.027,2	15	4.629,8	Dinas Parpora
24	Program Pengembangan Olah Raga Rekreasi	Jumlah penyelenggaraan event olah raga rekreasi	5	5	0	5		6	2.000,00	7	2.000,00	8	2.000,00	9	2.000,00	40	8.000,00	Dinas Parpora
	Sasaran 2 ; Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh	Nilai Realisasi Investasi (M)	175,7	195,0		195,0		196,9		198,9		200,9		202,9		202,9		
		Persentase Usaha Kecil Menengah Terhadap UMKM	26,64	27,14		27,64		28,15		28,66		29,18		29,70		29,70		
1	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	jumlah kerjasama investasi	4	8	128.2	8	177	8	177	8	270.9	8	231.7	9	321.2	9	1.177,9	DPM PTSP
		jumlah promosi investasi	2	2		2		5		5		5		5		5		
2	Program	Nilai Realisasi	195.0	195.0	371.7	200.1	427,2	200.70	427.2	215.8	194,7	230.7	214,1	200.75	235,6	1.243,	1.498,	DPM

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	16	18	19
	peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Investasi (Milyar)								6		5				12	9	PTSP
		Jumlah investor	474	474		766		936		1.151		1.321		1.451		1.451		
3	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Persentase peluang investasi yang telah divalidasi	20%	22%	486.8	25%	132,7	27%	145,9	28%	145,9	29%	160,5	29%	176,6	29%	761,8	DPM PTSP
4	Program Perencanaan Penataan ruang	% Tertatanya kawasan pusat kota	0	0	60%	60%	864,149	69%	1.222,46	73%	1.442,92	76%	1.416,09	78%	1.446,62	78%	6.392,23	Dinas PU PR
5	Program optimalisasi pelayanan publik	Nilai Survey kepuasaan masyarakat	82	81.5	0	81.8	911,01	82.20	2.760	82.4	1.500	82.60	1.500	82.80	1.500	82.80	8.171,1	DPM PTSP
		Persentase jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	na	100		100		100		100		100		100		100		
		Persentase layanan PTSP yang memenuhi standar waktu layanan sesuai SOP	100	100		100		100		100		100		100		100		
6	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Indeks Pencemaran Air	-	-	1,3	1,3	1.513,81	1,3	928,28	1,3	1.131,27	1,1	1.200,63	1,1	1.291,03	1,1	6.065,01	Dinas LH

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	16	18	19
7	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	persentase pertumbuhan UMKM	1.2%	1.2%	64,01	1.2%	18,3	1.4%	18,3	1.7%	89,8	1.8%	98.8	2%	108,7	2%	333,9	Dinas Koperasi dan UKM
8	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase peningkatan modal UMKM	2%	2%	82.7	2.5%	153,8	2.5%	153,8	3%	130,4	3%	143,4	3.5%	157,7	3.5%	739,3	Dinas Koperasi dan UKM
		Jumlah pertumbuhan volume penjualan UMKM di pasar modern	1%	1.2%		1.5%		1.7%		1.8%		2%		2.2%		2.2%		
9	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase pertambahan tenaga manajer UMKM	1%	1%	173.9	1.2%	202,3	1.4%	202,3	1.7%	235,2	1.8%	258,7	2%	284,6	2%	1.183,1	Dinas Koperasi dan UKM
		Persentase pertambahan tenaga pembukuan UMKM	1%	1%		1.2%		1.4%		1.7%		1.8%		2%		2%		
	Sasaran 3 : Meningkatnya Kesejahteraan anggota koperasi	Persentase Peningkatan SHU Koperasi			2	4		6		8		10		12		12		
1	Program Peningkatan Kualitas	Persentase penurunan jumlah	5%	5%	174.8	5%	179,3	5%	179,3	5%	246,1	5%	272,9	5%	300,3	25%	1.180,2	Dinas Koperasi dan UKM

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	16	18	19
	Kelembagaan Koperasi	tunggakan																
		Persentase peningkatan koperasi aktif	47,52	47,52		47,80		48		48,20		48,25		49,00		49,00		
		Persentase peningkatan koperasi sehat	11,36	11,40		11,50		11,60		11,70		11,80		11,90		11,90		

6.3. Misi 3 : Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum Yang Nyaman dan Berkelanjutan

Dalam mengoptimalkan pembangunan infrastruktur, Kota Payakumbuh tetap mengacu pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam upaya menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, kualitas dan kuantitas lingkungan hidup yang bersih, serta menyenangkan akan dapat diwujudkan melalui pencegahan pencemaran air, polusi udara, penataan pembangunan yang merata sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Disamping itu, Pemerintah Kota Payakumbuh senantiasa terus berusaha dan berupaya untuk meningkatkan prestasi pemuda dalam berbagai bidang dan aspek, diantaranya adalah prestasi olah raga. Karena itu, pembenahan pada berbagai aspek baik itu prasarana dan sarana, infrastruktur maupun suprastruktur terus menerus dilakukan. Fasilitasi dukungan dan support secara maksimal diberikan kepada organisasi induk olah raga, begitu juga terhadap organisasi cabang olah raga. Berbagai even olah raga, baik itu antar sekolah,antar club dan antar kecamatan serta even antar kelurahan dan bahkan even antar daerah dan nasional perlu diselenggarakan secara kontiniu. Disamping itu, Pemda juga mendorong peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan yang bersih melalui kegiatan Olah Raga Bersepeda.

Penguatan, pengembangan dan pelestarian seni dan kebudayaan lokal, bangunan bersejarah serta benda cagar budaya di Kota Payakumbuh terus digalakkan dalam rangka melestarikan, menjaga dan mengembangkan seni dankebudayaan daerah untuk mempertahankan jati diri dan karaktermasyarakat yang dibangundarinilai-nilai kebudayaan daerah, yaitu budaya alam minangkabau yang religius berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah,yang dapat berperan sebagai benteng kepribadian ditengah marak dan semakin derasnya arus informasi serta kebudayaan global. Penguatan budaya daerah dan kearifan lokal yang mendukung pembangunan daerah. Pemerintah dan masyarakat Kota Payakumbuh memiliki komitmen dan tekad untuk menghidupkan aktivitas yang berakar dari tradisi lokal masyarakat Kota Payakumbuh.

Tujuan dari misi 3 ini adalah : Meningkatkan keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan, dengan sasaran;

1. Meningkatnya kualitas dan Kualitas pemenuhan infrastruktur perkotaan;
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
3. Mewujudkan Perumahan dan pemukiman yang layak.

6.3.1. Strategi untuk Misi 3

Untuk mencapai sasaran pada Misi 3, diperlukan strategi sebagai berikut :

1. Percepatan Pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian;
2. Mendorong peningkatan kualitas udara, air dan tanah melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian;
3. Penataan Kawasan Kumuh perkotaan.

Tabel 6.9
Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pada Misi 3

Visi : Payakumbuh Maju, Sejahtera, dan Bermartabat, dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang		
Misi : Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum yang Nyaman dan Berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan.	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan.	1. Percepatan Pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian.
	2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	2. Mendorong peningkatan kualitas udara, air dan tanah melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian
	3. Mewujudkan Perumahan dan pemukiman yang layak	3. Penataan Kawasan Kumuh perkotaan

6.3.2. Arah Kebijakan untuk Misi 3

Dalam mengimplementasikan strategi yang telah disebutkan diatas, dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum;
2. Meningkatkan persentase panjang jalan dalam kondisi baik.
3. Peningkatkan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan.
4. Mengembangkan trotoar yang nyaman, menerus dan universal;
5. Meningkatkan persentase jalan kota yang memiliki drainase.
6. Meningkatkan Kepatuhan Pembangunan sesuai dokumen tata ruang.
7. Penyempurnaan tata cara perijinan penataan ruang.
8. Meningkatkan Pembangunan Bangunan Gedung sesuai dengan IMB.
9. Pendataan dan Konsolidasi Tanah Eks KTP.
10. Meningkatkan persentase irigasi dalam kondisi baik.
11. Meningkatkan Penataan sungai.
12. Meningkatkan kualitas pengelolaan jaringan irigasi dan bangunan pengairan lainnya.
13. Meningkatkan ketersediaan fasilitas umum perkotaan.
14. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan.
15. Mendorong peningkatan kualitas Lingkungan Hidup melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian.
16. Meningkatkan Usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup.
17. Peningkatkan Persentase cakupan pelayanan persampahan.
18. Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau.
19. Peningkatkan Persentase Rumah Layak Huni.
20. Mengurangi Persentase Luas Kawasan Kumuh.
21. Perencanaan pengembangan kawasan Bukapalipatar.

Arah Kebijakan Pembangunan untuk Misi 3 setiap tahunnya dapat dilihat pada Tabel 6.10. berikut :

Tabel 6.10.
Arah Kebijakan Pembangunan pada Misi 3 Kota Payakumbuh 2017-2022

No	Arah Kebijakan				
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6
1	Mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum;	Mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum;	Mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum;	Mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum;	Mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum;
2	Meningkatkan persentase panjang jalan dalam kondisi baik.	Meningkatkan persentase panjang jalan dalam kondisi baik.	Meningkatkan persentase panjang jalan dalam kondisi baik.	Meningkatkan persentase panjang jalan dalam kondisi baik.	Meningkatkan persentase panjang jalan dalam kondisi baik.
3	Peningkatkan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan.	Peningkatkan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan.	Peningkatkan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan.	Peningkatkan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan.	Peningkatkan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan.
4	Mengembangkan trotoar yang nyaman, menerus dan universal;	Mengembangkan trotoar yang nyaman, menerus dan universal;	Mengembangkan trotoar yang nyaman, menerus dan universal;	Mengembangkan trotoar yang nyaman, menerus dan universal;	Mengembangkan trotoar yang nyaman, menerus dan universal;
5	Meningkatkan persentase jalan kota yang memiliki drainase.	Meningkatkan persentase jalan kota yang memiliki drainase.	Meningkatkan persentase jalan kota yang memiliki drainase.	Meningkatkan persentase jalan kota yang memiliki drainase.	Meningkatkan persentase jalan kota yang memiliki drainase.
6	Meningkatkan Kepatuhan Pembangunan sesuai dokumen tata ruang.	Meningkatkan Kepatuhan Pembangunan sesuai dokumen tata ruang.	Meningkatkan Kepatuhan Pembangunan sesuai dokumen tata ruang.	Meningkatkan Kepatuhan Pembangunan sesuai dokumen tata ruang.	Meningkatkan Kepatuhan Pembangunan sesuai dokumen tata ruang.
7	Penyempurnaan tata cara perijinan penataan ruang.	Penyempurnaan tata cara perijinan penataan ruang.	Penyempurnaan tata cara perijinan penataan ruang.	Penyempurnaan tata cara perijinan penataan ruang.	Penyempurnaan tata cara perijinan penataan ruang.
8	Meningkatkan Pembangunan Bangunan Gedung sesuai dengan IMB.	Meningkatkan Pembangunan Bangunan Gedung sesuai dengan IMB.	Meningkatkan Pembangunan Bangunan Gedung sesuai dengan IMB.	Meningkatkan Pembangunan Bangunan Gedung sesuai dengan IMB.	Meningkatkan Pembangunan Bangunan Gedung sesuai dengan IMB.
9	Pendataan dan Konsolidasi Tanah Eks KTP.	Pendataan dan Konsolidasi Tanah Eks KTP.	Pendataan dan Konsolidasi Tanah Eks KTP.	Pendataan dan Konsolidasi Tanah Eks KTP.	Pendataan dan Konsolidasi Tanah Eks KTP.
10	Meningkatkan persentase irigasi dalam kondisi baik.	Meningkatkan persentase irigasi dalam kondisi baik.	Meningkatkan persentase irigasi dalam kondisi baik.	Meningkatkan persentase irigasi dalam kondisi baik.	Meningkatkan persentase irigasi dalam kondisi baik.
11	Meningkatkan Penataan sungai.	Meningkatkan Penataan sungai.	Meningkatkan Penataan sungai.	Meningkatkan Penataan sungai.	Meningkatkan Penataan sungai.
12	Meningkatkan kualitas pengelolaan jaringan irigasi dan bangunan pengairan lainnya.	Meningkatkan kualitas pengelolaan jaringan irigasi dan bangunan pengairan lainnya.	Meningkatkan kualitas pengelolaan jaringan irigasi dan bangunan pengairan lainnya.	Meningkatkan kualitas pengelolaan jaringan irigasi dan bangunan pengairan lainnya.	Meningkatkan kualitas pengelolaan jaringan irigasi dan bangunan pengairan lainnya.
13	Peningkatkan Persentase cakupan pelayanan persampahan.	Meningkatkan ketersediaan fasilitas umum perkotaan.	Meningkatkan ketersediaan fasilitas umum perkotaan.	Meningkatkan ketersediaan fasilitas umum perkotaan.	Peningkatkan Persentase cakupan pelayanan persampahan.
14	Mendorong peningkatan kualitas Lingkungan Hidup melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan.	Peningkatkan Persentase cakupan pelayanan persampahan.	Mendorong peningkatan kualitas Lingkungan Hidup melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian.
15	Meningkatkan Usaha yang	Peningkatkan Persentase cakupan	Peningkatkan Persentase cakupan	Mendorong peningkatan kualitas	Meningkatkan Usaha yang

No	Arah Kebijakan				
	Tahun 2018	**Tahun 2019**	**Tahun 2020**	**Tahun 2021**	**Tahun 2022**
1	2	3	4	5	6
	memenuhi baku mutu lingkungan hidup.	pelayanan persampahan.	pelayanan persampahan.	Lingkungan Hidup melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian.	memenuhi baku mutu lingkungan hidup.
16	Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau.	Mendorong peningkatan kualitas Lingkungan Hidup melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian.	Mendorong peningkatan kualitas Lingkungan Hidup melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian.	Meningkatkan Usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup.	Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau.
17	Peningkatkan Persentase kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).	Meningkatkan Usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup.	Meningkatkan Usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup.	Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau.	Peningkatkan Persentase kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
18	Penataan Kawasan Kumuh perkotaan melalui penyediaan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.	Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau.	Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau.	Peningkatkan Persentase kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).	Penataan Kawasan Kumuh perkotaan melalui penyediaan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
19	Peningkatkan Persentase rumah bersanitasi layak.	Peningkatkan Persentase kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).	Peningkatkan Persentase kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).	Penataan Kawasan Kumuh perkotaan melalui penyediaan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.	Peningkatkan Persentase rumah bersanitasi layak.
20	Perencanaan pengembangan kawasan Bukapalipatar.	Penataan Kawasan Kumuh perkotaan melalui penyediaan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.	Penataan Kawasan Kumuh perkotaan melalui penyediaan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.	Peningkatkan Persentase rumah bersanitasi layak.	Perencanaan pengembangan kawasan Bukapalipatar.
21		Peningkatkan Persentase rumah bersanitasi layak.	Peningkatkan Persentase rumah bersanitasi layak.	Perencanaan pengembangan kawasan Bukapalipatar.	
22		Perencanaan pengembangan kawasan Bukapalipatar.	Perencanaan pengembangan kawasan Bukapalipatar.		

6.3.3. Program Pembangunan Daerah Misi 3

Program-program prioritas untuk mewujudkan misi 3 adalah :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah
2. Program perluasan dan peningkatan sambungan rumah (SR)
3. Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan
4. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
5. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan
6. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
7. Program perencanaan penataan ruang
8. Program pemanfaatan ruang
9. Program pengendalian pemanfaatan ruang
10. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
11. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan danPenggunaan Pemanfaatan Tanah
12. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
13. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
14. Program Pembangunan Turab/Talud/Bronjong
15. Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
16. Program Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi
17. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
18. Rogram Pembangunan Fasilitas Umum
19. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
20. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
21. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
22. Program peningkatan pengendalian polusi
23. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
24. Program pengembangan perumahan
25. Program lingkungan sehat perumahan
26. Program Peningkatan Kesiaggaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
27. Program kerjasama pembangunan antar daerah

Keterkaitan antara Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel 6.11. dibawah ini :

Tabel 6.11
Keterkaitan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah pada Misi 3 Kota Payakumbuh 2017-2022

Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah
1. Percepatan Pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian.	1. Mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum;	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
		Program perluasan dan peningkatan sambungan rumah (SR)
	2. Meningkatkan persentase panjang jalan dalam kondisi baik.	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan

	3. Peningkatkan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan
	4. Mengembangkan trotoar yang nyaman, menerus dan universal;	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
	5. Meningkatkan persentase jalan kota yang memiliki drainase.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
	6. Meningkatkan Kepatuhan Pembangunan sesuai dokumen tata ruang.	Program perencanaan penataan ruang
		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
	7. Penyempurnaan tata cara perijinan penataan ruang.	Program pemanfaatan ruang
	8. Meningkatkan Pembangunan Bangunan Gedung sesuai dengan IMB.	Program pengendalian pemanfaatan ruang
	9. Pendataan dan Konsolidasi Tanah Eks KTP.	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan danPenggunaan Pemanfaatan Tanah
	10. Meningkatkan persentase irigasi dalam kondisi baik.	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
	11. Meningkatkan Penataan sungai.	Program Pembangunan Turab/Talud/Bronjong
	12. Meningkatkan kualitas pengelolaan jaringan irigasi dan bangunan pengairan lainnya.	Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
	13. Meningkatkan ketersediaan fasilitas umum perkotaan.	Rogram Pembangunan Fasilitas Umum
	14. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
	15. Perencanaan pengembangan kawasan Bukapalipatar	Program kerjasama pembangunan antar daerah
2. Mendorong peningkatan kualitas udara, air dan tanah melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian	1. Mendorong peningkatan kualitas Lingkungan Hidup melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian.	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
	2. Meningkatkan Usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
	3. Peningkatkan Persentase cakupan pelayanan persampahan.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
	4. Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau.	Program peningkatan pengendalian polusi
		Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
3. Penataan Kawasan Kumuh perkotaan	1. Mengurangi Persentase Luas Kawasan Kumuh.	Program pengembangan perumahan
		Program lingkungan sehat perumahan
		Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan
		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
		Program Peningkatan Kesiaggaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
		Program Peningkatan Kesiaggaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel 6.12. dibawah ini :

Tabel 6.12.
Keterkaitan antara Misi, Tujuan,Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Untuk Misi 3

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact /outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Misi : Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur Dan Fasilitas Umum Yang Nyaman Dan Berkelanjutan																		
	Tujuan : Meningkatkan keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Persentase Pemenuhan sarana prasarana sesuai dengan pelayanan minimum														100		
	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan	Persentase pelayananair minum	94.41	94.41		96,71		98,8		99,02		99,67		100		100		
		Persentase panjang jalan status Kota dalam kondisi mantap	66.56	66.56		69,31		72,06		74,81		77,56		80,31		80,31		
		Persentase sistem drainase berskala kota	42,17	42,17		44,46		45,95		47,39		48,91		50,44		50,44		
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	78,60	78,60		78,90		79,20		79,50		79,80		80,10		80,10		
		Persentase daerah irigasi berkinerja baik	73,43	73,43		76,34		79,1		81,72		84,21		86,58		86,58		

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact /outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan	72,22	72,22		77,78		83,33		88,89		94,44		94,44		94,44		
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	Persentase rumah yang terlayani air minum perpipaan	91,61 %	91,61%	626.500,00	92,30%	863	92,97%	947	93,62%	1.041	94,26%	1.145	94,89%	1.260	94,89 %	5.258	DPUPR
2	Program perluasan dan peningkatan sambungan rumah (SR)	Persentase rumah yang terlayani air minum perpipaan	91,61 %	91,61%		92,30%	856	92,97%	-	93,62%	-	94,26%	-	94,89%	-	94,89 %	856	DPUPR
3	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	persentase Panjang jalan dengan kondisi mantap	66,56 %	66,56%	2.492,70	66,56%	8,930	69,31%	12,00	72,06%	12,00	74,81%	20,000	80,31%	25,000	80,31 %	77,930	DPUPR
4	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	persentase Panjang jalan dengan kondisi mantap	65,56 %	66,56%	31,774	66,56%	13,179	69,31%	15,000	72,06%	25,000	74,81%	25,610	80,31%	30,000	80,31 %	108,790	DPUPR
5	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	persentase Panjang jalan dengan kondisi mantap	66,56 %	66,56%	446.297,60	66,56%	685	69,31%	350	72,06%	300	74,81%	3.00	80,31%	300	80,31 %	1,588	DPUPR
6	Program Pembangunan saluran drainasi/ gorong-gorong	persentase jalan kota yang memiliki drainase	42,17 %	44,46%	12,042 -	44,46%	23,179	45,95%	12,078	47,39%	16,042	48,91%	30,042	50,44%	42,042	50,44 %	123,384	Dinas PU PR
7	Program Perencanaan Penataan ruang	% Tertatanya kawasan pusat kota	55,00 %	60%	219	60%	864,149	69%	1.222,46	73%	1.442,92	76%	1.416,09	78%	1.446,62	78%	6.392,23	Dinas PU PR
8	Program pemanfaatan ruang	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	13%	13%	196.70	13%	509	18%	478	19%	502	21%	528	23%	339	23%	2.092	DPUPR

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact /outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		keseluruhan																
9	Program pengendalian pemanfaatan ruang	Rasio Ruang Terbuka Hijau	39,31	40,31	167.66	40,31	367	42,44	486	42,46	396	42,48	424	42,50	424	42,50	2,980	DPUPR
10	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase Kepatuhan Pembangunan sesuai dokumen tata ruang	30,60 %	31,32%	1.301,75	31,32%	1,503	32,02%	1,726	32,74%	1,503	33,46%	2,503	34,18%	3,503	34,18 %	9,185	DPUPR
11	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Pemanfaatan Tanah	Persentase sertifikasi aset dan bangunan Pemko	-	-	-	58,18	29	59,55	100	61,36	100	62,27	100	63,64	100	63,64	429	DPUPR
12	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Kasus konflik tanah yang tertangani	-	-	-	-	-	-	-	2 kasus	100	2 kasus	100	2 kasus	100	2 kasus	300	DPUPR
13	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	persentase irigasi dengan kondisi baik	73,43 %	76,34%	19,003	76,34%	10,902	79,10%	10.902,594	81,72%	10,000	84,21%	10.121,469	86,58%	10,000	86,58 %	31.599,878	Dinas PU PR
14	Program Pembangunan Turab/Talud/Bronjong	Persentase Penataan sungai	15,44 %	18,56%	681.889,00	18,56%	991	21,69%	991	23,52%	991	24,81%	991	26,37%	991	26,37 %	4,957	DPUPR
15	Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber	Persentase Penataan sungai	15,44 %	15,44%	13.513,76	15,44%	8,943	15,44	6.375	15,44	8.375	15,44	12,375	15,44	15,143 -	15,44	51,212	DPUPR

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact /outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	daya air lainnya																	
16	Program Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	Persentase Kepatuhan Pembangunan sesuai dokumen tata ruang	30,60 %	31,32%	125.93	31,32%	260	32,02%	295	32,74%	331	33,46%	370	34,18%	411	34,18 %	1.668	DPUPR
17	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	-	-	-			83,33 %	25,000	88,89 %	1,000	94,49 %	1,000	94,4 %	1,000	98,89 %	28,000	DISHUB
18	Rogram Pembangunan Fasilitas Umum	Persentase Ketersediaan fasilitas umum	66,66 %	72,22%	-	77,78%		83,33%	6.000	88,89%	400	94,44%	10.000	94,44%	22,000	94,44 %	14.400	DPUPR
19	Program kerjasama pembangunan antar daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan	90	91	122.8	92	109.1	94	119.9	96	131.9	98	145.1	100	159.6	100	665.6	Bappeda
	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56,5	56,5		57		57,25		57,5		57,75		58		58		
1	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Indeks Pencemaran Air	1,3	1,3	799	1,3	1.513,81	1,3	928,28	1,3	1.131,27	1,1	1.200,63	1,1	1.291,03	1,1	6.065,01	Dinas LH
2	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup	70	70	46	70	3,880	72	6,579	74	5,614	76	5,160	78	6.630	78	27,764	DLH
3	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya	Persentase Usaha yang memenuhi baku mutu	70	70	96	70	108	72	113	74	125	76	127	78	135	78	609	DLH

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact /outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Alam dan Lingkungan Hidup	lingkungan hidup																
4	Program peningkatan pengendalian polusi	Indeks Pencemaran Air	1,3	1,3	24,63	1,3	518	1,3	742	1,3	945	1,1	1.150	1,1	1.362	1,1	4.720	DLH
5	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase RTH Publik	15,45	15,45	2.482,43	15,91	434	16,25	5,723	16,50	4,543	16,75	3,882	17,00	5.032	17,00	3.754	DLH
	Sasaran 3 : Mewujudkan Perumahan dan pemukiman yang layak	Persentase luas kawasan kumuh	1,77	1,77		1,77		1,62		1,47		1,32		1,17		1,17		
1	Program pengembangan perumahan	Persentase rumah layak huni	91,70	91,70	16.175,75	92,95	5.641	93,81	6.486	94,87	5.929	95,92	5.857	96,98	5.947	96,98	29.863.	DPRKP
2	Program lingkungan sehat perumahan	Persentase rumah bersanitasi layak	40,31	40,31	5.718,58	13,3	3.300	13%	3.317	13%	4.201	13%	5.120	13%	4.541	13%	20.479	DPRKP
3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan pelayanan persampahan	88,20 %	88,20%	1.639,22	89,71%	2.797	91,22%	1.816	92,74%	1.941	94,25%	2.078	95,76%	2.270	95,76 %	10.904	DLH
4	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	persentase Panjang jalan dengan kondisi mantap	66,56 %	66,56%	2.492,70	66,56%	5.930	69,31%	6.825	72,06%	275	74,81%	10.000	80,31%	-	80,31 %	33.030	DPUPR
5	Program Pembangunan saluran drainasi/ gorong-gorong	persentase jalan kota yang memiliki drainase	42,17 %	44,46%	12,042 -	44,46%	23,179	45,95%	12,078	47,39%	16,042	48,91%	30,042	50,44%	42,042	50,44 %	123,384	Dinas PU PR
6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	Persentase rumah yang terlayani air minum perpipaan	91,61 %	91,61%	626.500,00	92,30%	863	92,97%	947	93,62%	1.041	94,26%	1.145	94,89%	1.260	94,89 %	5.258	DPUPR
7	Program perluasan dan	Persentase rumah	91,61	91,6		92,3	856	92,9	-	93,6	-	94,2	-	94,8	-	94,89	856	DPUPR

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact /outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	peningkatan sambungan rumah (SR)	yang terlayani air minum perpipaan	%	1%		0%		7%		2%		6%		9%		%		
8	Program Peningkatan Kesiaggaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	120%	124,33%	2.409.45	124,33%	3,339	124,33%	5,462	124,33%	4,074	124,33%	4.124	124,33%	4.179	124,33%	21,179	Pol PP Damkar

6.4. Misi 4 : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang salah satu tujuannya adalah peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan inovasi dalam bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat. Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip :

a. Peningkatan efisiensi, diarahkan kepada penggunaan sumber daya minimal dalam mencapai hasil pelayanan inovatif yang optimal.
b. Perbaikan efektifitas, dengan lebih memfokuskan pada ketepatan solusi dan sasaran atas permasalahan daerah yang ada.
c. Perbaikan kualitas pelayanan, dengan mengedepankan kepuasan pelanggan/masyarakat;
d. Tidak ada konflik kepentingan, dimana inovasi lahir berdasarkan konsensus dan partisipasi seluruh elemen yang berkepentingan;
e. Berorientasi kepada kepentingan umum, dengan mengedepankan kepada layanan publik yang lebih baik.
f. Dilakukan secara terbuka, dimana pemerintah daerah selalu aktif dalam mempublikasikan segala tindakan atas inovasi daerah.
g. Memenuhi nilai-nilai kepatutan,
h. Secara Akuntabel dapat dipertanggung jawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.
i. Jabaran atas visi yang strategis dalam peningkatan layanan publik agar dapat berkelanjutan.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih tersebut dapat dilakukan melalui sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial, lingkungan dan ekonomi. Prasyarat minimal untuk mencapai pemerintahan yang baik adalah adanya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel. Kebijakan pemerintah dalam hal ini harus transparan, efektif, efisien serta mampu menjawab ketentuan dasar keadilan. Sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus melibatkan masyarakat dalam setiap jenjang proses pengambilan keputusan. Dalam pelaksanaanya dapat mengacu kepada proses pencapaian keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Tata kelola pemerintahan yang baik juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan proses pembangunan pada akhirnya mampu menciptakan aparatur yang bersih dan profesional yang diiringi dengan peningkatan pelayanan publik.

Dalam mewujudkan Misi ke-4 tentang Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih, strategi dan arah kebijakan yang yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

6.4.1. Strategi untuk Misi 4

Sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya bahwa tujuan yang akan dicapai pada misi ke-4 adalah Meningkatnya Profesionalisme Birokrasi dengan sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintahan. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, maka strategi yang perlu dilakukan adalah :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah
3. Mengembangkan pemanfaatan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan(*e-Government*)
4. Meningkatkan kualitas aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik
5. Meningkatkan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam layanan publik
6. Meningkatkan fasilitasi dalam menunjang keamanan, ketertibandan ketenteraman masyarakat
7. Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal serta pengawasan masyarakat dan ketegasan tindaklanjut hasil pengawasan
8. Melakukan penguatan kelembagaan dan kompetensi aparatur pengadaan barang dan jasa
9. Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik

Selanjutnya, hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi dapat dilihat pada tabel 6.13 berikut :

Tabel 6.13
Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pada Misi ke-4

Visi : Payakumbuh Maju, Sejahtera, dan Bermartabat, dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang		
Misi	Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya profesionalisme birokrasi	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintahan	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah
		2. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah
		3. Mengembangkan pemanfaatan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan(*e-Government*)
		4. Meningkatkan kualitas aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik
		5. Meningkatkan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam layanan publik
		6. Meningkatkan fasilitasi dalam menunjang keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat
		7. Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal serta pengawasan masyarakat dan ketegasan tindaklanjut hasil pengawasan
		8. Melakukan penguatan kelembagaan dan kompetensi aparatur pengadaan barang dan jasa
		9. Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik

6.4.2. Arah Kebijakan untuk Misi 4

Kemudian untuk mencapai strategi di atas, maka arah kebijakan yang perlu menjadi acuan adalah :

1. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Pemantapan pengelolaan keuangan daerah, termasuk pendapatan, pengelolaan barang milik daerah dan akuntansi pemerintahan berbasis akrual;
3. Pengembangan dan optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
4. Peningkatan kualitas aparatur pelayanan, peningkatan kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani;
5. Peningkatan pengelolaan manajemen kepegawaian melalui proses rekruitmen yang sesuai dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah, mutasi dan promosi sesuai dengan kompetensinya, serta kejelasan pengembangan karir aparatur;
6. Penyediaan sarana keterpaduan pelayanan publik;
7. Peningkatan penerapan Sistem Inovasi Daerah;
8. Peningkatan fasilitasi penegakan Perda untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
9. Peningkatan pembinaan dan pengawasan aparatur;
10. Peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan independensi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP);
11. Peningkatan kualitas impelementasi sistem *e-procurement*;
12. Peningkatan transparansi melalui pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
13. Mendukung komitmen kerjasama antar daerah dalam bentuk sekretariat bersama perencanaan pengembangan kawasana BUKAPALIPATAR.

Arah Kebijakan Pembangunan untuk Misi 4 setiap tahunnya dapat dilihat pada Tabel 6.14. berikut :

Tabel 6.14.
Arah Kebijakan Pembangunan pada Misi 4 Kota Payakumbuh 2017-2022

No	Arah Kebijakan				
	Tahun 2018	**Tahun 2019**	**Tahun 2020**	**Tahun 2021**	**Tahun 2022**
1	2	3	4	5	6
	1. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 2. Pemantapan pengelolaan keuangan daerah, termasuk pendapatan, pengelolaan barang milik daerah dan akuntansi pemerintahan berbasis akrual; 3. Pengembangan dan optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; 4. Peningkatan kualitas aparatur pelayanan, peningkatan kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani; 5. Peningkatan pengelolaan manajemen kepegawaian melalui proses rekruitmen yang sesuai dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah, mutasi dan promosi sesuai dengan kompetensinya, serta kejelasan pengembangan karir aparatur; 6. Peningkatan penerapan Sistem Inovasi Daerah; 7. Peningkatan fasilitasi penegakan Perda untuk menciptakan keamanan,	1. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 2. Pengembangan dan optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; 3. Peningkatan kualitas aparatur pelayanan, peningkatan kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani; 4. Peningkatan pengelolaan manajemen kepegawaian melalui proses rekruitmen yang sesuai dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah, mutasi dan promosi sesuai dengan kompetensinya, serta kejelasan pengembangan karir aparatur; 5. Penyediaan sarana keterpaduan pelayanan publik; 6. Pemantapan pengelolaan keuangan daerah, termasuk pendapatan, pengelolaan barang milik daerah dan akuntansi pemerintahan berbasis akrual; 7. Peningkatan penerapan Sistem Inovasi Daerah; 8. Peningkatan fasilitasi penegakan Perda untuk	1. Penyediaan sarana keterpaduan pelayanan publik; 2. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 3. Pengembangan dan optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; 4. Peningkatan kualitas aparatur pelayanan, peningkatan kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani; 5. Pemantapan pengelolaan keuangan daerah, termasuk pendapatan, pengelolaan barang milik daerah dan akuntansi pemerintahan berbasis akrual; 6. Peningkatan pengelolaan manajemen kepegawaian melalui proses rekruitmen yang sesuai dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah, mutasi dan promosi sesuai dengan kompetensinya, serta kejelasan pengembangan karir aparatur; 7. Peningkatan penerapan Sistem Inovasi Daerah dalam	1. Pengembangan dan optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; 2. Pemantapan pengelolaan keuangan daerah, termasuk pendapatan, pengelolaan barang milik daerah dan akuntansi pemerintahan berbasis akrual; 3. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 4. Peningkatan penerapan Sistem Inovasi Daerah; 5. Peningkatan kualitas aparatur pelayanan, peningkatan kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani; 6. Peningkatan pengelolaan manajemen kepegawaian melalui proses rekruitmen yang sesuai dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah, mutasi dan promosi sesuai dengan kompetensinya, serta kejelasan pengembangan karir aparatur; 7. Penyediaan sarana keterpaduan pelayanan publik; 8. Peningkatan fasilitasi	1. Peningkatan kualitas aparatur pelayanan, peningkatan kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani; 2. Peningkatan penerapan Sistem Inovasi Daerah; 3. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 4. Pengembangan dan optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; 5. Pemantapan pengelolaan keuangan daerah, termasuk pendapatan, pengelolaan barang milik daerah dan akuntansi pemerintahan berbasis akrual; 6. Peningkatan pengelolaan manajemen kepegawaian melalui proses rekruitmen yang sesuai dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah, mutasi dan promosi sesuai dengan kompetensinya, serta kejelasan pengembangan karir aparatur;

No	Arah Kebijakan				
	Tahun 2018	**Tahun 2019**	**Tahun 2020**	**Tahun 2021**	**Tahun 2022**
1	2	3	4	5	6
	ketertiban dan ketenteraman masyarakat; 8. Penyediaan sarana keterpaduan pelayanan publik; 9. Peningkatan pembinaan dan pengawasan aparatur; 10. Peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan independensi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP); 11. Peningkatan kualitas impelementasi sistem *e-procurement*; 12. Peningkatan transparansi melalui pengelolaan dan pelayanan informasi public 13. Mendukung komitmen kerjasama antar daerah dalam bentuk sekretariat bersama perencanaan pengembangan kawasana BUKAPALIPATAR.	menciptakan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat; 9. Peningkatan pembinaan dan pengawasan aparatur; 10. Peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan independensi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP); 11. Peningkatan kualitas impelementasi sistem *e-procurement*; 12. Peningkatan transparansi melalui pengelolaan dan pelayanan informasi publik 13. Mendukung komitmen kerjasama antar daerah dalam bentuk sekretariat bersama perencanaan pengembangan kawasana BUKAPALIPATAR.	layanan publik; 8. Peningkatan fasilitasi penegakan Perda untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat; 9. Peningkatan pembinaan dan pengawasan aparatur; 10. Peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan independensi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP); 11. Peningkatan kualitas impelementasi sistem *e-procurement*; 12. Peningkatan transparansi melalui pengelolaan dan pelayanan informasi public 13. Mendukung komitmen kerjasama antar daerah dalam bentuk sekretariat bersama perencanaan pengembangan kawasana BUKAPALIPATAR.	penegakan Perda untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat; 9. Peningkatan pembinaan dan pengawasan aparatur; 10. Peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan independensi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP); 11. Peningkatan kualitas impelementasi sistem *e-procurement*; 12. Peningkatan transparansi melalui pengelolaan dan pelayanan informasi public 13. Mendukung komitmen kerjasama antar daerah dalam bentuk sekretariat bersama perencanaan pengembangan kawasana BUKAPALIPATAR.	7. Penyediaan sarana keterpaduan pelayanan publik; 8. Peningkatan fasilitasi penegakan Perda untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat; 9. Peningkatan pembinaan dan pengawasan aparatur; 10. Peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan independensi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP); 11. Peningkatan kualitas impelementasi sistem *e-procurement*; 12. Peningkatan transparansi melalui pengelolaan dan pelayanan informasi public 13. Mendukung komitmen kerjasama antar daerah dalam bentuk sekretariat bersama perencanaan pengembangan kawasana BUKAPALIPATAR.

6.4.3. Program Pembangunan Daerah

Program-program prioritas untuk mewujudkan misi 4 adalah :

1. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
2. Program penyelenggaraan pemerintahan umum dan perangkat daerah
3. Program Penataan kelembagaan dan organisasi daerah
4. Program Perencanaan pembangunan sosial budaya
5. Program Perencanaan pembangunan ekonomi
6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
7. Program Peningkatan pengendalian administrasi pembangunan
8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
9. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
10. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
11. Program Optimalisasi Pelayanan Publik
12. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
13. Program pengembangan inovasi daerah
14. Program pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal
15. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
16. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
17. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
18. Program pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi
19. Program pengembangan komunikasi,informasi dan media massa
20. Program kerjasama pembangunan antar daerah

Keterkaitan antara Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel 6.15 dibawah ini :

Tabel 6.15.
Keterkaitan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah pada Misi 4 Kota Payakumbuh 2017-2022

Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah	1. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);	1. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
		2. Program penyelenggaraan pemerintahan umum dan perangkat daerah
		3. Program Penataan kelembagaan dan organisasi daerah
		4. Program Perencanaan pembangunan sosial budaya
		5. Program Perencanaan Pembangunan ekonomi
		6. Program kerjasama pembangunan antar daerah
2. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan	1. Pemantapan pengelolaan keuangan daerah, termasuk pendapatan, pengelolaan	1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

aset daerah	barang milik daerah dan akutansi pemerintahan berbasis akrual.;	
		2. Program Peningkatan pengendalian administrasi pembangunan
3. Mengembangkan pemanfaatan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan(*e-Government*)	1. Pengembangan dan optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
4. Meningkatkan kualitas aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik	1. Peningkatan kualitas aparatur pelayanan, peningkatan kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani;	1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	2. Peningkatan pengelolaan manajemen kepegawaianmelalui proses rekruitmen yang sesuai dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah, mutasi dan promosi sesuai dengan kompetensinya, serta kejelasan pengembangan karir aparatur;	1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
	3. Penyediaan sarana keterpaduan pelayanan publik	1. Program Optimalisasi Pelayanan Publik
		2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
5. Meningkatkan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam layanan publik	1. Peningkatan Penerapan Sistem Inovasi Daerah.	1. Program pengembangan inovasi daerah
6. Meningkatkan fasilitasi dalam menunjang keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat	1. Peningkatan fasilitasi penegakan Perda untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat	1. Program pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal
7. Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal serta pengawasan masyarakat dan ketegasan tindaklanjut hasil pengawasan	1. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Aparatur;	1. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
	2. Peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan independensi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP);	1. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
		2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
8. Melakukan penguatan kelembagaan dan kompetensi aparatur pengadaan barang dan jasa	2. Peningkatan kualitas implementasi sistem *e-procurement*;	1. Program pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi
9. Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik	2. Peningkatan transparansi melalui pengelolaan dan pelayanan informasi publik;	1. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

Keterkaitan antara Misi, Tujuan,Sasaran dan Program Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel 6.16 dibawah ini :

Tabel 6.16
Keterkaitan antara Misi, Tujuan,Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Untuk Misi 4

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/out come)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17
	Misi : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih.																	
	Tujuan: Meningkatnya Profesionalisme Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)														81,85		
	Sasaran: Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan.	Nilai Evaluasi AKIP Kota	B	BB		BB		A		A		A		A		A		
		Opini BPK	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
		Persentase Perangkat Daerah yang telah terintegrasi TI	0	9,68		29,03		45,16		64,52		100		100		100		
		IKM	78,39	79,35		79,85		80,35		80,75		81,35		81,85		81,85		
		Indeks Reformasi Birokrasi	NA	45		50		55		60		65		70		70		
1	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP	B	BB	2.285	BB	2.285,6	A	2.595,9	A	2.758,4	A	2.808,5	A	3.133,3	A	13.581,7	Seluruh PD
2	Program penyelenggaraan pemerintahan umum dan perangkat daerah	Nilai IKM	78,39	79,35	6.294	79,85	6.999,77	80,35	8.612,77	80,75	8.968,6	81,35	8.520,32	81,85	8.775,42	81,85	41.876,9	Bag. Pemerintahan & Seluruh kecamatan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17
3	Program Penataan kelembagaan dan organisasi daerah	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk Sesuai Perundang-undangan	100	100	497,61	100	104,8	100	169,91	100	186,9	100	205,59	100	226,15	100	893,36	Setdako
4	Program Perencanaan pembangunan sosial budaya	Persentase OPD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	100	100	196	100	198,34	100	218,17	100	239,99	100	263,99	100	290,39	100	1.210,88	Bappeda
5	Program Perencanaan Pembangunan ekonomi	Persentase OPD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	100	100	158	100	68,01	100	74,81	100	82,29	100	90,52	100	99,57	100	415,21	Bappeda
6	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	4.846	WTP	6.592,05	WTP	7.067,37	WTP	7.265,59	WTP	8.514,36	WTP	13.133,74	WTP	42.573,12	BKD
7	Program Peningkatan pengendalian administrasi pembangunan	Persentase pengelola kegiatan yang tertib Administrasi sesuai	87	87	90	190,5	93,29	92,5	150	94,5	170	95,0	150	96,5	175	97,5	738,29	Setdako

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17
		aturan																
8	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	0	20	3.151	40	3.021,68	50	4.402,05	60	3.428,04	70	3.257,51	85	3.267,51	85	17.196,66	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat teknis kompetensi	38,92	38,92	1.152	42,92	847	42,92	932	42,92	1.025	42,92	1.127	42,92	644	42,92	4.574	BKPSDM
10	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensi	80	80	1.769	80	656	80	722	80	794	80	873	80	696.	80	3.742	BKPSDM
11	Program Optimalisasi Pelayanan Publik	Nilai Survey kepuasaan masyarakat	80	82	-	82	911	82,2	2.760	82,4	1.500	82,6	1.500	82,8	1.500	82,8	8.171	DPM PTSP
12	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi (Milyar)	192,4	195	371	196,9	427,2	198,9	427,2	200,9	194,7	202,9	214,1	204,9	235,6	204,9	1.498,9	DPM PTSP
13	Program pengembangan inovasi daerah	Persentase hasil penelitian yang	50	50	-	50	146	75	161	75	177	80	195	85	215	85	897	Bappeda

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17
		ditindak lanjuti stakeholder																
14	Program pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan tindak criminal	Penegakan Perda	100%	100 %	3.343	100 %	4.981	100 %	5.261	100 %	7.845	100 %	7.874	100 %	8.874	100%	34.837	Satpol PP & Damkar
15	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Indeks Reformasi Birokrasi	80	85,00	502	90,00	502	95	617	100	617	100,00	617	100	717	100	3.574	Inspektorat
16	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan ProsedurPengawasan	Persentase OPD yang taat terhadap hasil pembinaan pengawasan yang lebih komprehensif	60	60	72	70	502	80	617	90	617	100	617	100	717	100	3.143	Inspektorat
17	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Persentase OPD yang akuntabilitas kinerjanya meningkat per tahun	19,35	19,35	1.037	38,7	980	58,06	1.078	77,42	1.186	100	1.034	100	1.953	100	7.268	Inspektorat
18	Program pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi	Persentase tertib administrasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah	95	95	890	95	821,48	95	1.090	96	1.030	97	1.030	98	1.050	98	5.021,48	Setdako

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17
19	Program kerjasama informasi dan media massa	Persentase Perangkat Daerah yang mempublikasikan informasi pembangunan pada masyarakat	15	20	1.468	40	1.521	50	1.872	60	1.817	70	1.847	85	1.978	85	9.037	Dinas Kominfo
20	Program kerjasama pembangunan antar daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan	90	91	122.8	92	109.1	94	119.9	96	131.9	98	145.1	100	159.6	100	665.6	Bappeda

6.5. Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Dan Berbudaya Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

Lembaga masyarakat adat lokal merupakan sistem organisasi kemasyarakatan asli yang telah ada secara turun temurun yang dibentuk untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan tidak termasuk ke dalam lembaga pemerintahan vertikal. Yang termasuk ke dalam lembaga masyarakat lokal di Kota Payakumbuh sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 18 adalah Nagari dan sesuai dengan Permendagri No 5 tahun 2007, dari enam unsur komponen Lembaga Kemasyarakatan (Pasal 7), yang merupakan Lembaga Kemasyarakatan lokal adalah Lembaga Adat serta Lembaga lainnya. Maka lembaga adat di nagari yang dimaksud itu adalah Lembaga Kaum (Pangulu Kaum dan Perangkatnya), Lembaga Kampuang (Tuo Kampuang dan perangkatnya), Lembaga Suku (Pangulu Suku dan Perangkat-nya), serta Lembaga Nagari (Pucuak dan atau Kaampek Suku dan perangkatnya). Sedangkan lembaga kemasyarakatan lainnya adalah KAN (Kerapatan Adat Nagari) dan Bundo Kanduang sebagai lembaga penunjang eksistensi lembaga adat yang asli.

Lembaga tersebut sangat penting dalam membangun masyarakat dan Kota Payakumbuh. Peran mereka sangat vital karena bersentuhan langsung dengan masyarakat,karena merupakan lembaga lokal yang berhubungan dengan sistem adat Minangkabau yang juga berlaku di Kota Payakumbuh.

Lembaga-lembaga masyarakat lokal tersebut akan diberdayakan dan direvitalisasi agar dapat berfungsi secara efektif dan ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam membantu pemerintah untuk membangun masyarakat dan Kota Payakumbuh.

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi 5 ini adalah Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan agamis.

Sasaran yang akan dicapai dalam misi 5 ini ada 2 sasaran yaitu: 1). Meningkatnya pengamalan ajaran agama; 2) Menguatnya lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat.

6.5.1. Strategi untuk Misi 5

Untuk mencapai sasaran yang hendak diwujudkan pada Misi 5, diperlukan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat;
2. Meningkatnya fungsi dan peran lembaga kemasyarakatan;

Terkait dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Startegi tersebut untuk dilaksanakan dalam 5 tahun kedepan adalah sebagaimana pada Tabel 6.17. berikut :

Tabel 6.17
Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pada Misi 5

Visi : Payakumbuh Maju, Sejahtera, dan Bermartabat, dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang		
Misi : Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Dan Berbudaya Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah		
Tujuan	Sasaran	Strategi
1. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan agamis.	1. Meningkatnya pengamalan ajaran agama	1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat
	2. Menguatnya lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat	1. Meningkatkan fungsi dan peran lembaga kemasyarakatan

6.5.2. Arah kebijakan untuk Misi 5

Arah kebijakan untuk melaksanakan strategi Misi 5 adalah :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan;
2. Peningkatan peran dan fungsi sarana ibadah;
3. Peningkatan peran dan fungsi lembaga keagamaan;
4. Penguatan tugas pokok dan fungsi Lembaga Adat;
5. Mendorong revitalisasi Rumah Gadang dan Balai Adat.

Arah Kebijakan Pembangunan untuk Misi 5 setiap tahunnya dapat dilihat pada Tabel 6.18. berikut :

Tabel 6.18.
Arah Kebijakan Pembangunan pada Misi 5 Kota Payakumbuh 2017-2022

No	Arah Kebijakan				
	Tahun 2018	**Tahun 2019**	**Tahun 2020**	**Tahun 2021**	**Tahun 2022**
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan;	Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan;	Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan;	Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan;	Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan;
2.	Peningkatan peran dan fungsi sarana ibadah;	Peningkatan peran dan fungsi sarana ibadah;	Peningkatan peran dan fungsi sarana ibadah;	Peningkatan peran dan fungsi sarana ibadah;	Peningkatan peran dan fungsi sarana ibadah;
3.	Peningkatan peran dan fungsi lembaga keagamaan;	Peningkatan peran dan fungsi lembaga keagamaan;	Peningkatan peran dan fungsi lembaga keagamaan;	Peningkatan peran dan fungsi lembaga keagamaan;	Peningkatan peran dan fungsi lembaga keagamaan;
4.	Penguatan tugas pokok dan fungsi Lembaga Adat	Penguatan tugas pokok dan fungsi Lembaga Adat	Penguatan tugas pokok dan fungsi Lembaga Adat	Penguatan tugas pokok dan fungsi Lembaga Adat	Penguatan tugas pokok dan fungsi Lembaga Adat
5.	Mendorong revitalisasi Rumah Gadang dan Balai Adat	Mendorong revitalisasi Rumah Gadang dan Balai Adat	Mendorong revitalisasi Rumah Gadang dan Balai Adat	Mendorong revitalisasi Rumah Gadang dan Balai Adat	Mendorong revitalisasi Rumah Gadang dan Balai Adat

6.5.3. Program Pembangunan Daerah Misi 5

Sedangkan program-program prioritas untuk mewujudkan misi 5 yaitu mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama di tengah masyarakat adalah:

1. Program pendidikan karakter/akhlak mulia
2. Program Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama
3. Program peningkatan peran dan fungsi lembaga sosial keagamaan
4. Program Pengembangan Nilai Budaya

Keterkaitan antara Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel 6.19 dibawah ini :

Tabel 6.19.
Keterkaitan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah pada Misi 5 Kota Payakumbuh 2017-2022

Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah
1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan	Program pendidikan karakter/akhlak mulia
	2. Peningkatan peran dan fungsi sarana ibadah	Program Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama
2. Meningkatkan fungsi dan peran lembaga kemasyarakatan	3. Peningkatan peran dan fungsi lembaga keagamaan	Program peningkatan peran dan fungsi lembaga sosial keagamaan
	4. Penguatan tugas pokok dan fungsi lembaga adat	Program Pengembangan Nilai Budaya
	5. Mendorong revitalisasi Rumah Gadang dan Balai Adat	

Keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel 6.20 dibawah ini :

Tabel 6.20
Keterkaitan antara Misi, Tujuan,Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Untuk Misi 5

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Misi : Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah																	
	Tujuan : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan agamis	Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga/ Badan Zakat/ Wakaf	2,5 %	3,0 %		3,4 %		3,8 %		4,2 %		4,6 %		5 %		5%		
	Sasaran 1 : Meningkatnya pengamalan ajaran agama.	Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik	N/A	13,83		21		29		36		44		51		51		
		Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga/ Badan Zakat/ Wakaf	2,5 %	3,0 %		3,4 %		3,8 %		4,2 %		4,6 %		5 %		5 %		
1	Program pendidikan karakter/akhlak mulia	Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik	N/A	13,83	-	21	3.805	29	5.341	36	5.636	44	5.931	51	6.226	51	26.941	Diknas
2	Program peningkatan kualitas pelayanan	Persentase mesjid berfungsi secara baik	N/A	25 %	1.550,82	30 %	767,28	35 %	2.269,04	40 %	981,56	45 %	2.403,38	50 %	2.743,45	50 %	9.164,71	Setdako

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	kehidupan beragama																	
		Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga/ Badan Zakat/ Wakaf	2,5 %	3,00 %	334,2	3,4 %	775,8	3,8 %	635,3	4,2 %	1.213,9	4,6 %	473,9	5 %	708,6	5 %	3.626,3	Kecamatan
	Sasaran 2 : Menguatnya lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat.	Persentase lembaga keagamaan yang aktif	N/A	61,29 %		67,74 %		74,19 %		77,42 %		80,65 %		83,87 %		83,87 %		
		Persentase lembaga adat yang aktif	75 %	80 %		90 %		95 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1	Program peningkatan peran dan fungsi lembaga sosial keagamaan	Persentase lembaga keagamaan yang aktif	55,00 %	61,00 %	454,66	67,00 %	460,06	74,00 %	2.589,59	77,00 %	2.631,32	80,00 %	2.675,31	83,00 %	2.815,72	83,00 %	11.172	Setdako
2	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase lembaga adat yang aktif	75 %	80 %	816,5	90 %	231,9	95 %	231,9	100 %	638,8	100 %	638,8	100 %	721,8	100 %	2.463,3	Disparpora

6.6. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah dengan Propinsi dan Nasional

Penentuan prioritas pembangunan disusun dengan pelihat kepada isu-isu strategis baik di tingkat Popinsi Sumatera Barat maupun di tingkat Nasional, sebagaimana telah disandingkan pada Tabel IV-1 RPMD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022. Prioritas pembangunan Kota Payakumbuh diarahkan melalui pendekatan holistik-tematik, dengan melihat kepada NAWACITA sebagai acuan holistik dari prioritas secara Nasional yang selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pada tingkat Propinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Kedua level prioritas pembangunan ini dijabarkan lebih lanjut dengan rumusan strategi dan arah kebijakan yang tertuang pada BAB VI RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022 yang lebih fokus kepada prinsip *money follow program priority* sesuai dengan Misi dan Strategy Pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.

Prioritas pembangunan ini merupakan kumpulan program prioritas yang bersifat lintas sektoral sebagai penjabaran operasional dari RPJMD Kota Payakumbun tahun 2017-2022 yang dijabarkan dalam 9 (sembilan) prioritas yang tersinkronisasi dengan prioritas Propinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 dan Nasional melalui RPJMN tahun 2015-2019, sebagai berikut :

1. Prioritas pertama, Peningkatan kualitas pelayanan SDM dan kebutuhan dasar lainnya, pioritas ini selaras dengan propinsi Sumatera Barat yang meliputi peningkatan pemerataan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dam penanganan desa tertinggal serta selaras pula dengan upaya peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia dalam RPJMN tahn 2015-2019. Prioritas ini dilaksanakan dengan sasaran peningkatan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, peningkatan pemberdayaan perempuan serta peningkatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
2. Prioritas ke-dua, peningkatan perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, prioritas ini juga merupakan sinkronisasi dari prioritas propinsi dalam hal pengembangan parisiwata, industri perdagangan, koperasi, UMKM dan peningkatan investasi, serta di tingkat Nasional selaras dengan upaya prioritas dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Prioritas ini dilaksanakan dengan sasaran peningkatan produktivitas sektor strategis, peningkatan iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh serta peningkatan kesejahteraan anggota koperasi.
3. Prioritas ke-tiga, peningakatan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan, prioritas ini juga merupakan sinkronisasi dari prioritas propinsi dalam hal pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur, serta di tingkat Nasional selaras dengan upaya prioritas dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Prioritas ini dilaksanakan dengan sasaran peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan, peningkatan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan perumahan dan pemukiman yang layak.
4. Prioritas ke-empat, Peningkatan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean goverment*), prioritas ini diarahkan kepada pelaksanaan kebijakan nasional melalui NAWACITA dalam hal membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta

prioritas di tingkat Propinsi Sumatera Barat dalam hal pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan. Prioritas ini dilaksanakan dengan sasaran peningkatan kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan

5. Prioritas keenam, peningkatan pengamalan ajaran agama dan budaya, pioritas ini selaras dengan propinsi Sumatera Barat berupa upaya pembangunan mental pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat serta menjadi sumbangsih dalam melakukan revolusi karakter bangsa yang menjadi prioritas Nasional dalam NAWACITA. Prioritas ini dilaksanakan dengan sasaran peningkatan pengamalan ajaran agama dan penguatan lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat.

Tabel 6.20
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJMD tahun 2015-2019, Prioritas Pembangunan Propinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 dan Prioritas Pembangunan Kota Payakumbuh tahun 2017-2022

Prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJMN tahun 2015-2019	Prioritas Pembangunan Propinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021	Prioritas Pembangunan Kota Payakumbuh tahun 2017-2022
• Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara		
• Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	• Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan (Prior.2)	• Peningkatan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean goverment) (Prior.4)
• Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan	• Pengembngan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur (Prior.9)	• Peningakatan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan (Prior.3)
• Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya		
• Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	• Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan (Prior.3) • Peningkatan derajat kesehatan masyarakat (Prior.4) • Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan desa tertingal (prior.8) • Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana (prior.10)	• Peningkatan kualitas pelayanan SDM dan kebutuhan dasar lainnya (Prior.1)

• Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.	• Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan Nasional dan pengembangan agribisnis (Prior.5) • Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan (Prior.7)	
• Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	• Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan peningkatan investasi (Prior.6)	• Peningkatan perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan yang berkeadilan (Prior.2)
• Melakukan revolusi karakter bangsa	• Pembangunan mental pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat (Prior.1)	• Peningkatan Pengamalan ajaran agama dan budaya (prior.5)
• Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia		

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pada bab-bab terdahulu, telah dijabarkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota secara hirarkhis memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, sehingga menghasilkan rumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah. Program-program tersebut dikelompokkan ke dalam 9 prioritas pembangunan, program-progran tersebut adalah upaya-upaya yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota. Dalam implementasinya secara operasional, program-program tersebut harus dijabarkan kedalam urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pada bab ini program-program tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait sehingga dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas Perangkat Daerah dalam melaksanakan rencana pembangunan yang telah disusun, yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah langsung dalam pencapaian Visi, Misi Walikota dan Wakil Walikota.

Program dan indikator kinerja tersebut dikelompokkan ke dalam 6 urusan wajib Pemerintah Daerah, 16 Urusan Wajib non Pemerintah Daerah, 7 Urusan Penunjang , 2 Urusan Pendukung, 5 Urusan Pilihan dan 1 Urusan Kewilayahan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan rakyat, Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial. Urusan Wajib non Pemerintahan terdiri dari Urusan Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pasar, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Penduduk dan Catatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pemuda dan Olah Raga, Statistik, Kebudayaan, Perpustakaan dan Urusan Kearsipan. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan karakteristik daerah yang bersangkutan yaitu Urusan : Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Pariwisata, Perdagangan, dan Perindustrian. Urusan Penunjang adalah urusan pemerintahan yang berfungsi sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan sehingga pemerintahan dapat berjalan sebagaimana kaidah tata kelola pemerintahan yang baik, terdiri dari Urusan Inspektorat, Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Penelitian dan Pengembangan, serta Kesatuan Bangsa dan Politik dan Urusan Penanggulangan Bencana. Berikutnya Urusan Pendukung merupakan urusan pemerintahan yang terkait dengan fungsi fasilitasi dan koordinasi operasional Pemerintahan Daerah baik Eksekutif maupun Legislatif yang terdiri dari Urusan Kesekretariatan Daerah dan Urusan Kesekretariatan DPRD. Sedangkan Urusan Kewilayahan menjadi urusan tersendiri yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Kecamatan.

Untuk dapat merumuskan program secara terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing-masing program diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Indikator dan target kinerja ini ditetapkan dengan memperhatikan kondisi awal dan disusun bersama Perangkat Daerah dan kemudian disepakati dengan DPRD. Pada target kinerja diperkirakan output dan outcome yang akan dihasilkan dari masing-masing program. Penulisan output selain outcome pada indikator kinerja dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada Perangkat Daerah dalam merumuskan kegiatan-kegiatan pada setiap program prioritas pada penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Sedangkan pada kerangka pendanaan diperkirakan besarnya dana APBD dan sumber dana lainnya yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian target tersebut serta OPD penanggungjawab. Namun demikian

pendanaan program dan kegiatan setiap tahunnya mengacu kepada pagu indikatif yang ditetapkan pada tahun berjalan.

Kerangka pendanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel 7.1 dan Indikasi rencana program prioritas yang disetai kebutuhan pendanaan secara rinci dapat dilihat pada tabel 7.2.

TABEL 7.1
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2018-2022
KOTA PAYAKUMBUH

Kode	Kapasitas Riil/Belanja	Proyeksi				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN					
	BELANJA	**804.861.522.682**	**875.688.004.364**	**954.256.604.622**	**1.041.535.042.345**	**1.138.621.402.359**
	Belanja Tidak Langsung	**343.079.034.574**	**359.816.225.742**	**377.390.276.469**	**395.843.029.732**	**415.218.420.658**
	Belanja Pegawai	334.743.823.365	351.481.014.533	369.055.065.260	387.507.818.523	406.883.209.449
	Belanja Hibah	7.326.000.000	7.326.000.000	7.326.000.000	7.326.000.000	7.326.000.000
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabuapten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	559.211.209	559.211.209	559.211.209	559.211.209	559.211.209
	Belanja Tidak Terduga	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000
	Belanja Langsung	**461.782.488.108**	**515.871.778.622**	**576.866.328.153**	**645.692.012.613**	**723.402.981.701**
	Belanja Pegawai	41.628.181.832	43.093.493.832	44.610.384.815	46.180.670.361	47.806.229.957
	Belanja Barang dan Jasa	207.983.348.548	228.781.683.402	251.659.851.743	276.825.836.917	304.508.420.609
	Belanja Modal	212.170.957.728	243.996.601.387	280.596.091.595	322.685.505.335	371.088.331.135

Sumber : BKD Kota Payakumbuh diolah

TABEL 7.2
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KOTA PAYAKUMBUH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1,01	**TERKAIT PELAYANAN DASAR**				**268.675.647.041**		**282.752.059.574**		**294.473.645.770**		**308.052.162.352**		**365.253.072.197**		**381.934.533.309**		**1.784.389.807.945**	
1.01.01	**PENDIDIKAN**				**40.170.462.775**		**50.407.614.799**		**47.114.208.599**		**48.546.262.591**		**50.738.573.555**		**56.278.127.797**		**293.255.250.116**	**Dinas Pendidikan**
1.01.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	A	A	2.679.164.360	A	3.373.566.700	A	1.522.680.796	A	3.373.566.700	A	3.373.566.700	A	3.373.566.700	A	17.696.111.956	Dinas Pendidikan
1.01.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan	75	80	483.623.700	80	248.511.200	80	248.511.200	80	118.611.200	80	218.611.200	80	118.611.200	80	1.436.479.700	Dinas Pendidikan
1.01.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut	100	100	360.491.300	100	390.000.000	100	390.000.000	100	390.000.000	100	390.000.000	100	390.000.000	100	2.310.491.300	Dinas Pendidikan
1.01.01.01.05	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Nilai evaluasi AKIP	B	BB	76.124.500	BB	87.011.500	A	85.977.750	A	85.977.750	A	85.977.750	A	85.977.750	A	507.047.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.01.15	Program pendidikan anak usia dini	Persentase satuan PAUDNI yang memiliki sapras sesuai SNP	na	60%	2.455.021.399	62%	2.870.699.800	64%	3.562.000.000	65%	2.552.000.000	67%	2.352.000.000	70%	2.202.000.000	70%	15.993.721.199	Dinas Pendidikan
		Persentase satuan pendidikan PAUD yang pengelolaan nya berkategori baik	na	70%		72%%		75%		77%		78%		80%		80%	-	Dinas Pendidikan
		Persentase PTK PAUD yang sesuai dengan SNP	na	50%		52%		54%		56%		58%		60%		60%		
1.01.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun	Persentase sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai	na	80%	11.002.730.219	83%	16.716.816.904	85%	13.048.581.383	86%	12.638.665.771	87%	14.090.491.235	90%	17.023.195.412	90%	84.520.480.924	Dinas Pendidikan
		Rata - rata nilai Mid semester	na	7,5		7,6		7,7		7,8		7,9		8		8	-	Dinas Pendidikan
		Rata - rata nilai semester	na	7,5		7,6		7,7		7,8		7,9		8		8	-	Dinas Pendidikan
1.01.01.01.18	Program Pendidikan Non Formal	Angka melek huruf	99,63	99,56	4.284.505.281	99,6	4.423.164.800	99,66	4.423.164.800	99,71	4.393.298.500	99,75	4.393.298.500	99,81	6.393.298.500	99,85	28.310.730.381	Dinas Pendidikan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.01.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio guru per rombel	na	100%	547.355.320	100%	677.362.170	100%	677.362.170	100%	677.362.170	100%	677.362.170	100%	677.362.170	100%	3.934.166.170	Dinas Pendidikan
		Rasio guru per mapel	na	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	-	Dinas Pendidikan
		Rasio tenaga kependidikan per	na	80%		83%		85%		87%		88%		90%		90%	-	Dinas Pendidikan
		Persentase PTK yang sesuai dengan SNP	na	0,5		53%		55%		57%		60%		65%		65%		
1.01.01.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang pengelolaannya berkategori baik	na	0,7	477.162.490	72%	497.628.000	74%	497.628.000	75%	497.628.000	77%	497.628.000	80%	497.628.000	80%	2.965.302.490	Dinas Pendidikan
1.01.01.01.94	Program Pendidikan Karakter/ Akhlak mulia	Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik	na	13,83%	-	21%	3.805.853.725	29%	5.341.302.500	36%	5.636.302.500	44%	5.931.302.500	51%	6.226.302.500	51%	26.941.063.725	Dinas Pendidikan
		Persentase capaian program pendidikan karakter melalui mapel	na	44,44%		46%		48%		50%		55%		65%		65%	-	Dinas Pendidikan
1.01.01.01.95	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	APK SD	114	115	17.804.284.206	116	17.317.000.000	120	17.317.000.000	122	18.182.850.000	124	18.728.335.500	126	19.290.185.565	126	108.639.655.271	Dinas Pendidikan
		APK SMP	141	153,3		156,98		158,1		160,08		161,16		162,1		162,1		
		APM SD	100,88	101		108,39		109,75		110,5		112,05		113,8		113,8		
		APM SMP	109,94	117		119,3		120,15		121,3		122,1		124,15		124,15		
1.01.02	**KESEHATAN**				**108.299.436.415**		**115.103.279.181**		**136.875.907.632**		**130.020.794.825**		**149.177.787.112**		**127.318.980.998**		**766.775.884.111**	**DKK**
1.01.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	B	B	1.853.253.776	BB	2.273.742.680	A	2.243.802.680	A	2.426.841.000	A	2.511.982.500	A	2.655.642.080	A	13.965.264.716	Dinas Kesehatan
1.01.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan	80	80	180.523.000	80	359.468.900	80	381.196.900	80	382.146.400	80	391.426.400	80	392.976.500	80	2.087.738.100	Dinas Kesehatan
1.01.02.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut	100	100	169.410.000	100	169.410.000	100	170.510.000	100	170.510.000	100	178.610.000	100	178.610.000	100	1.037.060.000	Dinas Kesehatan
1.01.02.01.04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Nilai evaluasi AKIP	B	BB	30.252.612	BB	165.544.900	A	165.544.900	A	165.544.900	A	165.544.900	A	165.544.900	A	857.977.112	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.01.02.01.15	Program obat dan perbekalan kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan perbelkes untuk 24 bulan	100%	100%	1.108.687.000	100	2.591.945.000	100	2.824.300.000	100	3.048.244.648	100	3.290.104.220	100	5.551.312.557	100	18.414.593.425	DKK
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan sosialisasi pangan sehat	na	80%		80%		85%		85%		87%		87%		87%		
1.01.02.01.16	Program upaya kesehatan masyarakat	Persentase kepesertaan JKN	85,10%	87%	7.428.179.750	89%	7.813.239.577	95%	6.985.102.733	100%	9.587.559.331	100%	11.239.384.795	100%	17.572.088.972	100%	60.625.555.158	DKK
1.01.02.01.17	Program pengawasan obat dan makanan	Persentase kelompok masyakat cerdas menggunakan obat	na	25%	191.930.000	30%	282.229.250	35%	295.099.925	40%	295.099.925	50%	315.602.841	60%	315.602.841	60%	1.695.564.782	DKK
		Persentase kegiatan pengawasan keamanan pangan	na	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.01.02.01.19	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah tangga ber-PHBS	66,33%	67%	585.192.000	70%	872.276.800	75%	832.276.800	77%	832.276.800	79%	843.573.408	80%	843.573.408	80%	4.809.169.216	DKK
		Persentase sekolah PHBS	48,33%	73%		75%		78%		80%		85%		90%		90%		
1.01.02.01.20	Program perbaikan gizi masyarakat	Persentase peningkatan status gizi masyakat	na	100%	75.993.862	100%	99.428.000	100%	99.428.000	100%	99.428.000	100%	99.428.000	100%	99.428.000	100%	573.133.862	DKK
		Persentase penanganan balita gizi buruk	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	-	DKK
		Cakupan balita gizi buruk	0,08%	<3		<3		<3		<3		<3		<3		<3	-	DKK
1.01.02.01.21	Program Pengembangan lingkungan sehat	Cakupan jamban yang sesuai standar kesehatan	85,92%	87%	360.220.000	89,5%	369.970.000	90%	369.970.000	92%	391.868.200	93%	391.868.200	95%	391.868.200	95%	2.275.764.600	DKK
		Cakupan Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah	93,36%	95%		96,75%		96,80%		96,90%		97%		98%		98%	-	DKK
		Cakupan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	na	95%		96%		97%		98%		98,5%		98,6%		98,6%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Cakupan Pengelolan Limbah Cair Rumah Tangga	na	90%		92%		92,50%		93%		94%		95%		95%		
		Cakupan Laik Sehat	na	na		77%		80%		81%		82%		83%		83%		
		Cakupan Laik Sehat	na	na		79%		80%		81%		82%		83%		83%		
		Persentase peningkatan STBM	na	na		95%		96%		97%		98%		100%		100%		
		Persentase cakupan stop BABS	na	na		90%		91%		92%		93%		95%		95%		
		Persenatase laik sehat TTM dan TTU	na	na		80%		83%		85%		87%		90%		90%		
1.01.02.01.22	Program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	Cakupan penemuan semua kasus TB	40,38%	41%	194.823.200	42%	222.448.290	42%	222.448.290	43%	222.448.290	44%	235.795.187	45%	235.795.187	45%	1.333.758.444	DKK
		Persentase TB yang mengetahui status HIV	na	39%		40%		42%		43%		44%		45%		45%		
		Persentase HIV AIDS yang mendapatkan ARV	na	20%		20%		20%		20%		20%		20%		20%	-	DKK
		Cakupan penanganan kasus diare	na	95%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Insident rate DBD per 100.000 penduduk	na	<41		<41		<41		<41		<41		<41		<41		
		Cakupan Kelurahan UCI	na	75%		80%		81%		82%		83%		85%		85%		
		cakupan pelayanan imunisasi anak	na	90%		92%		93%		95%		100%		100%		100%		
		Cakupan pelayanan imunisasi dasar lengkap	na	90%		93%		95%		96%		97%		100%		100%		
		cakupan penanganan kasus DBD	na	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.01.02.01.23	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase RS dan Puskesmas terakreditasi	75%	80%	794.015.007	100%	423.852.000	100%	443.419.320	100%	425.952.000	100%	449.283.120	100%	449.283.120	100%	2.985.804.567	DKK
		Persentase puskesmasn dengan nilai IKM >75	na	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Persentase Sapras puskesmas yang sesuai standar	na	65%		70%		72%		75%		78%		80%		80%		
1.01.02.01.25	Prog. Pengadaan , peningkatan, perbaikan sappras Pusk/ Pustu/jaringan	Persentase Ketersediaan Prasarana Puskesmas sesuai standar	80%	83%	3.900.000.000	85%	15.500.000.000	86%	15.500.000.000	87%	15.500.000.000	89%	15.500.000.000	90%	17.500.000.000	70	83.400.000.000	DKK
1.01.02.01.26	Program Pengadaan, peningkatan sarana prasarana Rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata	Persentase Ketersediaan alat kedokteran RS sesuai standar	na	78%	21.373.434.000	80%	21.760.097.084	82%	42.000.000.000	83%	30.000.000.000	85%	45.000.000.000	87%	10.000.000.000	87%	170.133.531.084	DKK
		Persentase Ketersediaan Prasarana RS sesuai standar	na	75%		80%		82%		83%		85%		87%		87%		
1.01.02.01.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Cakupan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sesuai standar	na	90%	-	100%	64.814.000	100%	68.702.840	100%	68.702.840	100%	68.702.840	100%	72.825.010	100%	343.747.530	DKK
1.01.02.01.32	Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan persalinan dengan nakes di faskes	91,80%	98%	742.240.000	100%	738.944.000	100%	738.944.000	100%	747.280.640	100%	738.944.000	100%	747.280.640	100%	4.453.633.280	DKK
		Cakupan pelayan Nifas sesuai standar	93%	95%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	-	DKK
		Cakupan pelayan Neonatal sesuai standar	96%	98%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.01.02.01.34	Pengendalian Penyakit tidak Menular	Cakupan penderita hipertensi yang mendapat pelayanan	93%	95%	20.302.052	100%	37.360.000	100%	37.360.000	100%	39.601.600	100%	37.360.000	100%	37.360.000	100%	189.041.600	DKK
		Cakupan penderita DM yang mendapat pelayanan sesuai standar	na	95%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	-	DKK
		Cakupan IVA positif yang tertangani	na	95%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	-	DKK
		Cakupan pelayanan IVA usia produktif	na	30%		32%		33%		34%		35%		35%		35%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Cakupan penemuan kasus hipertensi usia > 15 tahun	na	20%		22,6%		22,8%		23%		23,5%		24%		24%		
		Cakupan penemuan kasus DM usia > 15 tahun	na	1,5%		1,6%		1,7%		1,8%		2,0%		2%		2%		
1.01.02.01.36	Peningkatan pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan BLUD	na	0,88	65.900.915.156	0,9	57.858.508.700	0,95	59.897.801.244	1	62.017.290.251	1	64.220.176.701	1	66.509.789.583	1	376.404.481.635	DKK
1.01.02.01.38	Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas	Persentase puskesmasn dengan nilai IKM >75	na	100%	3.390.065.000	100%	3.500.000.000	100%	3.600.000.000	100%	3.600.000.000	100%	3.500.000.000	100%	3.600.000.000	100%	21.190.065.000	DKK
1.01.03	**PEKERJAAN UMUM**				**95.972.112.730**		**88.025.382.839**		**80.447.140.707**		**91.318.304.504**		**127.905.933.112**		**148.946.164.168**		**536.642.925.330**	**Dinas PU PR**
1.01.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	B	B	5.652.029.806	BB	6.159.000.000	BB	5.947.000.000	A	5.947.000.000	A	5.947.000.000	AA	5.947.000.000	AA	29.947.000.000	Dinas PU PR
1.01.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan	80	80	5.245.378.050	80	8.083.360.000	80	5.713.120.000	80	5.147.740.000	80	7.147.740.000	80	7.647.740.000	80	33.739.700.000	Dinas PU PR
1.01.03.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100	100	53.330.000	100	63.000.000	100	63.000.000	100	63.000.000	100	63.000.000		63.000.000	100	315.000.000	Dinas PU PR
1.01.03.01.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	BB	A	-	A	153.950.000	A	153.950.000	A	153.950.000	A	153.950.000	AA	153.950.000	AA	769.750.000	Dinas PU PR
1.01.03.01.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP	BB	A	107.964.400	A	161.503.000	A	142.677.000	A	142.677.000	A	142.677.000	AA	142.677.000	AA	732.211.000	Dinas PU PR
1.01.03.01.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	persentase Panjang jalan dengan kondisi mantap	65,56%	66,56%	2.492.707.800	68,56%	8.930.200.000	69,31%	12.000.000.000	72,06%	12.000.000.000	74,81%	20.000.000.000	80.31%	25.000.000.000	80,31%	77.930.200.000	Dinas PU PR
1.01.03.01.16	Program Pembangunan saluran drainasi/ gorong-gorong	persentase jalan kota yang memiliki drainase	42,17%	44,46%	12.042.349.304	44,46%	23.179.830.000	45,95%	12.078.558.649	47,39%	16.042.349.304	48,91%	30.042.349.304	50,44%	42.042.349.304	50,44%	123.385.436.561	Dinas PU PR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.01.03.01.17	Program Pembangun Turap /Talud/Bronjong	Persentase Penataan sungai	15,44%	18,56%	681.889.000	18,56%	991.500.000	21,69%	991.500.000	23,52%	991.500.000	24,81%	991.500.000	26,37%	991.500.000	26,37%	4.957.500.000	Dinas PU PR
1.01.03.01.18	Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	persentase Panjang jalan yang dipelihara	65,56%	66,56%	31.774.977.102	66,56%	13.179.830.000	69,31%	15.000.000.000	72,06%	25.000.000.000	74,81%	25.610.890.000	80,31%	30.000.000.000	80,31%	108.790.720.000	Dinas PU PR
1.01.03.01.23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	persentase Panjang jalan dengan kondisi mantap	66,56%	66,56%	446.297.619	66,56%	685.000.000	69,31%	3.050.000	72,06%	300.000.000	74,81%	300.000.000	80,31%	300.000.000	80,31%	1.588.050.000	Dinas PU PR
1.01.03.01.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	persentase irigasi dengan kondisi baik	73,43%	76,34%	19.003.447.828	76,34%	10.902.594.558	79,10%	10.902.594.558	81,72%	10.000.000.000	84,21%	2.121.469.558	86,58%	10.000.000.000	86,58%	43.926.658.674	Dinas PU PR
1.01.03.01.26	Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai danau dan sumber daya air lainnya	Persentase Penataan sungai	15,44%	15,44%	13.513.768.724	15,44%	8.943.961.731	15,44%	6.375.000.000	15,44%	8.375.000.000	15,44%	12.375.000.000	15,44%	15.143.694.614	15,44%	51.212.656.345	Dinas PU PR
1.01.03.01.27	Program Pengembangan Kinerja, Pengelolaan Air Minum dan Limbah	Persentase rumah yang terlayani air minum perpipaan	91,61%	92,30%	626.500.000	92,30%	863.200.000	92,97%	947.100.000	93,62%	1.041.810.000	94,26%	6.145.990.000	94,89%	1.260.590.000	94,89%	10.258.690.000	Dinas PU PR
1.01.03.01.28	Program Pengendalian Banjir	Persentase Penataan sungai			131.226.000	66,56%	136.626.000	79,10%	150.000.000	23,52%	150.000.000	24,81%	160.000.000	26,37%	160.000.000	26,37%	756.626.000	Dinas PU PR
1.01.03.01.29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase Kepatuhan Pembangunan sesuai dokumen tata ruang	78,60%	78,60%	1.301.752.407	78,90%	1.503.330.000	79,20%	172.661.000	79,50%	1.503.330.000	79,50%	2.503.330.000	79,80%	3.503.330.000	80,10%	9.185.981.000	Dinas PU PR
1.01.03.01.30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	persentase Panjang jalan dengan kondisi mantap	65,56%	66,56%	2.188.937.660	68.56%	1.230.000.000	69.31%	1.325.000.000	72.86%	1.386.000.000	74.81%	1.462.000.000	80.31%	1.468.850.000	80,31%	6.871.850.000	Dinas PU PR
1.01.03.01.31	Program Perencanaan Penataan ruang	Persentase Tertatanya kawasan pusat kota	55,00%	60,00%	219.255.350	60,00%	864.149.000	69,00%	1.222.460.000	73,00%	1.442.916.000	76,00%	1.416.091.000	78,00%	1.446.616.000	78,00%	6.392.232.000	Dinas PU PR
		Jumlah advice planning yang dikeluarkan		583		583		571		610		800		825		825	-	Dinas PU PR
		Keberadaan PERDA RTRW		1		1		1		1		1		1		1	-	Dinas PU PR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.01.03.01.32	Program Pemanfaatan Ruang	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan keseluruhan	0,13	0,13	196.706.050	0,13	509.799.000	0,18	478.275.000	0,19	502.939.000	0,21	528.336.000	0,23	839.500.000	0,23	2.858.849.000	Dinas PU PR
1.01.03.01.33	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rasio Ruang Terbuka Hijau	39,31	40,31	167.664.405	40,31	367.679.550	42,44	486.138.500	42,46	396.338.200	42,48	424.255.250	42,5	424.255.250	42,5	2.098.666.750	Dinas PU PR
1.01.03.01.34	Program Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	Persentase Kepatuhan Pembangunan sesuai dokumen tata ruang	0,306	0,3132	125.931.225	0,3132	260.030.000	0,3202	295.056.000	0,3274	331.755.000	0,3346	370.355.000	0,3418	411.112.000	0,3418	1.668.308.000	Dinas PU PR
1.01.03.01.35	Program Pembangunan Fasilitas Umum	Persentase Ketersediaan Fasilitas Umum	66,66	72,22	-	77,78		83,33	6.000.000.000	88,89	400.000.000	94,4	10.000.000.000	94,4	2.000.000.000	94,4	18.400.000.000	Dinas PU PR
1.01.03.01..36	Program perluasan dan peningkatan sambungan rumah (SR)	Persentase rumah yang terlayani air minum perpipaan	0,9161		-	0,923	856.840.000										856.840.000	Dinas PU PR
1.01.04	**PERUMAHAN RAKYAT**				**10.684.426.548**		**10.266.636.374**		**9.596.979.262**		**9.744.549.298**		**7.101.362.214**		**10.473.316.391**		**47.142.843.539**	**Dinas Perumahan dan Waskin**
1.01.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM		B	477.532.592	BB	650.911.579	BB	650.903.579	A	650.903.579	A	650.903.579	AA	650.903.579	AA	3.254.525.895	Dinas Perumahan dan Waksin
1.01.04.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan		80	259.593.800	80	252.209.000	80	252.209.000	80	252.209.000	80	252.209.000	80	252.209.000	80	1.261.045.000	Dinas Perumahan dan Waksin
1.01.04.01.03	Program Peningkatan disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut		100	11.250.000	100	12.600.000	100	12.600.000	100	12.600.000	100	12.600.000	100	12.600.000	100	63.000.000	Dinas Perumahan dan Waksin
1.01.04.01.04	Program Peningkatan KapasitasSumber daya aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	0	4	-	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	16	10.000.000	Dinas Perumahan dan Waksin
1.01.04.01.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Nilai Evaluasi AKIP		A	44.242.800	A	34.702.800	A	34.702.800	A	34.702.800	A	34.702.800	AA	34.702.800	AA	173.514.000	Dinas Perumahan dan Waksin
1.01.04.01.15	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	91,70	91,70	4.173.218.950	92,95	5.467.533.727	93,81	5.388.440.883	94,84	6.056.282.919	95,92	4.645.350.735	96,98	7.978.054.912	96,98	29.535.663.176	Dinas Perumahan dan Waskin
1.01.04.01.16	Program Lingkungan sehat Perumahan	Persentase rumah bersanitasi layak	88,20	88,20	5.718.588.406	89,71	3.838.679.268	91,22%	3.248.123.000	92,74%	2.727.851.000	94,25%	1.495.596.100	95,76%	1.534.846.100	95,76%	12.845.095.468	Dinas Perumahan dan Waskin

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.01.05	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMU DAN PERLINDUNGAN RAKYAT (SATPOL PP)**				**10.034.470.969**		**15.112.339.454**		**15.587.535.490**		**20.111.256.506**		**20.493.021.970**		**25.502.226.147**		**96.806.379.567**	**Satpol PP & Damkar**
1.01.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	B	B	665.370.820	BB	922.310.900	BB	1.899.408.640	A	2.067.333.300	A	2.098.333.300	A	2.119.833.300	A	9.107.219.440	Satpol PP dan Damkar
1.01.05.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan	80	80	3.286.206.000	80	4.128.456.600	80	1.850.000.000	80	1.850.000.000	80	1.020.000.000	80	1.070.000.000	80	9.918.456.600	Satpol PP dan Damkar
1.01.05.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut	100	100	224.217.500	100	368.840.000	100	430.887.750	100	430.887.750	100	430.887.750	100	430.887.750	100	2.092.391.000	Satpol PP dan Damkar
1.01.05.01.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Nilai Evaluasi AKIP	BB	BB	26.720.000	BB	20.000.000	A	35.000.000	A	35.000.000	A	35.000.000	A	35.000.000	A	160.000.000	Satpol PP dan Damkar
1.01.05.01.15	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Penegakkan Perda	100%	100%	79.123.100	100%	1.351.984.197	100%	648.037.383	100%	3.808.121.771	100%	4.909.947.235	100%	8.792.651.412	100%	19.510.741.998	Satpol PP & Damkar
1.01.05.01.16	Program pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan tindak	Penegakan Perda	100%	100%	3.343.377.774	100%	4.981.025.482	100%	5.261.483.682	100%	7.845.759.650	100%	7.874.699.650	100%	8.874.699.650	100%	34.837.668.114	Satpol PP & Damkar
1.01.05.01.19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan pelayanan penanganan kebakaran	120	124,33	2.409.455.775	124,33	3.339.722.275	124,33	5.462.718.035	124,33	4.074.154.035	124,33	4.124.154.035	124,33	4.179.154.035	124,33	21.179.902.415	Satpol PP & Damkar
1.01.06	**SOSIAL**				**3.514.737.604**		**3.836.806.927**		**4.851.874.080**		**8.310.994.628**		**9.836.394.234**		**13.415.717.808**		**43.766.525.282**	**Dinas Sosial**
1.01.06.01.01	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Nilai IKM	B	B	626.107.300	BB	654.640.500	BB	654.640.500	A	661.186.905	A	690.008.672	A	690.008.672	A	3.976.592.549	Dinas Sosial
1.01.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan	80	80	113.053.000	80	510.064.550	80	487.177.500	80	457.746.136	80	142.343.529	80	156.577.882	80	1.866.962.597	Dinas Sosial
1.01.06.01.03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100	100	11.699.880	100	106.994.800	100	117.639.280	100	129.403.208	100	16.446.868	100	17.927.086	100	400.111.122	Dinas Sosial
1.01.06.01.05	Program Peningkatan Pengembanngan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi AKIP	CC	B	27.500.000	BB	12.700.000	A	13.843.000	A	15.088.870	A	33.075.350	A	36.382.885	A	138.590.105	Dinas Sosial

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.01.06.01.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS lainnya	Jumlah Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial/ penanganan PMKS	427 orang	427 orang	662.612.274	511	376.525.050	477	605.600.000	750	655.810.000	900	653.910.000	1.050 orang	652.810.000	4.115 orang	3.607.267.324	Dinas Sosial
1.01.06.01.16	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase meningkatnya keterampilan anak cacat, anak terlantar termasuk anak jalanan, dan anak nakal	70	70	968.938.500	80	663.336.000	85	982.310.000	90	1.335.050.000	100	1.410.430.000	100	1.486.178.000	100	6.846.242.500	Dinas Sosial
1.01.06.01.21	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Persentase peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial	70	70	897.529.700	80	211.329.200	85	591.700.000	90	656.000.000	100	713.400.000	100	764.200.000	100	3.834.158.900	Dinas Sosial
1.01.06.01.22	Program Pemeliharaan dan Rehabilitasi TMP	Persentase terpeliharanya sarana dan prasarana TMP dan makam mayat terlantar dan shelter orang terlantar yang	70	70	207.296.950	80	44.043.800	85	44.043.800	90	44.484.238	100	44.929.080	100	45.378.371	100	430.176.240	Dinas Sosial
		Persentase KK Miskin yang terlayani	80	85		90		95		100		100		100		100		Dinas Sosial
		Persentase Meningkatnya Kualitas penangan masalah Sosial	80	85		90		95		100		100		100		100		Dinas Sosial
1.01.06.01.23	Program Peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia melalui pemberian bantuan UEP	Persentase Meningkatnya kualitas hidup bagi lanjut usia	70	70		80	612.060.727	85	441.400.000	90	3.359.225.271	100	5.057.850.735	100	8.410.254.912	100	17.880.791.645	Dinas Sosial
1.01.06.01.24	Program Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase peningkatan kapasitas SDM kessos	70	70		80	645.112.300	85	913.520.000	90	997.000.000	100	1.074.000.000	100	1.156.000.000	100	4.785.632.300	Dinas Sosial
1,02	**TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR**				**56.572.140.116**		**68.062.983.889**		**110.270.226.401**		**101.329.099.956**		**97.023.969.168**		**109.604.928.451**		**493.629.350.374**	
1.02.01	**TENAGA KERJA**				**1.814.606.286**		**5.185.604.834**		**4.512.171.107**		**8.895.245.331**		**14.814.499.421**		**15.582.339.972**		**48.989.860.665**	**Dinas Naker dan Perin**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.02.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	B	B	440.979.450	BB	887.555.892	BB	887.555.892	A	873.288.592	A	882.443.592	A	891.598.592	A	4.422.442.560	Dinas Naker dan Perin
1.02.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan	80	80	108.505.000	80	369.271.968	80	163.371.968	80	185.421.968	80	193.621.968	80	201.821.968	80	1.113.509.840	Dinas Naker dan Perin
1.02.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap		100	11.250.000	100	18.600.000	100	18.600.000	100	20.134.500	100	20.134.500	100	20.134.500	100	97.603.500	Dinas Naker dan Perin
1.02.01.01.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh	BB	BB	12.600.000	BB	9.384.500	A	9.384.500							A	18.769.000	Dinas Naker dan Perin
1.02.01.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang berwirausaha	57	57	396.744.696,00	59	1.181.291.470,00	59	1.181.291.470,00	96	1.900.000.000	101	2.000.000.000	111	2.200.000.000	483	8.462.582.940	Dinas Naker dan Perin
		Jumlah tenaga kerja yang diserap wirausaha	86	86		88		88		143		151		166		722		
1.02.01.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	160	160	817.223.840	165	2.154.775.777	172	2.154.775.777	219	2.787.700.000	239	3.045.000.000	261	3.325.380.000	1216	13.467.631.554	Dinas Naker dan Perin
1.02.01.01.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah penurunan angka pemutusan hubungan kerja	8	8	27.303.300	10	564.725.227	25	97.191.500	34	3.128.700.271	45	8.673.299.361	52	8.943.404.912	174	21.407.321.271	Dinas Naker dan Perin
1.02.02	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**1.945.600.108**		**1.709.524.824**		**2.746.680.615**		**2.897.452.677**		**3.043.675.448**		**3.372.041.349**		**15.714.975.020**	**DP2AP3KB**
1.02.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	B	B	528.551.736	BB	531.830.624	BB	589.585.125	A	651.543.638	A	714.198.001	A	783.117.801	A	3.798.826.925	Dinas P2AP3KB
1.02.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan	80	80	200.098.500	80	200.098.500	80	295.108.350	80	324.619.185	80	357.081.104	80	392.789.214	80	1.769.794.852	Dinas P2AP3KB
1.02.02.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut	100	100	24.240.000	100	25.998.300	100	28.420.000	100	31.262.000	100	34.388.200	100	37.827.020	100	182.135.520	Dinas P2AP3KB
1.02.02.01.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	Nilai Evaluasi AKIP	CC	B	4.450.000	BB	4.450.000	A	4.895.000	A	5.384.500	A	5.922.950	A	6.515.245	A	31.617.695	Dinas P2AP3KB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.02.02.01.05	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Nilai Evaluasi AKIP	CC	B	51.417.900	BB	51.414.400	A	56.555.840	A	62.211.424	A	68.432.566	A	75.275.823	A	365.307.953	Dinas P2AP3KB
1.02.02.01.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Jumlah perwako, himbauan, MoU terkait perlindungan anak	na	1	125.663.300	1	147.837.500	1	268.831.250	1	282.318.375	1	306.371.713	1	317.378.844	6	1.448.400.981	DP2AP3KB
		Persentase perempuan yang duduk di legislatif	8%	8%		8%		20%		20%		20%		20%		20%		
		rasio kekerasan terhadap anak	0,0015	0,0012		0,001		0,008		0,006		0,005		0		0		
1.02.02.01.16	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah kelembagaan PUG	64	64	613.888.896,00	72	606.016.500	83	817.218.150	95	938.439.965	110	938.439.965	122	1.121.412.358	122	5.035.415.834	DP2AP3KB
		Persentase program dan kegiatan yang di PPRG - kan	na	5%		7%		10%		12%		15%		17%		17%		
		Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak	na	65%		70%		75%		80%		82%		85%		85%		
		Jumlah Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat	na	5		10		15		20		25		30		30		
		Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase kasus penanganan kekerasan anak	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.02.02.01.17	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan	Persentase pelaku usaha ekonom	na	15%	21.824.000,00	16%	21.879.000	20%	354.066.900	25%	256.473.590	28%	259.120.949	30%	262.033.044	100%	1.175.397.483	DP2AP3KB
		Rasio kekerasan terhadap perempuan	0,0015	0,0012		0,001		0,0008		0,0006		0,0005		0		0		
1.02.02.01.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Jumlah organisasi perempuan yang aktif	3	3	375.465.776,00	3	120.000.000	36	332.000.000	36	345.200.000	36	359.720.000	36	375.692.000	36	1.908.077.776	DP2AP3KB
1.02.03	**PANGAN**				**1.544.433.852**		**2.066.553.472**		**1.576.519.745**		**5.745.159.771**		**7.517.910.735**		**10.760.062.912**		**27.666.206.635**	**Dinas Ketapang**
1.02.03.01.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Nilai IKM	B	B	303.679.512	BB	372.204.450	BB	372.204.450	A	398.934.500	A	411.335.000	A	426.878.000	A	1.981.556.400	Dinas Ketapang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.02.03.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan	80	80	274.135.000	80	107.935.000	80	85.435.000	80	146.250.000	80	119.250.000	80	122.180.000	80	581.050.000	Dinas Ketapang
1.02.03.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut	100	100	9.450.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	13.500.000	100	13.500.000	100	13.500.000	100	70.500.000	Dinas Ketapang
1.02.03.01.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh	B	B	13.000.000	BB	6.400.000	BB	6.400.000	A	14.750.000	A	14.750.000	A	14.750.000	A	57.050.000	Dinas Ketapang
1.02.03.01.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Skor PPH Ketersediaan	78,84	87,50	944.169.340,00	89,00	1.565.014.022	90,50	1.097.480.295	92,00	5.171.725.271	93,50	6.959.075.735	95,00	10.182.754.912	95	24.976.050.235	Dinas Ketapang
1.02.04	**PERTANAHAN**				**45.906.000**		**339.875.000**		**361.600.000**		**389.400.000**		**421.600.000**	**127,28**	**427.000.000**	**127,28**	**1.939.475.000**	**Dinas PU PR**
1.01.03.01.16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan danPenggunaan Pemanfaatan Tanah	Persentase sertifikasi aset tanah dan bangunan pemko	56,82	56,82	31.021.000,00	58,18	37.850.000	59,55	38.000.000,00	61,36	37.800.000,00	62,27	38.900.000,00	63,64	39.000.000,00	63,64	191.550.000	Dinas PU PR
1.01.03.01.17	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Jumlah kasus konflik pertanahan yang terselesaika	2 kasus	2 kasus	14.885.000		52.025.000	2 kasus	53.600.000	2 kasus	54.600.000	2 kasus	56.000.000	2 kasus	53.000.000	2 kasus	269.225.000	Dinas PU PR
1.01.03.01.18	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase sertifikasi aset tanah dan bangunan pemko	56,82	56,82	-		250.000.000	59,55	270.000.000	61,36	297.000.000	62,27	326.700.000	63,64	335.000.000	63,64	1.478.700.000	Dinas PU PR
1.02.05	**LINGKUNGAN HIDUP**				**13.105.097.015**		**23.186.005.545**		**31.232.918.059**		**30.113.518.327**		**30.175.798.514**		**34.486.594.571**		**148.962.112.016**	**Dinas LH**
1.02.05.01.01	Pelayanan adimistrasi Perkantoran	Nilai IKM	B	B	7.557.834.360	BB	7.069.935.891	BB	7.918.328.198	A	8.868.527.582	A	9.932.750.892	AA	10.602.362.246	AA	44.391.904.809	Dinas LH
1.02.05.01.02	Peningkatan Sarana-Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan	80	80	277.790.000	80	350.155.160	80	392.173.779	80	539.234.633	80	491.942.789	80	550.975.923	80	2.324.482.284	Dinas LH
1.02.05.01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut	100	100	150.875.000	100	168.980.000	100	189.257.600	100	211.968.512	100	237.404.733	100	265.893.301	100	1.073.504.147	Dinas LH
1.02.05.01.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Nilai Evaluasi AKIP	B	BB	30.000.000	A	223.117.000	A	249.890.000	A	280.877.000	A	313.463.000	AA	351.078.000	AA	1.418.425.000	Dinas LH
1.02.05.01.00	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Evaluasi	B	BB	-	A	76.578.000	A	32.671.000	A	36.592.000	A	40.982.000	AA	45.900.000	AA	-	Dinas LH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.02.05.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan pelayanan persampahan	88	88	1.639.228.737	90	6.022.119.747	90	8.363.854.682	93	7.816.353.800	95	7.638.555.050	95	8.318.979.050	95	38.159.862.329	Dinas LH
1.02.05.01.16	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	Indeks Pencemaran Air	1,3	1,3	799.171.668	1,3	1.513.810.947	1,3	928.272.000	1,3	1.131.272.000	1,1	1.200.626.050	1,1	1.291.034.050	1,1	6.065.015.047	Dinas LH
		Indeks Pencemaran udara	99,66	99,66		99,0		99,0		98,5		98,5		98,0		98,0		
1.02.05.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup	70	70	46.577.950	70	3.880.654.400	72	6.579.235.400	74	5.614.346.400	76	5.160.037.000	78	6.530.186.000	78	27.764.459.200	Dinas LH
1.02.05.01.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup	70	70	96.549.000	70	108.929.000	72	113.460.000	74	125.000.000	76	127.000.000	78	135.000.000	78	609.389.000	Dinas LH
1.02.05.01.20	Program peningkatan pengendalian polusi	Indeks Pencemaran Air	1,3	1,3	24.637.000	1,3	518.725.400	1,3	742.775.400	1,3	945.735.400	1,1	1.150.892.000	1,1	1.362.759.000	1,1	4.720.887.200	Dinas LH
		Indeks Pencemaran udara	99,66	99,66		99,0		99,0		98,5		98,5		98,0		98,0		
1.02.05.01.24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase RTH Publik	15,45	15,45	2.482.433.300,00	15,91	3.253.000.000	16,25	5.723.000.000	16,5	4.543.611.000	16,75	3.882.145.000	17	5.032.427.000	17	22.434.183.000	Dinas LH
1.02.06	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**2.802.088.376**		**3.426.155.197**		**3.814.710.882**		**3.075.740.000**		**2.760.007.000**		**3.852.648.000**		**19.731.349.455**	**DISDUK CAPIL**
1.02.06.01.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Nilai IKM	A	A	747.585.938	A	820.311.194	A	854.233.000	A	860.703.000	AA	864.970.000	AA	872.611.000	AA	5.020.414.132	DISDUK CAPIL
1.02.06.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan	80	80	575.154.000	80	426.842.000	80	999.842.000	80	552.842.000	80	202.842.000	80	252.842.000	80	3.010.364.000	DISDUK CAPIL
1.02.06.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut	100	100	24.676.000	100	22.826.000	100	24.326.000	100	24.326.000	100	24.326.000	100	24.326.000	100	144.806.000	DISDUK CAPIL
1.02.06.01.05	5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan	Nilai Evaluasi AKIP	B	BB	35.213.500	BB	30.000.000	A	30.000.000	A	30.000.000	A	30.000.000	A	30.000.000	A	185.213.500	DISDUK CAPIL
1.02.06.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan kepemilikan Kartu keluarga	90%	100%	1.419.458.938	100%	2.126.176.003	100	1.906.309.882	100	1.607.869.000	100	1.637.869.000	100	2.672.869.000	1	11.370.551.823	DISDUK CAPIL
		Cakupan kepemilikan KTP-el	80%	83%		84%		88%		89%		90%		91%		91%	-	DISDUK CAPIL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Cakupan kepemilikan akte kelahiran usia 1-18 th	69%	85%		87%		89%		90%		91%		92%		92%		
		cakupan penerbitan akta kematian	24%	36%		37%		40%		46%		52%		62%		62%	-	DISDUK CAPIL
		Persentase penyelesaian penerbitan dokumen kependudukan tepat	80%	85%		88%		90%		93%		95%		98%		98%		
		Rata-rata lama waktu penyelesaian pengurusan dokumen kependuduk	na	1 hari		1 hari		1 hari		1 hari		1 hari		1 hari		1 hari		
		Persentase Penurunan data ganda dan anomali	na	20%		18%		16%		14%		12%		10%		10%		
1.02.08	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**				**2.823.177.025**		**3.041.319.800**		**3.649.125.380**		**3.973.187.918**		**4.365.506.711**		**4.796.607.380**		**22.648.924.215**	**DP2AP3KB**
1.02.02.01.15	Program keluarga berencana	unmeet need	na	11,85	1.683.088.525,00	11,27	1.834.699.700	11,13	2.051.547.520	11,06	2.256.702.272	10,92	2.482.372.500	10,87	2.730.609.748	10,87	13.039.020.266	DP2AP3KB
1.02.02.01.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	unmeet need	na	11,85	-	11,27	-	11,13	132.185.000	11,06	145.403.500	10,92	159.943.850	10,87	175.938.235	10,87	613.470.585	DP2AP3KB
1.02.02.01.17	Program pelayanan kontrasepsi	Cakupan peserta KB Aktif	76,36%	76,57%		76,59%	-	76,61%	95.000.000	76,64%	104.500.000	76,70%	114.950.000	77%	126.445.000	77%	440.895.000	DP2AP3KB
1.02.02.01.18	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Jumlah kelompok masyarakat peduli ber KB	**na**	0	-	0	-	0	26.000.000	1	28.600.000	2	31.460.000	1	34.606.000	4	120.666.000	DP2AP3KB
1.02.02.01.19	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat		na	65%		70%		80%	12.000.000	81%	13.000.000	82%	14.000.000	85%	15.000.000	85%	54.000.000	DP2AP3KB
1.02.02.01.20	Program Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling KRR	Persentase kelembagaan ketahanan keluarga	na	25%	-	28%	-	30%	69.000.000	35%	38.000.000	37%	40.000.000	40%	42.000.000	40%	189.000.000	DP2AP3KB
1.02.02.01.22	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persentase kelembagaan ketahanan keluarga	na	25%	373.998.500,00	28%	373.998.500	30%	305.009.100	35%	335.510.010	37%	369.061.011	40%	405.967.112	40%	2.163.544.233	DP2AP3KB
1.02.02.01.23	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Bina Keluarga	Persentase kelembagaan ketahanan keluarga	na	25%	-	28%	-	30%	42.500.000	35%	44.000.000	37%	45.500.000	40%	47.000.000	40%	179.000.000	DP2AP3KB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.02.02.01.24	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD	Persentase posyandu dengan strata mandiri	na	10%	766.090.000,00	15%	832.621.600	20%	915.883.760	25%	1.007.472.136	30%	1.108.219.350	40%	1.219.041.285	40%	5.849.328.131	DP2AP3KB
1.02.09	**PERHUBUNGAN**				**3.840.679.572**		**2.958.537.796**		**28.864.168.296**		**10.942.563.067**		**8.685.724.531**		**11.868.428.708**		**63.319.422.398**	**Dinas Perhubungan**
1.02.09.01.01	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Nilai IKM	A	A	1.428.308.114	A	963.210.147	A	1.038.240.647	AA	1.033.110.147	AA	1.009.446.147	AA	1.009.446.147	AA	5.053.453.235	Dinas Perhubungan
1.02.09.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80	80	527.489.958	80	321.058.050	80	451.658.050	80	356.658.050	80	321.658.050	80	321.658.050	80	1.772.690.250	Dinas Perhubungan
1.02.09.01.03	Program Peningkatan Disiplin aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut	100	100	148.410.000	100	130.710.000	100	130.710.000	100	130.710.000	100	130.710.000	100	130.710.000	100	653.550.000	Dinas Perhubungan
1.02.09.01.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Nilai Evaluasi AKIP	BB	BB	22.333.500	BB	19.983.599	A	19.983.599	A	19.983.599	A	19.983.599	A	19.983.599	A	99.917.995	Dinas Perhubungan
1.02.09.01.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase Ketersediaan Fasilitasi Umum	66	72,22	-	77,78	-	83,33	25.000.000.000	88,89	5.000.000.000	94,4	1.000.000.000	94,4	1.000.000.000	60	32.000.000.000	Dinas Perhubungan
1.02.09.01.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas	65	65	239.172.000	65	125.749.000	65	625.749.000	65	3.004.274.271	65	4.656.099.735	65	7.988.803.912	65	16.400.675.918	Dinas Perhubungan
1.02.09.01.17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase masyarakat yang menggunakan sarana angkutan umum	60	60	1.076.263.500	60	735.260.000	60	735.260.000	60	735.260.000	60	735.260.000	60	735.260.000	60	3.676.300.000	Dinas Perhubungan
1.02.09.01.19	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas	65	65	105.292.000	65	222.660.000	65	422.660.000	65	222.660.000	65	372.660.000	65	222.660.000	65	1.463.300.000	Dinas Perhubungan
1.02.09.01.20	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas	65	65	293.410.500	65	110.460.000	65	110.460.000	65	110.460.000	65	110.460.000	65	110.460.000	65	552.300.000	Dinas Perhubungan
1.02.09.01.21	Program Pengendalian dan Peningkatan Pelayanan Parkir	Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas	0	65	-	65	329.447.000	65	329.447.000	65	329.447.000	65	329.447.000	65	329.447.000	65	1.647.235.000	Dinas Perhubungan
1.02.10	**KOMUNIKASI DAN INFORMASI**				**5.990.038.184**		**6.324.097.816**		**8.213.072.996**		**6.928.537.060**		**6.731.075.150**		**6.872.174.299**		**35.068.957.321**	**Dinas Kominfo**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.02.10.01.01	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Nilai IKM	A	A	978.751.566	A	943.146.916	A	1.037.830.876	AA	1.037.830.876	AA	1.132.189.068	AA	1.132.189.068	AA	5.283.186.804	Dinas Kominfo
1.02.10.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80	80	366.943.850	80	680.583.200	80	238.087.900	80	238.087.900	80	252.565.320	80	252.565.320	80	1.661.889.640	Dinas Kominfo
1.02.10.01.03	Program Peningkatan Disiplin aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut	100	100	12.570.000	100	18.530.000	100	20.850.000	100	20.850.000	100	22.703.000	100	22.703.000	100	105.636.000	Dinas Kominfo
1.02.10.01.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Nilai Evaluasi AKIP	B	BB	11.484.000	BB	21.511.000	A	*21.511.000*	A	21.511.000	A	23.662.100	A	23.662.100	A	111.857.200	Dinas Kominfo
1.02.10.01.15	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	15	20	-	40	117.127.700	50	620.000.000	60	120.000.000	70	120.000.000	85	120.000.000	85	1.097.127.700	Dinas Kominfo
1.02.10.01.18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	15	20	1.468.872.000	40	1.521.626.000	50	1.872.744.220	60	1.817.208.284	70	1.847.441.182	85	1.978.696.232	85	9.037.715.917	Dinas Kominfo
1.02.10.01.19	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	15	20	3.151.416.768	40	3.021.573.000	50	4.402.049.000	60	3.248.049.000	70	3.257.514.480	85	3.267.358.579	85	17.196.544.059	Dinas Kominfo
1.02.10.01.20	Program Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	15	20	-		-	50	-	60	425.000.000	70	75.000.000	85	75.000.000	85	575.000.000	Dinas Kominfo
1.02.11	**KOPERASI DAN UKM**		**0,1**	**0,09**	**2.332.692.323**		**3.248.454.560**		**3.399.794.590**		**3.676.380.559**		**4.040.148.615**		**4.440.293.475**		**18.805.071.799**	**Dinas Koperasi dan UKM**
1.02.11.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	B	B	1.432.802.900	B	1.807.503.300	BB	2.371.995.130	BB	2.609.194.643	A	2.870.114.107	A	3.157.125.518	A	12.815.932.698	Dinas Koperasi dan UKM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.02.11.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan	80	80	354.089.923	80	840.582.000	80	426.640.200	80	315.304.220	80	346.834.642	80	381.518.106	80	2.310.879.168	Dinas Koperasi dan UKM
1.02.11.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut	100	100	25.650.000	100	38.700.000	100	38.700.000	100	38.700.000	100	38.700.000	100	38.700.000	100	193.500.000	Dinas Koperasi dan UKM
1.02.11.01.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh	BB	BB	24.700.000	BB	7.900.000	A	8.690.000	A	9.559.000	A	10.514.900	A	11.566.390	A	48.230.290	Dinas Koperasi dan UKM
1.02.11.01.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	persentase pertumbuhan UMKM	1,2%	1,2%	64.018.000,00	1,2%	18.297.860	1,40%	18.297.860	1,70%	89.845.961	1,80%	98.830.557	2%	108.713.612	2%	333.985.850	Dinas Koperasi dan UKM
1.02.11.01.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha	Persentase pertambahan tenaga manajer UMKM	1%	1%	173.860.000,00	1,2%	202.280.900	1,4%	202.280.900	1,7%	235.211.900	1,8%	258.733.090	2%	284.606.399	2%	1.183.113.189	Dinas Koperasi dan UKM
		Persentase pertambahan tenaga pembukuan UMKM	1%	1%		1,2%		1,4%		1,7%		1,8%		2%		2%		
1.02.11.01.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase peningkatan modal UMKM	2%	2%	82.770.000,00	2,5%	153.836.500	2,5%	153.836.500	3%	130.388.995	3%	143.427.895	3,5%	157.770.684	3,5%	739.260.574	Dinas Koperasi dan UKM
		Jumlah pertumbuhan volume penjualan UMKM di pasar modern	1%	1,2%		1.5%		1,7%		1,8%		2%		2,2%		2,2%		
1.02.11.01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase penurunan jumlah tunggakan	5%	5%	174.801.500,00	5%	179.354.000	5%	179.354.000	5%	248.175.840	5%	272.993.424	5%	300.292.766	25$	1.180.170.030	Dinas Koperasi dan UKM
		Persentase peningkatan koperasi aktif	47,52	47,52		47,80		48		48,20		48,25		49,00		49		
		Persentase peningkatan koperasi sehat	11,36	11,40		11,50		11,60		11,70		11,80		11,90		11,90		
1.02.12	**PENANAMAN MODAL**			**780,22**	**1.779.332.530**		**2.608.473.775**		**4.492.122.461**		**3.297.689.881**		**3.628.494.295**		**4.193.031.215**		**18.219.811.627**	**DPM PTSP**
1.02.12.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	A	A	659.377.480	A	694.694.825	A	698.932.791	AA	865.435.656	AA	1.159.073.122	AA	1.547.615.240	AA	4.965.751.634	DPM & PTSP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.02.12.01.02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan	80	80	95.193.750	80	123.053.750	80	123.053.750	80	148.895.038	80	163.784.541	80	180.162.995	80	738.950.074	DPM & PTSP
1.02.12.01.03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut	100	100	18.000.000	100	24.000.000	100	24.000.000	100	29.040.000	100	31.944.000	100	35.138.400	100	144.122.400	DPM & PTSP
1.02.12.01.04	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	4	4	-	4	85.209.000	4	102.250.800	4	122.700.960	4	147.241.152	4	176.689.382	24	634.091.294	DPMD & PTSP
1.02.12.01.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh	BB	BB	20.000.000	BB	33.600.000	A	33.600.000	A	20.000.000	A	20.000.000	A	20.000.000	A	127.200.000	DPM & PTSP
1.02.12.01.15	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	jumlah kerjasama investasi	4	8	128.258.500	8	177.000.000	8	177.000.000	8	270.962.967	8	231.730.694	9	321.232.333	9	1.177.925.994	DPM PTSP
		jumlah promosi investasi	2	2		2		5		5		5		5		5		
1.02.12.01.16	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Nilai Realisasi Investasi (Milyar)	195	195	371.702.600,00	200,06	427.227.000	200,7	427.227.000	215,86	194.713.860	230,75	214.185.246	200,75	235.603.771	1243,12	1.498.956.877	DPM PTSP
		Jumlah investor	474	474		766		936		1151		1321		1451		1451		
1.02.12.01.17	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Persentase peluang investasi yang telah divalidasi	20%	22,00%	486.800.200	25,00%	132.674.000	27,00%	145.941.400	28,00%	145.941.400	29,00%	160.535.540	29,00%	176.589.094	29,00%	761.681.434	DPM PTSP
1.02.12.01.00	Program optimalisasi pelayana publik	Nilai Survey kepuasaan masyarakat	82	81,50	-	81,80	911.015.200	82,2	2.760.116.720	82,4	1.500.000.000	82,6	1.500.000.000	82,8	1.500.000.000	82,8	8.171.131.920	DPM PTSP
		Persentase jumlah pengaduan yang ditindak	na	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase layanan PTSP yang memenuhi standar waktu layanan sesuai SOP	100	100		100		100		100		100		100		100		
1.02.13	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**15.107.303.800**		**6.414.429.750**		**9.839.429.750**		**4.436.324.030**		**6.814.099.433**		**4.472.142.976**		**31.976.425.939**	**Dinas Parpora**
2.00.02.01.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peringkat pemuda pelopor tingkat nasional		100%	77.721.650	100%	80.657.000	100%	80.657.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	146.410.000	100%	561.824.000	**Dinas Parpora**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.00.02.01.17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Peringkat pemuda pada lomba wirausaha muda tk. Propinsi dan tk.nasional		100%	41.750.250	100%	39.043.000	100%	39.043.000	100%	52.324.030	100%	57.556.433	100%	63.312.076	100%	251.278.539	**Dinas Parpora**
2.00.02.01.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah cabor yang dapat medali	27	27	4.387.482.000	30	3.180.359.750	30	6.180.359.750	33	4.000.000.000	33	6.300.000.000	35	4.000.000.000	35	23.660.719.500	**Dinas Parpora**
2.00.02.01.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik	na	75	10.600.349.900	80	2.864.370.000	83	3.164.370.000	85	125.000.000	95	198.443.000	97	132.420.900	97	6.484.603.900	**Dinas Parpora**
2.00.02.01.22	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sapras olah raga yang dibangun	na		-	3 bh	250.000.000	3 bh	250.000.000	2 bh	120.000.000	3 bh	125.000.000	2	130.000.000	10	875.000.000	**Dinas Parpora**
2.00.02.01.23	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah pemuda pelopor yang sampai ke tingkat nasional			-	25	-	30	125.000.000	35	18.000.000		-		-	45	143.000.000	**Dinas Parpora**
2.00.02.01.24	Program Pengembangan Olah Raga Rekreasi	Jumlah Penyelenggraan event olah raga rekreasi	5	5	-	5	-	6	2.000.000.000	7	2.000.000.000	8	2.000.000.000	9	2.000.000.000	40	8.000.000.000	**Dinas Parpora**
1.02.14	**STATISTIK**				**14.940.000**		**65.474.000**		**65.474.000**		**103.267.500**		**108.430.875**		**113.852.419**		**456.498.794**	**Dinas Kominfo**
1.02.10.01.15	Program pengembangan data/informasi /statistik daerah	Persentase kepuasan data pengguna statistik	-	-	14.940.000	80%	65.474.000	80%	65.474.000	80%	103.267.500	80%	108.430.875	85%	113.852.419	85%	456.498.794	Dinas Kominfo
1.02.16	**KEBUDAYAAN**				**2.214.392.000**		**1.234.156.800**		**1.234.156.800**		**1.793.074.441**		**1.800.827.046**		**2.014.069.780**		**8.076.284.867**	**Dinas Parpora**
2.00.02.01.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah lingkungan seni dan budaya yang aktif (grup)	na	20	816.523.000	20	231.940.000	20	231.940.000	20	638.783.000	20	638.783.000	20	721.847.000	20	2.463.293.000	Dinas Parpora
2.00.02.01.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah lingkungan seni dan budaya yang aktif (grup)	na	20	265.000.000	20	180.895.000	20	180.895.000	20	172.200.000	20	184.200.000	20	265.000.000	20	983.190.000	Dinas Parpora
2.00.02.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah penyelenggaraan festival budaya	8	8	1.132.869.000	8	821.321.800	9	821.321.800	11	982.091.441	12	977.844.046	15	1.027.222.780	15	4.629.801.867	Dinas Parpora
1.02.17	**PERPUSTAKAAN**				**876.655.225**		**5.982.052.895**		**5.996.013.895**		**14.257.959.395**		**1.302.321.395**		**1.349.691.395**		**28.888.038.975**	**Dinas Perpustakaan dan Arsip**
1.02.17.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	B	B	390.833.603	B	446.733.995	BB	495.694.995	BB	495.694.995	BB	499.991.995	BB	503.951.995	A	2.442.067.975	Dinas Perpustakaan dan Arsip

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.02.17.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan	80	80	155.031.200	80	5.352.814.400	80	5.317.814.400	80	13.317.814.400	80	317.814.400	80	317.814.400	80	24.624.072.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
1.02.17.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut	100	100	9.900.000	100	9.900.000	100	9.900.000	100	9.900.000	100	9.900.000	100	9.900.000	100	49.500.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
1.02.17.01.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Nilai Evaluasi AKIP	B	BB	20.000.000	BB	24.000.000	A	24.000.000	A	24.000.000	A	24.000.000	A	24.000.000	A	120.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
1.02.17.01.15	Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan	8,2	9,2	300.890.422,00	28,26	148.604.500	40,21	148.604.500	50	410.550.000	63,04	450.615.000	73,91	494.025.000	73,91	1.652.399.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
1.02.18	**KEARSIPAN**				**335.197.820**		**272.267.825**		**272.267.825**		**803.600.000**		**813.850.000**		**1.003.950.000**		**3.165.935.650**	**Dinas Perpustakaan dan Arsip**
1.02.17.01.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase OPD dan kelurahan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	5	10	64.659.980	25	117.600.000	43,75	117.600.000	62,5	117.600.000	75	117.600.000	100	117.600.000	100	588.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
1.02.17.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase peningkatan arsip statis yang diakuisisi	0	0	204.620.580	6,25	65.765.825	6,25	65.765.825	6,25	210.000.000	6,25	220.000.000	6,25	220.000.000	6,25	781.531.650	Dinas Perpustakaan dan Arsip
1.02.17.01.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Persentase peningkatan arsip statis yang diakuisisi	0	0	12.097.000	6,25	5.717.000	6,25	5.717.000	6,25	6.000.000	6,25	6.250.000	6,25	6.350.000	6,25	30.034.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
1.02.17.01.18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase OPD dan kelurahan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	500%	1000%	53.820.260	25	83.185.000	43,75	83.185.000	62,5	470.000.000	75	470.000.000	100	660.000.000	100	1.766.370.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2,00	**URUSAN PILIHAN**				**37.326.444.413**		**32.986.643.918**		**38.378.955.318**		**39.198.276.154**		**43.746.952.213**		**54.108.490.275**		**206.350.461.878**	
2.00.01	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**1.207.974.909**		**2.539.319.645**		**2.539.319.645**		**2.711.350.405**		**1.222.312.512**		**1.357.775.014**		**10.370.077.221**	Dinas Pertanian
2.00.03.01.20	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi ikan konsumsi	433,27	482,25	1.034.624.159	500	2.217.756.645	520	2.217.756.645	540	2.217.756.645	550	650.000.000	560	691.000.000	560	7.994.269.935	Dinas Pertanian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.00.03.01.21	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	Persentase kelompok tani yg menerapkan anjuran teknologi budidaya perikanan	73,33%	74,19%	139.283.250	77,42%	244.329.000	80,65%	244.329.000	83,87%	393.593.760	87,10%	472.312.512	90,32%	566.775.014	90,32%	1.921.339.286	Dinas Pertanian
2.00.03.01.22	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Jumlah fasilitasi pemasaran hasil perikanan	1 kali	1 kali	34.067.500	1 kali	77.234.000	1 kali	77.234.000	2 kali	100.000.000	2 kali	100.000.000	2 kali	100.000.000	9 kali	454.468.000	Dinas Pertanian
2.00.02	**PARIWISATA**				**6.512.037.105**		**8.135.699.610**		**8.960.694.610**		**12.910.992.450**		**15.445.965.149**		**19.746.901.770**		**62.996.653.590**	**Dinas Parpora**
2.00.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	B	B	837.641.005	BB	856.440.974	BB	856.440.974	A	1.013.197.325	A	1.097.434.451	A	1.188.044.674	A	5.011.558.397	Dinas Parpora
2.00.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan	80	80	171.327.700	80	308.022.700	80	133.017.700	80	241.727.784	80	246.562.340	80	251.493.587	80	1.180.824.112	Dinas Parpora
2.00.02.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut	100	100	32.550.000	100	17.550.000	100	17.550.000	100	18.259.020	100	18.624.200	100	18.996.684	100	90.979.905	Dinas Parpora
2.00.02.01.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh	BB	BB	18.731.000	BB	27.973.500	A	27.973.500	A	29.103.629	A	29.685.702	A	30.279.416	A	145.015.747	Dinas Parpora
2.00.02.01.15	Program pengembangan pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan wisatawan	27,74	2,5	1.298.985.340,00	2,5	1.317.868.840	2,5	1.317.868.840	2,5	4.156.245.716	2,5	5.900.025.582	2,5	9.333.163.248	15	22.025.172.226	Dinas Parpora
		Persentase promosi kepariwisata an yang dilaksanakan	40%	50%		50%		55%		65%		75%		80%		80%		
		Rata-rata lama tingggal wisatawan	1.2 hari	1.2 hari		1.25 hari		1.27 hari		1.30 hari		1.40 hari		1.50 hari		1,5 hari		
2.00.02.01.16	Program Pengembangan Destinasi	Persentase objek wisata unggulan dengan kondisi baik	32,5%	32,5%	4.084.899.560,00	35%	4.946.826.096	37%	5.946.826.096	40%	6.364.452.501	45%	7.000.897.751	50%	7.700.987.526	50%	31.959.989.970	Dinas Parpora
		Jumlah Pengembang an Destinasi Pariwisata	1 ow	1 ow		2 ow		1 ow		1 ow		1 ow		1 ow		7 ow		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.00.02.01.17	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah Kerjasama yang dilakukan dengan pelaku usaha jasa Pariwisata	3	3	67.902.500,00	3	220.297.500	4	220.297.500	5	647.286.475	6	712.015.123	7	783.216.635	7	2.583.113.233	Dinas Parpora
2.00.02.01.18	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah karya ekonomi kreatif yang	-	-	-	1	440.720.000	1	440.720.000	1	440.720.000	1	440.720.000	1	440.720.000	5		Dinas Parpora
2.00.03	**PERTANIAN**				**6.478.325.415**		**11.060.750.528**		**16.183.968.928**		**12.486.792.583**		**14.780.937.542**		**19.505.198.059**		**74.152.391.639**	**Dinas Pertanian**
2.00.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	B	B	936.371.010	B	1.018.801.650	A	1.018.801.650	A	838.109.350	A	881.311.350	A	1.444.656.350	A	5.201.680.350	Dinas Pertanian
2.00.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan	80	80	527.981.050	80	521.682.800	80	496.682.800	80	643.400.000	80	709.000.000	80	779.000.000	80	3.149.765.600	Dinas Pertanian
2.00.03.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut	100	100	74.052.000	100	74.250.000	100	74.250.000	100	89.800.000	100	98.800.000	100	108.500.000	100	445.600.000	Dinas Pertanian
2.00.03.01.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh	BB	BB	35.060.000	BB	7.988.000	A	7.988.000	A	29.800.000	A	32.800.000	A	36.000.000	A	114.576.000	Dinas Pertanian
2.00.03.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	100.32	100.38	467.857.000	100.51	339.100.000	100.61	339.100.000	100,73	611.862.750	100,8	702.849.025	101	807.693.928	101	2.800.605.703	Dinas Pertanian
2.00.03.01.17	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	Persentase fasilitasi pemasaran hasil produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan	15,00%	20.00%	134.744.000	26.00%	-	27.00%	148.218.400	28.00%	155.629.320	29.00%	164.967.079	30.00%	176.514.775	30.00%	780.073.574	
2.00.03.01.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Produktivitas Padi	5,30 ton/ha	5,50 ton/ha	1.099.094.525	5,56 ton/ha	1.911.914.349	5,60 ton/ha	1.911.914.349	5,69 ton/ha	2.097.710.452	5,75 ton/ha	2.262.265.369	6,00 ton/ha	2.563.232.552	6,00 ton/ha	10.747.037.070	Dinas Pertanian
		Produktivitas Cabe	9 ton/ha	10 ton/ha		10,50 ton/ha		10,80 ton/ha		11,00 ton/ha		11,40 ton/ha		11,70 ton/ha		12,00 ton/ha		
		Produktivitas Bawang	10 ton/ha	12 ton/ha		12,50 ton/ha		12,80 ton/ha		13,00 ton/ha		14,00 ton/ha		15,00 ton/ha		15,00 ton/ha		
		Produktivitas Kakao	1 ton/ha	1,2 ton/ha		1,25 ton/ha		1,30 ton/ha		1,33 ton/ha		1,35 ton/ha		1,40 ton/ha		1,40 ton/ha		
2.00.03.01.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi padi	37402 ton	37500 ton	1.299.433.200	37750 ton	3.613.709.479	38588 ton	3.613.709.479	40517 ton	3.328.525.271	41543 ton	5.010.350.735	43000 ton	8.383.054.912	43000 ton	23.949.349.876	Dinas Pertanian
		Produksi cabe	973,9 ton	980 ton		980 ton		985 ton		985 ton		990 ton		990 ton		990 ton		Dinas Pertanian
		Produksi bawang	-	50 ton		200		400		600		800		1000		1000		Dinas Pertanian
		Produksi Kakao	1092 ton	1095 ton		1095 ton		1095 ton		1100 ton		1170 ton		1230 ton		1230 ton		Dinas Pertanian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.00.03.01.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Persentase kelompok tani yg menerapkan anjuran teknologi budidaya pertanian	35%	40%	174.547.050,00	42%	126.675.000	45%	126.675.000	51%	202.428.000	55%	242.913.600	60%	291.496.320	60%	990.187.920	Dinas Pertanian
2.00.03.01.21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase angka kematian ternak	0,35%	0,40%	352.128.000	0,37%	305.700.000	0,36%	305.700.000	0.35%	552.000.000	0.35%	591.200.000	0.35%	672.820.000	0.35%	2.427.420.000	Dinas Pertanian
2.00.03.01.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Populasi Sapi (ekor)	5510	5620	620.569.580	5732	777.964.000	5846	5.777.964.000	5962	2.963.789.440	6081	3.025.168.384	6202	3.092.685.222	6202	15.637.571.046	Dinas Pertanian
		Jumlah Produksi Sapi Konsumsi	922 ton	939 ton		967 ton		996 ton		1036 ton		1.077 ton		1.131 ton		1.131 ton		
2.00.03.01.23	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Persentase Fasilitasi pemasaran hasil produksi peternakan	20,00%	29.00%	756.488.000,00	30.00%	2.362.965.250	31.00%	2.362.965.250	32.00%	973.738.000	34.00%	1.059.312.000	35.00%	1.149.544.000	35.00%	7.908.524.500	Dinas Pertanian
2.00.06	**PERDAGANGAN**				**11.558.353.049**		**7.318.241.355**		**7.318.241.355**		**7.597.598.210**		**8.657.358.031**		**9.568.093.834**		**40.459.532.785**	**Dinas Koperasi dan UKM**
1.02.11.01.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga	50,00%	55,00%	350.990.500,00	60,00%	636.147.250	65,00%	636.147.250	70,00%	838.738.423	75,00%	922.612.265	80,00%	1.014.873.491	80,00%	4.048.518.679	Dinas Koperasi dan UKM
		Persentase peningkatan jumlah komoditi yg diperdagangkan	2%	3%		3,5%		4%		4,5%		5%		5,5%		5,5%		
1.02.11.01.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	Jumlah Kerjasama Perdagangan	25	30	9.731.113.778,00	31	4.638.589.529	32	4.638.589.529	33	4.404.508.850	34	4.844.959.735	35	5.329.455.709	35	23.856.103.352	Dinas Koperasi dan UKM
1.02.11.01.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Persentase Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang mematuhi SOP	60%	65%	1.476.248.771,00	70%	2.043.504.576	75%	2.043.504.576	80%	2.354.350.937	85%	2.589.786.031	90%	2.848.764.634	90%	11.879.910.754	Dinas Koperasi dan UKM
1.02.11.01.20	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Volume Perdagangan Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 ton	300.000.000	4 ton	375.000.000	6 ton	675.000.000	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas TK Perindustrian
2.00.07	**PERINDUSTRIAN**				**11.569.753.935**		**3.932.632.780**		**3.376.730.780**		**3.491.542.506**		**3.640.378.979**		**3.930.521.598**		**18.371.806.643**	**Dinas Naker dan Perin**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.02.01.01.15	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Persentase industri yang menerapkan standarisasi mutu produk	1.50%	1.50%	604.996.000	1.50%	754.793.000	1.50%	650.528.000	1.50%	710.000.000	1.50%	710.000.000	1.50%	710.000.000	1.50%	3.535.321.000	Dinas Naker dan Perin
1.02.01.01.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase promosi produk yang memperoleh umpan balik	0.30%	0.30%	65.465.000	0.30%	500.000.000	0.50%	546.422.000	0.50%	546.422.000	0.50%	546.422.000	0.50%	546.422.000	2.60%	2.685.688.000	Dinas Naker dan Perin
1.02.01.01.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase industri yang menerapkan teknologi tepat guna	0.30%	0.30%	157.954.000	0.30%	1.571.069.000	0.30%	442.735.000	0.30%	628.349.726	0.50%	646.911.199	0.70%	667.328.818	0,70%	3.956.393.743	Dinas Naker dan Perin
1.02.01.01.18	Program Penataan Struktur Industri	Jumlah produk industri yang mendapat sertifikat	-	-	10.741.338.935	-	1.106.770.780	-	1.693.620.780	1 buah	1.606.770.780	1 buah	1.693.620.780	1 buah	2.006.770.780	3 buah	8.107.553.900	Dinas Naker dan Perin
1.02.01.01.19	Program Pengembangan Sentra - sentra Industri Potensial	Persentase peningkatan nilai produksi	-	-	-	1.50%	-	1.50%	43.425.000	2%	-	2.50%	43.425.000	3,0%	-	10.50%	86.850.000	Dinas Naker dan Perin
3,00	**FUNGSI PENDUKUNG URUSAN**				**42.849.334.385**		**41.693.261.661**		**49.065.710.983**		**48.209.508.625**		**40.402.214.222**		**43.719.477.627**		**264.520.598.481**	
3.00.03	**KESEKRETARIATAN DAERAH**				**21.466.942.685**		**15.031.492.531**		**22.491.001.880**		**21.476.985.047**		**13.394.799.457**		**14.493.965.348**		**106.936.277.926**	**SETDAKO**
3.00.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	B	BB	5.739.470.135	BB	4.314.479.662	A	5.645.750.000	A	5.203.950.000	A	4.031.950.000	A	5.640.750.000	A	24.836.879.662	Sekretariat Daerah
3.00.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan	80	80	5.933.040.000	80	4.033.130.000	80	3.225.100.000	80	3.135.100.000	80	3.605.100.000	80	4.350.000.000	80	18.348.430.000	Sekretariat Daerah
3.00.03.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut	100	100	207.650.000	100	142.350.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	175.000.000	100	767.350.000	Sekretariat Daerah
3.00.03.01.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	4		-	4	121.750.000	4	111.650.000	4	122.815.000	4	135.096.500	4	148.606.150	20	639.917.650	Sekretariat Daerah
3.00.03.01.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Nilai Evaluasi AKIP	B	BB	341.784.000	BB	395.520.300	A	677.364.840	A	796.337.824	A	787.431.456	A	1.024.099.558	A	3.680.753.978	Sekretariat Daerah
3.00.03.01.15	Program Pengembangan data/informasi	Persentase pertumbuhan ekonomi daerah	619%	610%	125.000.000	6,14	58.436.000	6,2	61.357.800	6,26	64.425.690	6,32	67.646.975	6,38	71.029.323	6,38	322.895.788	Sekretariat Daerah
3.00.03.01.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Presentase peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%	100%	2.551.234.900	100%	1.938.708.180	100%	2.526.885.000	100%	2.769.694.000	100%	3.022.014.000	100%	3.312.781.900	100%	13.570.083.080	Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3.00.03.01.17	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Presentase peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%	100%	28.500.000	100%	17.336.000	100%	26.036.000	100%	26.036.000	100%	26.036.000	100%	26.036.000	100%	121.480.000	Sekretariat Daerah
3.00.03.01.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelesaian masalah hukum yang diproses secara non litigasi	40%	50%	692.892.000	60%	469.708.489	70%	756.000.000	80%	811.000.000	85%	866.000.000	90%	921.000.000	90%	3.823.708.489	Sekretariat Daerah
3.00.03.01.27	Program penataan kelembagaan dan organisasi daerah	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk Sesuai Perundang-undangan	100%	100%	497.613.000	1	104.807.000	100%	169.910.700	100%	186.901.770	100%	205.591.947	100%	226.151.142	100%	893.362.559	Sekretariat Daerah
3.00.03.01.28	Program penyelenggaraan pemerintahan umum dan perangkat daerah	Jumlah Kecamatan yang menerapkan (PATEN) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	5 kecamatan	5 kecamatan	1.584.004.400	5 kecamatan	872.338.000	5 kecamatan	2.117.372.600	5 kecamatan	2.435.522.760	5 kecamatan	1.947.435.900	5 kecamatan	2.110.571.400	5 kecamatan	9.483.240.660	Sekretariat Daerah
3.00.03.01.29	Program peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama	Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga/ Badan Zakat/ Wakaf	3%	3%	1.550.822.600	3%	767.275.100	4%	2.269.043.740	4%	981.556.790	5%	2.403.378.202	5%	2.743.451.640	5%	9.164.705.472	Sekretariat Daerah
		Persentase mesjid berfungsi secara baik	N/A	25%		30%		35%		40%		45%		50%		50%		
3.00.03.01.30	Program peningkatan peran dan fungsi lembaga sosial keagamaan	Jumlah organisasi/ lembaga sosial dan keagamaan yang aktif	55,00	61,00	454.658.000	67	460.064.000	74	2.589.585.600	77	2.631.323.885	80	2.675.308.022	83	2.815.716.073	83	11.171.997.580	Sekretariat Daerah
3.00.03.01.32	Program peningkatan kapasitas kelembagaan	Persentase pertumbuhan ekonomi daerah	6,19	6,1	181.992.000	6,14	160.530.000	6,2	288.212.400	6,26	302.623.020	6,32	317.754.171	6,38	333.641.880	6,38	1.402.761.471	Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3.00.03.01.48	Program peningkatan pengendalian administrasi pembangunan	Persentase pengelola kegiatan yang ertib Administrasi sesuai aturan	88	90,5	190.682.020	92,5	93.292.000	94,5	150.000.000	95	170.000.000	96,5	150.000.000	97,5	175.000.000	97,5	738.292.000	Sekretariat Daerah
3.00.03.01.49	Program pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi	Persentase paket lelang yang melalui elektronik	100%	100%	893.606.630	1	821.480.800	1	1.090.000.000	1	1.030.000.000	1	1.030.000.000	1	1.050.000.000	1	5.021.480.800	Sekretariat Daerah
3.00.03.01.52	Program peningkatan pendidikan Usaha Kesehatan Sekolah	Jumlah Sekolah/Madrasah yang mencapai Strata yang Maksimal	100%	100%	310.164.000	1	228.920.000	1	295.718.400	1	301.632.768	1	307.665.423	1	313.818.732	1	1.447.755.323	Sekretariat Daerah
3.00.03.01.53	Program Fasilitasi dan koordinasi forum pengembangan ekonomi daerah	Persentase pertumbuhan ekonomi daerah	6,19	6,1	183.829.000	6,14	31.367.000	6,2	341.014.800	6,26	358.065.540	6,32	375.968.817	6,38	394.767.258	6,38	1.501.183.415	Sekretariat Daerah
3.00.04	**KESEKRETARIATAN DPRD**				**21.382.391.700**		**26.661.769.130**		**26.574.709.103**		**26.732.523.578**		**27.007.414.765**		**29.225.512.280**		**157.584.320.555**	**Sekretariat DPRD**
3.00.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	B	BB	5.930.966.400	BB	8.319.423.583	BB	8.202.568.251	A	8.243.571.191	A	8.389.969.689	A	8.440.273.246	A	47.526.772.360	Sekretariat DPRD
3.00.04.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan	80	80	1.394.411.800	80	1.061.923.047	80	1.168.115.352	80	1.284.926.887	80	1.413.419.576	80	1.554.761.533	80	7.877.558.194	Sekretariat DPRD
3.00.04.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut	100	100	157.960.000	100	157.740.000	100	157.740.000	100	157.740.000	100	157.740.000	100	157.740.000	100	946.660.000	Sekretariat DPRD
3.00.04.01.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Nilai Evaluasi AKIP	B	BB	904.026.000	BB	700.116.000	BB	673.664.000	A	673.664.000	A	673.664.000	A	700.116.000	A	4.325.250.000	Sekretariat DPRD
3.00.04.01.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase fasilitasi rapat rapat dan persidangan DPRD tepat waktu	70	70	12.995.027.500	70	16.422.566.500	80	16.372.621.500	90	16.372.621.500	95	16.372.621.500	100	18.372.621.500	100	96.908.080.000	Sekretariat DPRD
		Jumlah Produk Hukum DPRD yang difasilitasi	10	10		11		11		12		13		14		15		
4,00	**FUNGSI PENUNJANG URUSAN**				**21.695.830.622**		**18.428.497.294**		**18.473.964.232**		**32.685.773.242**		**24.246.035.591**		**33.370.905.516**		**128.617.091.875**	
4.00.01	**INSPEKTORAT**				**2.355.404.040**		**2.619.057.800**		**2.850.816.800**		**12.793.931.969**		**2.959.020.482**		**4.017.071.331**		**26.651.814.382**	**Inspektorat**
4.00.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	A	A	514.519.840	A	402.926.600	A	285.333.600	A	275.958.000	A	294.342.000	AA	509.863.000	AA	1.568.423.200	Inspektorat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4.00.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan	80	80	168.868.200	80	170.648.200	80	187.713.000	80	25.879.349	80	46.877.000	80	50.960.400	80	482.077.949	Inspektorat
4.00.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut	100	100	20.100.000	100	20.100.000	100	21.900.000	100	24.090.000	100	26.449.000	100	29.148.900	100	121.687.900	Inspektorat
4.00.01.01.05	Program Peningkatan Pengembanngan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi AKIP	B	BB	40.000.000	A	40.000.000	A	43.100.000	A	47.410.000	A	52.151.000	AA	57.430.000	AA	240.091.000	Inspektorat
4.00.01.01.15	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase rekomendai hasil pemriksaan internal yang ditindaklanju	80	85	502.435.000	90	502.585.000	95	617.263.000	100	617.263.000	100	617.263.000	100	717.263.000	100	3.574.072.000	Inspektorat
4.00.01.01.16	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase ASN yang memahami aturan pengelolaan keuangan	80	85	72.159.000	90	502.585.000	95	617.263.000	100	617.263.000	100	617.263.000	100	717.263.000	100	3.143.796.000	Inspektorat
		Persentase ASN yang memahami aturan pengelolaan aset	80	85		90		95		90		100		100		100		
4.00.01.01.17	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase rekomendai hasil pemriksaan Eksternal yang ditindaklanjuti	80	85	1.037.322.000	90	980.213.000	95	1.078.244.200	100	11.186.068.620	100	1.304.675.482	100	1.935.143.031	100	17.521.666.333	Inspektorat
		Persentase penurunan temuan penyimpangan keuangan	80	85		90		95		100		100		100		100		
		Persentase penurunan temuan penyimpangan aset	80	85		90		95		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Persentase penyelesaian pengaduan grtatifikasi yang ditindaklanjuti di lingkungan perangkat daerah (OPD)	80	85		90		95		100		100		100		100		
		Nilai Maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan perangkat daerah (OPD)	8	8		9		10		10		10		10		10		
		Persentase penerbitan LHP setiap tahun	80	85		90		95		100		100		100		100		
		tingkat/level kpabilitas APIP Kota Payakumbuh	8	8		9		10		10		10		10		10		
4.00.02	**PERENCANAAN**				**5.631.010.130**		**4.404.262.256**		**3.591.276.593**		**4.399.729.253**		**4.344.702.178**		**4.779.172.396**		**21.519.142.675**	**Bappeda**
4.00.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	B	B	893.590.242	A	532.453.868	A	585.699.255	A	644.269.180	A	708.696.098	AA	779.565.708	AA	3.250.684.110	Bappeda
4.00.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80	80	429.977.560	80	270.022.960	80	257.535.256	80	283.288.782	80	311.617.660	80	342.779.426	80	1.465.244.083	Bappeda
4.00.02.01.03	Program Peningkatan disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut	100	100	18.900.000	100	18.900.000	100	20.250.000	100	21.600.000	100	23.760.000	100	26.136.000	100	110.646.000	Bappeda
4.00.02.01.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	3	3	26.100.000	3	50.840.724	3	55.924.796	3	61.517.276	3	67.669.004	3	74.435.904	18	310.387.704	Bappeda
4.00.02.01.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP	BB	A	34.500.000	A	14.203.750	A	15.624.125	A	17.186.538	A	18.905.191	AA	20.795.710	AA	86.715.314	Bappeda
4.00.02.01.15	Program Pengembangan data/informasi	Persentase OPD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	100	100	286.257.020	100	358.433.880	100	394.277.268	100	433.704.995	100	477.075.494	100	524.783.044	100	2.188.274.681	Bappeda

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4.00.02.01.16	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan	90	91	122.833.000	92	109.023.000	94	119.925.300	96	131.917.830	98	145.109.613	100	159.620.574	100	665.596.317	Bappeda
4.00.02.01.18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase OPD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	100%	100%	54.187.000	100%	30.041.500	100%	33.045.650	100%	36.350.215	100%	39.985.237	100%	43.983.760	100%	183.406.362	Bappeda
4.00.02.01.19	Program Perencanaan pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan	90	91	214.103.100	92	131.446.650	94	144.591.315	96	159.050.447	98	174.955.491	100	192.451.040	100	802.494.943	Bappeda
4.00.02.01.20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	47	47	92.950.500	48	80.827.700	49	88.910.470	50	97.801.517	51	107.581.669	52	118.339.836	52	493.461.191	Bappeda
4.00.02.01.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan	90	91	2.992.699.308	92	2.500.930.324	94	1.537.641.468	96	2.141.405.615	98	1.860.546.176	100	2.046.600.794	100	10.087.124.377	Bappeda
		Persentase kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	75	75		75		80		80		85		85		85		Bappeda
4.00.02.01.22	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase OPD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	100	100	163.745.000	100	68.010.250	100	74.811.275	100	82.292.403	100	90.521.643	100	99.573.807	100	415.209.377	Bappeda
4.00.02.01.23	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Persentase OPD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	100	100	236.032.900	100	198.339.900	100	218.173.890	100	239.991.279	100	263.990.407	100	290.389.448	100	1.210.884.923	Bappeda

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4.00.02.01.24	Program penyusunan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah	Jumlah aksi pelaporan PPK	4 pelaporan	4 pelaporan	65.134.500	4 pelaporan	40.787.750	4 pelaporan	44.866.525	4 pelaporan	49.353.178	4 pelaporan	54.288.495	4 pelaporan	59.717.345	4 pelaporan	249.013.293	Bappeda
4.00.03	**KEUANGAN**				**9.964.364.602**		**9.030.476.257**		**9.449.312.260**		**12.633.673.583**		**13.782.906.651**		**20.939.353.600**		**65.835.722.351**	**BKD**
4.00.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	B	B	2.930.033.814	BB	3.855.080.028	A	4.241.969.931	A	4.520.145.364	A	4.998.859.900	AA	7.384.402.174	AA	25.000.457.397	BKD
4.00.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan	80	80	931.593.000	80	363.161.000	80	399.477.100	80	439.424.810	80	483.367.291	80	531.704.020	80	2.217.134.221	BKD
4.00.03.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut	100	100	46.290.000	100	33.750.000	100	33.750.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	202.500.000	BKD
4.00.03.01.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek			-	4	200.000.000	4	200.000.000							4	400.000.000	BKD
4.00.03.01.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh	BB	BB	10.000.000	BB	34.370.000	A	30.000.000	A	30.000.000	A	30.000.000	A	30.000.000	A	154.370.000	BKD
4.00.03.01.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan keuangan berbasis Akrual	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		BKD
		Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		BKD
		Penetapan APBD tepat waktu	20 Des	20 Des		31 Des		31 Des		31 Des		31 Des		31 Des		31 Des		BKD
		Persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja	95%	95%		95%		95%		95%		95%		95%		90%		BKD
		Persentase sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu terhadap total pendapatan	10%	10%		10%		<10%		<10%		<10%		10%		10%		BKD
		Persentase Belanja Pegawai Terhadap total belanja	50%	50%		50%		50%		50%		50%		50%		50%		BKD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Persentase Belanja Modal Terhadap total belanja	23%	23%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		BKD
		Laporan Keuangan berbasis Akrual	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		BKD
		Tersedianya standarisasi biaya	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		BKD
		Persentase Bangunan Milik Pemko yang diasuransikan	26%	26%		0,1				0,1		0,1		0,1		0,1		BKD
		Persentase Kendaraan Milik Pemko yang diasuransikan	34%	34%		0,1				0,1		0,1		0,1		0,1		BKD
		Persentase jumlah aset pemko yang dihapuskan dari total pengusulan	91%	91%		0,8				0,8		0,8		0,8		0,8		BKD
		Persentase RKBMD yang diakomodir dalam APBD	56%	56%	4.846.447.788	0,5	3.544.115.229		3.544.115.229	0,5	6.599.103.409	0,5	7.225.679.460	0,5	10.948.247.406	0,5	31.861.260.733	BKD
		Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	11%	11%		11,61%		Min 10%		Min 10%		Min 10%		11,61%		11,61%		BKD
		Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%		1,15		100%		100%		100,00%		1,15		1,15		BKD
		Persentase realisasi penerimaan retribusi daerah	100%	100%		105,00%		100%		100%		100,00%		105,00%		105,00%		BKD
		Persentase fasilitasi pembiayaan yang lancar dari total pembiayaan	70%	70%		0,7				0,7		0,7		0,7		0,7		BKD
		Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	13 buah	13 buah		13 buah		12 buah		13 buah		13 buah		13 buah		13 buah		BKD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		IKM Pelayanan Pajak Daerah	80	80		80				80		80		80		80		BKD
		IKM Fasilitasi Pembiayaan	80	80		80				80		80		80		80		BKD
		Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi pengelolaan keuangan daerah	93 Orang	93 Orang		93 Orang		93 Orang		93 Orang		93 Orang		93 Orang		372		BKD
		Jumlah Aparatur yang mengikuti bimbingan teknis akuntansi berbasis akrual	180 orang	180 orang		180 Orang		40 orang		40 orang		40 orang		180 Orang		300		BKD
		Jumlah Aparatur yang mengikuti bimbingan teknis pengelolaan barang milik daerah	200 orang	200 orang		200 org		200 org		200 org		200 org		200 org		893		BKD
		Sosialisasi PBB-P2	200 org	200 org		200 org				200 org		200 org		200 org				BKD
		Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		BKD
4.00.03.01.18	Program Peningkatan Pelayanan	Persentase fasilitasi pembiayaan yang lancar dari total pembiayaan	70	70	1.200.000.000	80	1.000.000.000	80	1.000.000.000	80	1.000.000.000	80	1.000.000.000	80	2.000.000.000	80	6.000.000.000	BKD
4.00.04	**KEPEGAWAIAN**				**3.745.051.850**		**2.227.770.981**		**2.420.935.579**		**2.680.653.137**		**2.963.842.451**		**3.420.187.976**		**13.713.390.124**	**BKPSDM**
4.00.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	B	B	549.628.850	BB	497.455.731	BB	547.201.304	A	601.921.435	A	662.113.578	A	451.502.000	A	2.760.194.048	BKPSDM
4.00.04.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80	80	236.305.750	80	195.332.250	80	181.787.975	80	219.966.773	80	259.463.450	80	285.000.000	80	1.141.550.447	BKPSDM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4.00.04.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut	100	100	17.550.000	100	18.450.000	100	23.760.000	100	23.760.000	100	23.760.000	100	23.760.000	100	113.490.000	BKPSDM
4.00.04.01.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat teknis kompetensi	38,92	38,92	1.151.938.350	42,92	846.970.000	42,92	931.667.000	42,92	1.024.833.700	42,92	1.127.317.070	42,92	1.643.696.850	42,92	5.574.484.620	BKPSDM
		Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat struktural peningatan kompetensi	73	73		73		73		73		73		73		73		BKPSDM
		Persentase ASN yang mengikuti tugas belajar dan izin belajar sesuai kebutuhan formasi	26,1	26,1		26,1		26,1		26,1		26,1		26,1		26,1		BKPSDM
4.00.04.01.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Nilai Evaluasi AKIP	CC	B	20.000.000	BB	13.188.000	BB	14.506.800	A	15.957.480	A	17.553.228	A	20.000.000	A	81.205.508	BKPSDM
4.00.04.01.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensi	80	80	1.769.628.900	80	656.375.000	80	722.012.500	80	794.213.750	80	873.635.125	80	996.229.126	80	4.042.465.501	BKPSDM
4.00.06	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**-**		**146.930.000**		**161.623.000**		**177.785.300**		**195.563.830**		**215.120.213**		**897.022.343**	**Bappeda**
4.00.02.01.29	Program pengembangan inovasi daerah	Persentase hasil penelitian yang ditindak lanjuti stakeholder (jumlah penelitian yang ditindak lanjuti dibagi jumlah seluruh penelitian	50	50	-	50	146.930.000	75	161.623.000	75	177.785.300	80	195.563.830	85	215.120.213	85	897.022.343	Bappeda
5,00	**URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**5.085.208.332**		**6.818.367.703**		**8.876.967.832**		**12.142.117.741**		**18.270.338.669**		**21.958.288.066**		**68.066.080.011**	
5.00.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**2.414.406.732**		**2.153.367.203**		**3.359.549.849**		**6.049.074.327**		**8.752.469.791**		**11.115.173.968**		**31.429.635.138**	**Kantor Kesbangpol**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.00.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	A	A	539.048.532	A	388.707.076	A	753.721.656	A	683.161.656	A	604.731.656	A	604.731.656	A	3.035.053.700	Kantor Kesbangpol
5.00.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan	80	80	114.066.000	80	74.916.000	80	84.066.000	80	84.066.000	80	84.066.000	80	84.066.000	80	411.180.000	Kantor Kesbangpol
5.00.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut	100	100	5.850.000	100	6.750.000	100	6.750.000	100	6.750.000	100	6.750.000	100	6.750.000	100	33.750.000	Kantor Kesbangpol
5.00.01.01.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Nilai Evaluasi AKIP	BB	BB	30.000.000	BB	30.000.000	A	30.000.000	A	30.000.000	A	30.000.000	A	30.000.000	A	150.000.000	Kantor Kesbangpol
5.00.01.01.17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase penanganan konflik yang terjadi di tengah masyarakat	100%	100%	1.266.097.850	100%	1.328.916.877	100%	1.856.777.633	100%	4.516.862.021	100%	7.218.687.485	100%	9.581.391.662	100%	24.502.635.678	Kantor Kesbangpol
5.00.01.01.18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase penanganan konflik yang terjadi di tengah masyarakat	100%	100%	88.845.820	100%	82.763.920	100%	157.024.230	100%	257.024.320	100%	257.024.320	100%	257.024.320	100%	1.010.861.110	Kantor Kesbangpol
5.00.01.01.21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase penanganan konflik yang terjadi di tengah masyarakat	100%	100%	370.498.530	100%	241.313.330	100%	471.210.330	100%	471.210.330	100%	551.210.330	100%	551.210.330	100%	2.286.154.650	Kantor Kesbangpol
5.00.02	**PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**				**2.670.801.600**		**4.665.000.500**		**5.517.417.983**		**6.093.043.414**		**9.517.868.878**		**10.843.114.098**		**36.636.444.873**	**BPBD**
5.00.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	B	B	522.313.650	A	673.807.400	A	794.331.000	A	794.331.000	A	794.331.000	A	794.331.000	A	3.851.131.400	BPBD
5.00.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan	80	80	1.332.620.950	80	2.387.631.600	80	2.668.574.600	80	678.115.643	80	428.115.643	80	437.656.686	80	6.600.094.172	BPBD
5.00.02.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut	100	100	44.380.000	100	71.720.000	100	86.000.000	100	62.000.000	100	85.000.000	100	68.000.000	100	372.720.000	BPBD
5.00.02.01.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Nilai Evaluasi AKIP	BB	BB	10.000.000	BB	10.000.000	A	10.000.000	A	10.000.000	A	10.000.000	A	10.000.000	A	50.000.000	BPBD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.00.02.01.22	Program Peningkatan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Presentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	15	16	761.487.000	17	1.521.841.500	17	1.958.512.383	18	4.548.596.771	18	8.200.422.235	18	9.533.126.412	18	25.762.499.301	BPBD
		Presentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	100	100	-	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	BPBD
6,00	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**17.880.095.325**		**18.346.527.794**		**25.447.386.822**		**23.945.514.764**		**32.721.623.851**		**52.868.903.226**		**147.584.064.838**	
6.00.01	**KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT**				**5.650.401.162**		**5.238.153.229**		**5.335.600.973**		**5.862.688.981**		**6.054.584.445**		**9.431.365.622**		**39.022.393.250**	
6.00.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	A	A	1.003.230.082	A	994.347.182	A	1.147.197.190	A	1.148.597.190	A	1.198.597.190	A	1.198.597.190	A	5.687.335.942	Kecamatan Payakumbuh Barat
6.00.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan	80	80	1.789.347.748	80	1.049.690.800	80	1.005.190.800	80	855.190.800	80	855.190.800	80	905.190.800	80	4.670.454.000	Kecamatan Payakumbuh Barat
6.00.01.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut	100	100	54.435.000	100	56.250.000	100	56.250.000	100	56.250.000	100	56.250.000	100	56.250.000	100	281.250.000	Kecamatan Payakumbuh Barat
6.00.01.01.04	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	3	3	34.277.000	3	10.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	18	70.000.000	Kecamatan Payakumbuh Barat
6.00.01.01.05	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan	Nilai Evaluasi AKIP	BB	BB	20.000.000	BB	20.000.000	A	20.000.000	A	20.000.000	A	20.000.000	A	20.000.000	A	100.000.000	Kecamatan Payakumbuh Barat
.6.00.01.01.15	Program Peningkatan keberdayaan masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100	100	868.326.700	100	331.905.800	100	365.096.380	100	400.700.000	100	440.770.000	100	484.847.000	100	2.023.319.180	Kecamatan Payakumbuh Barat
.6.00.01.01.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase kehadiran peserta musrenbang	100	100	234.021.200	100	145.000.000	100	145.000.000	100	145.000.000	100	145.000.000	100	145.000.000	100	725.000.000	kec Payakumbuh Barat
.6.00.01.01.28	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Perangkat	Persentase peningkatan nilai IKM	5	5	1.570.810.882	5	2.480.959.447	5	2.481.866.603	5	2.471.950.991	5	3.223.776.455	5	6.456.480.632	25	24.215.034.128	Kec Payakumbuh Barat
.6.00.01.01.29	Program Peningkatan kualitas pelayanan Kehidupan beragama	Persentase santri yang berkualitas	50	60	75.952.550	65	150.000.000	70	100.000.000	75	750.000.000	80	100.000.000	85	150.000.000	85	1.250.000.000	Kec Payakumbuh Barat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
6.00.02	**KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR**				**2.949.924.302**		**3.779.459.215**		**4.595.797.626**		**4.632.882.014**		**6.639.707.478**		**8.939.854.754**		**18.109.795.558**	
6.00.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	B	B	842.110.427	BB	938.755.672	A	985.693.456	A	985.693.456	A	985.693.456	A	1.059.620.465	A	4.955.456.504	Kecamatan Payakumbuh Tmur
6.00.02.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan	80	80	147.408.900	80	205.771.550	80	1.219.910.378	80	666.910.378	80	1.021.910.378	80	416.910.378	80	2.081.413.060	Kecamatan Payakumbuh Timur
6.00.02.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut	100	100	31.930.000	100	40.130.000	100	57.136.500	100	57.136.500	100	57.136.500	100	71.250.000	100	282.789.500	Kecamatan Payakumbuh Tmur
6.00.02.01.04	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	3			3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	15	50.000.000	Kecamatan Payakumbuh Tmur
6.00.02.01.05	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan	Nilai Evaluasi AKIP	BB	BB	19.975.000	BB	25.398.000	A	24.000.000	A	24.000.000	A	24.000.000	A	24.000.000	A	121.398.000	Kecamatan Payakumbuh Tmur
6.00.02.01.15	Program Peningkatan keberdayaan masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100	100	527.214.632	100	526.888.152	100	553.232.560	100	553.232.560	100	553.232.560	100	915.000.000	100	3.101.585.831	Kecamatan Payakumbuh Timur
6.00.02.01.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	Persentase kehadiran peserta musrenbang	100	100	117.897.500	100	128.937.000	100	135.383.850	100	135.383.850	100	135.383.850	100	145.000.000	100	680.088.550	Kec Payakumbuh Timur
6.00.02.01.28	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Perangkat	Persentase peningkatan nilai IKM	5	5	1.175.650.843	5	1.642.177.286	5	1.523.440.883	5	2.113.525.271	5	3.765.350.735	5	6.148.073.912	25	6.164.662.559	Kec Payakumbuh Timur
6.00.02.01.29	Program Peningkatan kualitas pelayanan Kehidupan beragama	Persentase santri yang berkualitas	50	60	87.737.000	65	261.401.555	70	87.000.000	75	87.000.000	80	87.000.000	80	150.000.000	85	672.401.555	Kec Payakumbuh Timur
6.00.03	**KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA**				**4.936.497.999**		**4.885.635.425**		**8.909.412.981**		**5.753.763.905**		**8.761.322.833**		**12.226.156.282**		**36.536.291.426**	
6.00.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	A	A	942.634.542	BB	951.010.098	A	951.010.098	A	973.147.362	A	951.010.098	AA	951.010.098	AA	4.777.187.754	Kecamatan Payakumbuh Utara
6.00.03.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan	80	80	1.573.583.100	80	968.962.699	80	5.148.583.100	80	1.403.962.372	80	758.583.100	80	913.962.372	80	5.194.053.643	Kecamatan Payakumbuh Utara
6.00.03.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut	100	100	29.000.000	100	29.150.000	100	52.400.000	100	29.150.000	100	52.400.000	100	29.150.000	100	192.250.000	Kecamatan Payakumbuh Utara

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
6.00.03.01.04	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	3	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	18	50.000.000	Kecamatan Payakumbuh Utara
6.00.03.01.05	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan	Nilai Evaluasi AKIP	A	A	20.000.000	A	20.000.000	A	20.000.000	A	20.000.000	A	20.000.000	AA	20.000.000	AA	100.000.000	Kecamatan Payakumbuh Utara
6.00.03.01.15	Program Peningkatan keberdayaan masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100	100	548.067.400	100	616.446.700	100	616.446.700	100	616.446.700	100	616.446.700	100	616.446.700	100	3.082.233.500	Kecamatan Payakumbuh Utara
6.00.03.01.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase kehadiran peserta musrenbang	100	100	160.088.000	100	111.669.000	100	111.669.000	100	111.669.000	100	111.669.000	100	111.669.000	100	558.345.000	Kecamatan Payakumbuh Utara
6.00.03.01.28	Program penyelenggaraan pemerintahan umum dan perangkat daerah	Persentase peningkatan nilai IKM	5	5	1.597.515.757	5	2.038.967.728	5	1.859.874.883	5	2.449.959.271	5	6.101.784.735	5	9.434.488.912	25	21.885.075.529	Kecamatan Payakumbuh Utara
6.00.03.01.29	Program Peningkatan kualitas pelayanan Kehidupan beragama	Persentase santri yang berkualitas	50	60	55.609.200	65	139.429.200	70	139.429.200	75	139.429.200	80	139.429.200	85	139.429.200	85	697.146.000	Kecamatan Payakumbuh Utara
6.00.04	**KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN**				**2.315.652.962**		**2.240.143.400**		**3.261.588.353**		**3.988.633.803**		**5.792.030.465**		**11.291.289.905**		**26.274.397.336**	
6.00.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Evaluasi AKIP	B	B	756.365.092	BB	702.184.200	A	767.111.620	A	838.531.782	A	917.039.800	A	1.003.376.190	A	4.228.243.592	Kecamatan Payakumbuh Selatan
6.00.04.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Nilai IKM	80	80	327.456.700	80	136.805.200	80	736.906.200	80	736.906.200	80	736.906.200	80	736.906.200	80	785.141.410	Kecamatan Payakumbuh Selatan
6.00.04.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan	100	100	25.545.000	100	25.545.000	100	25.545.000	100	25.545.000	100	25.545.000	100	25.545.000	100	127.725.000	Kecamatan Payakumbuh Selatan
6.00.04.01.04	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut	3					3	15.313.000	3	16.844.300	3	18.528.730	3	20.381.603	12	71.067.633	Kecamatan Payakumbuh Selatan
6.00.04.01.05	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan	Nilai Evaluasi AKIP	BB	BB	13.640.000	BB	20.000.000	A	22.000.000	A	24.200.000	A	26.620.000	A	29.282.000	A	122.102.000	Kecamatan Payakumbuh Selatan
6.00.04.01.15	Program Peningkatan keberdayaan masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100	100	336.540.700	100	400.888.300	100	434.078.880	100	476.580.750	100	524.270.000	100	576.697.000	100	2.412.514.930	kec Payakumbuh Selatan
6.00.04.01.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase kehadiran peserta musrenbang	100	100	97.950.200	100	80.670.700	100	88.737.770	100	97.700.000	100	107.470.000	100	118.217.000	100	492.795.470	kec Payakumbuh Selatan
6.00.04.01.28	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Perangkat	Persentase peningkatan nilai IKM	5	5	698.624.270	5	814.519.000	5	1.106.411.783	5	1.700.293.261	5	3.356.350.735	5	8.693.654.912	25	17.671.229.691	Kec Payakumbuh Selatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
6.00.04.01.29	Program Peningkatan kualitas pelayanan Kehidupan beragama	Persentase santri yang berkualitas	50	60	59.531.000	65	59.531.000	70	65.484.100	75	72.032.510	80	79.300.000	85	87.230.000	85	363.577.610	Kec Payakumbuh Selatan
6.00.05	**KECAMATAN LIMPOSI TIGO NAGORI**				**2.027.618.900**		**2.203.136.525**		**3.344.986.889**		**3.707.546.061**		**5.473.978.630**		**10.980.236.663**		**27.641.187.268**	
6.00.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	B	B	693.675.516	BB	598.409.500	A	828.912.800	A	880.805.690	A	924.845.975	A	971.088.273	A	4.204.062.238	Kecamatan LATINA
6.00.05.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan	80	80	328.714.529	80	364.644.200	80	907.755.000	80	961.975.000	80	495.073.750	80	508.827.438	80	3.238.275.388	Kecamatan LATINA
6.00.05.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut	100	100	21.500.000	100	21.045.000	100	22.395.000	100	23.514.750	100	24.690.448	100	25.925.012	100	117.570.210	Kecamatan LATINA
6.00.05.01.05	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan	Nilai Evaluasi AKIP	BB	BB	18.940.000	BB	20.152.000	A	30.000.000	A	31.500.000	A	33.075.000	A	34.728.750	A	149.455.750	Kecamatan LATINA
6.00.05.01.15	Program Peningkatan keberdayaan masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100	100	368.435.575	100	404.626.825	100	444.998.595	100	467.248.525	100	490.610.951	100	515.141.499	100	2.322.626.395	Kecamatan LATINA
6.00.05.01.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase kehadiran peserta musrenbang	100	100	91.351.800	100	75.374.000	100	82.911.400	100	87.056.970	100	91.409.819	100	95.080.309	100	431.832.498	Kecamatan LATINA
6.00.05.01.28	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Perangkat	Persentase peningkatan nilai IKM	5	5	449.471.530	5	553.417.000	5	966.014.094	5	1.089.977.126	5	3.346.072.687	5	8.647.430.582	25	16.534.213.989	Kecamatan LATINA
6.00.05.01.29	Program Peningkatan kualitas pelayanan Kehidupan beragama	Persentase santri yang berkualitas	50	60	55.529.950	65	165.468.000	70	62.000.000	75	165.468.000	80	68.200.000	85	182.014.800	85	643.150.800	Kecamatan LATINA
TOTAL					**450.084.700.234**		**469.088.341.833**		**544.986.857.358**		**565.562.452.833**		**621.664.205.911**		**697.565.526.470**		**3.093.157.455.402**	

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH

Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan RPJMD Tahun 2017-2022 secara terukur diperlukan penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja daerah secara makro *(outcome)*. Indikator kinerja daerah ini meliputi 3 aspek utama pembangunan daerah yaitu Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing. Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi : Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, Aspek Pelayanan Umum meliputi : Pelayanan Urusan Wajib dan Pelayanan Urusan Pilihan, sedangkan aspek daya saing meliputi : Nilai Tukar Petani, Produktivitas total daerah dan Rasio Ekspor terhadap PDRB. Penetapan indikator kinerja daerah disajikan dalam tabel 9.1 sebagai berikut.

Tabel 8.1
Tabel Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kota Payakumbuh

NO	INDIKATOR	Kondisi Tahun Dasar 2016	TAHUN					
			Target Capaian					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Misi I : Mewujudkan SDM yang handal, sehat dan kompetitif								
1	Jumlah sekolah (SD, SMP) yang berakreditasi A	64	67	70	74	77	80	82
2	Angka Usia Harapan Hidup	73,03	73,14	73,40	73,60	73,90	74,30	74,50
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	NA	61.70	61,76	61,80	61,86	61,92	62,50
4	Tingkat Kemiskinan	6,46	6,20	5,93	5,66	5,39	5,12	5,00
5	Tingkat Pengangguran	7,07	6,92	6,77	6,62	6,47	6,32	6,00
6	Jumlah Atlet berprestasi tingkat Nasional.	NA	4	7	11	15	18	20
Misi II : Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing Dan Berkeadilan Dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama								
1	Laju pertumbuhan ekonomi	6,08	6,11	6,14	6,20	6,26	6,32	6,38
2	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	23,92	23,92	23,97	24,02	24,07	24,12	24,17
3	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB	5,64	5,98	6,00	6,02	6,08	6,11	6,12
4	Kontribusi Sektor Sektor Pertanian terhadap PDRB	7,39	7,39	7,42	7,44	7,45	7,46	7,47
5	Persentase peningkatan kunjungan wisata	27,74	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

NO	INDIKATOR	Kondisi Tahun Dasar 2016	TAHUN Target Capaian					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Nilai Realisasi Investasi (Miliar Rupiah)	175,7	195,0	196,9	198,9	200,9	202,9	204,9
7	Persentase Usaha Kecil Menengah terhadap UMKM	26,64	27,14	27,64	28,15	28,66	29,18	29,70
8	Persentase Peningkatan SHU Koperasi	8,3	10,26	12,30	14,25	16,40	18,30	20,25
Misi III : Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur Dan Fasilitas Umum Yang Nyaman Dan Berkelanjutan								
1	Persentase pelayanan air minum	94,21	94,41	96,71	98,80	99,02	99,67	100,00
2	Persentase panjang jalan status Kota dalam kondisi mantap	63,81	66,56	69,31	72,06	74,81	77,56	80,3
3	Persentase sistem drainase skala kota	39,88	42,17	44,46	45,95	47,39	48,91	50,44
4	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	78,30	78,60	78,90	79,20	79,50	79,80	80,10
5	Persentase daerah irigasi berkinerja baik	70,52	73,43	76,34	79,10	81,72	84,21	86,58
6	Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan	66,66	72,22	77,78	83,33	88,89	94,44	94,44
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56,23	56,50	57,00	57,25	57,5	57,75	58,00
8	Persentase luas kawasan kumuh	1,77	1,77	1,77	1,62	1,47	1,32	1,17
Misi IV : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih								
1	Nilai Evaluasi AKIP Kota	B	BB	BB	BB	A	A	A
2	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Persentase Perangkat Daerah yang telah terintegrasi TI	0	9,68	29,03	45,16	64,52	100,00	100,00
4	IKM	78,39	79,35	79,85	80,35	80,75	81,35	81,85
5	Indeks Reformasi Birokrasi	NA	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00
Misi V : Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Dan Berbudaya Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah								
1	Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter berkategori baik	N/A	5,81	7,45	18,08	28,72	39,36	50
2	Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga/ Badan Zakat/ Wakaf	2,50	3,00	3,4	3,80,	4,2	4,6	5
3	Persentase lembaga keagamaan yang aktif	54,84	61,29	67,74	74,19	77,42	80,65	83,87
4	Persentase lembaga adat yang aktif	75,00	80,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kota Payakumbuh

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA TAHUN 2016	TAHUN Target Capaian						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
	Kesejahteraan dan Pemerataan ekonomi									
1	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**									
1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6.09	6,11	6,14	6,20	6,26	6,32	6,38	6,38
1.2	Laju Inflasi	%	4.17	4.17	4.97	4.44	3.91	3.38	2.85	2.85
1.3	PDRB Perkapita (2010=100)	(Rp/juta)	29.02	30.02	31.47	32.70	33.92	35.15	36.37	36.37
2	**Kesejahteraan Sosial**									
2.1	Angka kemiskinan	%	6,46	6,20	6,00	5,80	5,60	5,40	5,00	5,00
2.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Skor	Skor	77,56	77,90	78,25	78,60	78,94	79,29	79,63
2.3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Skor	Na	98,52	98,52	98,52	98,62	98,62	98,62	98,62
2.4	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,30	10,40	10,50	10,60	10,70	10,80	10,90	10,90
2.5	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14.22	14,31	14.40	14,49	14,58	14,67	14,77	14,77
2.6	Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	Tahun	73,03	73,14	73,40	73,60	73,90	74,30	74,50	74,50
	ASPEK PELAYANAN UMUM									
	Pelayanan Urusan Wajib									
	Terkait Pelayanan Dasar									
1	**Pendidikan**									
1.1	**Angka Partisipasi Kasar**									
1.1.1	APK PAUD	%	Na	75,00	75,50	75,70	75,90	76,10	76,30	76,30
1.1.2	APK SD/MI/Paket A	%	114,00	114,31	121,66	125,05	127,50	130,10	132,75	132,75
1.1.3	APK SMP/MTs/Paket B	%	141,00	141,05	156,98	158,10	160,08	161,15	162,10	162,10
1.2	**Angka Partisipasi Murni**									
1.2.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100,88	100,88	108,39	109,75	110,50	112,05	113,80	113,80

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA TAHUN 2016	TAHUN Target Capaian						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1.2.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	109,94	109,94	119,30	120,15	121,30	122,10	124,15	124,15
1.2.3	Rasio Siswa SD/MI Perkelas	Siswa Perkelas	27	27	28	28	28	28	28	28
1.2.4	Rasio Siswa SMP/MTS Perkelas	Siswa Perkelas	30	30	32	32	32	32	32	32
1.2.5	Persentase sekolah yang berakreditasi A	%	61,54	67,96	73,79	79,61	85,44	91,26	97,09	97,09
1.2.6	Persentase Lembaga PAUD yang terakreditasi	%	28,33	34,17	44,00	54,00	64,00	74,00	84,00	84,00
1.2.7	Angka kelulusan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2.8	Rata-rata nilai ujian sekolah SD	Nilai	7,60	7,39	7,4	7,41	7,42	7,43	7,44	7,44
1.2.9	Rata-rata Nilai ujian SMP	Nilai	5,95	5,51	5,52	5,53	5,54	5,55	5,56	5,56
2	**Kesehatan**									
2.1	Jumlah Kasus Kematian Bayi	jumlah	19	27	27	26	25	24	23	23
2.2	Jumlah Kasus Kematian Ibu melahirkan	jumlah	2	3	3	3	3	3	3	3
2.3	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,079	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3
2.4	Jumlah kasus Kematian Balita	jumlah	<13	<13	<12	<11	<10	<9	<8	<8
2.5	Persentase Kasus Diare per jumlah	%	1,72	1,72	1,70	1,68	1,65	1,60	1,50	1,50
2.6	Persentase Kasus Hipertensi (Usia > 40 tahun)	%	1,94	1,94	1,90	1,85	1,80	1,70	1,50	1,50
2.7	Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar	%	85,00	85,00	87,00	89,00	92,00	94,00	95,00	95,00
2.8	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	**Pekerjaan Umum**									
3.1	Persentase rumah yang terlayani air minum perpipaan	%	94,21	94,41	96,71	98,8	99,02	99,67	100,00	100,00
3.2	persentase irigasi	%	70,52	73,43	76,34	79,10	81,72	84,21	86,58	86,58

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA TAHUN 2016	TAHUN Target Capaian						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
	dengan kondisi baik									
3.3	Persentase Penataan sungai	%	13,24	15,44	18,56	21,69	23,52	24,81	26,37	26,37
3.4	Persentase panjang jalan status Kota dalam kondisi mantap	%	63,81	66.56	69,31	72,06	74,81	77,56	80,31	80,31
3.5	Persentase jalan kota yang memiliki drainase	%	41,28	42,17	44,46	45,95	47,39	48,91	50,44	50,44
4	**Perumahan Rakyat**									
4.1	Persentase Rumah Layak Huni	%	80,90	91,70	92,95	93,81	94,87	95,92	96,98	96,98
4,2	Persentase pengurangan Backlog	%	NA	NA	2	3	2	3	2	2
4.3	Persentase rumah bersanitasi layak	%	85,35	88,20	89,71	91,22	92,74	94,25	95,76	95,76
4.4	Luas Pengurangan kawasan kumuh	Ha	5,9	5	5	5	5	5	5	5
4.6	Persentase penyerahan PSU Perumahan oleh Pengembangan	%	-	-	-	1,95	3,92	5,88	7,84	7,84
4.7	Persentase Pengelolaan PSU Perumahan	%	-	-	-	-	0,98	2,94	4,90	4,90
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat									
5	**SATPOL PP-DAMKAR**									
5.1	Penegakkan Perda	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5.2	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	Orang	9	9	11	13	13	13	13	13
5.3	Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	Orang	42	42	42	42	42	42	42	42
5.4	Rasio pos siskamling per jumlah desa/ kelurahan	Unit	1	1	1	2	2	2	2	2
5.5	Cakupan pelayanan penanganan kebakaran	%	124,33	124,33	124,33	124,33	124,33	124,33	124,33	124,33
5.6	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	4,35	4,35	40,91	40,91	40,91	40,91	40,91	40,91

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA TAHUN 2016	TAHUN Target Capaian						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
6	**Sosial**									
6.1	Angka Kemiskinan	%	6,46	6,20	5,93	5,66	5,39	5,12	5,00	**5,00**
6.2	Persentase Rumah Tangga sasaran (RTS) yang keluar dari basis data terpadu	%	0,20	0,20	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,00
6.3	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos	%	40	44,00	48,00	50,00	60,00	65,00	70,00	70,00
6.4	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	%	99,2	99,5	99,6	99,7	99,8	99,9	100	100
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
1.	**Tenaga Kerja**									
1.1	Tingkat Pengangguran	%	7,07	7.07	6,70	6,50	6,30	6,00	5,80	5,80
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**									
2.1	Indeks Pemberdayaan gender / IDG (IKU OPD)	%	Na	61,70	61,76	61,8	61,8	61,92	62,5	62,5
2.2	Persentase Penanganan dan penyelesaian pengaduan terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak (IKU OPD)	%	Na	65,00	65,00	70,00	75,00	85,00	95,00	95,00
2.3	Persentase Keterwakilan perempuan dalam berpolitik (DPRD)	%	8,00	8,00	8,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2.4	Persentase kekerasan terhadap anak	%	Na	0,022	0,019	0,017	0,016	0,015	0,014	0,014
2.5	Persentase kekerasan terhadap perempuan	%	Na	0,14	0,12	0,11	0,10	0,07	0,06	0,06
2.6	Contrasepsi Prevalens Rate	%	63,71	70,9	71,3	72,4	73,5	74,5	76,00	76,00
3	**Pangan**									
3.1	Jumlah ketersediaan pangan per tahun									
	a. padi-padian	ton	17.084	18.073	19.067	19.921	20.542	21.013	21.471	21.471
	b. gula	ton	2.070	2.275	2.424	2.579	2.680	2.757	2.818	2.818

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA TAHUN 2016	TAHUN Target Capaian						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
	c. buah-buahan	ton	5.023	5.243	5.510	5.788	5.997	6.141	6.301	6.301
	d. sayuran	ton	4.524	4.929	5.180	5.444	5.643	5.792	5.926	5.926
	e. daging	ton	1.902	2.076	2.204	2.407	2.538	2.649	2.733	2.733
	f. telur	ton	4.712	4.886	5.180	5.444	5.667	5.816	5.957	5.957
	g. susu		7,13	8,39	9,9	11,46	11,8	13,24	16,00	16,00
	h. ikan	ton	3.064	3.362	3.637	3.839	3.978	4.094	4.200	4.200
3.2	Tingkat nilai/ skor Pola Pangan Harapan (PPH) berbasis ketersediaan	skor	86,00	87,50	89,00	90,50	92,00	93,50	95,00	95,00
3.3	Persentase keamanan pangan segar yang dikonsumsi	%	86,00	87,50	89,00	90,50	92,00	93,50	95,00	95,00
3.4	Persentase kelompok (KWT) yang memanfaatkan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan	%	61,00	64,00	67,00	70,00	73,00	76,00	80,00	80,00
3.5	Stabilisasi harga bahan pangan pokok (gabah dan beras) di tingkat produsen	Nilai	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP
3.6	Stabilisasi harga bahan pangan pokok (beras di tingkat konsumen)	nilai	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5
4	**Pertanahan**									
4.1	Persentase sertifikasi aset tanah dan bangunan pemko	%	55,46	56,82	58,18	59,55	61,36	62,27	63,64	63,64
5	**Lingkungan Hidup**									
5.1	Persentase RTH Publik	%	15.45	15.45	15,91	16,25	16,50	16,75	17,00	17,00
5.2	Indeks Pencemaran Air		1.30	1.30	1,30	1,30	1,30	1,10	1,10	1,10
5.3	Indeks Pencemaran udara	%	99.66	99.66	99,66	99,0	98,5	98,5	98,0	98,0
5.4	Persentase Usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup	%	70,00	70,00	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	78,00
5.5	Persentase cakupan pelayanan persampahan	%	88,00	88,00	88,00	90,00	90,00	93,00	95,00	95,00

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA TAHUN 2016	TAHUN Target Capaian						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
6.	**Kependudukan dan Catatan Sipil**									
6.1	Cakupan kepemilikan KTP	%	81,70	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	100	100
6.2	Cakupan kepemilikan Akte kelahiran (0 – 18 Tahun)	%	28,60	70,00	82,00	85,00	87,00	90,00	95,00	95,00
6.3	Cakupan kepemilikan KK	%	100	100	100	100	100	100	100	100
6.4	Cakupan kepemilikan akte kematian	%	24,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	50,00
6.5	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	%	68,00	76,00	77,00	79,25	81,25	83,25	86,25	86,25
7	**Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**									
7.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Angka	23,85	23,92	23,97	24,02	24,07	24,12	24,17	24,17
7.2	Persentase pertumbuhan omset	%	23,00	25,00	27,00	29,00	31,00	33,00	35,00	35,00
7.3	Persentase pertumbuhan tenaga kerja sektor UMKM	%	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	20,00
7.4	Persentase pertumbuhan Tenaga Kerja sektor UMKM	%	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	20,00
8	**Penanaman Modal**									
8,1	Jumlah investor	orang	327	496	766	936	1151	1321	1451	1451
8.2	Nilai Realisasi Investasi (IKU KOTA)	milyar	175,7	195,0	196,9	198,9	200,9	202,9	204,9	204,9
8.3	Nilai Survey kepuasaan masyarakat	Nilai	80,00	81,50	82,00	82,20	82,40	82,60	82,80	82,80
8.4	Persentase penurunan pengaduan perizinan masyarakat	%	9,00	8,00	7,00	6,00	5,00	4,00	3,00	7,00
9	**Kepemudaan dan Olahraga**									
9.1	Peringkat pemuda pelopor tingkat nasional	Peringkat	1	1	1	1	1	1	1	1
9.2	Peringkat pramuka tk. Propinsi	Regu	1	1	1	2	2	2	2	9
9.3	Peringkat pemuda	Pering	1	1	1	1	1	1	1	1

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA TAHUN 2016	TAHUN Target Capaian						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
	pada lomba wirausaha muda tk. Propinsi dan tk.nasional	kat								
9.4	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif dan mandiri	organisasi	18	20	25	30	35	40	45	45
9.5	Perolehan medali pada kejuaraan daerah	Medali	29	31	35	37	39	41	43	226
10	**Statistik**									
10.1	Jumlah dokumen statistik yang tersedia	Buah	3	3	4	4	4	4	4	4
11	**Kebudayaan**									
11.1	Jumlah lingkungan seni dan budaya yang aktif	Grup	20	20	20	20	20	20	20	20
12	**Perpustakaan**									
12.1	Jumlah pengunjung perpustakaan	orang	3.38	7.50	11.80	12.90	13.80	15.00	16.00	16.00
12.2	Persentase perpustakaan yang aktif	%	25,00	37,50	43,00	50,00	56,00	62,50	62,50	62,50
13	**Kearsipan**									
13.1	Jumlah khasanah arsip	berkas	N/A	6.00	7.00	7.50	8.00	8.50	9.00	9.00
13.2	Persentase OPD dan kelurahan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	%	3,79	11,43	28,57	50	71,43	85,71	100	100
Pelayanan Urusan Pilihan										
1	**Kelautan dan Perikanan**									
1.1	Produksi ikan konsumsi	Ton	413	433,27	500	520	540	550	560	560
2	**Pariwisata**									
2.1	Persentase Peningkatan Kunjungan wisatawan	%	0,95	1,20	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
2.2	Jumlah iven pariwisata	Kali	16	16	16	16	16	16	16	16
3	**PERTANIAN**									
3.1	Produksi padi	Ton	34.00	35.00	36.75	38.58	40.51	41.54	43.00	43.00
3.2	Produksi cabe	Ton	360,00	380,00	400,00	420,00	440,00	462,00	485,00	485,00
3.3	Produksi bawang	Ton	50,00	50,00	200,00	400,00	600,00	800,00	1.00	1.00
3.4	Produksi Kakao	Ton	940,00	970,00	1.020	1.070	1.120	1.17	1.23	1.23

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA TAHUN 2016	TAHUN Target Capaian						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
3.5	Jumlah sapi	Ekor	5.51	5.62	5.73	5.84	5.96	6.08	6.20	6.20
3.6	Jumlah produksi ikan konsumsi	Ton	410,00	433,27	500,00	520,00	540,00	550,00	560,00	560,00
3.7	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	100,28	100,38	100,51	100,61	100,73	100,80	101,00	101,00
4	**Perdagangan**									
4.1	Persentase pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah	%	1,20	1,20	1,20	1,40	1,70	1,80	2,00	2,00
4.2	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB(2010=100)	%	23,87	23,92	23,97	24,02	24,07	24,12	24,17	24,17
5	**Perindustrian**									
5.1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB(2010=100)	%	5,60	5,61	5,63	5,65	5,71	5,74	5,75	5,75
5.2	Persentase peningkatan nilai produksi	%	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	8,00
5.3	Nilai LQ Industri	Nilai	0,52	0,52	0,54	0,66	0,76	0,88	1,00	1,00
	PENDUKUNG									
1	**Kesekretariatan Daerah**									
1.1	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai	B	B	BB	BB	A	A	A	A
1.2	Peringkat LPPD	Peringkat	20	20	18	16	15	13	12	12
1.3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
1.4	Persentase jumlah paket lelang yang melalui elektronik	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.5	Keberadaan e-procurement	Ada/tidak ada	Ada	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada
1.6	Persentase penyelesaian masalah hukum yang diproses secara non litigasi	%	N/A	50,00	60,00	70,00	80,00	85,00	90,00	90,00
2	**Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**									
2.1	Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan sekwan	%	na	70,00	72,00	75,00	78,00	80,00	85,00	85,00

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA TAHUN 2016	TAHUN Target Capaian						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
	dalam memfasilitasi kegiatan									
2.2	Persentase aspirasi masyarakat yang ditanggapi DPRD	%	na	70,00	72,00	75,00	78,00	80,00	85,00	85,00
	PENUNJANG									
1	**Inspektorat**									
1.1	Persentase OPD yang akuntabilitas kinerjanya meningkat per tahun	%	16,12	64,50	70,90	77,40	83,80	90,30	96,7	96,7
1.2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	na	67,50	70,00	72,50	75,00	77,50	80,00	80,00
1.3	Persentase pelaksanaan PKPT per tahun	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.4	Persentase pengaduan masyarakat yang diproses/ diperiksa	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.5	Persentase pemeriksaan dengan tujuan tertentu (khusus) yang diproses/ diperiksa	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.6	Persentase OPD yang akuntabilitas keuangannya baik	%	55,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100	100	100
1.7	Persentase OPD yang taat terhadap hasil pembinaan pengawasan yang lebih komprehensif	%	57,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100	100	100
2	**Perencanaan**									
2.1	Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	%	30,00	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	100	100
2.2	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	%	98.78	100	100	100	100	100	100	100
2.3	Persentase Indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target	%	N/A	47,00	48,00	49,00	50,00	51,00	52,00	52,00

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA TAHUN 2016	TAHUN Target Capaian						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
3	**Keuangan**									
3.1	Opini laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.2	Penetapan Perda APBD tepat waktu	Waktu	20 Des	20 Des	31 Des	31 Des	31 Des	31 Des	31 Des	31 Des
3.3	Persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja	%	94,34	94,34	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
3.4	Persentase sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu terhadap total pendapatan	%	10,30	6,32	<10	<10	<10	<10	<10	<10
3.5	Persentase belanja pegawai terhadap total belanja	%	46,47	51,24	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3.6	Persentase belanja modal terhadap total belanja	%	21,76	21,69	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
3.7	Laporan keuangan berbasis akrual	Ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada
3.8	Tersedianya standarisasi biaya	Ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada
3.9	Persentase Bangunan Milik Pemko yang diasuransikan	%	26,16	26,16	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
3.10	Persentase Kendaraan Milik Pemko yang diasuransikan	%	34	34,72	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
3.11	Persentase jumlah aset pemko yang dihapuskan dari total pengusulan	%	91,67	91,67	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
3.12	Persentase RKBMD yang diakomodir dalam APBD	%	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
3.13	Kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah	%	12,00	11,61	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
3.14	Persentase realisasi Penerimaan Pajak Daerah	%	92,16	92,16	100	100	100	100	100	100
3.15	Persentase realisasi	%	94,00	95,00	100	100	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA TAHUN 2016	TAHUN Target Capaian						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
	Penerimaan Retribusi Daerah									
3.16	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	buah	13	13	13	13	13	13	13	13
3.17	Persentase fasilitasi pembiayaan yang lancar dari total pembiayaan	%	65,00	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
3.18	IKM Pelayanan Pajak Daerah	indeks	83,00	83,32	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
3.19	IKM Fasilitasi Pembiayaan	indeks	83,00	83,32	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
3.20	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi pengelolaan keuangan daerah	orang	93	93	93	93	93	93	93	93
3.21	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Akuntansi Berbasis Akrual	orang	180	180	180	180	180	180	180	180
3.22	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis pengelolaan barang milik daerah	orang	200	200	200	200	200	200	200	200
3.23	Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)	ada	ada	ada	Ada	ada	ada	ada	ada	Ada
4	**Kepegawaian**									
4.1	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensi	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
4.2	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat teknis kompetensi	%	29,1	38,92	42,92	42,92	42,92	42,92	42,92	42,92
4.3	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat struktural peningatan kompetensi	%	60,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00
4.4	Persentase ASN yang mengikuti tugas belajar dan izin belajar sesuai kebutuhan	%	26,10	26,10	26,10	26,10	26,10	26,10	26,10	26,10

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA TAHUN 2016	TAHUN Target Capaian						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
	formasi									
4.5	Persentase aparatur dengan nilai SKP minimal baik	%	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50
4.6	Persentase penanganan kasus kepegawaian	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4.7	Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	%	79,25	79,25	79,74	80,10	80,50	80,40	80,90	80,90
5	**Penelitian dan Pengembangan**									
5.1	Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	%	50,00	70,00	70,00	75,00	75,00	80,00	85,00	85,00
	Kesatuan Bangsa dan Politik									
1	**Kesatuan Bangsa dan Politik**									
1.2	Persentase penanganan konflik yang terjadi di tengah masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	**Penanggulangan Bencana Daerah**									
2.1	Presentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	%	16,00	16,00	17,00	17,00	18,00	18,00	18,00	18,00
2.2	Presentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Kewilayahan									
1	**Kewilayahan**									
1.1	Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA TAHUN 2016	TAHUN Target Capaian						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
	Kemampuan Ekonomi									
1	**Pertanian**									
1	Nilai Tukar Petani	%	100,28	100,38	100,51	100,61	100,73	100,80	101,00	101,00
	Fasilitas Wilayah									
1	**Perhubungan**									
1.1	Persentase masyarakat yang menggunakan sarana angkutan umum	%	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
1.2	Persentase ketersediaan terminal angkutan penumpang	%	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
1.3	Jumlah rute pelayanan angkutan umum dalam kota	Rute	23	23	23	23	23	23	23	23
1.4	Nilai survey IKM Pelayanan transportasi	angka	90,00	90,00	90,00	90,00	100	100	100	100
1.5	Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas	%	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
2	**Penataan Ruang**									
2.1	Persentase Kepatuhan Pembangunan sesuai dokumen tata ruang	%	78,30	78,60	78,90	79,20	79,50	79,80	80,10	80,10

BAB IX
PENUTUP

RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022 adalah kerangka kebijakan daerah untuk mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan selama lima tahun kedepan. Menurut skalanya, RPJMD merupakan perencanaan tingkat menengah daerah yang perlu dipahami sebagai dokumen bersama seluruh stakeholder dalam rangka melaksanakan pembangunan. Selanjutnya, dokumen RPJMD secara teknis menjadi pedoman dan dijabarkan dalam rangka perencanaan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Seluruh komponen masyarakat, pemerintah, dan swasta ikut bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara rencana jangka menengah dengan implementasi tahunannya sehingga rencana pembangunan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Payakumbuh sebagai bagian dari proses pencapaian visi daerah yakni "PAYAKUMBUH MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT, DENGAN SEMANGAT KEBERSAMAAN MENUJU PAYAKUMBUH MENANG".

WALIKOTA PAYAKUMBUH

WALI KOTA PAYAKUMBUH

RIZA FALEPI